



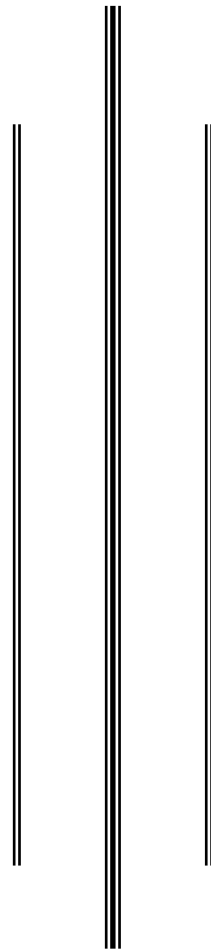
**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
2021**



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 3

Susunan dan sistematika RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2022.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
 - d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi.

- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 28 Juni 2021

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 27

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	6
1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2022	7
1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan.....	8
1.3.3 Hubungan RKPD dan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023	8
1.3.4 Hubungan RKPD, Renja PD dan KUA-PPAS	9
1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota.....	9
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	16
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	17
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	17
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	61
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	100
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	116
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	130
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	133
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD	133
2.2.2 Realisasi RPJMD	149
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	225
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	225
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	232
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	250
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	250
3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali	261
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	275
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	276
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	282
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	288
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	292
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	303
4.1.1 Visi	304
4.1.2 Misi, Tujuan, dan Sasaran	309

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan	313
4.3 Paradigma Pembangunan Bali	316
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	320
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	416
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	679
BAB VIII PENUTUP	708

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.....	2
Gambar 1.2	Kedudukan RKPD dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah.....	4
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2022.....	7
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Provinsi Bali.....	19
Gambar 2.2	Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2017.....	28
Gambar 2.3	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Menurut Periode Sensus Penduduk.....	53
Gambar 2.4	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020.....	54
Gambar 2.5	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016-2021.....	64
Gambar 2.6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2015-2020.....	67
Gambar 2.7	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	68
Gambar 2.8	Laju Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Kota Singaraja, dan Nasional Tahun 2015-2020.....	72
Gambar 2.9	PDRB Per Kapita Bali Tahun 2016-2020.....	74
Gambar 2.10	Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2016-2020.....	76
Gambar 2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2015-2020.....	82
Gambar 2.12	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2015-2020.....	85
Gambar 2.13	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	91
Gambar 2.14	Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bali Tahun 2015-2019.....	92
Gambar 2.15	Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	94
Gambar 2.16	Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2013-2017.....	95
Gambar 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali Tahun 2016-2020.....	96
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	103
Gambar 2.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	104
Gambar 2.20	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali Tahun 2015-2020.....	105
Gambar 2.21	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	106

Gambar 2.22	Jumlah Produksi Ikan dan Nilai Produksi Ikan di Provinsi Bali Tahun 2015-2019.....	111
Gambar 2.23	Rata-rata Pengeluaran Per kapita di Provinsi Bali Tahun 2015-2020.....	117
Gambar 2.24	Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2016-2021.....	121
Gambar 5.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2016-2020.....	322
Gambar 5.2	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2016-2020.....	323
Gambar 5.3	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2016-2020.....	324
Gambar 5.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2016-2020.....	325
Gambar 5.5	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2016-2020.....	326
Gambar 5.6	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020.....	332
Gambar 5.7	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020.....	333
Gambar 5.8	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020.....	335
Gambar 5.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020.....	333
Gambar 5.10	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020.....	336
Gambar 5.11	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2015-2019.....	349
Gambar 5.12	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2015-2019.....	350
Gambar 5.13	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2015-2019.....	351
Gambar 5.14	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2015-2019.....	352
Gambar 5.15	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Gianyar Tahun 2016-2020.....	353
Gambar 5.16	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2015-2019.....	363
Gambar 5.17	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2015-2019.....	364
Gambar 5.18	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2015-2019.....	365
Gambar 5.19	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2015-2019.....	366
Gambar 5.20	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Bangli Tahun 2016-2020.....	367
Gambar 5.21	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2020.....	373
Gambar 5.22	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2020.....	374

Gambar 5.23	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2020.....	375
Gambar 5.24	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2020.....	376
Gambar 5.25	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2020.....	377
Gambar 5.26	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	385
Gambar 5.27	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	386
Gambar 5.28	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	387
Gambar 5.29	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	388
Gambar 5.30	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020.....	389
Gambar 5.31	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020.....	392
Gambar 5.32	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020.....	393
Gambar 5.33	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020.....	394
Gambar 5.34	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020.....	395
Gambar 5.35	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020.....	396
Gambar 5.36	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020.....	401
Gambar 5.37	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020.....	402
Gambar 5.38	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020.....	403
Gambar 5.39	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020.....	404
Gambar 5.40	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2020.....	405
Gambar 5.41	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2015-2019.....	410
Gambar 5.42	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2015-2019.....	411
Gambar 5.43	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2015-2019.....	412
Gambar 5.44	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2015-2019.....	413
Gambar 5.45	Perkembangan Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2016-2020.....	414
Gambar 6.1	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1.....	415

Gambar 6.2	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2.....	418
Gambar 6.3	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3.....	419
Gambar 6.4	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4.....	421
Gambar 6.5	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5.....	422
Gambar 6.6	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6.....	424
Gambar 6.7	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7.....	425

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali.....	18
Tabel 2.2	Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2005-2017 (Hektare).....	27
Tabel 2.3	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali.....	31
Tabel 2.4	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali.....	33
Tabel 2.5	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali.....	43
Tabel 2.6	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali.....	45
Tabel 2.7	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk.....	53
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020.....	54
Tabel 2.9	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020.....	56
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Tahun 2020.....	57
Tabel 2.11	Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2017-2020.....	58
Tabel 2.12	Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	61
Tabel 2.13	Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, Jawa-Bali, dan Nasional Tahun 2022.....	65
Tabel 2.14	Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2018-2020.....	66
Tabel 2.15	Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini.....	75
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (periode September).....	79
Tabel 2.17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2015-2020.....	83
Tabel 2.18	Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2019.....	84
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019.....	87
Tabel 2.20	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	89
Tabel 2.21	Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2015-2019.....	90
Tabel 2.22	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020.....	93

Tabel 2.23	Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali Tahun 2021.....	99
Tabel 2.24	Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	112
Tabel 2.25	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2018-2020.....	113
Tabel 2.26	Populasi Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2020.....	114
Tabel 2.27	Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2016-2020.....	118
Tabel 2.28	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2015-2020.....	119
Tabel 2.29	Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2019.....	125
Tabel 2.30	Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2022.....	131
Tabel 2.31	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	135
Tabel 2.32	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2020 dengan RPJMD SB Tahun 2018-2023	136
Tabel 2.33	Realisasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2020.....	139
Tabel 2.34	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	150
Tabel 2.35	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Daya Saing Daerah.....	152
Tabel 2.36	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Pelayanan Umum.....	153
Tabel 3.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023.....	251
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Permendagri 13 Tahun 2006).....	281
Tabel 3.3	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dan 2022 (PP Nomor 12 Tahun 2019).....	282
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Provinsi Bali Tahun 2016-2020	286
Tabel 3.5	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dan Tahun 2022 (PP Nomor 12 Tahun 2019)	287
Tabel 3.6	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020.....	290
Tabel 3.7	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 dan Tahun 2022 (PP Nomor 12 Tahun 2019).....	291
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023.....	309
Tabel 4.2	Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali.....	313

Tabel 4.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	314
Tabel 5.1	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022....	327
Tabel 5.2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022	327
Tabel 5.3	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022.....	330
Tabel 5.4	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.....	336
Tabel 5.5	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.....	337
Tabel 5.6	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2022.....	348
Tabel 5.7	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.....	353
Tabel 5.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022	354
Tabel 5.9	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2022.....	362
Tabel 5.10	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.....	368
Tabel 5.11	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2022.....	369
Tabel 5.12	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2022.....	371
Tabel 5.13	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.....	377
Tabel 5.14	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022	378
Tabel 5.15	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2022.....	381
Tabel 5.16	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022....	389
Tabel 5.17	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022	390
Tabel 5.18	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2022.....	391
Tabel 5.19	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.....	396
Tabel 5.20	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022	397
Tabel 5.21	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2022.....	399
Tabel 5.22	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.....	405

Tabel 5.23	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022	406
Tabel 5.24	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2022.....	409
Tabel 5.25	Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.....	414
Tabel 5.26	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022	415
Tabel 5.27	Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022..	415
Tabel 6.1	Pemetaan Program RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berdasarkan Nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.....	427
Tabel 6.2	Penanganan Dampak Pandemi COVID-19.....	453
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022.....	457
Tabel 7.1	Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2022.....	679
Tabel 7.2	Target Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2022.....	680
Tabel 7.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali.....	682

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

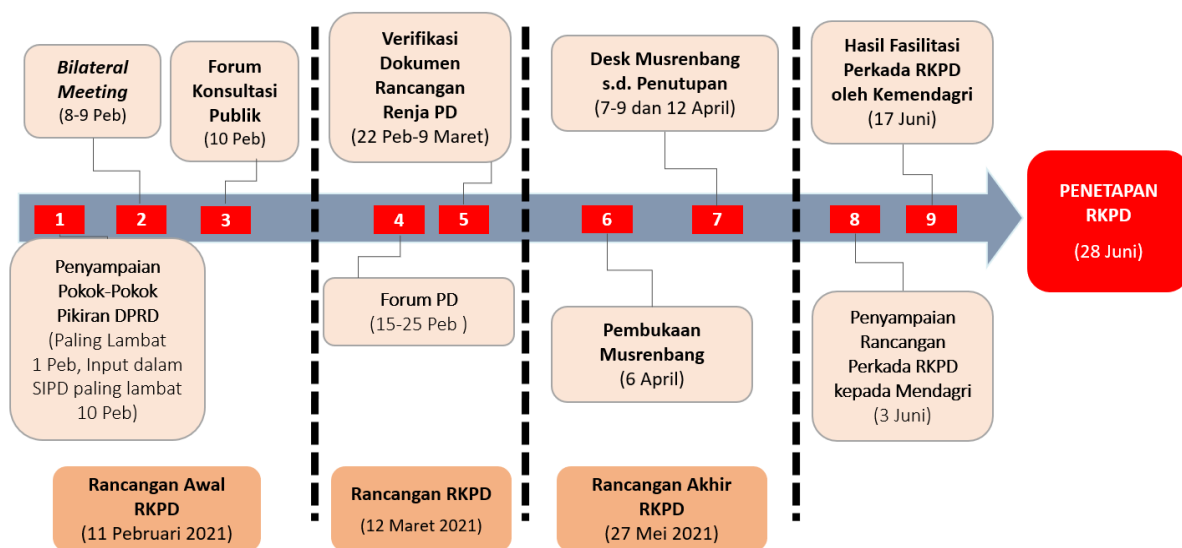
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencananan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Hal ini bermakna suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga

keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) *Bilateral Meeting*; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2022 disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

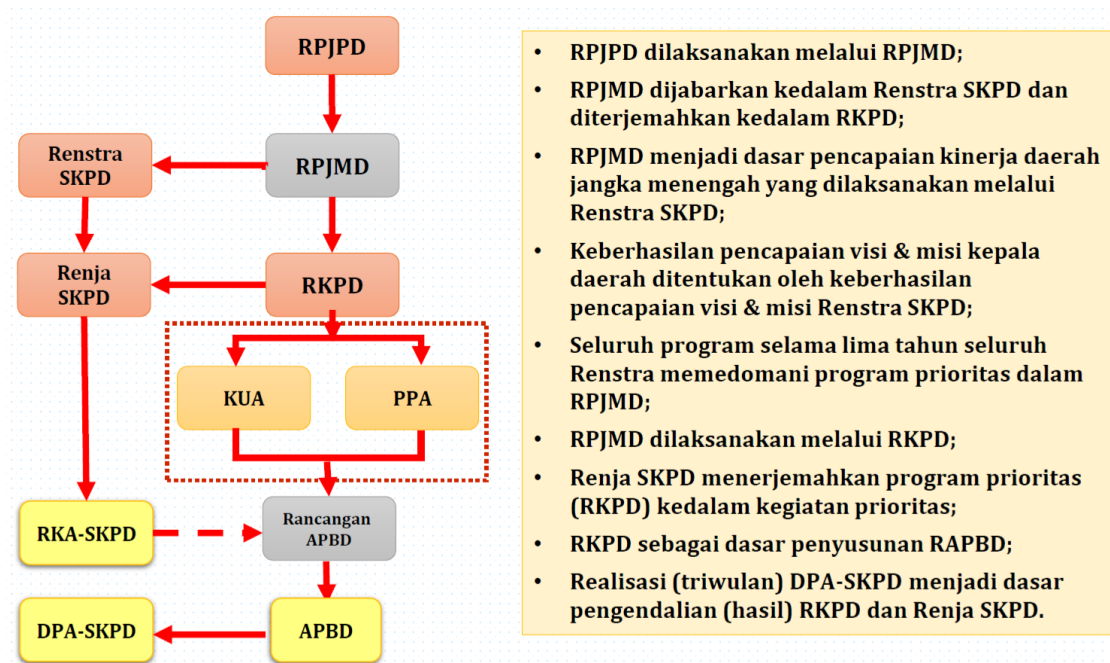
Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022

Sebagai penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, penyusunan RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik,

Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPD Semesta Berencana merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD Semesta Berencana memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD Semesta Berencana merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD Semesta Berencana merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Semesta Berencana ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD Semesta Berencana sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD Semesta Berencana tahun 2022 sebagai penjabaran tahunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2.

Kedudukan RPKPD dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

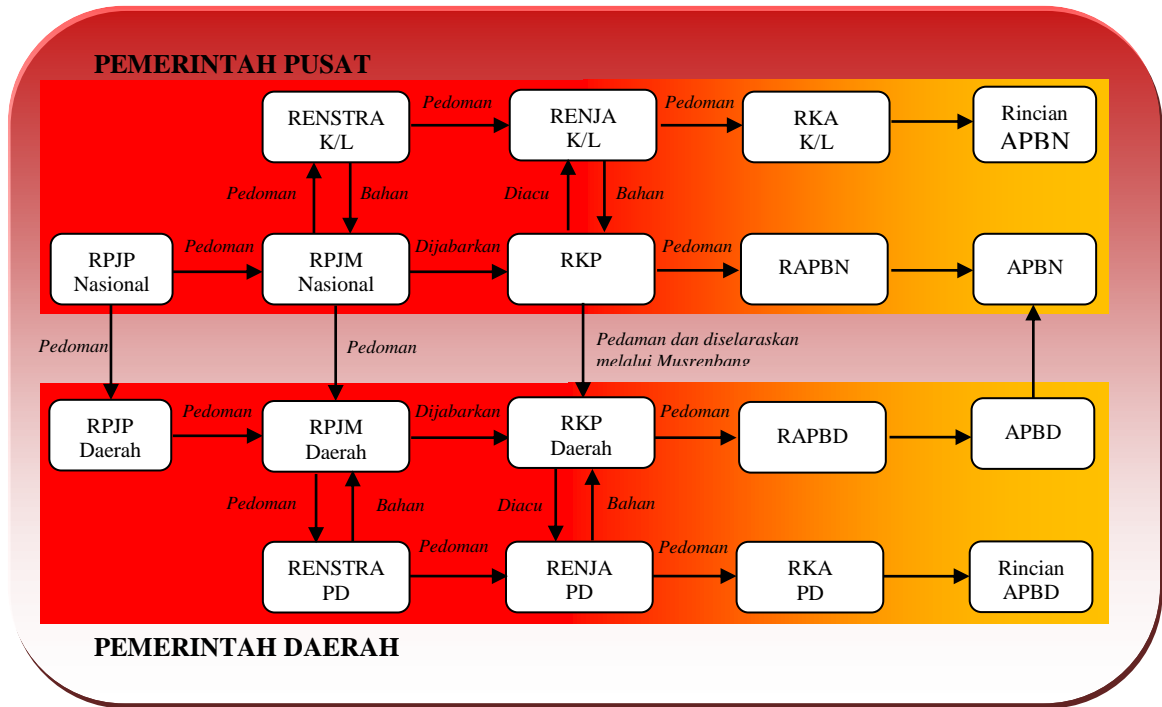
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2022.

Hubungan dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut :



Gambar 1.3.

Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKP Tahun 2022

Penyusunan RKP Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKP Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKP Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1.3.1 Hubungan RKP dan RKP Tahun 2022

Dokumen RKP Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2022 merupakan RKP tahun kedua yang merupakan penjabaran tahunan RPJM 2020-2024. Keterkaitan RKP Semesta Berencana Provinsi Bali

Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan

RPJPD Semesta Berencana Tahun 2005-2025 sebagai rencana pembangunan jangka panjang telah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam penyusunan arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan pada RKPD.

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

1.3.3 Hubungan RKPD dan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target yang tertuang

di dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 tahun berkenan (tahun 2022).

1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, agar terwujud keselerasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial.

Tujuan penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 adalah:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Bali dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2022;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin);
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkroniasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKP);
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali;
9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali, pelaku usaha swasta dan masyarakat, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan

dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan target-target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari

laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Bab ini memuat arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kedudukan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bentangan sejarah panjang Bali dari zaman ke zaman dengan sangat jelas menunjukkan bahwa para Leluhur/Tetua Bali sesungguhnya telah mewariskan suatu tatanan kehidupan ideal bagi *Krama* Bali. Tatanan kehidupan ideal itu berupa tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara tiga unsur utama, yaitu: Alam Bali, Manusia (*Krama*) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal bernapaskan agama Hindu, secara *sakala* dan *niskala*. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan *Krama* Bali, sehingga pada puncaknya menghasilkan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali yang matakusu, bermartabat, dan bernilai tinggi. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang merupakan *Genuine* Bali.

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan *matakusu*, sehingga menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, dalam lontar *Mpu Kuturan* disebutkan bahwa Bali merupakan *Padma Bhuwana*, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali.

Namun seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global, maka Bali yang semula merupakan *Padma Bhuwana* itu pun turut serta berubah. Bagaimana dinamika perubahan tersebut terjadi di Bali, berikut ini akan diuraikan gambaran umum kondisi daerah Bali lebih terperinci yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Aspek Geografi

1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota, yang terletak di bagian selatan pulau ini.

Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.636,66 Km², terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali.

Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di Indonesia.

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km² atau 0,29% dari luas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Bali terbagi kedalam delapan kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten dan kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar yaitu 1.365,88 Km² atau 24,23% dari luas Provinsi Bali, diikuti oleh Kabupaten Jembrana seluas 841,80 Km² (14,93%), Kabupaten Karangasem seluas 839,54 Km² (14,89%), dan Kabupaten Tabanan seluas 839,33 Km² (14,89%). Wilayah sisanya berturut-turut adalah Kabupaten Bangli seluas 520,81 Km², Kabupaten Badung seluas 418,52 Km², Kabupaten Gianyar seluas 368,00 Km², Kabupaten Klungkung seluas 315,00 Km², dan Kota Denpasar seluas 127,78 Km².

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat/. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

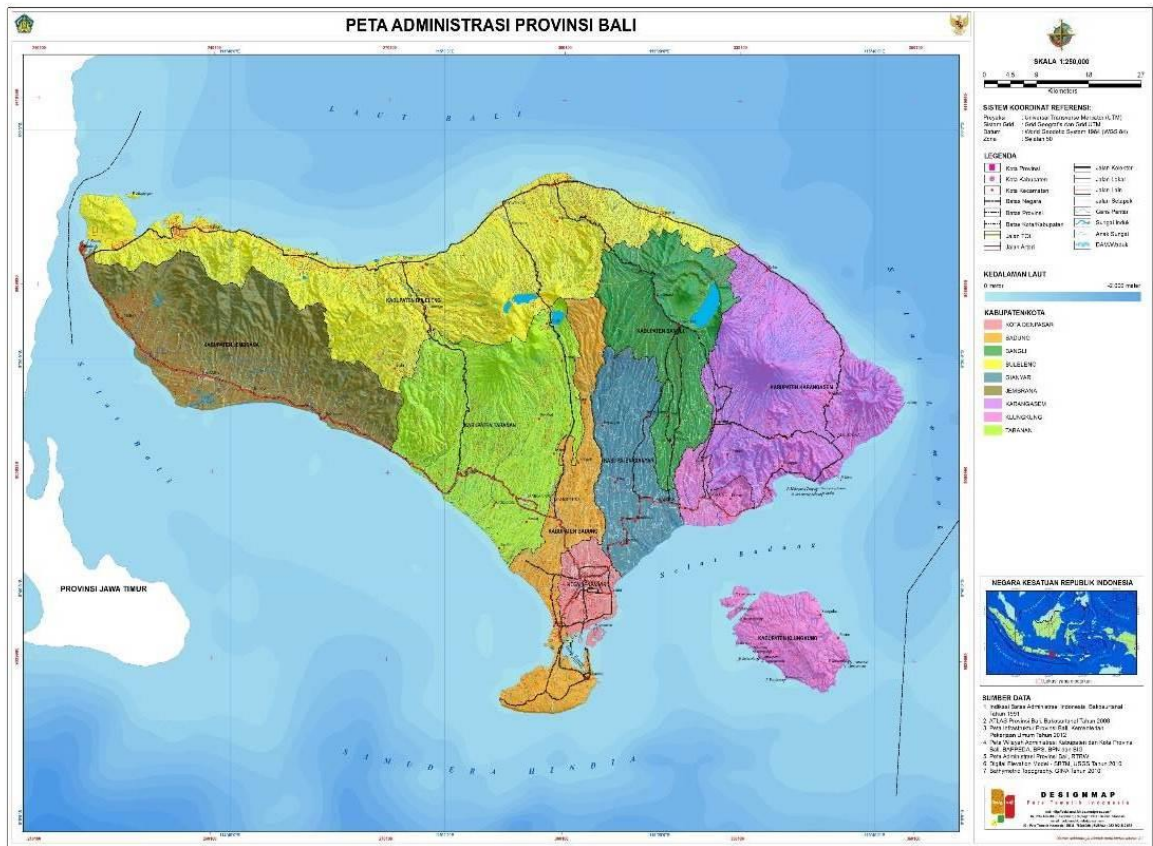
Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km²)	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Desa Adat
1	Buleleng	1.365,88	9	148	170
2	Jembrana	841,80	5	51	64
3	Tabanan	839,33	10	133	348
4	Badung	418,52	6	62	122
5	Denpasar	127,78	4	43	35
6	Gianyar	368,00	7	70	272
7	Bangli	520,81	4	72	168
8	Klungkung	315,00	4	59	119
9	Karangasem	839,54	8	78	190
BALI		5.636,66	57	716	1.493

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2021



Gambar 2.1.

Wilayah Administrasi Provinsi Bali

Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut *Desa Dinas*, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan Desa Adat. Di bawahnya ada *banjar adat* atau *banjar suka-duka*.

Keberadaan Desa Adat di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan

tersebut, *Krama* atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*).

Masing-masing Desa Adat memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (*Pura Desa*, *Pura Puseh*, dan *Pura Dalem*) dan ada pula Desa Adat yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/ disebut *Desa Mawacara*.

Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 4.552 *Pura*, *Pura Dang Kahyangan* sebanyak 289 *Pura*, dan *Pura Sat Kahyangan* sebanyak 10 *Pura* yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu *Pura*.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (*Krama Bali*), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan *Krama Bali* yang berkebudayaan tinggi dan religius.

2. Topografi

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

Wilayah Provinsi Bali, 85% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.140 m).

Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut:

- a) Lahan dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 ha;
- b) Lahan dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan berombak sampai bergelombang dengan luas 60.620,34 ha;
- c) Lahan dengan ketinggian 100-500 meter seluas 211.923,85 ha didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit;
- d) Lahan dengan ketinggian 500-1.000 meter seluas 145.188,61 ha; dan
- e) Lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 ha.

3. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk, 1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api. Sementara batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir. Dengan komposisi litologi/batuan wilayah, sebagai berikut.

- a) Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai, danau dan pantai di

leher sepenanjung Prapat Agung, wilayah pesisir dekat pantai di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan Mendoyo), Kabupaten Badung (Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar Selatan dan Pulau Serangan asli).

- b) Formasi Prapat Agung (Tpasp), terdiri dari batugamping terkars-kan, batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepenanjung Prapat Agung Kabupaten Buleleng.
- c) Formasi Palasari (QTsp), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping terumbu. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten Jembrana, menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng.
- d) Formasi Selatan (Tmps), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.

4. Hidrologi

a) Sungai

Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat – timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Sungai-sungai di Provinsi Bali dikelompokkan dalam Wilayah Sungai Bali Penida, terdiri dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS).

DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 137 DAS, Zona Timur 67 DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS dan Zona Barat 31 DAS. Dari 391 DAS yang ada 76 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas Kabupaten/Kota. Provinsi Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (125 DAS) disusul Kabupaten Karangasem (73 DAS) dan Kabupaten Klungkung (70 DAS).

b) Danau/Waduk/Embung/Embungan

Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Semua danau-danau tersebut tidak termasuk di dalam wilayah pesisir. Potensi air danau di Bali adalah 1.007,85 juta m³. Danau terbesar di Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 80,90% dari total potensi air danau.

Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem. Seluruh bendungan/waduk/embung tersebut terdapat di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 13,53 juta m³.

c) Mata Air

Berdasarkan data dari berbagai sumber pada Balai Wilayah Bali Penida, didapatkan data jumlah mata air di Provinsi Bali Tahun 2015 adalah sebanyak 1.934 mata air dengan debit kurang lebih sebanyak 32.271,82 lt/dtk.

d) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut:

- 1) Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri).
- 2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka

tanah, debit sumur umumnya 5 - 10 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).

- 3) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan Mendoryo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Geokgak, Seririt, dan Banjar).
- 4) Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima).
- 5) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya >5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja).
- 6) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya <5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng (Tejakula, Buleleng, dan Seririt).

- 7) Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan Buleleng.
- 8) Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan.
- 9) Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.
- 10) Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan dan Sumberkima).
- 11) Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem.

5. Klimatologi

a) Tipe Iklim

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan

iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

b) Suhu dan Curah Hujan

Menurut catatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar, sepanjang tahun 2020, suhu/temperature udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali terjadi di Kota Denpasar, yaitu mencapai 28,2°C dengan rata-rata kelembaban udara 78%. Sebaliknya, suhu udara rata-rata terendah terjadi di Kabupaten Karangasem yang mencapai 26,3°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 80%.

Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali, tercatat Kabupaten Bangli memiliki curah hujan tertinggi yang mencapai 3.070 mm selama tahun 2020. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Badung yang mencapai 1.390,5 mm.

Intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2020 terjadi di bulan Desember seperti yang tercatat di semua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.

6. Penggunaan Lahan

Secara umum, penggunaan lahan dibedakan atas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian. Potensi penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tanah, sumber daya mineral, vegetasi, topografi, iklim, dan lokasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan bukan pertanian di wilayah Provinsi Bali mengalami peningkatan.

Lahan pertanian terdiri atas lahan sawah dan lahan bukan sawah. Dalam kurun waktu dari tahun 2013–2017 telah tercatat konversi lahan sawah seluas 2.581 ha, yang beralih

dari lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah atau menjadi lahan bukan pertanian. Secara terperinci tercatat bahwa luas lahan sawah pada tahun 2013 sebesar 81.165 ha, tahun 2014 sebesar 80.542 ha, tahun 2015 80.063 ha, tahun 2016 sebesar 79.526 ha dan terus mengalami penurunan menjadi 78.626 ha pada tahun 2017.

Namun selama tahun 2013-2017, luas lahan bukan sawah di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan, di mana lahan bukan sawah pada tahun 2013 seluas 274.402 ha dan pada tahun 2017 tercatat seluas 328.908 ha. Secara komulatif telah tercatat penambahan lahan bukan sawah sebanyak 55.790 ha.

Lahan bukan pertanian terdiri dari lahan yang digunakan untuk rumah, bangunan dan halaman sekitarnya, hutan negara, rawa-rawa (tidak ditanami) dan lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus). Luas lahan yang digunakan bukan untuk pertanian di Provinsi Bali Tahun 2017 tercatat 156.132 ha atau 27,70% dari total luas lahan Provinsi Bali.

Tabel 2.2.

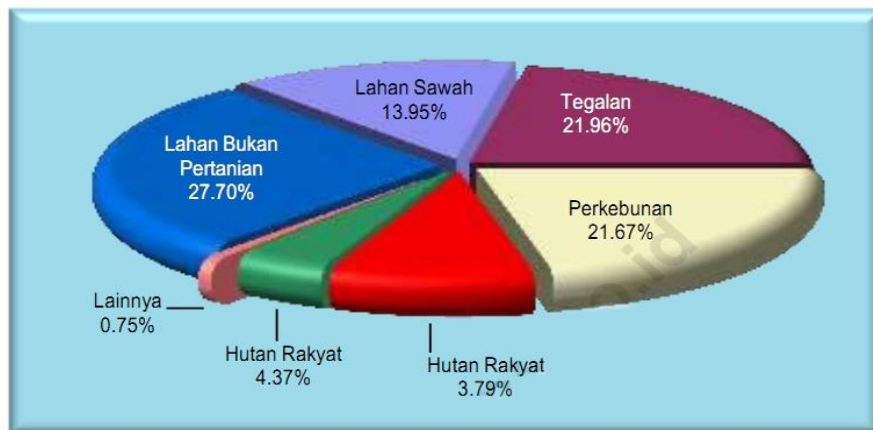
Perkembangan Penggunaan Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2005-2017 (Hektare)

No	Tahun	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian
		Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	
1	2013	81.165	274.402	208.099
2	2014	80.542	273.864	209.260
3	2015	80.063	273.739	209.864
4	2016	79.526	273.965	210.175
5	2017	78.626	328.908	156.132

Sumber: BPS Provinsi Bali

Penggunaan lahan bukan sawah di Bali selama tahun 2017 paling banyak diperuntukkan bagi tegal/kebun sebesar 123.774 hektare atau 37,63%. Penggunaan lahan bukan sawah paling banyak terdapat di Kabupaten Buleleng, dimana pada tahun 2017 sebesar 115.365 hektare, disusul Kabupaten Karangasem dengan 53.043 hektare. Khusus

penggunaan lahan sawah, Kabupaten Tabanan masih menempati posisi pertama di tahun 2017 dengan luas lahan sawah mencapai 21.089 hektare. Namun luas areal lahan sawah ini berkurang 1,69 persen dari tahun sebelumnya seluas 21.452 hektare.



Sumber: BPS Provinsi Bali

Gambar 2.2.

Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Provinsi Bali Tahun 2017

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Selanjutnya mempertimbangkan dari aspek penggunaan lahan maka dalam pengembangan wilayah dipertimbangkan aspek perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang.

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan daerah, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah.

Potensi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan yang dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan di masing-masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan, seperti PKN, PKW, dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa kreatif, produktif, dan mandiri berkelanjutan sehingga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan dan keterpaduan kegiatan ekonomi antar sektor, antar kabupaten/kota dan antar kota dengan desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang seirama dengan pembangunan Kawasan perkotaan.

8. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti *epidemic* dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali berpotensi mengalami bencana alam dan bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa dan tsunami, abrasi pantai, gelombang pasang, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut. Oleh karena itu, mitigasi bencana pesisir mutlak mendapatkan perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

a) Daerah Rawan Banjir

Seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali termasuk memiliki daerah rawan banjir ditinjau dari aspek curah hujan, kemiringan lereng, kerapatan sungai, jenis tanah dan penggunaan lahan serta ketinggian tempat dari permukaan laut.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, terdapat 81 desa/kelurahan di Provinsi Bali yang termasuk kedalam daerah rawan banjir. Desa/Kelurahan ini tersebar di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terbanyak yang memiliki desa/kelurahan dengan status daerah rawan banjir. Terdapat 40 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng yang rawan banjir.

Untuk lebih jelasnya, daerah rawan banjir di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir
di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
1	Desa Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
2	Desa Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
3	Desa Kedonganan	Kecamatan Kuta	Badung
4	Desa Tuban	Kecamatan Kuta	Badung
5	Desa Kuta	Kecamatan Kuta	Badung
6	Desa Legian	Kecamatan Kuta	Badung
7	Desa Seminyak	Kecamatan Kuta	Badung
8	Desa Kerobokan Kelod	Kecamatan Kuta Utara	Badung
9	Desa Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara	Badung
10	Desa Dalung	Kecamatan Kuta Utara	Badung
11	Desa Kapal	Kecamatan Mengwi	Badung
12	Desa Penarungan	Kecamatan Mengwi	Badung
13	Desa Darmasaba	Kecamatan Abiansemal	Badung
14	Desa Abiansemal	Kecamatan Abiansemal	Badung
15	Desa Carangsari	Kecamatan Petang	Badung
16	Desa Takmung	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
17	Kelurahan Semarapura Kauh	Kecamatan Klungkung	Klungkung
18	Kelurahan Semarapura Tengah	Kecamatan Klungkung	Klungkung
19	Kelurahan Semarapura Kangin	Kecamatan Klungkung	Klungkung
20	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Kecamatan Klungkung	Klungkung
21	Desa Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
22	Desa Kampung Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
23	Desa Pejarakan	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
24	Desa Celukan Bawang	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
25	Desa Sangalagit	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
26	Desa Musi	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
27	Desa Penyabangan	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
28	Desa Banyupoh	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
29	Desa Pengastulan	Kecamatan Seririt	Buleleng
30	Desa Tangguwisia	Kecamatan Seririt	Buleleng
31	Desa Kalianget	Kecamatan Seririt	Buleleng
32	Desa Sulanyah	Kecamatan Seririt	Buleleng
33	Desa Umaanyar	Kecamatan Seririt	Buleleng
34	Kelurahan Seririt	Kecamatan Seririt	Buleleng
35	Desa Banjarasem	Kecamatan Seririt	Buleleng
36	Desa Kalisade	Kecamatan Seririt	Buleleng
37	Desa Petemon	Kecamatan Seririt	Buleleng
38	Desa Kaliasem	Kecamatan Banjar	Buleleng
39	Desa Temukus	Kecamatan Banjar	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA
40	Desa Dencarik	Kecamatan Banjar	Buleleng
41	Desa Banjar	Kecamatan Banjar	Buleleng
42	Kelurahan Penarukan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
43	Kelurahan Banyuning	Kecamatan Buleleng	Buleleng
44	Kelurahan Kampung Baru	Kecamatan Buleleng	Buleleng
45	Kelurahan Kampung Kajanan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
46	Kelurahan Kampung Anyar	Kecamatan Buleleng	Buleleng
47	Kelurahan Kaliuntu	Kecamatan Buleleng	Buleleng
48	Banjar Bali	Kecamatan Buleleng	Buleleng
49	Kelurahan Kampung Bugis	Kecamatan Buleleng	Buleleng
50	Desa Baktiserage	Kecamatan Buleleng	Buleleng
51	Desa Pamaron	Kecamatan Buleleng	Buleleng
52	Desa Kalibubuk	Kecamatan Buleleng	Buleleng
53	Desa Anturan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
54	Desa Bungkulan	Kecamatan Sawan	Buleleng
55	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
56	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
57	Desa Kubutambahan	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
58	Desa Bukti	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
59	Desa Pacung	Kecamatan Tejakula	Buleleng
60	Desa Bondalem	Kecamatan Tejakula	Buleleng
61	Desa Tejakula	Kecamatan Tejakula	Buleleng
62	Desa Tembok	Kecamatan Tejakula	Buleleng
63	Desa Padasambian Kaje		Denpasar
64	Kelurahan Padasambian		Denpasar
65	Kelurahan Padasmbian Klod		Denpasar
66	Desa Tegal Kertha		Denpasar
67	Desa Tegal Harum		Denpasar
68	Desa Pemecutan		Denpasar
69	Desa Pemecutan Klod		Denpasar
70	Desa Dauh Puri		Denpasar
71	Desa Dauh Puri Kauh		Denpasar
72	Desa Dauh Puri Klod		Denpasar
73	Desa Sesetan		Denpasar
74	Desa Panjer		Denpasar
75	Desa Pemogan		Denpasar
76	Desa Pedungan		Denpasar
77	Desa Sanur		Denpasar
78	Desa Kesiman Kerthalangu		Denpasar
79	Desa Melaya	Kecamatan Melaya	Jembrana
80	Kelurahan Baler Bale Agung	Kecamatan Negara	Jembrana
81	Desa Batuagung	Kecamatan Jembrana	Jembrana

Sumber: BPBD Provinsi Bali

b) Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor

Pulau Bali dibentuk oleh vulkanik dan mempunyai topografi bergelombang, berbukit dan bergunung, termasuk memiliki kerentanan tinggi terhadap potensi longsor.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, tercatat sebanyak 322 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang masuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Terdapat 122 desa di Kabupaten Tabanan yang rawan longsor. Untuk lebih jelasnya, data mengenai desa/kelurahan yang masuk kedalam klasifikasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Buahon	Kintamani	Bangli
2	Desa Belandingan	Kintamani	Bangli
3	Desa Batur Utara	Kintamani	Bangli
4	Desa Batur Tengah	Kintamani	Bangli
5	Desa Batur Selatan	Kintamani	Bangli
6	Desa Kutuh	Kintamani	Bangli
7	Desa Abang Batudinding	Kintamani	Bangli
8	Desa Pengejaran	Kintamani	Bangli
9	Desa Subaya	Kintamani	Bangli
10	Desa Siakin	Kintamani	Bangli
11	Desa Trunyan	Kintamani	Bangli
12	Desa Bunutin	Kintamani	Bangli
13	Desa Binyan	Kintamani	Bangli
14	Desa Dausa	Kintamani	Bangli
15	Desa Kintamani	Kintamani	Bangli
16	Desa Kedisan	Kintamani	Bangli
17	Desa Serai	Kintamani	Bangli

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
18	Desa Satra	Kintamani	Bangli
19	Desa Songan A	Kintamani	Bangli
20	Desa Songan B	Kintamani	Bangli
21	Desa Pinggan	Kintamani	Bangli
22	Desa Suter	Kintamani	Bangli
23	Desa Tegallalang	Tegallalang	Gianyar
24	Desa Taro	Tegallalang	Gianyar
25	Desa Pupuan	Tegallalang	Gianyar
26	Desa Kedisan	Tegallalang	Gianyar
27	Desa Kenderan	Tegallalang	Gianyar
28	Desa Sebatu	Tegallalang	Gianyar
29	Desa Keliki	Tegallalang	Gianyar
30	Desa Tampaksiring	Tampaksiring	Gianyar
31	Desa Manukaya	Tampaksiring	Gianyar
32	Desa Sanding	Tampaksiring	Gianyar
33	Desa Pejeng	Tampaksiring	Gianyar
34	Desa Pejeng Kaja	Tampaksiring	Gianyar
35	Desa Pejeng Kelod	Tampaksiring	Gianyar
36	Desa Pejeng Kawan	Tampaksiring	Gianyar
37	Desa Puhu	Payangan	Gianyar
38	Desa Bukian	Payangan	Gianyar
39	Desa Bresela	Payangan	Gianyar
40	Desa Kelusa	Payangan	Gianyar
41	Desa Melinggih Kelod	Payangan	Gianyar
42	Desa Melinggih	Payangan	Gianyar
43	Desa Buahan	Payangan	Gianyar
44	Desa Buahan Kaja	Payangan	Gianyar
45	Desa Kerta	Payangan	Gianyar
46	Desa Gobleg	Banjar	Buleleng
47	Desa Pancasari	Banjar	Buleleng
48	Desa Gitgit	Banjar	Buleleng
49	Desa Antap	Selemadeg	Tabanan
50	Desa Bajera	Selemadeg	Tabanan
51	Desa Bajera Utara	Selemadeg	Tabanan
52	Desa Berembeng	Selemadeg	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
53	Desa Serampingan	Selemadeg	Tabanan
54	Desa Selemadeg	Selemadeg	Tabanan
55	Desa Pupuan Sawah	Selemadeg	Tabanan
56	Desa Wanagiri	Selemadeg	Tabanan
57	Desa Wanagiri Kauh	Selemadeg	Tabanan
58	Desa Manikyang	Selemadeg	Tabanan
59	Desa Tegai Mengkeb	Selemadeg Timur	Tabanan
60	Desa Tangguntiti	Selemadeg Timur	Tabanan
61	Desa Mambang	Selemadeg Timur	Tabanan
62	Desa Bantas	Selemadeg Timur	Tabanan
63	Desa Megati	Selemadeg Timur	Tabanan
64	Desa Gadungan	Selemadeg Timur	Tabanan
65	Desa Gunung Salak	Selemadeg Timur	Tabanan
66	Desa Dalang	Selemadeg Timur	Tabanan
67	Desa Gadung sari	Selemadeg Timur	Tabanan
68	Desa Lalanglinggah	Selemadeg Barat	Tabanan
69	Desa Antosari	Selemadeg Barat	Tabanan
70	Desa Tiyng Gading	Selemadeg Barat	Tabanan
71	Desa Lumbung	Selemadeg Barat	Tabanan
72	Desa Lumbung Kauh	Selemadeg Barat	Tabanan
73	Desa Mundeh	Selemadeg Barat	Tabanan
74	Desa Mundeh Kangin	Selemadeg Barat	Tabanan
75	Desa Angkah	Selemadeg Barat	Tabanan
76	Desa Mundeh Kauh	Selemadeg Barat	Tabanan
77	Desa Selabih	Selemadeg Barat	Tabanan
78	Desa Bengkel Sari	Selemadeg Barat	Tabanan
79	Desa Tibibiu	Kerambitan	Tabanan
80	Desa Kelanting	Kerambitan	Tabanan
81	Desa Penarukan	Kerambitan	Tabanan
82	Desa Belumbang	Kerambitan	Tabanan
83	Desa Tista	Kerambitan	Tabanan
84	Desa Kerambitan	Kerambitan	Tabanan
85	Desa Pangkung Karung	Kerambitan	Tabanan
86	Desa Kukuh	Kerambitan	Tabanan
87	Desa Baturiti	Kerambitan	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
88	Desa Meliling	Kerambitan	Tabanan
89	Desa Sembung Gede	Kerambitan	Tabanan
90	Desa Samsam	Kerambitan	Tabanan
91	Desa Batuaji	Kerambitan	Tabanan
92	Desa Kesiut	Kerambitan	Tabanan
93	Desa Timpag	Kerambitan	Tabanan
94	Desa Sudimara	Tabanan	Tabanan
95	Desa Bongan	Tabanan	Tabanan
96	Desa Gubug	Tabanan	Tabanan
97	Desa Dauh Peken	Tabanan	Tabanan
98	Desa Delod Peken	Tabanan	Tabanan
99	Desa Dajan Peken	Tabanan	Tabanan
100	Desa Subamia	Tabanan	Tabanan
101	Desa Denbantas	Tabanan	Tabanan
102	Desa Tunjuk	Tabanan	Tabanan
103	Desa Wanasari	Tabanan	Tabanan
104	Desa Beraban	Kediri	Tabanan
105	Desa Buwit	Kediri	Tabanan
106	Desa Kaba-kaba	Kediri	Tabanan
107	Desa Pandak Gede	Kediri	Tabanan
108	Desa Pejaten	Kediri	Tabanan
109	Desa Nyambu	Kediri	Tabanan
110	Desa Kediri	Kediri	Tabanan
111	Desa Abiantuwung	Kediri	Tabanan
112	Desa Banjar Ayar	Kediri	Tabanan
113	Desa Tegal Jadi	Marga	Tabanan
114	Desa Kukuh	Marga	Tabanan
115	Desa Beringkit	Marga	Tabanan
116	Desa Peken Blayu	Marga	Tabanan
117	Desa Batan Nyuh	Marga	Tabanan
118	Desa Kuwum	Marga	Tabanan
119	Desa Caublayu	Marga	Tabanan
120	Desa Selanbawak	Marga	Tabanan
121	Desa Marga	Marga	Tabanan
122	Desa Petiga	Marga	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
123	Desa Tua	Marga	Tabanan
124	Desa Payangan	Marga	Tabanan
125	Desa Dauh Puri	Marga	Tabanan
126	Desa Dajan Puri	Marga	Tabanan
127	Desa Geluntung	Marga	Tabanan
128	Desa Baru	Marga	Tabanan
129	Desa Perean	Baturiti	Tabanan
130	Desa Perean Tengah	Baturiti	Tabanan
131	Desa Perea Kangin	Baturiti	Tabanan
132	Desa Luwus	Baturiti	Tabanan
133	Desa Apuan	Baturiti	Tabanan
134	Desa Angseri	Baturiti	Tabanan
135	Desa Bangli	Baturiti	Tabanan
136	Desa Baturiti	Baturiti	Tabanan
137	Desa Batunya	Baturiti	Tabanan
138	Desa Antapan	Baturiti	Tabanan
139	Desa Candikuning	Baturiti	Tabanan
140	Desa Rejasa	Penebel	Tabanan
141	Desa Jegu	Penebel	Tabanan
142	Desa Riang Gede	Penebel	Tabanan
143	Desa Buruan	Penebel	Tabanan
144	Desa Tajen	Penebel	Tabanan
145	Desa Pitra	Penebel	Tabanan
146	Desa Penatahan	Penebel	Tabanan
147	Desa Teng kudak	Penebel	Tabanan
148	Desa Mengeste	Penebel	Tabanan
149	Desa Penebel	Penebel	Tabanan
150	Desa Biaung	Penebel	Tabanan
151	Desa Bebahan	Penebel	Tabanan
152	Desa Seganan	Penebel	Tabanan
153	Desa Jatiluwih	Penebel	Tabanan
154	Desa Wangaya Gede	Penebel	Tabanan
155	Desa Pesagi	Penebel	Tabanan
156	Desa Tegallingah	Penebel	Tabanan
157	Desa Sangketan	Penebel	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
158	Desa Belatungan	Pupuan	Tabanan
159	Desa Kebon Padangan	Pupuan	Tabanan
160	Desa Belimbing	Pupuan	Tabanan
161	Desa Sanda	Pupuan	Tabanan
162	Desa Batungsel	Pupuan	Tabanan
163	Desa Pujungan	Pupuan	Tabanan
164	Desa Pajahan	Pupuan	Tabanan
165	Desa Munduk Temu	Pupuan	Tabanan
166	Desa Bantiran	Pupuan	Tabanan
167	Desa Padangan	Pupuan	Tabanan
168	Desa Jelijih Punggang	Pupuan	Tabanan
169	Desa Karya Sari	Pupuan	Tabanan
170	Desa Sai	Pupuan	Tabanan
171	Desa Bugbug	Karangasem	Karangasem
172	Desa Bukit	Karangasem	Karangasem
173	Desa Pertama	Karangasem	Karangasem
174	Desa Seraya Barat	Karangasem	Karangasem
175	Desa Tegallinggah	Karangasem	Karangasem
176	Desa Tumbu	Karangasem	Karangasem
177	Desa Gegelang	Manggis	Karangasem
178	Desa Nyuh Tebel	Manggis	Karangasem
179	Desa Selumbung	Manggis	Karangasem
180	Desa Tenganan	Manggis	Karangasem
181	Desa Ulakan	Manggis	Karangasem
182	Desa Datah	Abang	Karangasem
183	Desa Pidpid	Abang	Karangasem
184	Desa Purwakerti	Abang	Karangasem
185	Desa Tista	Abang	Karangasem
186	Desa Tiyingtali	Abang	Karangasem
187	Desa Ababi	Abang	Karangasem
188	Desa Bunutan	Abang	Karangasem
189	Desa Bebandem	Bebandem	Karangasem
190	Desa Bhuana Giri	Bebandem	Karangasem
191	Desa Budakeling	Bebandem	Karangasem
192	Bungaya Kangin	Bebandem	Karangasem

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
193	Desa Jungutan	Bebandem	Karangasem
194	Desa Macang	Bebandem	Karangasem
195	Desa Sibetan	Bebandem	Karangasem
196	Desa Besakih	Rendang	Karangasem
197	Desa Menanga	Rendang	Karangasem
198	Desa Nongan	Rendang	Karangasem
199	Desa Pempatan	Rendang	Karangasem
200	Desa Rendang	Rendang	Karangasem
201	Desa Amertha Bhuana	Selat	Karangasem
202	Desa Duda	Selat	Karangasem
203	Desa Duda Timur	Selat	Karangasem
204	Duda Utara	Selat	Karangasem
205	Desa Muncan	Selat	Karangasem
206	Desa Peringsari	Selat	Karangasem
207	Desa Sebudi	Selat	Karangasem
208	Desa Selat	Selat	Karangasem
209	Desa Kertha Bhana	Sidemen	Karangasem
210	Desa Lokasari	Sidemen	Karangasem
211	Desa Sangkangunung	Sidemen	Karangasem
212	Desa Sidemen	Sidemen	Karangasem
213	Desa Sindu Wati	Sidemen	Karangasem
214	Desa Talibeng	Sidemen	Karangasem
215	Desa Tangkup	Sidemen	Karangasem
216	Desa Telaga Tawang	Sidemen	Karangasem
217	Desa Tri Ekabuana	Sidemen	Karangasem
218	Desa Wismakerta	Sidemen	Karangasem
219	Desa Tianyar Barat	Kubu	Karangasem
220	Desa Tianyar Tengah	Kubu	Karangasem
221	Desa Tulamben	Kubu	Karangasem
222	Desa Ban	Kubu	Karangasem
223	Desa Melaya	Melaya	Jembrana
224	Kelurahan Baler Bale Agung	Negara	Jembrana
225	Desa Batu Agung	Jembrana	Jembrana
226	Kelurahan Dauh Waru	Jembrana	Jembrana
227	Desa Penyaringan	Mendoyo	Jembrana

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
228	Desa Yeh Sumbul	Mendoyo	Jembrana
229	Desa Yehembang	Mendoyo	Jembrana
230	Desa Asah Duren	Pekutatan	Jembrana
231	Desa Manggis Sari	Pekutatan	Jembrana
232	Desa Gumbrih	Pekutatan	Jembrana
233	Desa Selisihan	Klungkung	Klungkung
234	Desa Selat	Klungkung	Klungkung
235	Desa Akah	Klungkung	Klungkung
236	Desa Tangkas	Klungkung	Klungkung
237	Kelurahan Semarapura Kangin	Klungkung	Klungkung
238	Kelurahan Semarapura Kelod Kangin	Klungkung	Klungkung
239	Desa Toh Pati	Banjarangkan	Klungkung
240	Desa Bungbungan	Banjarangkan	Klungkung
241	Desa Nyalian	Banjarangkan	Klungkung
242	Desa Tusan	Banjarangkan	Klungkung
243	Desa Getakan	Banjarangkan	Klungkung
244	Desa Aan	Banjarangkan	Klungkung
245	Desa Timuhun	Banjarangkan	Klungkung
246	Desa Nyanglan	Banjarangkan	Klungkung
247	Desa Takmung	Banjarangkan	Klungkung
248	Desa Paksewali	Dawan	Klungkung
249	Desa Gunaksa	Dawan	Klungkung
250	Desa Besan	Dawan	Klungkung
251	Desa Pikat	Dawan	Klungkung
252	Desa Dawan Kelod	Dawan	Klungkung
253	Desa Dawan Kaler	Dawan	Klungkung
254	Desa Kutampi	Nusa Penida	Klungkung
255	Desa Batu Kandik	Nusa Penida	Klungkung
256	Desa Bungamekar	Nusa Penida	Klungkung
257	Desa Suana	Nusa Penida	Klungkung
258	Desa Pejukutan	Nusa Penida	Klungkung
259	Desa Carangsari		Badung
260	Desa Getasan		Badung
261	Desa Pangsan		Badung
262	Desa Petang		Badung
263	Desa Sulangai		Badung
264	Desa Pelaga		Badung
265	Desa Belok		Badung
266	Desa Ayunan		Badung
267	Desa Bongkasa		Badung
268	Desa Sangeh		Badung

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
269	Desa Bongkasa Pertiwi		Badung
270	Desa Kuwum		Badung
271	Desa Pecatu		Badung
272	Desa Ungasan		Badung
273	Desa Kutuh		Badung
274	Desa Jimbaran		Badung
275	Desa Sumberkirana	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
276	Desa Pemuteran	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
277	Desa Musi	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
278	Desa Gerokgak	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
279	Desa Pengulon	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
280	Desa Tinga-tinga	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
281	Desa Tukad Sumaga	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
282	Desa Pangkung Paruk	Kecamatan Seririt	Buleleng
283	Desa Unggahan	Kecamatan Seririt	Buleleng
284	Desa Rangdu	Kecamatan Seririt	Buleleng
285	Desa Gunung Sari	Kecamatan Seririt	Buleleng
286	Desa Titab	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
287	Desa Telaga	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
288	Desa Subuk	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
289	Desa Kedis	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
290	Desa Uma Jero	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
291	Desa Bengkel	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
292	Desa Puncak Sari	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
293	Desa Tinggar Sari	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
294	Desa Sepang	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
295	Desa Sepang Kelod	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
296	Desa Tista	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
297	Desa Tigawase	Kecamatan Banjar	Buleleng
298	Desa Cempage	Kecamatan Banjar	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
299	Desa Pedawa	Kecamatan Banjar	Buleleng
300	Desa Sidatape	Kecamatan Banjar	Buleleng
301	Desa Gobleg	Kecamatan Banjar	Buleleng
302	Desa Banyuseri	Kecamatan Banjar	Buleleng
303	Desa Munduk	Kecamatan Banjar	Buleleng
304	Desa Gesing	Kecamatan Banjar	Buleleng
305	Desa Silangjana	Kecamatan Sukasada	Buleleng
306	Desa Pegayaman	Kecamatan Sukasada	Buleleng
307	Desa Ambengan	Kecamatan Sukasada	Buleleng
308	Desa Gitgit	Kecamatan Sukasada	Buleleng
309	Desa Wanagiri	Kecamatan Sukasada	Buleleng
310	Desa Lemukih Desa Galungan	Kecamatan Sawan	Buleleng
311	Desa Sekumpul	Kecamatan Sawan	Buleleng
312	Desa Sudaji	Kecamatan Sawan	Buleleng
313	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
314	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
315	Desa Depaha	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
316	Desa Tunjung	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
317	Desa Tajun	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
318	Desa Bontiing	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
319	Desa Tamblang	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
320	Desa Sembiran	Kecamatan Tejakula	Buleleng
321	Desa Madenan	Kecamatan Tejakula	Buleleng
322	Desa Julah	Kecamatan Tejakula	Buleleng

Sumber: BPBD Provinsi Bali

c) Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi

Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Bali (3.142 meter) merupakan gunung berapi yang aktif. Direktorat Jenderal Vulkanologi telah menggolongkan radius bahaya letusan G. Agung kedalam tiga zona bahaya yaitu:

- 1) Zona Terlarang: area yang paling tinggi tingkat resiko terkena awan panas, aliran lava dan lontaran batu pijar, diharuskan terbebas dari hunian.
- 2) Zona Bahaya Primer: area yang dapat terkena lontaran batu pijar, hujan abu dan pasir serta aliran lahar.
- 3) Zona Bahaya Sekunder: area sepanjang lembah sungai yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi lahar serta banjir yang menyertainya

Sedangkan rawan bencana letusan Gunung Berapi Batur berada dalam Kaldera Batur.

Berikut adalah data desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi.

Tabel 2.5.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Songan A	Kintamani	Bangli
2	Desa Songan B	Kintamani	Bangli
3	Desa Belandingan	Kintamani	Bangli
4	Desa Sukawana	Kintamani	Bangli
5	Desa Pinggan	Kintamani	Bangli
6	Desa Batur Selatan	Kintamani	Bangli
7	Desa Kedisan	Kintamani	Bangli
8	Desa Buahon	Kintamani	Bangli
9	Desa Abang Batudinding	Kintamani	Bangli
10	Desa Terunyan	Kintamani	Bangli
11	Desa Abang Songan	Kintamani	Bangli
12	Desa Padang Kerta	Karangasem	Karangasem
13	Desa Karangasem	Karangasem	Karangasem
14	Desa Subagan	Karangasem	Karangasem
15	Desa Pidpid	Abang	Karangasem
16	Desa Bebandem	Abang	Karangasem
17	Desa Bhuana Giri	Abang	Karangasem
18	Desa Budakeling	Abang	Karangasem
19	Desa Bungaya Kangin	Abang	Karangasem

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
20	Desa Jungutan	Abang	Karangasem
21	Desa Macang	Abang	Karangasem
22	Desa Sibetan	Abang	Karangasem
23	Desa Besakih	Rendang	Karangasem
24	Desa Menanga	Rendang	Karangasem
25	Desa Nongan	Rendang	Karangasem
26	Desa Pesaban	Rendang	Karangasem
27	Desa Rendang	Rendang	Karangasem
28	Desa Amertabuana	Selat	Karangasem
29	Desa Duda	Selat	Karangasem
30	Desa Duda Utara	Selat	Karangasem
31	Desa Muncan	Selat	Karangasem
32	Desa Peringsari	Selat	Karangasem
33	Desa Sebudi	Selat	Karangasem
34	Desa Selat	Selat	Karangasem
35	Desa Kerta Bhuana	Sidemen	Karangasem
36	Desa Lokasari	Sidemen	Karangasem
37	Desa Sangkan Gunung	Sidemen	Karangasem
38	Desa Sinduwati	Sidemen	Karangasem
39	Desa Talibeg	Sidemen	Karangasem
40	Desa Tangkup	Sidemen	Karangasem
41	Desa Telaga Tawang	Sidemen	Karangasem
42	Desa Wismakerta	Sidemen	Karangasem
43	Desa Baturinggit	Kubu	Karangasem
44	Desa Sukadana	Kubu	Karangasem
45	Desa Tianyar Barat	Kubu	Karangasem
46	Desa Tulamben	Kubu	Karangasem
47	Desa Tianyar	Kubu	Karangasem

Sumber: BPBD Provinsi Bali

d) Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Berdasarkan hasil kajian BMG Bali (Daryono dkk, 2006 dalam Bappeda Provinsi Bali, 2006) yang mendasarkan pada seismik gempa merusak dan

sejarah gempa maka di Bali dibagi menjadi 3 zone daerah rawan gempa. Daerah sangat rawan gempa (zone 1) meliputi wilayah Bali timur (Kabupaten Karangasem dan Klungkung; daerah rawan gempa (zone 2) mencakup seluruh wilayah Bangli, Buleleng, Jembrana dan Tabanan. Sedangkan zone 3 daerah agak rawan gempa meliputi Denpasar, Badung dan Gianyar.

e) Daerah Rawan Bencana Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang tsu artinya pelabuhan dan nami berarti gelombang. Tsunami berarti pasang laut besar di pelabuhan. Secara singkat tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti terjadinya gempa bumi, erupsi vulkanik, atau oleh land-slide (longsoran). Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh gaya impulsif ini bersifat transien yaitu gelombangnya bersifat sesar. Luasan rawan tsunami merupakan hasil tumpang susun antara peta permukiman dengan ketinggian tempat.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, terdapat 141 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami. Adapun daftar desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
2	Desa Jimbaran	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
3	Desa Ungasan	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
4	Desa Kutuh	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
5	Desa Pecatu	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
6	Desa Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
7	Desa Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara	Badung
8	Desa Canggu	Kecamatan Kuta Utara	Badung
9	Desa Tibubeneng	Kecamatan Kuta Utara	Badung
10	Desa Kedonganan	Kecamatan Kuta	Badung

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
11	Kelurahan Kuta	Kecamatan Kuta	Badung
12	Desa Tuban	Kecamatan Kuta	Badung
13	Desa Seminyak	Kecamatan Kuta	Badung
14	Desa Legian	Kecamatan Kuta	Badung
15	Desa Pererenan	Kecamatan Mengwi	Badung
16	Desa Cemagi	Kecamatan Mengwi	Badung
17	Desa Munggu	Kecamatan Mengwi	Badung
18	Desa Sanur Kauh	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
19	Desa Sanur Kaja	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
20	Kelurahan Sanur	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
21	Kelurahan Pedungan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
22	Desa Sidakrya	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
23	Kelurahan Serangan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
24	Kelurahan Sesetan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
25	Desa Pemogan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
26	Desa Kesiman	Kecamatan Denpasar Timur	Denpasar
27	Desa Kertalangu	Kecamatan Denpasar Timur	Denpasar
28	Desa Candi Kusuma	Kecamatan Melaya	Jembrana
29	Desa Melaya Banjar Melaya Pantai	Kecamatan Melaya	Jembrana
30	Desa Cupel	Kecamatan Negara	Jembrana
31	Desa Banyu Biru Banjar Pebuahan	Kecamatan Negara	Jembrana
32	Desa Pengambengan	Kecamatan Negara	Jembrana
33	Kelurahan Lelateng Banjar Awen	Kecamatan Negara	Jembrana
34	Desa Baluk	Kecamatan Negara	Jembrana
35	Desa Perancak	Kecamatan Jembrana	Jembrana
36	Desa Air Kuning	Kecamatan Jembrana	Jembrana
37	Desa Yeh Kuning	Kecamatan Jembrana	Jembrana
38	Desa Delod Berawah	Kecamatan Mendoyo	Jembrana
39	Desa Medewi	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
40	Desa Puluhan	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
41	Desa Pengeragoan	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
42	Desa Negari	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
43	Desa Takmung	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
44	Desa Jumpai	Kecamatan Klungkung	Klungkung
45	Desa Gelgel	Kecamatan Klungkung	Klungkung
46	Desa Tojan	Kecamatan Klungkung	Klungkung
47	Desa Tangkas	Kecamatan Klungkung	Klungkung
48	Desa Satra	Kecamatan Klungkung	Klungkung
49	Desa Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
50	Desa Posinggahan	Kecamatan Dawan	Klungkung
51	Desa Lembongan	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
52	Desa Jungutbatu	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
53	Desa Toya Pakeh	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
54	Desa Pedungan	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
55	Desa Kutampi Kaler	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
56	Desa Batununggul	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
57	Desa Suana	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
58	Desa Tulikup	Kecamatan Gianyar	Gianyar
59	Desa Lebih	Kecamatan Gianyar	Gianyar
60	Desa Keramas	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
61	Desa Medahan	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
62	Desa Pering	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
63	Desa Saba	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
64	Desa Sukawati	Kecamatan Sukawati	Gianyar
65	Desa Guwang	Kecamatan Sukawati	Gianyar
66	Desa Ketewel	Kecamatan Sukawati	Gianyar
67	Desa Batubulan	Kecamatan Sukawati	Gianyar
68	Desa Nyuh Tebel	Kecamatan Manggis	Karangasem
69	Desa Sengkidu	Kecamatan Manggis	Karangasem
70	Desa Manggis	Kecamatan Manggis	Karangasem
71	Desa Ulakan	Kecamatan Manggis	Karangasem
72	Desa Padang Bai	Kecamatan Manggis	Karangasem
73	Desa Antiga Kelod	Kecamatan Manggis	Karangasem
74	Desa Antiga	Kecamatan Manggis	Karangasem
75	Desa Bugbug	Kecamatan Karangasem	Karangasem
76	Desa Pertama	Kecamatan Karangasem	Karangasem
77	Kelurahan Subagan	Kecamatan Karangasem	Karangasem
78	Kelurahan Karangasem	Kecamatan Karangasem	Karangasem
79	Desa Tumbu	Kecamatan Karangasem	Karangasem
80	Desa Seraya Barat	Kecamatan Karangasem	Karangasem
81	Desa Seraya	Kecamatan Karangasem	Karangasem
82	Desa Bunutan	Kecamatan Abah	Karangasem
83	Desa Purwakerti	Kecamatan Abah	Karangasem
84	Desa Datah	Kecamatan Abah	Karangasem
85	Desa Labasan	Kecamatan Abah	Karangasem
86	Desa Tulamben	Kecamatan Kubu	Karangasem
87	Desa Kubu	Kecamatan Kubu	Karangasem
88	Desa Baturinggit	Kecamatan Kubu	Karangasem
89	Desa Sukadana	Kecamatan Kubu	Karangasem
90	Desa Tianyar Tengah	Kecamatan Kubu	Karangasem
91	Desa Tianyar	Kecamatan Kubu	Karangasem
92	Desa Tianyar Barat	Kecamatan Kubu	Karangasem
93	Desa Tembok	Kecamatan Tejakula	Buleleng
94	Desa Les	Kecamatan Tejakula	Buleleng
95	Desa Penuktukan	Kecamatan Tejakula	Buleleng
96	Desa Sambirenteng	Kecamatan Tejakula	Buleleng
97	Desa Tejakula	Kecamatan Tejakula	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
98	Desa Bondalem	Kecamatan Tejakula	Buleleng
99	Desa Julah	Kecamatan Tejakula	Buleleng
100	Desa Pacung	Kecamatan Tejakula	Buleleng
101	Desa Bukti	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
102	Desa Kubutambahan	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
103	Desa Bungkulan	Kecamatan Sawan	Buleleng
104	Desa Giriemas	Kecamatan Sawan	Buleleng
105	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
106	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
107	Kelurahan Banyuning	Kecamatan Buleleng	Buleleng
108	Kelurahan Penarukan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
109	Kelurahan Kampung Baru	Kecamatan Buleleng	Buleleng
110	Kelurahan Kampung Kajanan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
111	Kelurahan Kampung Anyar	Kecamatan Buleleng	Buleleng
112	Kelurahan Kaliuntu	Kecamatan Buleleng	Buleleng
113	Desa Baktiserage	Kecamatan Buleleng	Buleleng
114	Desa Pemaron	Kecamatan Buleleng	Buleleng
115	Desa Tukad Mungga	Kecamatan Buleleng	Buleleng
116	Desa Anturan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
117	Desa Kalibukbuk	Kecamatan Buleleng	Buleleng
118	Desa Temukus	Kecamatan Banjar	Buleleng
119	Desa Banjar	Kecamatan Banjar	Buleleng
120	Desa Kaliasem	Kecamatan Banjar	Buleleng
121	Desa Dencarik	Kecamatan Banjar	Buleleng
122	Desa Pengastulan	Kecamatan Seririt	Buleleng
123	Desa Lokapaksa	Kecamatan Seririt	Buleleng
124	Desa Tangguwisia	Kecamatan Seririt	Buleleng
125	Desa Kalianget	Kecamatan Seririt	Buleleng
126	Desa Sulanyah	Kecamatan Seririt	Buleleng
127	Desa Umaanyar	Kecamatan Seririt	Buleleng
128	Desa Seririt	Kecamatan Seririt	Buleleng
129	Desa Kalisada	Kecamatan Seririt	Buleleng
130	Desa Antap	Kecamatan Selemadeg	Tabanan
131	Desa Berembeng	Kecamatan Selemadeg	Tabanan
132	Desa Tegal Mengkeb	Kecamatan Selemadeg Timur	Tabanan
133	Desa Beraban	Kecamatan Selemadeg Timur	Tabanan
134	Desa Lalanglinggah	Kecamatan Selemadeg Barat	Tabanan
135	Desa Selabih	Kecamatan Selemadeg Barat	Tabanan
136	Desa Tibibiu	Kecamatan Kerambitan	Tabanan
137	Desa Kelating	Kecamatan Kerambitan	Tabanan
138	Desa Sudimara	Kecamatan Tabanan	Tabanan
139	Desa Pangkung Tibah	Kecamatan Kediri	Tabanan
140	Desa Belalang	Kecamatan Kediri	Tabanan
141	Desa Beraban	Kecamatan Kediri	Tabanan

Sumber: BPBD Provinsi Bali

f) Daerah Rawan Bencana Angin Kencang dan Gelombang Badai Pasang

Terjadinya bencana angin kencang di beberapa tempat di Bali pada umumnya, disamping disebabkan faktor dinamika atmosfer lokal juga disebabkan karena pengaruh cuaca ekstrim secara regional. Berdasarkan identifikasi potensi bencana alam di Provinsi Bali, secara geografis kerawanan paling tinggi terhadap ancaman bencana angin kencang adalah seluruh kawasan pesisir di selatan Bali yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, tempat terjadinya badai tropis. Secara spesifik, daerah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi bencana angin kencang adalah Gilimanuk, kawasan pesisir Kecamatan Negara, Tabanan, Canggu, Kerobokan, Nusa Dua, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Nusa Penida dan pesisir selatan Kabupaten Karangasem.

g) Erosi / Abrasi Pantai

Erosi adalah pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan batuan oleh aktivitas tenaga angin, air, gelombang laut atau es. Sedangkan abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Bali Penida, panjang pantai di Bali yang mengalami erosi/abrasi mencapai 111,652 km, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1987. Hampir seluruh kawasan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mengalami erosi/abrasi. Erosi pantai terpanjang terdapat di Kabupaten Buleleng mengingat kabupaten ini juga memiliki pantai terpanjang di Bali. Dari panjang pantai yang tererosi, sampai tahun 2013 telah ditangani dengan berbagai metode sepanjang 77, 230 km atau 69,17%.

B. Aspek Demografi

1. Struktur Penduduk

Penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Bali yang dikenal dengan istilah *Krama* Bali, memiliki tata kehidupan yang berakar pada Kebudayaan Bali yang sangat kental berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-harinya sehingga terwujud menjadi suatu alam kehidupan, selain khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang memiliki kekuatan tersendiri (*mataksu*).

Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Desa Adat atau disebut dengan *Desa Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur Bali.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali menyatu dengan alam sehingga perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, tata kehidupan *Krama* Bali harus sejalan dan seirama dengan alam: *“hidup yang menghidupi, urip yang menguripi”*.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali yang menyatu dalam alam, baik secara *“sakala”* maupun *“niskala”* terdapat dalam nilai-nilai *Sad Kerthi*, yaitu *enam sumber kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan* yang terdiri dari: (1) *Atma Kerthi*, (2) *Danu Kerthi*, (3) *Wana Kerthi*, (4) *Segara Kerthi*, (5) *Jana Kerthi*, dan (6) *Jagat Kerthi*.

Tata cara *kehidupan* masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai tersebut merupakan warisan leluhur untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan alam Bali yang

khas/unik, indah, dan suci/*metaksu* yang dituangkan menjadi nilai-nilai *Tri Hita Karana*: yaitu cara hidup untuk memelihara/menjaga 3 (tiga) keseimbangan/keharmonisan manusia, yaitu:

- a) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan Hyang Maha Pencipta/ Hyang Widhi Wasa yang dinamakan *Parahyangan*;
- b) Keseimbangan/ keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia yang dinamakan *Pawongan*; dan
- c) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan alam beserta lingkungan yang dinamakan *Palemahan*.

Tata cara kehidupan untuk memelihara keseimbangan atau keharmonisan kehidupan *Krama* Bali dalam ranah spiritualitas, adat, agama, dan budaya dilaksanakan dengan *Upakara Pakerthi Yadnya* untuk Sad Kerthi, , yaitu: (1) *Tumpek Landep*, (2) *Tumpek Wariga*, (3) *Tumpek Kuningan*, (4) *Tumpek Klurut*, (5) *Tumpek Uye* atau *Tumpek Kandang*, (6) *Tumpek Wayang*. Sistem nilai dalam kebudayaan Bali tersebut terbentuk melalui suatu pemahaman tentang *Manumadi*, yaitu sifat keutamaan kelahiran sebagai manusia; pemahaman tentang *Rta*, yaitu hukum alam; dan kewajiban manusia merawat/ memelihara keselarasan/ keharmonisan hubungan-hubungan kosmik, nilai tentang keniscayaan *Dharma* dalam pengembangan kebudayaan, *lascarya*, yaitu sikap yang ikhlas dalam melaksanakan *swadharma* sebagai kewajiban hidup manusia, dan *Karma Phala*, yaitu kepercayaan kepada kehidupan hukum sebab-akibat.

Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat (*Krama*) Bali adalah sumber daya manusia yang *unggul*, yaitu *berkualitas* dan *berintegritas* dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kualitas dan keunggulan *Krama* Bali tersebut tercermin dalam potensi yang luar biasa dengan karakter *jemet*, *seken*, *saja*, *beneh* dan *luwih*, serta *undagi* (kreatif dan inovatif). Dengan kualitas tersebut *Krama* Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya, seperti tari-tarian, tetabuhan, lukisan, patung, arsitektur, dan

kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif yang bernilai tinggi sehingga menarik perhatian masyarakat dunia.

2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Provinsi Bali pada bulan September 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Bali mengalami penambahan sekitar 426,65 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 42,66 ribu setiap tahun.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali sebesar 1,01% per tahun. Terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,14% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk pada sensus periode 2010-2020 merupakan yang terendah di Provinsi Bali semenjak sensus pertama pada periode tahun 1961-1971.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) hasil sensus 2020 juga tidak mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Laju pertumbuhan penduduk ditetapkan terus meningkat sepanjang periode 2018-2023 dimana pada tahun 2020, target LPP Provinsi Bali adalah 2,15%.

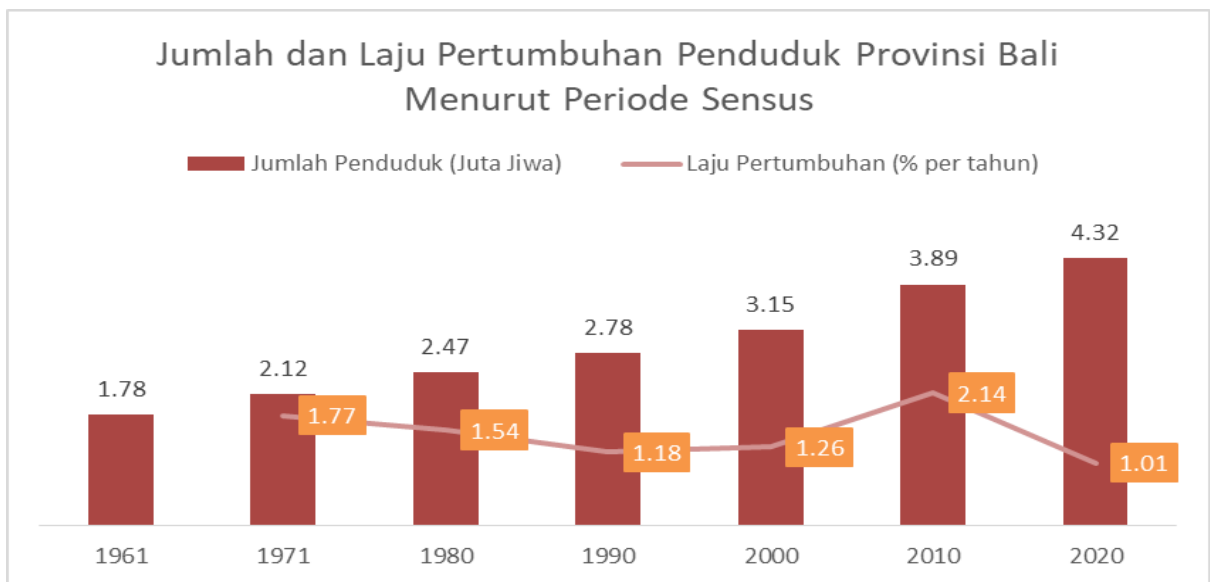
Dari 4,32 juta penduduk Bali sebesar 87,73% atau sekitar 3,79 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara sebesar 12,27% atau sekitar 0,53 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Jumlah ini merupakan indikasi adanya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK/KTP lagi.

Tabel 2.7.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk

No	Periode Sensus	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Laju Pertumbuhan (% per tahun)
1	1961	1,78	
2	1971	2,12	1,77
3	1980	2,47	1,54
4	1990	2,78	1,18
5	2000	3,15	1,26
6	2010	3,89	2,14
7	2020	4,32	1,01

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.3.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Bali Menurut Periode Sensus Penduduk

Penduduk di Provinsi Bali tersebar pada 9 kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Bali dengan jumlah 791.813 jiwa atau sebesar 18,34% dari penduduk Bali. Kota Denpasar merupakan daerah dengan penduduk terbanyak kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 725.314 jiwa atau sebesar 16,80%. Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Tabanan merupakan kabupaten yang persentase sebaran penduduknya terhadap Bali di atas 10%. Kabupaten Jembrana, Bangli, dan Klungkung persentase sebaran penduduknya di bawah 8%.

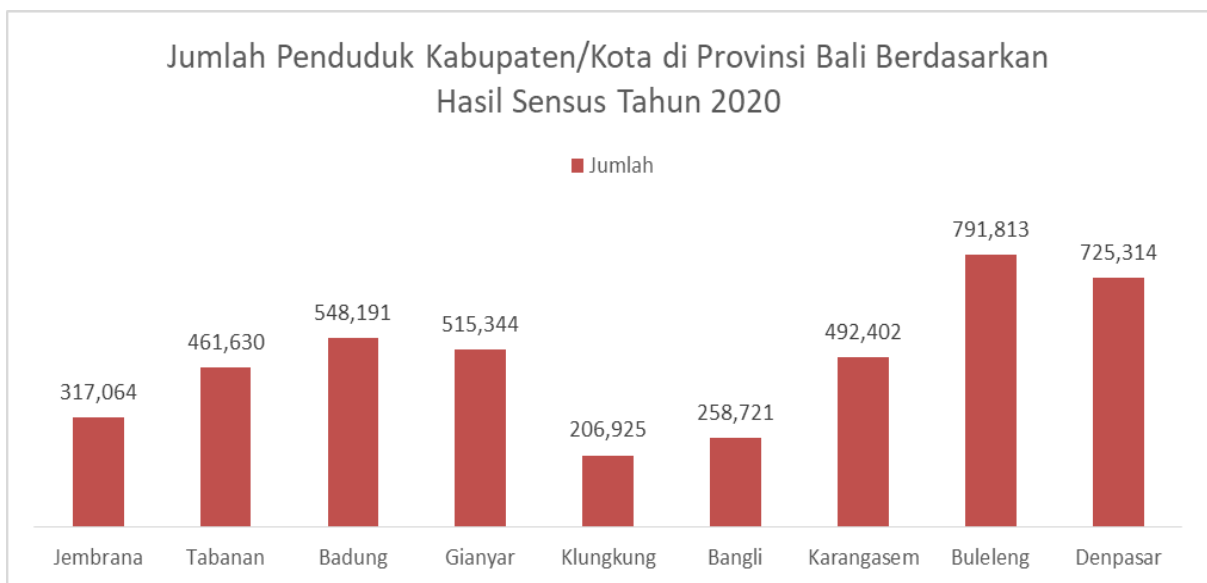
Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten dengan penduduk paling sedikit dengan jumlah penduduk sebanyak 206.925 jiwa atau 4,79% dari total jumlah penduduk Bali.

Tabel 2.8.

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Sensus 2020		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jembrana	158.730	158.334	317.064
2	Tabanan	231.448	230.182	461.630
3	Badung	274.577	273.614	548.191
4	Gianyar	258.455	256.889	515.344
5	Klungkung	103.657	103.268	206.925
6	Bangli	130.307	128.414	258.721
7	Karangasem	249.495	242.907	492.402
8	Buleleng	398.135	393.678	791.813
9	Denpasar	366.301	359.013	725.314
	Provinsi Bali	2.171.105	2.146.299	4.317.404

Sumber: BPS Provinsi Bali 2021



Sumber: BPS Provinsi Bali 2021

Gambar 2.4.

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

3. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2020, rasio jenis kelamin Provinsi Bali adalah sebesar 101,16. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 102,71 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu dengan rasio jenis kelamin 100,25

Tabel 2.9.

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Sex Ratio
1	Jembrana	100,25
2	Tabanan	100,55
3	Badung	100,35
4	Gianyar	100,61
5	Klungkung	100,38
6	Bangli	101,47
7	Karangasem	102,71
8	Buleleng	101,13
9	Denpasar	102,03
	Provinsi Bali	101,16

Sumber: BPS Provinsi Bali 2021

4. Kepadatan Penduduk

Dengan luas wilayah 5,636.66 Km², kepadatan penduduk di Provinsi Bali diperkirakan mencapai 766 Jiwa/Km² pada tahun 2020 menyesuaikan dengan hasil sensus penduduk Tahun 2020. Di antara kabupaten/kota yang ada di Bali, hanya 3 kabupaten dan kota saja yang memiliki kepadatan penduduk di atas rata-rata Provinsi. Kabupaten Badung memiliki kepadatan penduduk rata-rata 1.310 Jiwa/Km², Kabupaten Gianyar memiliki kepadatan penduduk 1.400 Jiwa/Km², dan Kota Denpasar memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu

5.676 Jiwa/Km². Karakter dan status kawasan akan mempengaruhi kepadatan penduduk.

Kota Denpasar dengan status sebagai ibukota Provinsi Bali tentu akan menarik lebih banyak migrasi penduduk untuk tinggal di dalamnya. Kondisi ekonomi yang lebih baik, ketersediaan fasilitas dan utilitas yang lebih memadai, serta ketersediaan sarana sosial dan rekreasi yang lebih beragam menjadi salah satu alasan mengapa kemudian lebih banyak penduduk yang bermigrasi ke Denpasar dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Bali. Kondisi ini didukung oleh data hasil sensus 2020 yang menyebutkan Kota Denpasar merupakan wilayah di Provinsi Bali dengan jumlah penduduk tidak sesuai KK/KTP tertinggi yaitu sebanyak 156.934 jiwa atau 21,64% dari total penduduknya. Artinya hampir seperempat penduduk Kota Denpasar, secara administrasi, bukan merupakan penduduk yang berdomisili di Kota Denpasar. Mereka hanya bertempat tinggal di Denpasar, namun secara administrasi tercatat pada wilayah lain di luar Kota Denpasar.

Pada sisi lainnya karakter perkotaan di Denpasar sudah terbentuk secara menyeluruh, berbeda dibandingkan dengan kabupaten lain yang masih memiliki karakter perdesaan yang kuat. Kawasan perdesaan akan memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan kawasan perkotaan mengingat bagaimana perbedaan perkembangan ekonomi dan ketersediaan fasilitas dan utilitas umum mempengaruhi karakter masyarakat dan kecenderungan pertumbuhan sekaligus migrasi penduduk di dalamnya.

Tabel 2.10.

Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Berdasarkan Hasil Sensus Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Hasil Sensus Tahun 2020 (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Persentase Jumlah Penduduk (%)
1	Jembrana	841,80	317.064	377	7,34
2	Tabanan	839,33	461.630	550	10,69
3	Badung	418,52	548.191	1.310	12,70

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk Hasil Sensus Tahun 2020 (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Persentase Jumlah Penduduk (%)
4	Gianyar	368,00	515.344	1.400	11,94
5	Klungkung	315,00	206.925	657	4,79
6	Bangli	520,81	258.721	497	5,99
7	Karangasem	839,54	492.402	587	11,41
8	Buleleng	1.365,88	791.813	580	18,34
9	Denpasar	127,78	725.314	5.676	16,80
	Provinsi Bali	5.636,66	4.317.404	766	100,00

Sumber: BPS Provinsi Bali 2021

5. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di Provinsi Bali. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak.

Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian;
- b) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; dan
- c) Sektor tersier berupa jasa.

Untuk melihat data lebih rinci dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.11.

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Bali Tahun 2017-2020

No	Lapangan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	466.307	505.611	462.871	545.533
2	Pertambangan dan Penggalian	6.536	6.108	9.627	9.013
3	Industri Pengolahan	361.743	369.588	368.947	381.746
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.406	6.033	5.709	5.473
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.514	5.791	11.870	8.324
6	Konstruksi	179.134	159.101	162.469	159.554
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	485.573	510.860	480.622	495.533
8	Transportasi dan Pergudangan	66.654	72.735	77.347	59.540
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	295.291	325.190	327.609	236.386
10	Informasi dan Komunikasi	10.429	7.786	12.805	14.360
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	58.175	61.944	71.061	62.230
12	Real Estat	4.387	3.191	4.092	3.094
13	Jasa Perusahaan	55.296	59.404	58.490	42.832
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	117.396	139.231	125.316	114.051
15	Jasa Pendidikan	103.644	117.956	100.014	103.537
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	47.892	51.064	54.886	51.303
17	Jasa lainnya	128.930	124.114	135.271	130.910
	Jumlah	2.398.307	2.525.707	2.469.006	2.423.419

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, dimana pengelompokan penduduk usia 15 tahun yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaannya/lapangan usaha, terdapat 17 klasifikasi lapangan kerja. Lapangan pekerjaan sektor pertanian, industri, dan perdagangan merupakan lapangan kerja dengan serapan tenaga kerja tertinggi. Sektor pertanian menyerap 22,51%, sektor industri menyerap 15,75%, sektor perdagangan menyerap 20,45%, dan sektor pariwisata menyerap 9,75% tenaga kerja. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi perubahan struktur serapan tenaga kerja

pada sektor-sektor ekonomi utama di Bali. Tahun 2020, jumlah serapan tenaga kerja sektor pertanian di Bali adalah 22,51%, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 18,75%. Begitu pula dengan sektor industri pengolahan yang meningkat menjadi 15,75% dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 14,94%. Sektor perdagangan mengalami hal yang serupa yaitu peningkatan pada tahun 2020 menjadi 20,45% yang pada tahun 2019 hanya 19,47%. Berbeda halnya dengan serapan tenaga kerja sektor pariwisata yang mengalami penurunan cukup signifikan. Pada tahun 2019 serapan tenaga kerja sektor pariwisata cukup tinggi yaitu 13,27%, namun menurun cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 9,75%.

Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.

Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (*productive employment*).

Selama kurun waktu 2015 sampai 2020, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Bali terus meningkat dari tahun 2015 sebanyak 3,14 juta jiwa hingga mencapai 3,46 juta jiwa ditahun 2020. Berdasarkan jumlah penduduk usia kerja tersebut, jumlah angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan bukan angkatan kerja. Tahun 2015 jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu 75,51%. Persentase tersebut berfluktuasi sampai tahun 2020 menjadi 74,32%.

Tingkat pengangguran terbuka selama kurun waktu 2015 sampai 2019 menunjukkan tren yang membaik, yaitu dari 1,99% tahun 2015 menjadi 1,52% di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 TPT Provinsi Bali melambung tinggi menjadi 5,63%. TPT Tahun 2020 merupakan yang tertinggi selama periode 2015-2020. Penyebab dari tingginya TPT di tahun 2020 adalah karena banyaknya penduduk Provinsi Bali yang kehilangan pekerjaan/dirumahkan akibat kelesuan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan sektor-sektor utama di Provinsi Bali seperti pariwisata, transportasi, dan perdagangan mengalami kejatuhan. Pembatasan aktivitas khususnya pariwisata dan perjalanan (domestik maupun luar negeri) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan banyak usaha-usaha yang harus tutup dalam waktu singkat dan merumahkan sebagian besar pekerjanya. Sehingga pada tahun 2020 tingkat pengangguran menjadi melambung tinggi.

Pada Februari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,42%, menurun 0,21 poin dibandingkan TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63%, ditandai dengan menurunnya 5,36 ribu orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,18%.

Untuk melihat data lebih rinci dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12.

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3.189.018	3.235.563	3.288.908	3.338.767	3.455.127
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	77,24	75,24	76,78	73,87	74,32
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,89	1,48	1,37	1,52	5,63

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara lain: pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, gini ratio, kondisi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi

Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan daerah lain. Daya dukung sektor pertanian, pariwisata dan sektor jasa-jasa pendukung pariwisata adalah modal dasar dalam menggerakkan pembangunan di Provinsi Bali.

Pada periode Tahun 2015-2019, sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi Bali berada

diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 6,03%, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Bali mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,33%. Sampai dengan Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Bali tercatat 5,56% masih tetap berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,07%. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,33%.

Ekonomi Bali tahun 2019 tercatat tumbuh 5,60%, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mencatatkan angka 6,31%. Struktur ekonomi Bali dari sisi lapangan usaha pada tahun 2019 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan kontribusi sebesar 23,26%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu sebesar 47,96%.

Ekonomi Bali pada tahun 2020 tercatat tumbuh negatif (kontraksi) sedalam -9,31%. Total perekonomian Bali pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 224,21 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 147,55 triliun.

Dengan capaian tersebut, ekonomi Bali triwulan IV-2020 tercatat tumbuh sebesar 0,94% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Ekonomi Bali lanjut bertumbuh dari periode triwulan sebelumnya di tengah tekanan pandemi COVID-19 yang masih melanda pada triwulan IV-2020.

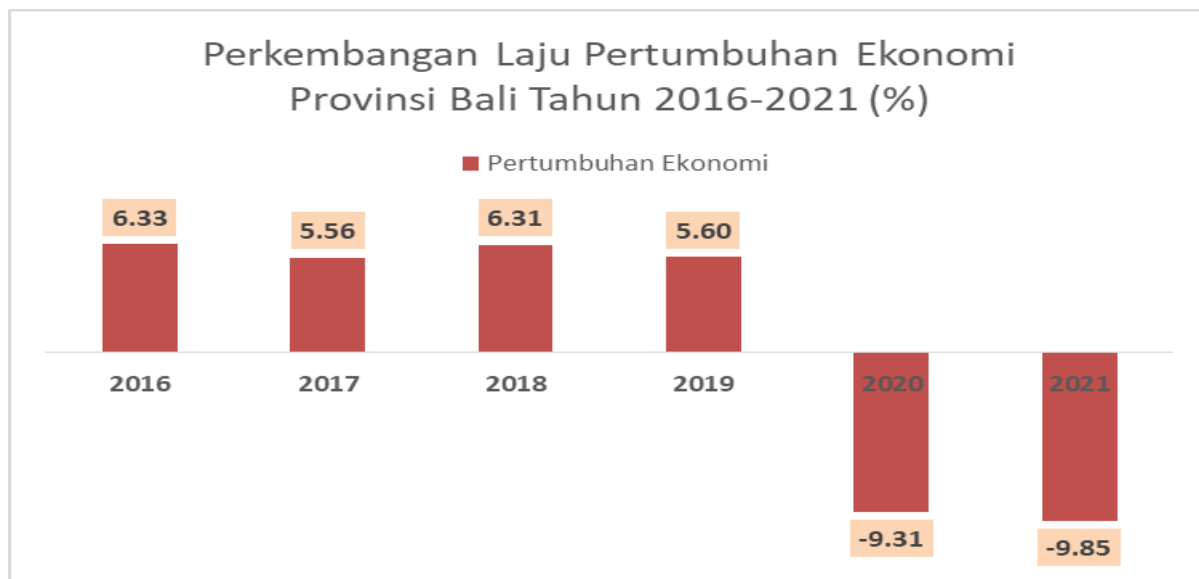
Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan IV-2020 tercatat tumbuh negatif sedalam -12,21%.

Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada tahun 2020 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 18,37%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 54,06%.

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi paling dalam yaitu -31,79%, yang disusul oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -27,52%, dan ketiga adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -16,48%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif adalah Informasi dan Komunikasi (6,16%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (2,84%), dan Real Estate (0,48%).

Pada awal tahun 2021 ini atau pada triwulan I tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali masih mengalami kontraksi (minus). Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, total perekonomian Bali pada triwulan I-2021 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 52,88 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 34,81 triliun. Dengan besaran tersebut, ekonomi Bali triwulan I-2021 tercatat tumbuh negatif (kontraksi) sedalam -5,24% jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV-2020 (*q-to-q*).

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*), ekonomi Bali triwulan I-2021 tercatat tumbuh negatif sedalam -9,85%. Dari sisi produksi, struktur ekonomi Bali pada triwulan I-2021 masih didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 17,39%. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu 57,09%.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.5.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali
Tahun 2016-2021

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali selalu lebih tinggi dibandingkan nasional semenjak tahun 2012 hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang jauh lebih dalam dibandingkan nasional. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 adalah -2,07%. Sedangkan pada triwulan I tahun 2021, meskipun lebih baik dari kumulatif tahun 2020, pertumbuhan nasional masih mengalami kontraksi sedalam -0,74%.

Bappenas menyebutkan proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Bali pada tahun 2022 berada pada rentang 5,5%–6,3% dan pada tahun 2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi Bali berada di angka 5,6%. Angka LPE tahun 2021 dan 2022 optimis dapat dicapai dengan adanya 2 faktor pendorong yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi massal yaitu: Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Pembangunan jalur kereta api listrik bandara menuju Kuta, dan Pembangunan Pelabuhan Benoa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi

2. Pemulihan sektor pariwisata seiring dengan pemulihan ekonomi

Sedangkan untuk LPE Nasional diproyeksikan berada pada rentang 5,4 – 6,0%.

Tabel 2.13.

Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, Jawa-Bali, dan Nasional Tahun 2022

No.	Wilayah	LPE (%)
1	Nasional	5,4 – 6,0
2	Jawa – Bali	5,5 – 5,9
3	Bali	5,5 – 6,3

Sumber : Bappenas, 2021

Struktur ekonomi makro Provinsi Bali ditopang sebagian besar oleh sektor pariwisata dan pertanian. Pada tahun 2020, sektor pariwisata yang dipresentasikan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menyumbang share PDRB Provinsi Bali sebesar 18,37% atau tertinggi setelah sektor pertanian yaitu sebesar 15,09%. Meskipun tertinggi, kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Provinsi Bali belum mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2020, target kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Provinsi Bali adalah sebesar 45%. Tentu saja target ini sangat jauh dari realisasinya yang hanya sebesar 18,37%. Begitupula dengan sektor pertanian yang belum mencapai target kontribusi dalam PDRB Bali. Pada tahun 2020 target kontribusi dalam PDRB adalah sebesar 17% sedangkan realisasinya adalah 15,09%.

Sektor pariwisata mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020 yaitu sebesar -27,52% dari tahun 2019. Kontraksi sebesar ini merupakan kontraksi terdalam kedua setelah sektor transportasi dan perdagangan yang mengalami kontraksi sebesar -31,79%. Kondisi ini terjadi karena imbas penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dimana sektor pariwisata dan sektor transportasi ditutup untuk sementara waktu khususnya perjalanan untuk wisatawan asing ke Provinsi Bali.

Imbas pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata Provinsi Bali juga terlihat pada dinamika trend laju pertumbuhan sektor pariwisata selama 5 tahun terakhir. Selama tahun 2015-2019, pertumbuhan sektor pariwisata selalu sejajar dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Pada tahun 2017 bahkan pertumbuhan sektor pariwisata tercatat 9,03% sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,56%. Ini menunjukkan sektor pariwisata berkembang sangat positif dan menjadi penopang ekonomi makro Bali. Hingga tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 melanda, laju pertumbuhan sektor pariwisata akhirnya jatuh menjadi -27,52%, jauh dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali sebesar -9,31%.

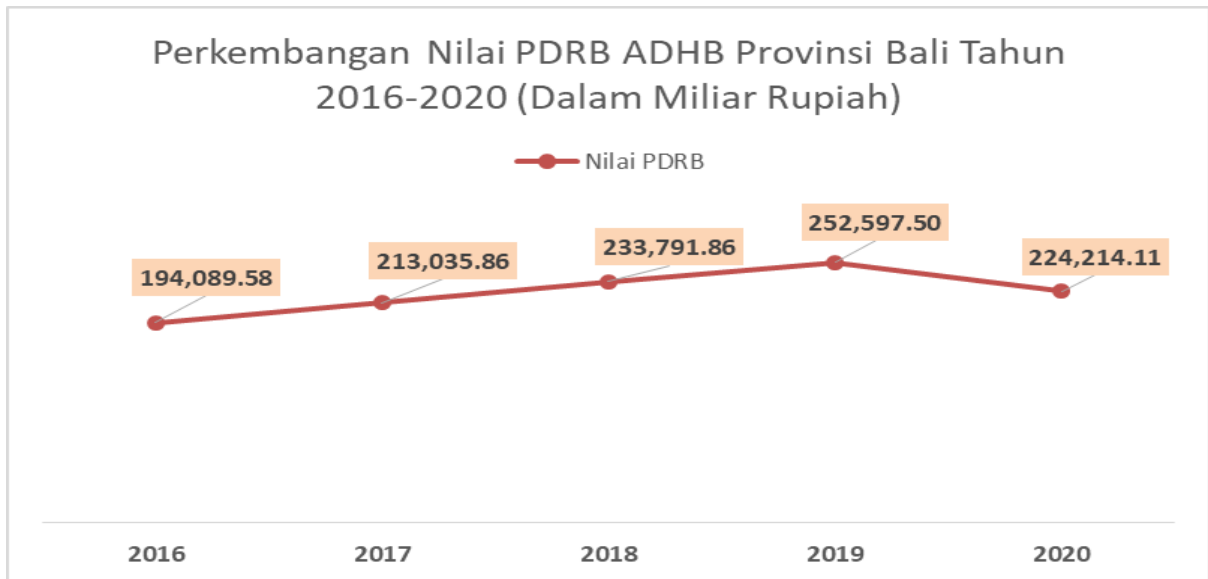
Jika dilihat dari segi perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi Bali dengan target pertumbuhan ekonomi sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, pertumbuhan Ekonomi Bali Tahun 2019 tidak memenuhi target. Target pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2019 adalah 6,4%, sedangkan angka pertumbuhan riil adalah 5,63%. Pada tahun 2020, target pertumbuhan ekonomi Bali adalah sebesar 6,6% dimana kembali tidak dapat terpenuhi bahkan jauh dari ekspektasi (batas atas dan batas bawah). Seperti yang telah tertuang sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2020 menjadi -9,31%. RPJMD Semesta Berencana memberikan target pertumbuhan paling rendah di tahun 2020 adalah 6,40% sedangkan paling tinggi 6,80%.

Tabel 2.14.

Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Bali
Tahun 2018-2020

No	Pertumbuhan Ekonomi Bali	2018 (tahun awal RPJMD)	2019	2020
1	Target RPJMD Semesta Berencana 2018-2023	6,90	6,40	6,60
2	Realisasi	6,31	5,60	-9,31

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021 & RPJMD Semesta Berencana 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.6.

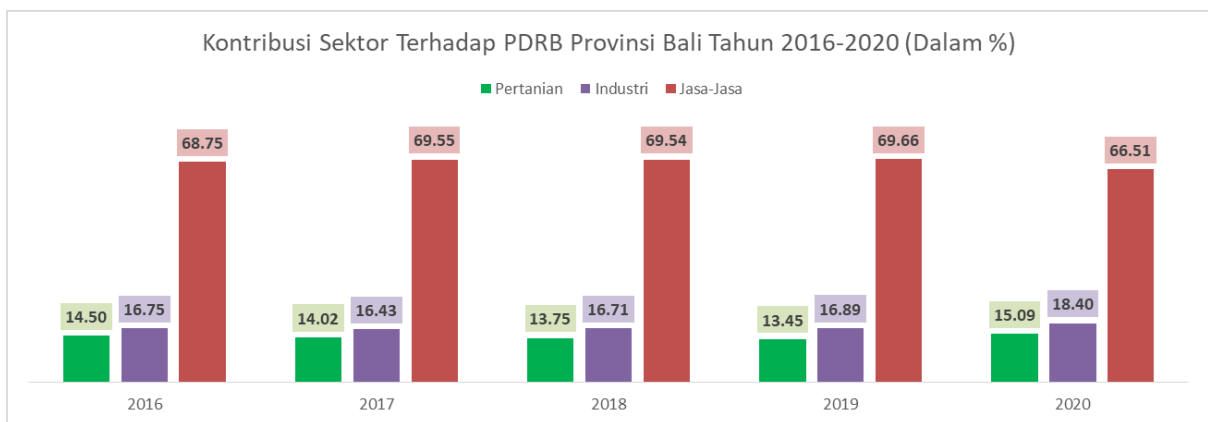
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2015-2020

Struktur perekonomian Provinsi Bali masih ditunjang oleh sektor tersier (jasa-jasa). Hal tersebut terlihat dari kategori yang berkontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB, yaitu kategori penyediaan akomodasi makan dan minum. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dalam pada tahun 2020 masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya saja terjadi lonjakan yang cukup besar pada sektor pertanian, dan sektor industri, sedangkan sektor jasa mengalami penurunan paling tinggi dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan sektor sekunder dan tersier mengalami penurunan nilai di tahun 2020. Hal ini karena sektor-sektor dengan kemampuan menarik kerumunan tinggi seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, dll harus dibatasi pergerakannya sementara sampai pandemi berakhir. Pada sisi lainnya, sektor primer sebagai sektor penghasil kebutuhan pokok utama justru semakin menggeliat karena kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan ensensi penunjang hidup yang tidak dapat dibatasi pergerakannya. Alhasil, sektor primer tetap dapat melaju secara progresif sedangkan sektor tersier dan sekunder mengalami penurunan.

Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan PDRB yang sangat terfokus pada sektor tersier (jasa pariwisata) maka dilakukan perimbangan khususnya sektor primer dengan memberi perhatian lebih banyak pada sektor pertanian dan sektor sekunder (industri) untuk menjaga kestabilan PDRB. Melihat kondisi tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan target baru.

Segmentasi wilayah sektor tersier ini berada di wilayah Bali bagian selatan atau biasa disebut “Sarbagita” (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), karena di wilayah tersebut terkonsentrasi aktivitas ekonomi pendukung pariwisata, seperti: hotel, villa, agen dan biro perjalanan wisata, restoran, rumah makan, cafe, dan lain sebagainya.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.7.

Kontribusi Sektor Pertanian, Industri, dan Jasa-Jasa Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2016-2020

2. Inflasi

Laju inflasi Provinsi Bali merupakan cerminan keadaan harga Provinsi Bali secara umum. Laju inflasi Provinsi Bali direpresentasikan oleh 2 kota besar yaitu Kota Denpasar dan Kota Singaraja.

a. Laju Inflasi Kota Singaraja.

Pada bulan Mei 2021 Kota Singaraja tercatat mengalami deflasi sedalam 0,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) sebesar 107,61. Tingkat inflasi

tahun kalender Mei 2021 setinggi 1,33 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2021 terhadap Mei 2020 atau YoY) tercatat setinggi 2,87 persen.

Dua kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi (m to m) yaitu kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sedalam 1,70 persen dan kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan) sedalam 1,01 persen. Sementara itu, lima kelompok pengeluaran lainnya tercatat mengalami inflasi yaitu kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,95 persen; kelompok V (kesehatan) setinggi 0,40 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,38 persen; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 0,38 persen; dan kelompok VI (transportasi) setinggi 0,26 persen. Empat kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga), kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya), kelompok IX (pendidikan), dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran).

Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan deflasi pada bulan Mei 2021 antara lain, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, terong, telepon seluler, daging babi, pisang, jeruk, es krim, ikan kakap merah, nangka muda, ikan lamuru, telur ayam ras, jagung manis, tauge/kecambah, apel, sabun detergen bubuk/cair, cumi-cumi, udang basah, dan bawang putih.

Dari 90 kota IHK, tercatat 78 kota mengalami inflasi dan 12 kota mengalami deflasi. Deflasi terdalam tercatat di Timika (Papua) sedalam 0,83 persen sedangkan deflasi terdangkal tercatat di Palembang (Sumatera Selatan) sedalam 0,02 persen. Sementara itu, inflasi tertinggi tercatat di Manokwari (Papua Barat) setinggi 1,82 persen sedangkan inflasi terendah tercatat di Tembilahan (Riau) setinggi 0,01 persen. Jika diurutkan dari deflasi terdalam, maka Singaraja menempati urutan ke-3 dari 12 kota yang mengalami deflasi.

Untuk inflasi tahunan, Kota Singaraja cenderung mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2018, inflasi tahunan Kota Singaraja tercatat sebesar 1,88%. Laju inflasi ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 2,42% dan kembali meningkat menjadi 2,48% di tahun 2020. Peningkatan laju inflasi di Kota Singaraja bertolak belakang dengan laju inflasi di Kota Denpasar dan Nasional. Pada tahun 2020, laju inflasi tahunan nasional tercatat sebesar 1,68% atau menurun sebanyak 1,04 poin dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,72%. Penurunan laju inflasi ini terjadi akibat menurunnya daya beli masyarakat karena dampak Pandemi COVID-19 dimana masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan sehingga pengeluaran turut berkurang.

b. Laju Inflasi Kota Denpasar

Pada bulan Mei 2021 Kota Denpasar tercatat mengalami deflasi sedalam 0,59 persen yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2018=100) dari 105,78 pada April 2021 menjadi 105,16 pada Mei 2021. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2021 terhadap Mei 2020 atau YoY) tercatat masing-masing setinggi 0,90 persen dan 0,81 persen.

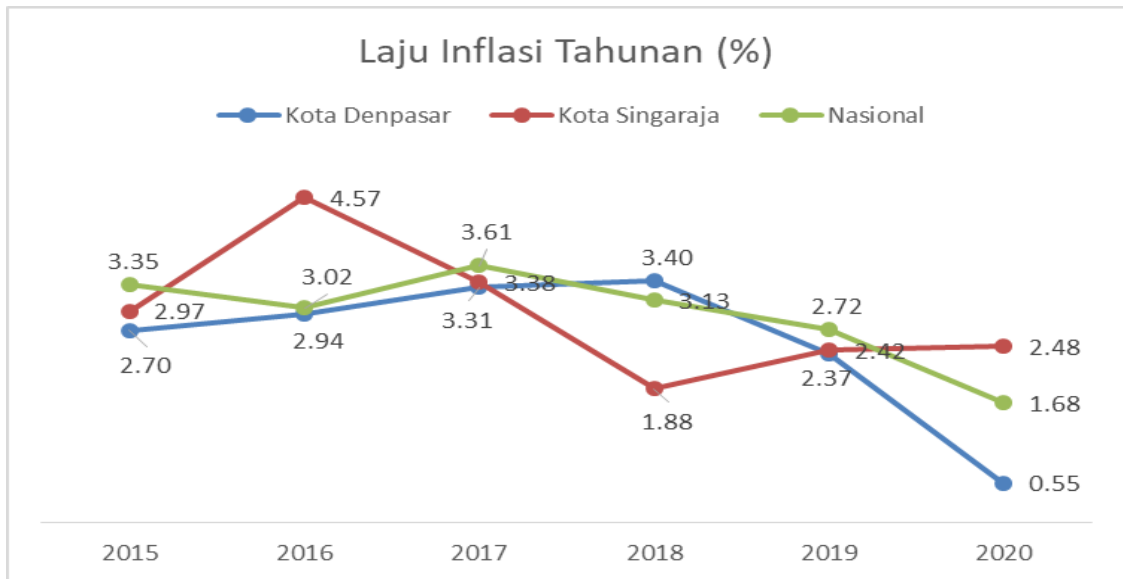
Dari sebelas kelompok pengeluaran, tujuh kelompok pengeluaran tercatat mengalami deflasi yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sedalam 4,19 persen; kelompok II (pakaian dan alas kaki) sedalam 1,30 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sedalam 1,04 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sedalam 0,78 persen; kelompok VI (transportasi) sedalam 0,12 persen; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) sedalam 0,11 persen; dan kelompok V (kesehatan) sedalam 0,01 persen. Sementara itu, tiga kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi yaitu: kelompok VII (informasi,

komunikasi, dan jasa keuangan) setinggi 0,56 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,46 persen; dan kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 0,07 persen. Satu kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu kelompok IX (pendidikan)..

Komoditas yang tercatat memberikan andil atau sumbangan deflasi pada bulan Mei 2021 antara lain, canang sari, cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, tarif angkutan udara, baju kaos tanpa kerah pria, jeruk, popok bayi sekali pakai, dan sawi putih.

Dari 90 kota IHK, tercatat 12 kota mengalami deflasi dan 78 kota mengalami inflasi. Deflasi terdalam tercatat di Kota Timika sedalam 0,83 persen, sedangkan deflasi terdangkal tercatat di Kota Palembang sedalam 0,02 persen. Sementara itu, inflasi tertinggi tercatat di Kota Manokwari setinggi 1,82 persen, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Tembilahan setinggi 0,01 persen. Jika diurutkan dari deflasi terdalam, maka Kota Denpasar menempati urutan ke-2 dari 12 kota yang mengalami deflasi.

Laju inflasi tahunan Kota Denpasar sebagaimana yang dialami oleh nasional, mengalami penurunan. Pada tahun 2020, laju inflasi tahunan Kota Denpasar tercatat sebesar 0,55% dimana menurun 1,82 poin dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 2,37%. Penurunan laju inflasi Kota Denpasar pada tahun 2020 ini tercatat lebih besar dari nasional, ini mengindikasikan daya beli masyarakat Kota Denpasar mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan daya beli rata-rata masyarakat nasional.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.8.

Laju Inflasi Tahunan Kota Denpasar, Kota Singaraja, dan Nasional Tahun 2015-2020

3. PDRB per Kapita Provinsi Bali

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian

perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.

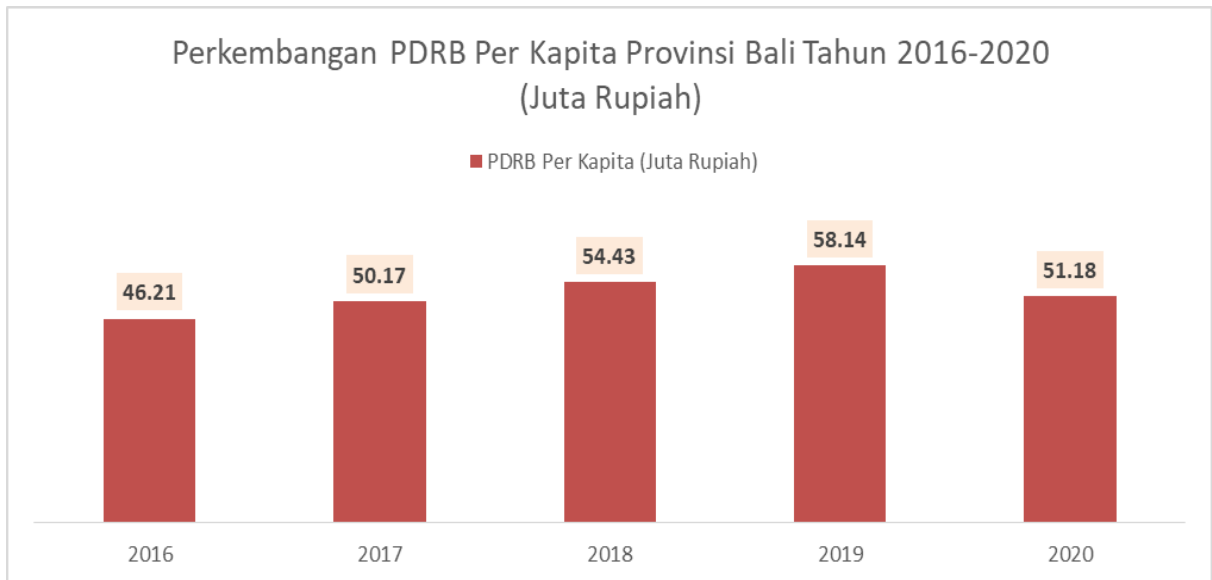
Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun.

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2017 peningkatan mencapai 9,05%, yaitu dari Rp42,48 juta tahun 2015 menjadi Rp46,21 juta pada tahun 2016. Pada tahun 2017 PDRB perkapita Bali sebesar Rp50,17 juta. Pada tahun 2018 PDRB perkapita Bali sebesar Rp54,43 juta. Pada tahun 2019, PDRB Per Kapita Provinsi Bali meningkat menjadi Rp58,14 juta. Pada tahun 2020, diperkirakan PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi Rp51,18 Juta.

Namun demikian PDRB per kapita Bali masih berada di bawah angka rata-rata nasional, hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh semua *stakeholder* untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita penduduk Bali. Berdasarkan data BPS Nasional, pada tahun 2018, PDRB Perkapita nasional adalah sebesar 55,98 Juta sedangkan Provinsi Bali adalah sebesar 54,43 Juta. Pada tahun 2020, PDRB Perkapita tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai 260,44 Juta.

PDRB Perkapita Provinsi Bali tahun 2020 juga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2020, target PDRB Perkapita yang ditetapkan adalah 56 juta sampai 61 juta. Target ini berada jauh di atas realisasi yaitu yang hanya 51,18 Juta. Dampak dari pandemi Covid-19 turut menjadi andil

paling besar penyebab turunnya angka PDRB Perkapita penduduk Provinsi Bali.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.9.

PDRB Per Kapita Bali Tahun 2016-2020

4. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

Tabel 2.15.

Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

Indeks Gini	Klasifikasi
$GR \leq 0,20$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
$0,20 < GR \leq 0,39$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
$0,39 < GR \leq 0,59$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
$0,59 < GR \leq 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi
$GR > 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

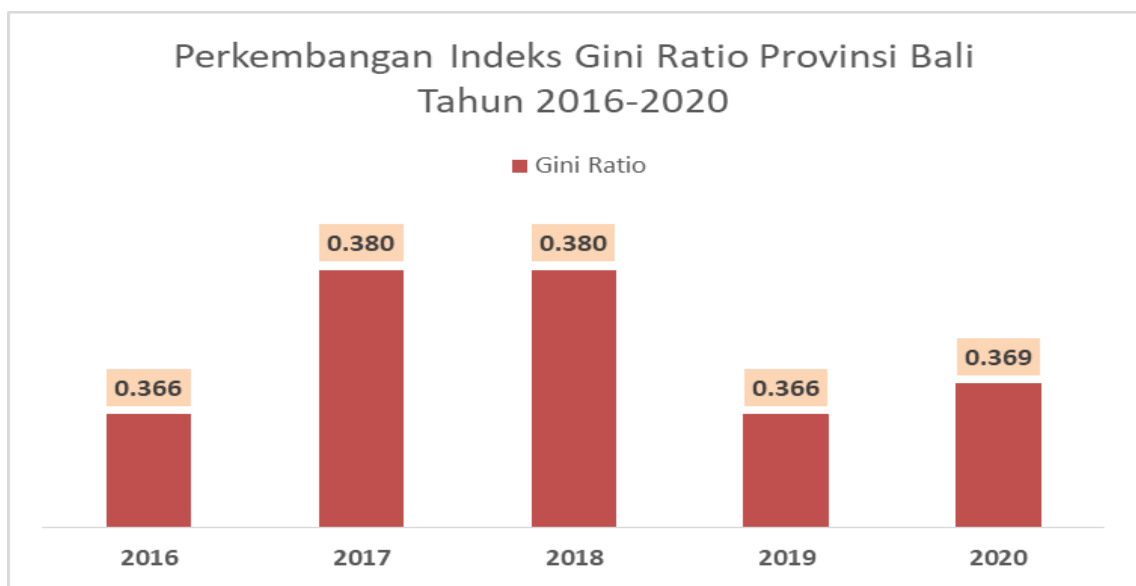
Sumber: BPS

Gini ratio Provinsi Bali pada September 2020 tercatat sebesar 0,369 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini tidak mengalami perubahan dari kondisi Maret 2020 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali kondisi September 2020 serupa dengan ketimpangan pendapatan kondisi Maret 2020.

Angka Gini Ratio Bali tersebut di atas sudah mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bali menetapkan target Gini Ratio sebesar 0,3264. Target Gini Ratio Bali ditetapkan menurun setiap tahun hingga di tahun 2023 target yang harus dicapai adalah 0,2500.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,378, angka ini naik 0,006 poin dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,372. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio September 2020 tercatat sebesar 0,304, nilai ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,298. Kedua indeks gini ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kabupaten Klungkung merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun itu yaitu sebesar 0,358. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio 0,369. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Bangli yaitu sebesar 0,283. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada tahun 2020 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.10.
Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2016-2020

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan merepresentasikan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Kondisi September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 18,63 persen yang berarti ketimpangan pendapatan penduduk di Bali ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini sama jika dibandingkan dengan Maret 2020 yang tercatat sebesar 17,55 persen. Jika dibedakan menurut daerah, kondisi September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 18,33 persen, sementara di daerah perdesaan pada periode yang sama tercatat sebesar 21,58 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan dan perdesaan di Bali termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

5. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2020 tercatat sebesar 4,45%, naik 0,67 poin dibandingkan dengan posisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 3,78%. Angka ini masih jauh berada pada rata-rata nasional yaitu sebesar 10,19%. Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu 26,80%. Jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan September 2020 tercatat sekitar 196,92 ribu orang. Bertambah 31,73 ribu orang dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 yang tercatat sekitar 165,19 ribu orang.

Realisasi persentase penduduk miskin Bali tahun 2020 masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020, target persentase penduduk Provinsi Bali yang berada di bawah garis kemiskinan adalah 3,59%.

Selama periode Maret–September 2020, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat mengalami peningkatan, dari 3,33% pada Maret 2020 menjadi 4,04% pada September 2020. Hal yang sama juga terjadi di daerah perdesaan, tercatat persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari 4,78% pada Maret 2020 menjadi 5,40% pada September 2020.

Garis kemiskinan tercatat naik sekitar 1,94%, dari Rp429.834,00 per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp438.167,00 per kapita per bulan pada September 2020.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Bali pada September 2020 tercatat sebesar 0,610, naik sebesar 0,086 poin dibandingkan Maret 2020, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik 0,02 poin dari 0,103 pada Maret 2020 menjadi 0,123 pada September 2020.

Bila dirinci pada masing-masing kabupaten/kota, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Bali yaitu sebesar 35.250 jiwa sedangkan Kabupaten Klungkung memiliki penduduk miskin paling sedikit yaitu 8.760 jiwa. Bila disandingkan dengan jumlah penduduknya, Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling tinggi yaitu 5,91%, artinya sebanyak 5,91% penduduk di Kabupaten Karangasem merupakan penduduk miskin. Sedangkan persentase terendah dimiliki oleh Kota Denpasar yaitu sebesar 2,14%. Bila disandingkan dengan persentase Provinsi Bali, hanya kota Denpasar dan Kabupaten Badung saja yang memiliki jumlah penduduk miskin di bawah persentase Provinsi Bali.

Tabel 2.16.

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2016-2020
(periode September)

No.	Penduduk Miskin	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah (Ribuan Jiwa)	174,94	176,48	168,34	156,91	196,92
2	Persentase (%)	4,15	4,14	3,91	3,61	4,45

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan, komponen yang dibutuhkan bukan hanya jumlah penduduk miskin namun juga indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Bali kondisi September 2020 tercatat sebesar 0,610 naik 0,086 poin dibanding kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,524. Apabila dibandingkan dengan kondisi September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Bali pada September 2020 naik 0,106 poin.

Di sisi lain, Indeks Keparahannya Kemiskinan di Bali tercatat sebesar 0,123 pada September 2020. Nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan pada Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,103.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2020 di perkotaan terlihat lebih rendah dibandingkan di daerah perdesaan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan tercatat sebesar 0,550, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,752. Begitu juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), pada

September 2020 di perkotaan tercatat sebesar 0,114, lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan yang tercatat sebesar 0,143. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan di Bali lebih dekat dengan garis kemiskinan dibanding di daerah perdesaan, sedangkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi atau cenderung lebih heterogen dibanding daerah perkotaan.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dihitung secara komposit, dengan cara mengukur Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli yang diperoleh dari rata-rata Pengeluaran Per Kapita Riil. Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2020. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 75,50 pada tahun 2020. Selama periode 2010-2019, IPM Bali rata rata tumbuh sebesar 0,81% per tahun dan berada pada level “tinggi”. Namun badai pandemi COVID-19 telah memberi dampak pada pembangunan manusia Bali pada tahun 2020. Pada periode 2019-2020, IPM Bali tumbuh 0,16%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, selama periode 2010-2020, rata-rata pertumbuhan IPM Bali 2010-2020 menjadi sebesar 0,75% per tahun.

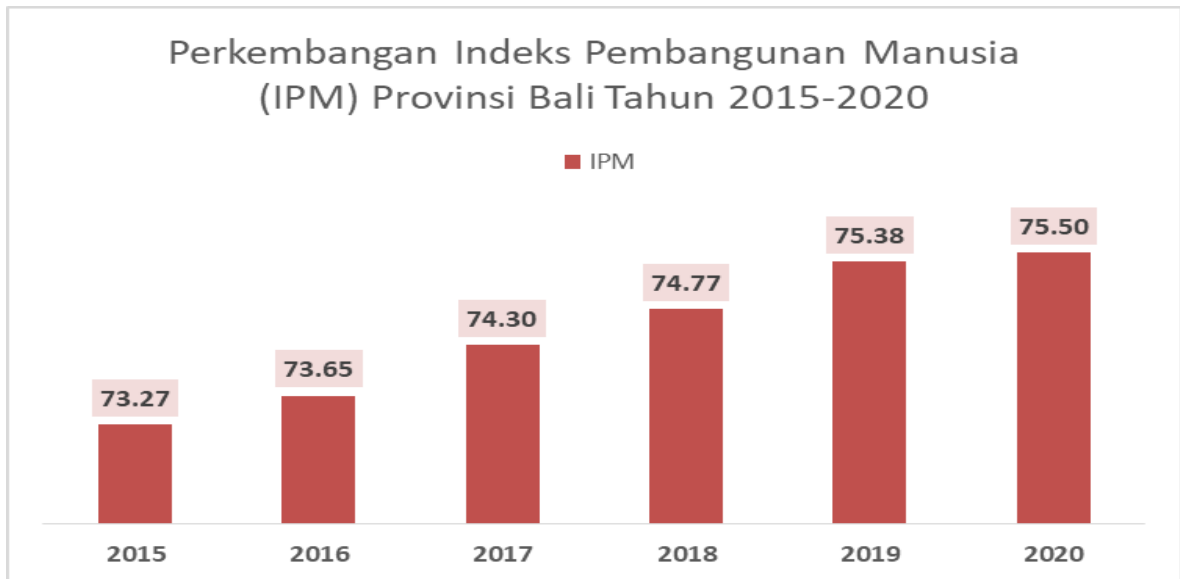
Pembangunan manusia Bali konsisten mengalami kemajuan, namun kecepatannya pada tahun 2020 mengalami perlambatan. Kemajuan tersebut ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 yang mencatatkan capaian sebesar 75,50 atau meningkat 0,12 poin dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38.

Perlambatan pembangunan manusia tersebut diindikasikan oleh pertumbuhan IPM yang sebesar 0,16%, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 yang ketika itu tercatat tumbuh sebesar 0,82%.

Perlambatan tahun 2020 ditengarai oleh menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat COVID-19, yang digambarkan oleh komponen rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan (PPP) yang tercatat sebesar 13,93 juta rupiah menurun 217 ribu rupiah dari tahun sebelumnya.

IPM Bali tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020, target IPM Provinsi Bali adalah 75,31 dengan batas bawah adalah 75,21 dan batas atas adalah 75,41. Dengan IPM 75,50 berarti Provinsi Bali sudah melampaui target baik itu rata-rata maupun batas atasnya.

Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.11.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2015-2020

BPS Provinsi Bali mencatat pada tahun 2020, berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Provinsi Bali memiliki IPM yang lebih tinggi dari penduduk perempuannya. Penduduk laki-laki memiliki IPM 78,74 sedangkan penduduk perempuan memiliki IPM 73,85. Kota Denpasar merupakan wilayah yang tercatat memiliki IPM tertinggi baik untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan. Sedangkan Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan IPM terendah baik itu untuk penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.17.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen
Tahun 2015-2020

Komponen	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	71,35	71,41	71,46	71,68	71,99	72,13
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,97	13,04	13,21	13,23	13,27	13,33
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,26	8,36	8,55	8,65	8,84	8,95
Pengeluaran Perkapita	Rp000	13.078	13.279	13.573	13.886	14.146	13.929
IPM		73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50
Pertumbuhan IPM	%	1,09	0,52	0,88	0,63	0,82	0,16

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan

Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu ini telah mencapai hasil cukup menggembirakan, perkembangan AMH Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2015-2020. Pada tahun 2020, AMH di Provinsi Bali adalah 94,80% yang artinya sebanyak 94,80% penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu untuk membaca dan menulis latin. Meskipun sudah diatas 90%, angka ini belum belum mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana di tahun 2020 yaitu sebesar 99,88%.

Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, data disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.18.

Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2015-2020

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jembrana	94,14	93,74	93,80	93,08	95,40	95,26
2	Tabanan	94,54	93,88	94,00	93,32	94,93	93,19
3	Badung	95,13	97,05	97,10	96,81	99,81	97,71
4	Gianyar	93,43	93,27	93,30	92,35	94,00	95,36
5	Klungkung	86,32	85,82	85,80	86,82	87,81	91,57
6	Bangli	89,21	88,09	88,20	87,43	89,06	90,43
7	Karangasem	82,52	81,74	81,80	84,91	85,01	89,05
8	Buleleng	90,34	89,41	89,50	90,80	91,40	92,13
9	Kota Denpasar	97,96	98,68	98,70	98,02	99,31	99,00
10	Provinsi Bali	92,77	92,82	92,90	92,98	94,53	94,80

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

b) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

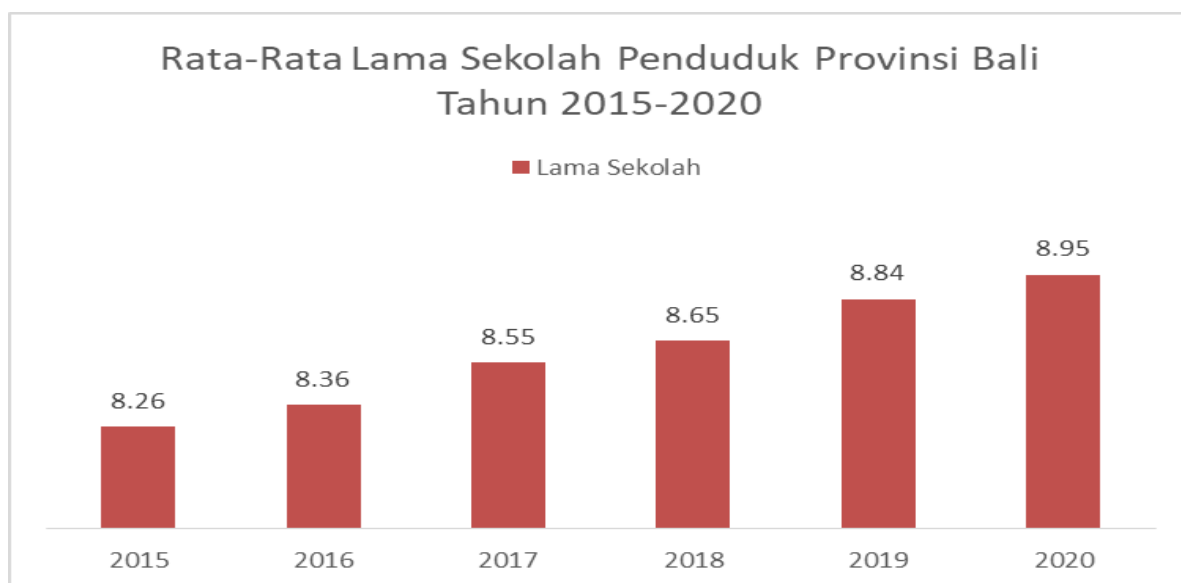
Selama kurun waktu 2015-2020 rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 rata-rata lama sekolah adalah sebesar 7,44 tahun dan meningkat menjadi 8,65 pada tahun 2018.

Sementara itu, pada tahun 2020, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata tercatat telah menempuh pendidikan selama 8,95 tahun, lebih lama 0,11 tahun dibandingkan keadaan tahun 2019. Artinya, penduduk Provinsi Bali yang berusia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,95 tahun atau hampir menamatkan kelas IX atau kelas 3 SMP.

Angka lama sekolah tahun 2020 ini masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana

Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020, target angka lama sekolah adalah 10,28 tahun.

Perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali dari tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.12.

Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Tahun 2015-2020

Bila dirinci dengan data jenis kelamin, penduduk laki-laki di Provinsi Bali tahun 2020 memiliki rata-rata lama sekolah 9,68 tahun sedangkan penduduk perempuan adalah selama 8,21 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi dimiliki oleh Kota Denpasar, sedangkan terendah oleh Kabupaten Karangasem.

c) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) didefinisikan sebagai Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada

jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya

APK merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SD pada tahun 2014 mencapai 105,59%, tahun 2015 mencapai 105%, tahun 2016 mencapai 104,97% dan tahun 2017 mencapai 104,35%. Untuk tahun 2018, APK untuk SD menurun dari tahun 2017 menjadi 103,02%. Pada tahun 2019, APK untuk SD meningkat menjadi 103,52%.

Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SMP pada tahun 2015 telah mencapai 96,82% dan untuk tahun 2017 mencapai sebesar 96,29% atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 96,19%. Untuk tahun 2018, APK untuk SMP menurun dari tahun 2017 menjadi 96,14% dan tahun 2019 menjadi 97,26%.

Untuk jenjang SMA/SMK, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun tahun 2015 telah mencapai 86,61% dan tahun 2017 mencapai sebesar 90,04%

meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 86,41%. Untuk tahun 2018, APK untuk SMA/SMK menurun dari tahun 2017 menjadi 87,74% dan tahun 2019 menjadi 87,96%.

Untuk jenjang Perguruan Tinggi, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2015 mencapai 26,50% dan tahun 2017 sebesar 29,40% meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 27,02% dan di tahun 2018 kembali meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 30,51%. Pada tahun 2019 APK Perguruan Tinggi turun menjadi 29,84%. Angka APK perguruan tinggi ini mengindikasikan kurang dari 1/3 jumlah penduduk usia perguruan tinggi di Provinsi Bali yang benar-benar mengenyam bangku perguruan tinggi. Selebihnya mereka tidak mengenyam pendidik tinggi, hanya menamatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Berikut data APK ditampilkan secara tabel, seperti berikut ini :

Tabel 2.19.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2019

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD	105,00	104,97	104,35	103,02	103,52
SLTP	96,82	96,19	96,29	96,14	97,26
SLTA	86,61	86,41	90,04	87,74	87,96
Perguruan Tinggi	26,50	27,02	29,40	30,51	29,84

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

d) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2020, struktur demografi penduduk Provinsi Bali pada kelompok usia 15 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi yang ditamatkan masih didominasi pendidikan 12 tahun (SD-SLTA atau sederajat). Apabila diakumulasikan, penduduk usia tersebut memiliki komposisi sebesar 70,09%. Penduduk dengan

kualifikasi pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi) yaitu dimulai dari DI hingga S3, komposisinya hanya 14,18%. Pada sisi lainnya, masih terdapat penduduk Provinsi Bali pada usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk dengan kriteria ini adalah sebesar 14,92%, yang bahkan lebih besar dari jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan tinggi.

Apabila melihat pada trend komposisi pada masing-masing kelompok: penduduk tanpa ijazah, penduduk yang hanya tamatan SD, dan hanya tamatan SLTP komposisinya mengalami penurunan. Penurunan pada masing-masing kelompok relatif menggemberikan karena pada 2 tahun sebelumnya justru meningkat. Penurunan yang paling tinggi terjadi pada kelompok masyarakat yang tidak memiliki ijazah. Pada tahun 2019, kelompok masyarakat ini memiliki komposisi 17,11% yang bahkan komposisinya lebih besar dari penduduk yang sudah mengenyam pendidikan tinggi (13,26%). Pada tahun 2020, penduduk pada kelompok ini menurun cukup drastis komposisinya menjadi 14,92%. Besaran komposisi ini bahkan paling rendah selama 5 tahun terakhir (2015-2019).

Pada sisi lainnya, penduduk dengan ijazah tertinggi SLTA sederajat, DI-DIII, DIV-S3, komposisinya terus mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan ini tidak signifikan, namun konsistensi peningkatan komposisi ini mengindikasikan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Bali berdasarkan tingkat pendidikan terus mengalami perbaikan.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah menetapkan target angka kelulusan SD-SLTA adalah 100% dan angka putus sekolah 0% untuk SD, 0,05% untuk SLTP, dan 0,20% untuk SLTA. Dengan penetapan target ini diharapkan nantinya, penduduk dengan kelompok usia di atas 15 tahun namun tidak memiliki ijazah dapat diantisipasi.

Tabel 2.20.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

No	Uraian	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak Punya	16,95	17,70	18,19	17,11	14,92
2	SD Sederajat	27,06	21,48	20,80	20,02	20,08
3	SLTP Sederajat	13,27	17,75	17,65	19,05	17,77
4	SLTA Sederajat	31,05	31,70	31,05	30,55	33,05
5	DI/DII/DIII	3,75	4,07	3,84	4,05	4,25
6	DIV/S1/S2/S3	7,92	7,31	8,47	9,21	9,93

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

e) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh

Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat

SD/MI/Paket A pada tahun 2015-2019 berturut-turut adalah sebagai berikut; 95,64; 95,75; 96,09; 96,19; dan 96,78. Angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, target APM tingkat SD/MI/Paket A adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2019 adalah 96,78%.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/MTs/Paket B pada tahun 2015-2019 berturut-turut adalah sebagai berikut; 84,78; 84,99; 85,32; 86,00 dan 86,75. Angka tersebut belum mencapai target. Pada tahun 2019, target APM tingkat SMP/MTs/ Paket B adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2019 adalah 86,75%.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2015-2019 berturut-turut adalah sebagai berikut; 71,53; 71,71; 72,4; 73,00; dan 72,93. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, target APM tingkat SMA/MA/Paket C adalah 100% sedangkan angka riil berdasarkan data BPS tahun 2019 adalah 72,93%.

Tabel 2.21.

Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2015-2019

No	Uraian	Angka Partisipasi Murni (Persen)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/Sederajat	95,64	95,75	96,09	96,19	96,78
2	SMP/Sederajat	84,78	84,99	85,32	86,00	86,75
3	SMA/Sederajat	71,53	71,71	72,40	73,00	72,93
4	Perguruan Tinggi	21,61	21,80	22,78	24,06	N/A

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Bali dari tahun 2016 sampai dengan 2010 menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2018, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebesar 4,4 turun dari tahun 2017

sebesar 4,8 dan tahun 2016 yang mencapai 6,01 per 1000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2019, AKB Provinsi Bali adalah 4,97 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 5,0.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

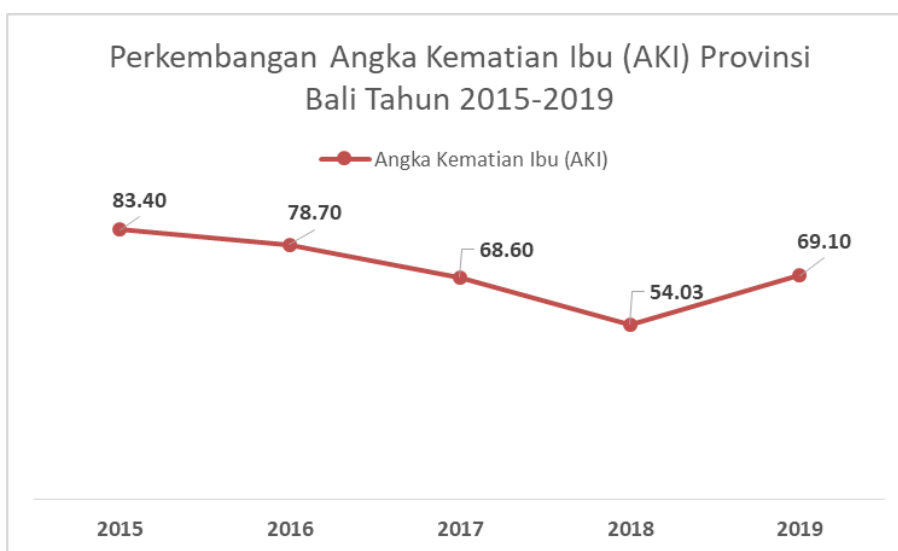
Gambar 2.13.

Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. AKI di Provinsi Bali dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sudah mencapai target kurang dari 102/100.000 Kelahiran Hidup. Namun demikian, trendnya sangat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Di tahun 2017 terjadi penurunan AKI dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 68,6/100.000 Kelahiran Hidup sedangkan pada tahun 2016 sebesar 78,7/100.000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2018 AKI Provinsi Bali menurun drastis menjadi 54,03/100.000 kelahiran hidup namun pada tahun 2019 berdasarkan data

Dinas Kesehatan Provinsi Bali, AKI Provinsi Bali meningkat menjadi 69,10/100.000 kelahiran hidup. Meskipun meningkat, angka ini sudah memenuhi target dari Dinas Kesehatan yaitu 69/100.000 kelahiran hidup. Namun demikian tetap diupayakan AKI setiap tahunnya dapat diturunkan.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2020

Gambar 2.14.

Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019

c. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya umur harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan

baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan angka yang diterbitkan BPS.

Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Bali selama selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2015, UHH Provinsi Bali tercatat sebesar 71,35 Tahun. Angka usia ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020, UHH Provinsi Bali adalah sebesar 72,13 Tahun. UHH tahun 2020 ini sudah melampaui target dalam RPJMD Semesta Berencana 2018-2023. Pada tahun 2020, target UHH yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah 72 tahun.

Apabila dibandingkan dengan UHH Nasional, UHH Provinsi Bali masih lebih tinggi. UHH Nasional tercatat sebesar 71,47 Tahun. UHH Provinsi Bali juga tercatat lebih tinggi dari UHH provinsi sekitar, seperti Jawa Timur dengan UHH 71,30 Tahun dan NTB dengan UHH 66,51 Tahun.

Apabila diperinci pada masing-masing kabupaten/kota, UHH tertinggi terdapat di Kabupaten Badung yaitu sebesar 75,10 Tahun dan Kota Denpasar yaitu 74, 82 Tahun. UHH di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar bahkan lebih tinggi dari UHH penduduk Provinsi DKI Jakarta yaitu 72,91 Tahun. UHH terendah terdapat di Kabupaten Karangasem yaitu 70,42 tahun dan Kabupaten Bangli yaitu 70,52 tahun.

Tabel 2.22.

Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

No	Wilayah	Umur Harapan Hidup (UHH)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jembrana	71,57	71,70	71,91	72,21	72,35
2	Tabanan	72,89	73,03	73,23	73,53	73,65
3	Badung	74,42	74,53	74,71	74,99	75,10
4	Gianyar	72,95	73,06	73,26	73,56	73,68
5	Klungkung	70,28	70,45	70,70	71,06	71,25
6	Bangli	69,69	69,83	70,05	70,37	70,52
7	Karangasem	69,66	69,85	70,05	70,35	70,47
8	Buleleng	70,97	71,14	71,36	71,68	71,83
9	Kota Denpasar	74,04	74,17	74,38	74,68	74,82
10	Provinsi Bali	71,41	71,46	71,68	71,99	72,13

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

d. Persentase Balita Gizi Buruk

Jumlah balita gizi buruk di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016 sampai 2020. Pada tahun 2016, jumlah balita gizi buruk sebanyak 102 balita terus meningkat menjadi 152 balita pada tahun 2020.



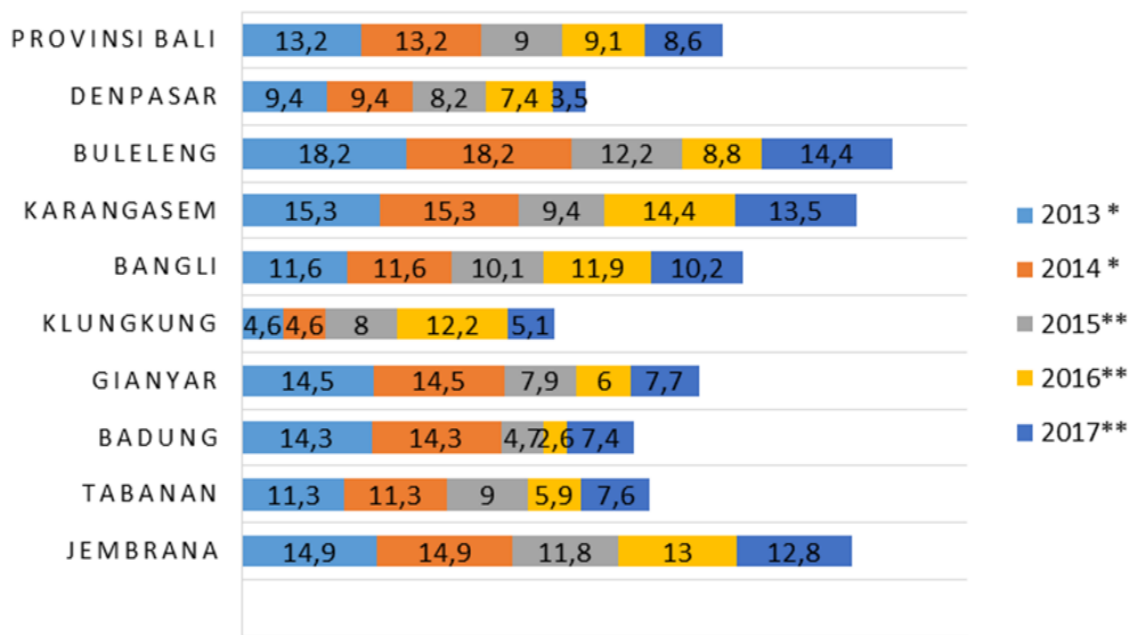
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.15.

Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

e. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang di Provinsi Bali selama periode 2013 sampai 2017, yaitu 13,2%, 13,2%, 9%, 9,1%, dan 8,6%. Prevalensi balita gizi kurang tertinggi pada tahun 2017 ada di Kabupaten Buleleng dengan 14,4%. Prevalensi balita gizi kurang terendah pada tahun 2017 ada di Kota Denpasar , yaitu 3,5%.



Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Bali, 2017

Gambar 2.16.

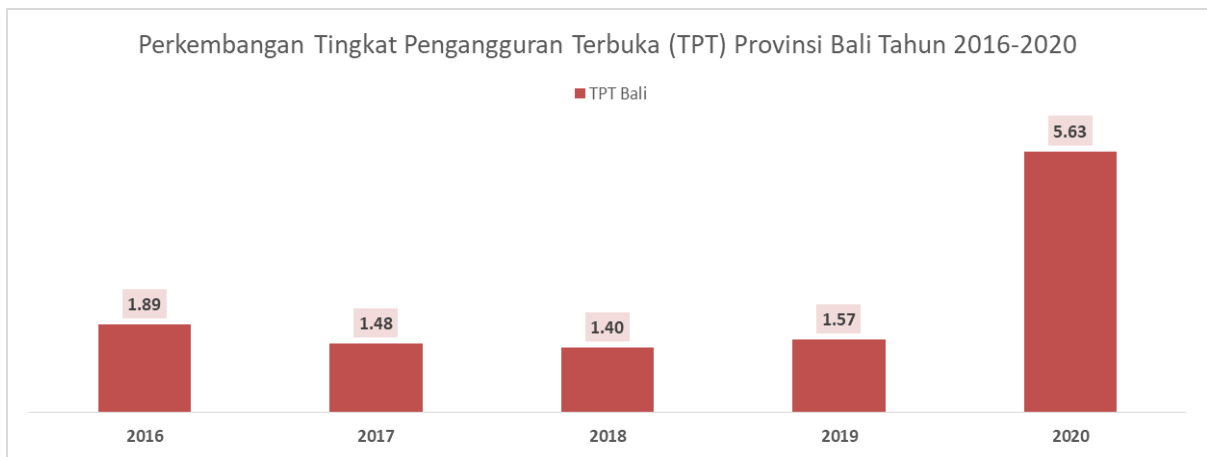
Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2013-2017

3. Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali pada tahun 2019 belum melampaui target. Target TPT Provinsi Bali tahun 2019 adalah 1,28% sedangkan berdasarkan data riil BPS, TPT Provinsi Bali tahun 2019 adalah 1,57%.

TPT Provinsi Bali meningkat sangat signifikan di tahun 2020 menjadi 5,63%. Peningkatan yang sangat signifikan ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat Bali yang dirumahkan. Jatuhnya sektor pariwisata membuat banyak usaha-usaha di bidang pariwisata seperti hotel, restoran, villa, transportasi, dll mengalami penutupan dengan merumahkan sebagian besar karyawannya. Kondisi ini memberikan andil sangat signifikan terhadap melonjaknya TPT Provinsi Bali di tahun 2020.

Secara grafik akan ditampilkan seperti di bawah ini:



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.17.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali
Tahun 2016-2020

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 tercatat sebanyak 2,57 juta orang (2.566,43 ribu orang), berkurang 1,49 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan berkurangnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga tercatat penurunan sebesar -0,61 persen poin.

Pada Februari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,42 persen, menurun 0,21 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2020 yang tercatat sebesar 5,63 persen, ditandai dengan menurunnya 5,36 ribu orang penganggur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk tingkat pendidikan Diploma I/II/III masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,18 persen.

Pada periode Agustus 2020 - Februari 2021, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja, terutama ada pada Kategori G (Perdagangan) sebesar 1,60 persen poin; Kategori H (Transportasi dan pergudangan) sebesar 1,15 persen poin; Kategori A (Pertanian) sebesar 0,73 persen poin; dan Kategori R,S,T,U (Jasa Lainnya) sebesar 0,59 persen poin. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan serapan utamanya ada pada Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar -3,19 persen poin; dan Kategori I

(Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar -0,69 persen poin.

Pekerja formal tercatat sebanyak 1,07 juta orang (43,93 persen) sedangkan yang bekerja pada kegiatan informal tercatat sebanyak 1,36 juta orang (56,07 persen). Selama periode Agustus 2020 - Februari 2021, pekerja formal naik sebesar 0,63 persen poin.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan merupakan sumber daya utama, penting, dan strategis yang dimiliki oleh Bali. Lahirnya kebudayaan Bali dapat dilihat dan dipahami dari lintasan sejarah panjang. Bali telah dihuni oleh Bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Dari potret perjalanan historis wilayah ini, Bali memiliki komposisi masyarakat dan warisan budaya yang unik, tidak ada satu pun etnis di dunia ini yang persis seperti Bali. Kondisi ini memberi kesan bahwa Bali bukanlah suatu wilayah migrasi yang baru tumbuh. Bukan tempat-tempat orang yang baru bermukim untuk membentuk rumah dan lingkungannya melainkan suatu komunitas yang telah sekian lama menempuh evolusi yang panjang. Keseharian *Krama* Bali dengan budaya yang unik, senantiasa menampilkan kontur budaya lokal dan semua itu menunjukkan bahwa perjalanan Bali telah melewati alur sejarah yang panjang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari sekian banyak temuan arkeologis di berbagai wilayah Bali yang menceritakan tentang masa lalu perjalanan panjang Pulau Bali. Seperti kehidupan pada umumnya, masa lalu Bali direntang dari masa-masa awal kehidupan.

Kebudayaan *Krama* Bali juga tercermin dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali dengan tata kehidupan yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* dan memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang menjadi sumber nilai-nilai tata

kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub dan memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang terikat oleh *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Kehidupan budaya *Krama* Bali juga tercermin dalam pertanian dalam bentuk *Sistem Subak* sebagai manifestasi dari filosofi *Tri Hita Karana*, yang merupakan suatu kearifan lokal dengan budaya sangat tinggi sehingga dikagumi oleh dunia. Sistem *Subak* sebagai suatu sistem pertanian budaya Bali mendapat pengakuan dan perlindungan dari UNESCO, sebagai Warisan Dunia (*World Heritage*).

Daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan *Acropolis* Bedulu, ibukota penting dalam periode Prasejarah dan periode Sejarah Bali adalah situs yang merupakan museum hidup mengenai tampilan tradisi pertanian yang panjang. Ini menunjukkan bukti hidupnya tradisi asketis (*Dharmasunya* di berbagai pasraman/pertapaan), presentasi dari sistem ketatanegaraan klasik (*statecraft*) Bali, dan menyimpan kekayaan artefak serta literasi dari beberapa periode.

Hal itu menunjukkan bahwa, dalam alur sejarah panjang kehidupan *Krama* Bali, kebudayaan merupakan bagian dari keseharian hidupnya, yang dilakukan secara aktif, baik individu maupun kolektif, sehingga kebudayaan Bali terus hidup dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman.

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, telah menjadikan Bali pulau yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan *mataksu* yang menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, di dalam *Lontar Mpu Kuturan* disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali.

Oleh karena itu, kiranya tepat masyarakat dunia, bahkan pemimpin dunia memberi berbagai julukan atau sebutan untuk

Bali, yaitu: *The Island of Gods* (Pulau Dewata), *The Island of Thousand Temple* (Pulau Seribu Pura), *The Morning of the World* (Mentari Pagi di Pulau Bali atau Paginya Dunia), *The Paradise Island* (Pulau Surga), *The Last Paradise* (Surga Terakhir di Bumi), dan *The Island of Love* (Pulau Cinta).

Kondisi seni budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik, penyelenggaraan *event-event* seni budaya selalu banyak diminati masyarakat Bali. Hal ini banyak dilatarbelakangi oleh budaya Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus berlangsung di Bali.

Pusat kegiatan seni budaya di Bali selain berada di Banjar/Desa Adat/Pakraman juga banyak bermunculan dari sanggar-sanggar tari dan budaya yang lokasinya banyak tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Jumlah kelompok kesenian di Provinsi Bali Pada tahun 2021 adalah sebanyak 11.851 kelompok, serta jumlah gedung keseniannya sebanyak 8 gedung.

Tabel 2.23.

Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali
Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Gedung Kesenian/Pertunjukkan	Grup Kesenian
1	Karangasem	Gedung Kesenian Amlapura	756
2	Klungkung	Gedung Kesenian Bali Budaya Ida I Dewa Agung Istri Sania	1.860
3	Bangli	Gedung Kesenian Sasana Budaya Giri Kusuma	1.190
4	Gianyar	Gedung Kesenian Bali Budaya	1.113
5	Badung	Gedung Kesenian Jaba Pura Lingga Buana	3.327
6	Denpasar	-	588
7	Tabanan	Gedung Kesenian Ketut Mario	1.078
8	Buleleng	Gedung Kesenian Gede Manik	960

No	Kabupaten/Kota	Gedung Kesenian/Pertunjukkan	Grup Kesenian
9	Jembrana	Gedung Kesenian Jagat Nata	976
Jumlah		8 gedung	11.851

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2021

Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah cabang olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 47 cabang olahraga. Sedangkan untuk jumlah gedung olahraga/stadion di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 31 gedung.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Bidang Pendidikan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali, Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan secara berjenjang mulai dari tingkat Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara Gratis (Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Mendirikan Pendidikan berbasis Keagamaan Hindu: PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dalam bentuk *Pasraman* (formal, nonformal, dan informal) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.

Fokus yang akan dituju di Bidang Kesehatan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan *Krama* Bali. Pengembangan sistem dan *data based* riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan *Krama* Bali berbasis Kecamatan yang terintegrasi (RS milik Pemda dan Swasta) di seluruh wilayah Bali

Provinsi Bali memiliki luas daratan sebesar 5.636,66 Km², yang dibagi dalam 9 daerah kabupaten/kota dan 57 kecamatan. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah daratan terluas, yaitu 1.365,88 Km² (± 24,25%) dan Kota Denpasar memiliki luas wilayah terkecil yaitu 127,78 Km² (± 2,20%). Perkembangan wilayah di

Provinsi Bali masih menampakkan adanya kesenjangan perkembangan antarwilayah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian sekitar 67% PDRB Bali disumbangkan oleh wilayah pembangunan Bali Selatan dan sisanya 33% disumbangkan oleh wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur. Pembangunan pada beberapa wilayah/kawasan dilakukan tanpa mengikuti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini disebabkan masih lemahnya penerapan sanksi hukum berkenaan dengan pelanggaran rencana tata ruang serta belum tegasnya peraturan perundangan tentang rencana rinci dan detail tata ruang. Di samping itu masih belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang baik dalam perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun dalam bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Bali secara umum relatif terkendali. Namun beberapa tahun belakangan ini berbagai tindakan kriminal cenderung meningkat di masyarakat sehingga keamanan tetap masih mengalami gangguan. Konflik sosial dan adat sering terjadi di berbagai tempat, yang dapat meresahkan masyarakat sehingga mereka belum bisa menikmati hidup tenteram. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini tampaknya berkurang, karena meningkatnya tindakan-tindakan pelanggaran dan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.

Pembangunan bidang sosial terkait erat dengan kualitas hidup manusia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia tetap menjadi perhatian penting, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan.

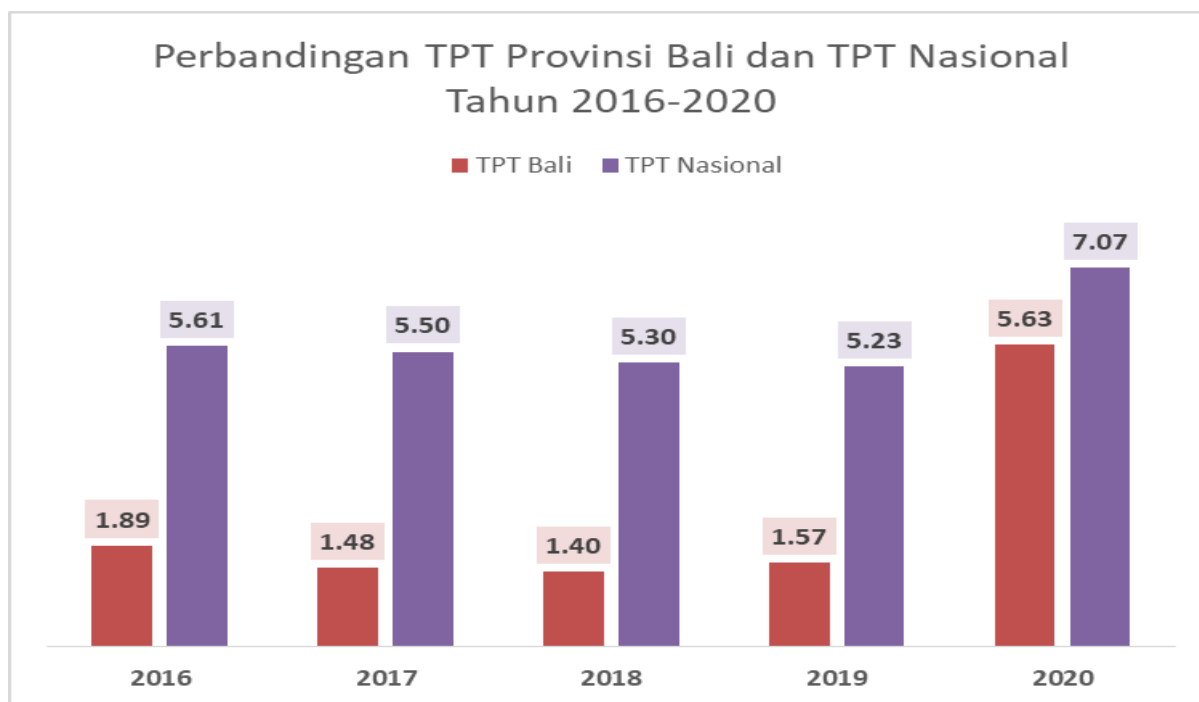
B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tingkat kesempatan kerja merupakan suatu ukuran yang menunjukkan proporsi orang yang bekerja dalam angkatan kerjanya. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali meningkat sangat signifikan di tahun 2020 menjadi 5,63%. Peningkatan yang sangat signifikan ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat Bali yang dirumahkan. Jatuhnya sektor pariwisata membuat banyak usaha-usaha di bidang pariwisata seperti hotel, restoran, villa, transportasi, dll mengalami penutupan dengan merumahkan sebagian besar karyawannya. Kondisi ini memberikan andil sangat signifikan terhadap melonjaknya TPT Provinsi Bali di tahun 2020.

Meskipun TPT Provinsi Bali mengalami peningkatan sangat signifikan, namun masih berada di bawah TPT nasional. Tahun 2020, TPT nasional tercatat sebesar 7,07% sedangkan Provinsi Bali 5,63%. Apabila ditarik 5 tahun ke belakang, TPT Provinsi Bali selalu berada jauh di bawah TPT Nasional. Sebelum tahun 2020, TPT Provinsi Bali tidak pernah melewati angka 2%, tertinggi hanya 1,89% di tahun 2016 dengan perbandingan TPT nasional sebesar 5,61%.

TPT Provinsi Bali tahun 2020 juga sangat jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Tahun 2020, target TPT Provinsi Bali adalah hanya 1,17% dan diharapkan tahun 2023 menurun menjadi 0,9%. Diharapkan dengan adanya stimulasi ekonomi bagi dunia usaha dan pembukaan zona hijau pada beberapa kawasan pariwisata di Provinsi Bali tahun 2021, TPT Provinsi Bali dapat menurun secara perlahan



Sumber: BPS Tahun 2021

Gambar 2.18.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

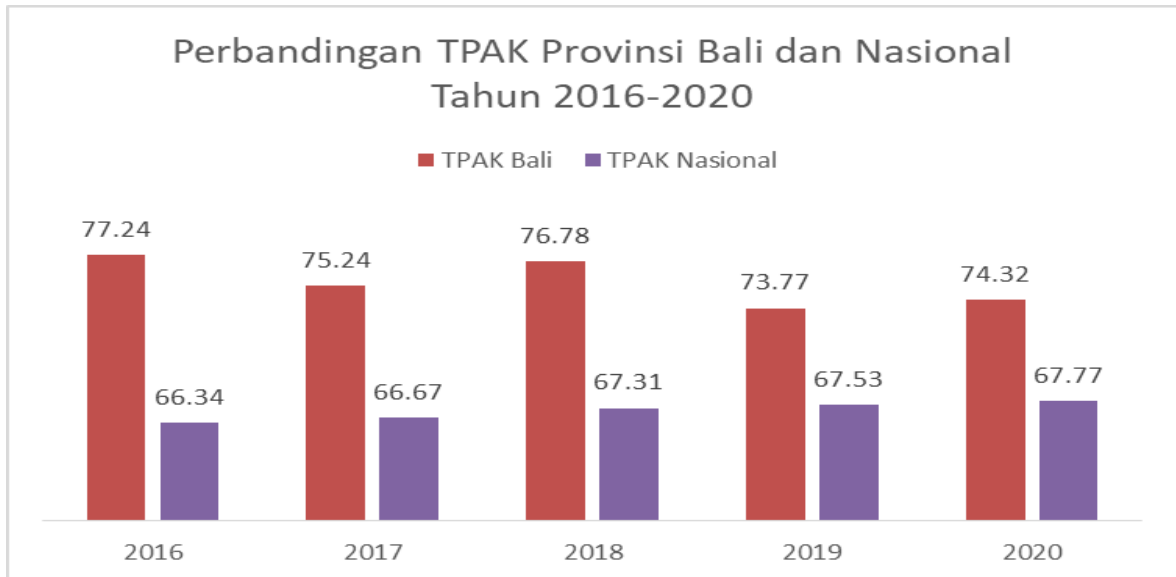
Angka atau tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Bali cenderung fluktuatif selama kurun waktu 2016-2020. Tahun 2016 angka partisipasi angkatan kerja sebesar 2.463.039 jiwa, meningkat menjadi 2.434.450 jiwa pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.535.355 jiwa. Pada tahun 2019, angka partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali adalah 2.428.679 jiwa.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Bali pada tahun 2016 sebesar 77,24% namun menurun di tahun 2017 menjadi 75,24%. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 76,78% dan kembali menurun tahun 2019 menjadi 73,77%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 74,32%.

TPAK Bali tahun 2020 masih belum mencapai target dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Target TPAK tahun 2020 Provinsi Bali adalah 76,03%.

Bila dibandingkan dengan nasional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali selalu berada di atas rata-rata nasional selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2020, TPAK nasional tercatat sebesar 67,77% berbeda 6,55 poin dengan

Provinsi Bali. Gap tertinggi antara TPAK nasional dengan TPAK Provinsi Bali terjadi pada tahun 2016 dengan gap 10,90 poin dimana nasional 66,34% sedangkan Provinsi Bali 77,24%.

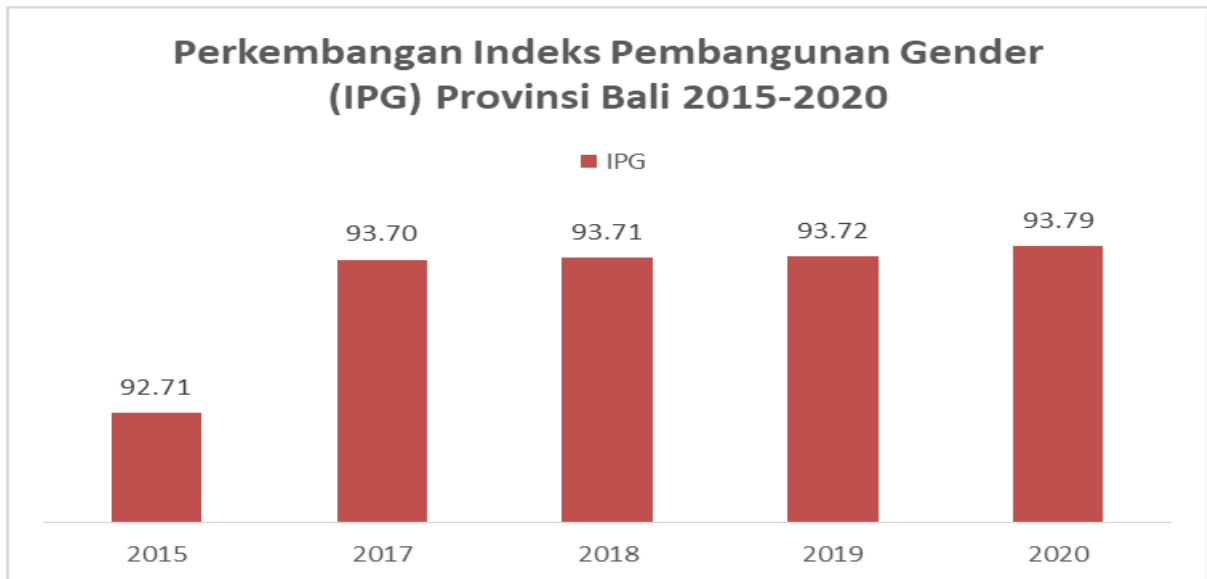


Sumber: BPS Tahun 2021

Gambar 2.19.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Nasional dan Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG). Indikator ini dapat dipakai dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada Tahun 2015 capaian IPG Provinsi Bali mencapai 92,71 dan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 mencapai 93,79. Hal ini menunjukkan capaian IPG yang cukup bagus berada di atas rata-rata nasional.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.20.

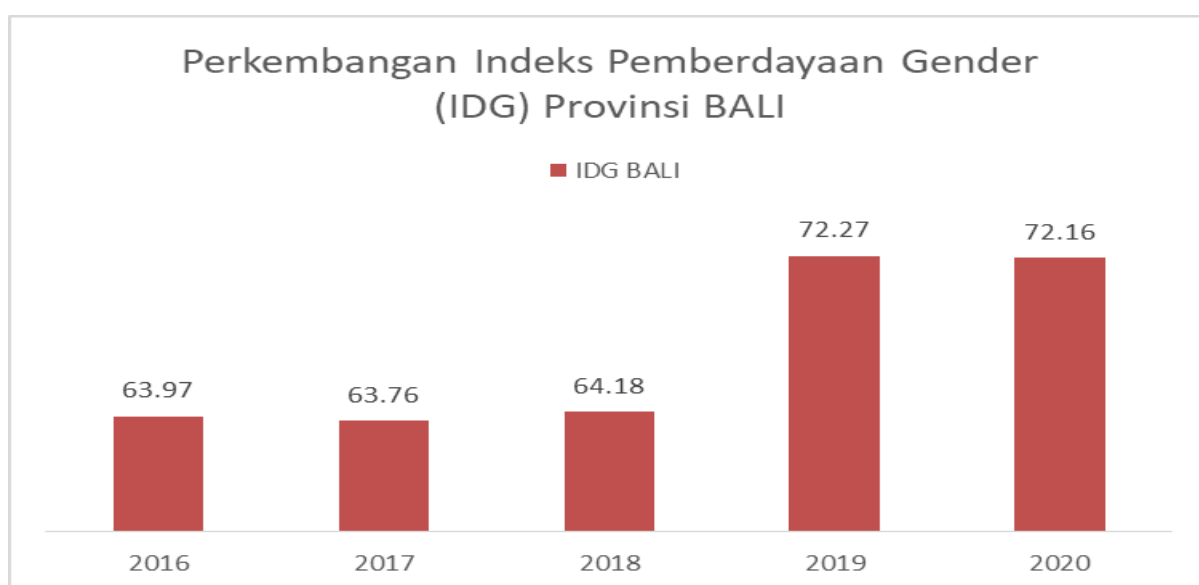
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Bali
Tahun 2015-2020

Selain IPG indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja pemerintah daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Provinsi Bali selama tahun 2016-2020 menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, masih berada dibawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi se Pulau Jawa dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan yang lambat, bahkan sempat turun pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, IDG Provinsi Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2018 menjadi 72,27 sedangkan IDG Nasional pada tahun yang sama adalah 75,24.

Jika diperbandingkan dengan beberapa Provinsi se Pulau Jawa-Bali pada tahun 2020, maka nampak posisi Provinsi Bali masih berada dalam posisi yang cukup baik terkait dengan IDG-nya. IDG Provinsi Bali berada di atas IDG Provinsi Jawa Barat,

Jawa Tengah, dan Banten. Provinsi dengan IDG paling rendah di Pulau Jawa pada tahun 2020 adalah Banten dengan angka 68,76 sedangkan tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu 75,16. Artinya para perempuan Bali dalam hal kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi, masih lebih baik dari para perempuan di beberapa provinsi se-Pulau Jawa.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.21.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Pembangunan yang berkaitan dengan pangan, mulai dari hulu sampai ke hilir berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk: kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk ekspor. Jumlah produksi beras petani Bali mengalami penurunan pada tahun 2018-2019. Pada tahun 2018, jumlah produksi beras Bali adalah sebesar 667.069 ton, dimana Kabupaten Tabanan, Badung, dan Gianyar merupakan penyumbang terbesar.

Luas panen padi pada 2020 sebesar 90.981 hektar, mengalami penurunan sebanyak 4.339 hektar atau 4,55% dibandingkan 2019 yang sebesar 95.319 hektar. Produksi padi pada 2020 sebesar 532.168 ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan

sebanyak 47.152 ton atau 8,14% dibandingkan 2019 yang sebesar 579.321 ton GKG.

Jika dilihat menurut subround, terjadi penurunan produksi padi pada subround Januari-April dan Mei-Agustus 2020, yaitu masing-masing sebesar 44.566 ton GKG (24,38%) dan 3.833 ton GKG (1,84%) dibandingkan 2019. Peningkatan hanya terjadi pada subround September-Desember, yakni sebesar 1.247 ton GKG (0,66%).

Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 sebesar 298.573 ton, mengalami penurunan sebanyak 26.455 ton atau 8,14% dibandingkan 2019 yang sebesar 325.028 ton.

Potensi produksi padi pada subround Januari-April 2021 diperkirakan sebesar 253.780 ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 115.572 ton atau 83,62% dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 138.208 ton GKG.

Ketiga nilai produksi ini apabila merujuk pada target RPJMD Semesta Berencana di tahun yang sama belum mencapai target. Pada tahun 2020, target ketersediaan padi adalah 851.523 ton, jauh di atas realisasi produksinya. Target realisasi ketersediaan padi pada tahun 2021 adalah 853.523 ton.

Realisasi ketersediaan jagung mengalami penurunan dari 66.355 ton pada tahun 2014 menjadi 43.892 ton pada tahun 2018. Realisasi ketersediaan jagung belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 dan 2016 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, target realisasi ketersediaan jagung adalah 45.000 ton.

Realisasi ketersediaan kedelai selama kurun waktu 2014 sampai 2015, sebesar 5.550 ton, 7.259 ton, dan 6.990 ton. Selama kurun waktu 2014 sampai 2015, ketersediaan kedelai belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi ketersediaan kedelai adalah 2.500 ton, jauh menurun dari tahun tahun sebelumnya. Target realisasi kedelai tahun 2021 adalah 2.653 ton.

Realisasi ketersediaan kacang tanah pada tahun 2014 sebesar 13.010 ton dan meningkat menjadi 66.608 ton pada tahun 2015,

namun mengalami penurunan menjadi 6.537 ton pada tahun 2016. Pada tahun 2016, ketersediaan kacang tanah belum mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2018, realisasi kacang tanah adalah 4.408 ton, jauh menurun dari tahun tahun sebelumnya. Target realisasi kacang tanah tahun 2021 adalah 4.778 ton.

Realisasi ketersediaan ubi kayu selama tahun 2014 sampai 2016, sebesar 163.741 ton, dan 87.599 ton. Selama kurun waktu tersebut, realisasi ketersediaan ubi kayu belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi ketersediaan ubi kayu di Provinsi Bali adalah 53.267 ton, jauh menurun dari tahun tahun sebelumnya. Target realisasi tahun 2021 adalah 55.000 ton.

Realisasi ketersediaan kacang hijau stagnan selama kurun waktu 2014 sampai 2016 yaitu sebesar 1 ton. Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi kacang hijau adalah 170 ton dan target tahun 2021 adalah 177 ton.

Realisasi ketersediaan ubi jalar mengalami penurunan mulai dari 70.318 ton pada tahun 2014 menjadi 30.478 ton pada tahun 2016. Realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, realisasi ubi jalar adalah 25.042 ton dan target tahun 2019 adalah 26.575 ton.

Jumlah tanah yang tercatat di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 4.592 bidang tanah dengan luas 2.856,9 ha dan senilai 2,879 triliun rupiah. Dari total tanah tersebut, sebanyak 1.675,3 ha sudah bersertipikat dan 1.181,6 ha belum bersertipikat. Jumlah bidang tanah terbesar Provinsi Bali ada di Kabupaten Badung dengan 1.042 bidang tanah. Dari jumlah bidang tersebut, tercatat 1.027 bidang tanah telah bersertipikat dan 15 bidang tanah belum bersertipikat. Dari sisi luas tanah terbesar ada di Kabupaten Karangasem, yaitu 5.611.030,40 m². Dari sisi nilai tanah terbesar ada di Kota Denpasar dengan nilai 1,696 triliun rupiah. Pola pemanfaatan tanah yang paling banyak di Provinsi Bali, yaitu dengan pola pinjam pakai sebanyak 416. Sedangkan, untuk sewa sebanyak 185 dan kerjasama pemanfaatan sebanyak 10.

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali sebagai suatu ekosistem pulau mempunyai peranan penting dalam perekonomian Bali. Kondisi umum yang akan diuraikan meliputi kondisi eksisting sumberdaya hutan, biodiversitas, Daerah Aliran Sungai (DAS), air bawah tanah, ruang terbuka hijau, erosi dan longsor, pencemaran air dan pencemaran lingkungan lainnya, sumberdaya pesisir dan lautan, serta intrusi air laut dan sumberdaya tak terbarukan. Wilayah Bali tengah merupakan daerah resapan air bagi Bali Utara dan Selatan. Namun, daerah tersebut sangat rawan mengalami kerusakan yang disebabkan oleh meningkatnya bahaya erosi dan longsor. Kemiringan lereng daerah tersebut tergolong curam berkisar antara 15-40% bahkan sampai lebih dari 45%, jenis tanahnya andosol dan regosol yang peka erosi, serta curah hujan di daerah tersebut cukup tinggi berkisar 2.500-3.000 mm per tahun. Penutupan vegetasi yang jarang dan banyaknya pertanian tanaman pangan dengan konservasi tanah yang kurang memadai juga dapat mempercepat kerusakan lahan dan meningkatnya sedimentasi.

Pembangunan yang berkaitan dengan tradisi, seni, dan budaya dari hulu sampai ke hilir, berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan Kebudayaan Bali yang meliputi: perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi, seni, dan budaya Krama Bali. Kebudayaan Bali merupakan salah satu bagian dari kebudayaan nusantara yang sangat unik dan memiliki jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Nilai-nilai universal, seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Bali yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang menganut agama Hindu. Konsep spiritual yang kuat membuat kebudayaan Bali menjadi unik dan terkenal di seluruh dunia. Mengingat kebudayaan Bali seperti juga kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya mengalami transformasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, demografi, ekonomi dan ekologi maka masyarakat Bali yang semula bersifat homogen dan

mayoritas penduduk beragama Hindu kini mengalami perubahan, sehingga cenderung bersifat heterogen yang terdiri atas multi-etnik, multiagama dan sistem kepercayaan, serta multikultur.

Fokus pengembangan infrastruktur merupakan perwujudan dari sistem interkoneksi antar-Kabupaten/Kota untuk pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Dengan demikian, semestinya dilihat sebagai perwujudan dari berbagai ragam interkoneksi, mulai dari yang berupa fisik ekologis yang umumnya bersifat tersedia (*given*), interkoneksi buatan (Interkoneksi teknologi), berupa jaringan prasarana wilayah, seperti jalan, irigasi, dan telekomunikasi, dan kemudian memicu atau mendukung mewujudnya interkoneksi yang disebutkan terakhir akan mempengaruhi interkoneksi buatan, dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pula interkoneksi fisik ekologis. Pola keterkaitan itu berlangsung secara berkesinambungan dan bersifat sangat dinamis.

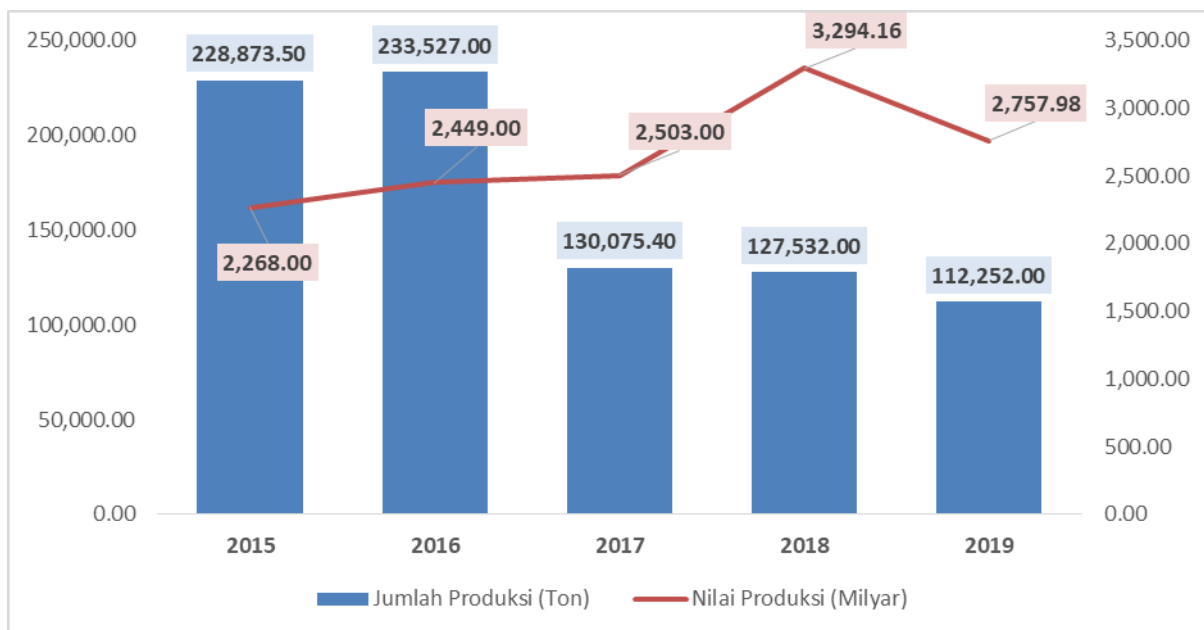
C. Urusan Pemerintahan Pilihan

Optimalisasi sektor perikanan sebagai pendukung perekonomian Bali perlu ditingkatkan karena ekspor hasil perikanan sangat menjanjikan bagi perolehan devisa Bali ke depan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, secara keseluruhan jumlah produksi ikan (perikanan laut dan perikanan darat) selama tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2015 jumlah tangkapan atau produksi ikan di Provinsi Bali adalah sebesar 228.873,5 ton dengan nilai produksi Rp 2.268 milyar. Tahun 2016 meningkat menjadi 233.527 ton dengan produksi senilai 2.449 milyar rupiah. Pada tahun 2017 produksi perikanan adalah sebesar 130.075,4 ton atau turun 44,30% dibandingkan tahun 2016.

Meskipun pada tahun 2017 jumlah produksi ikan menurun tajam, nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 2,2% dari Rp2.449 milyar tahun 2016 menjadi Rp2.503 milyar tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah produksi ikan di Provinsi Bali adalah 127.532 ton atau 1,96% dari tahun 2017. Meskipun pada

tahun 2018 jumlah produksi ikan menurun tajam, nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 7,03% dari tahun 2017 menjadi Rp2.679 milyar. Pada tahun 2019 baik produksi maupun nilai produksi perikanan Provinsi Bali mengalami penurunan menjadi 112.252 ton dengan nilai produksi 2.757,98 milyar rupiah.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.22.

Jumlah Produksi Ikan dan Nilai Produksi Ikan di Provinsi Bali Tahun 2015-2019

Pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek, yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Dalam konteks pariwisata berkualitas, yang menjadi sasaran wisatawan adalah: wisatawan yang waktu tinggalnya lebih lama, wisatawan yang berbelanja lebih banyak, wisatawan yang peduli lingkungan dan kebudayaan, wisatawan yang memberdayakan sumber daya lokal (tenaga kerja lokal, komoditas lokal, produk lokal, investasi lokal).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali, kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Tingginya kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan

minum, tidak terlepas dari tingginya *share* lapangan usaha tersebut. Pada tahun 2015, *share* sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Bali adalah 23,01% atau hampir seperempatnya. Pada tahun 2019, persentase *share* sektor ini meningkat menjadi 23,26% atau lebih dari separuh ekonomi Bali ditopang oleh Sektor Pariwisata.

Tabel 2.24.

Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian
Provinsi Bali Tahun 2016-2020.

No	Tahun	Share (%)
1	2016	22,87
2	2017	23,49
3	2018	23,38
4	2019	23,27
5	2020	18,37

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2021

Untuk pengembangan produksi tanaman pangan, potensi/sumberdaya alam yang dimiliki berupa tanah dan air sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan produksi tanaman pangan hanya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas tanah. Sebaliknya, upaya melalui ekstensifikasi sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami dinamika yang cukup menarik. Pada tahun 2015-2019, *share* sektor pertanian mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar 14,65% dan tahun 2019 menjadi hanya 13,45%. Namun pada tahun 2020, besarnya *share* sektor pertanian mengalami peningkatan yang cukup baik menjadi 15,09%.

Selain itu, perkebunan mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Bali. Apalagi perkebunan di Bali merupakan perkebunan rakyat. Peningkatan kualitas dan produksi hasil perkebunan adalah salah satu tujuan

pembangunan sub sektor perkebunan. Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di Bali adalah kelapa, kopi, cengkeh, vanili, dan jambu mete.

Dalam bidang Peternakan, ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong, dan itik.

Berdasarkan data BPS tahun 2021, pada tahun 2020 terjadi penurunan pada populasi ternak di Provinsi Bali. Ternak-ternak yang didata populasinya adalah berupa sapi potong, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Tahun 2020, jumlah populasi ternak secara total adalah 684.202 ekor, turun dari tahun 2019 dengan populasi sebesar 1.283.182 ekor. Penurunan jumlah ternak terbanyak terjadi pada populasi ternak babi. Pada tahun 2019 jumlahnya tercatat sebesar 690.379 ekor, menurun drastis tahun 2020 menjadi 86.211 ekor. Penurunan drastis populasi ternak Babi pada tahun 2020 diperkirakan karena terjadinya wabah flu Babi yang melanda Bali yang menyebabkan kematian mendadak ternak babi dalam jumlah yang cukup besar.

Sedangkan untuk ternak-ternak lainnya mengalami peningkatan populasi seperti misalnya populasi sapi potong dan populasi kambing. Populasi kerbau dan Kuda seperti halnya babi, mengalami penurunan populasi namun tidak signifikan.

Tabel 2.25.

Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2018-2020

No	Ternak	Populasi (Ekor)		
		2018	2019	2020
1	Sapi Perah	0	0	0
2	Sapi Potong	526.159	544.955	550.350
3	Kerbau	1.178	2.492	1.390
4	Kuda	181	254	168
5	Kambing	55.769	45.102	46.083
6	Domba	0	0	0
7	Babi	762.409	690.379	86.211

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Ternak lainnya yang juga dikembangkan di Provinsi Bali adalah ternak unggas. Pada tahun 2020, jumlah total populasi unggas di Provinsi Bali tercatat sebanyak 19.900.141 ekor atau meningkat 1,78% dari tahun 2019 dengan total populasi unggas 19.551.113 ekor. Populasi unggas tahun 2020 terdiri dari Ayam Kampung sebanyak 2.817.231 ekor, Ayam Petelur sebanyak 4.668.076 ekor, Ayam Pedaging sebanyak 11.915.534 ekor, dan Itik sebanyak 499.300 ekor.

Tabel 2.26.

Populasi Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2020

No	Unggas	Populasi (ekor)		
		2018	2019	2020
1	Ayam Kampung	3.040.742	2.853.115	2.817.231
2	Ayam Petelur	4.975.545	4.657.290	4.668.076
3	Ayam Pedaging	11.499.099	11.511.225	11.915.534
4	Itik/Itik Manila	495.098	529.483	499.300

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Bali, melalui penetapan SK Menteri Kehutanan, jumlah total luas hutan di Provinsi Bali adalah sebesar 136.815,02 Ha. Total luas hutan ini meliputi 23 Kelompok Hutan dan 30 RTK. Hutan-hutan ini membentang dari Kabupaten Jembrana hingga Kabupaten Karangasem dengan beragam fungsi seperti misalnya Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Taman Nasional, maupun Taman Hutan Raya.

Jumlah lahan kritis cenderung mengalami penurunan mulai dari 44.669,78 ha pada tahun 2013 menjadi 40.568,35 ha pada tahun 2017. Lahan yang telah berhasil direhabilitasi, yaitu sebesar 1,6% pada tahun 2013, 2,72% pada tahun 2014, 2,63% pada tahun 2015, 2,57% pada tahun 2016, dan 1,48% pada tahun 2017.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB pada tahun 2015 adalah Rp1.951,95 milyar dan perlahan mulai meningkat kembali menjadi Rp2.095,83 milyar pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp2.108,90 milyar. Pada tahun 2018, kontribusi sector pertambangan dan

penggalan naik menjadi Rp2.207,44 milyar. Pada Tahun 2019, kontribusi sector ini menjadi Rp2.199,87 milyar atau menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, kembali mengalami penurunan menjadi Rp2.124,28 milyar. Pada tahun 2020, sektor pertambangan dan penggalan hanya menyumbang 0,95% terhadap struktur PDRB Provinsi Bali dimana bila dibandingkan dengan akumulasi tahun 2019 (pertumbuhan c-to-c), terjadi kontraksi pertumbuhan sedalam -4,28%. Atau dengan kata lain, dibandingkan dengan tahun 2019, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan mengalami penurunan -4,28% dalam struktur PDRB Provinsi Bali

Nilai sektor perdagangan ADHB menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp14.713,87 milyar, meningkat menjadi Rp16.209,45 milyar pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi Rp1.854,29 milyar. Pada tahun 2018, nilai sector perdagangan meningkat menjadi Rp19.802,33 milyar. Pada tahun 2019 menjadi Rp21.628,388 milyar yang kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi Rp20.332,76 milyar. Pada tahun 2020, Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 9,07% share terhadap struktur PDRB Provinsi Bali atau menempati urutan keempat setelah Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum (Pariwisata), Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan (Pertanian), dan Sektor Konstruksi. Seperti halnya sektor pertambangan, sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami kontraksi pertumbuhan dari tahun 2019 sebesar -6,95%.

Nilai sektor perindustrian ADHB mengalami peningkatan dari Rp 11.523,80 milyar pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp 12.412,69 milyar pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi Rp 13.024,02 milyar. Pada tahun 2018, nilai sector perindustrian naik menjadi Rp14.238,29 milyar. Pada tahun 2019 kembali naik menjadi Rp15.244,73 milyar namun menurun di tahun 2020 menjadi Rp14.452,96 milyar. Sektor industri pengolahan menempati urutan ke-6 pada pembentuk struktur PDRB Provinsi Bali dengan share sebesar 6,45%. Industri Pengolahan mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar -6,78%.

Pada tahun 2020, hanya ada 3 sektor yang mengalami pertumbuhan positif dalam PDRB Provinsi Bali. Sektor-sektor ini adalah sektor yang dapat menyintas Pandemi Covid-19 dengan baik, yaitu Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan 6,16%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 2,84%, dan terakhir Real Estate tumbuh 0,48%.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Pengeluaran Perkapita

Perekonomian makro Bali selama ini dapat dikatakan tumbuh dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari tren peningkatan angka total PDRB baik berdasarkan komponen lapangan usaha maupun pengeluaran, total PDRB Perkapita, Konsumsi Rumah tangga, proporsi Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB), serta proposi konsumsi pemerintahan. Faktor lain yang menjadi acuan adalah nilai inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan daerah melalui upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Bali. Perkembangan pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015, besar pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Bali tercatat Rp13.078.000, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp14.146.000. Namun, pada tahun 2020, pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Bali menurun menjadi Rp13.929.000. Penurunan ini terjadi karena dampak dari Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi

menurun sehingga ada dorongan untuk membatasi pengeluaran pada masing-masing keluarga terdampak.

Meskipun menurun, pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Bali masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu Rp11.013.000 maupun dengan provinsi sekitar yaitu Jawa Timur dengan pengeluaran perkapita Rp11.601.000 dan Nusa Tenggara Barat yaitu Rp10.351.000.

Bila dirinci berdasarkan jenis kelaminnya, pengeluaran perkapita penduduk laki-laki di Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuannya. Pada tahun 2020, pengeluaran perkapita penduduk laki-laki Provinsi Bali adalah sebesar 16,94 Juta sedangkan penduduk perempuannya adalah sebesar 13,47 Juta.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.23.

Rata-rata Pengeluaran Per kapita di Provinsi Bali Tahun 2015-2020

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar berturut-turut tercatat sebagai dua daerah yang penduduknya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penduduk di kedua wilayah tersebut relatif lebih sejahtera dibanding daerah lainnya.

Pada tahun 2020, pengeluaran perkapita tertinggi dimiliki oleh penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar Rp19.723.000 dan disusul oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp17.503.000. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita terendah dimiliki oleh penduduk Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp10.237.000.

Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2020 mengalami penurunan pengeluaran perkapita. Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar Rp317.000 dari tahun 2019 atau sebesar 2,30%. Sedangkan penurunan terendah terjadi di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp65.000 atau sebesar 0,63%.

Tabel 2.27.

Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
tahun 2016-2020

No	Wilayah	Pengeluaran Perkapita (dalam Rp000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jembrana	11.343	11.468	11.666	11.902	11.790
2	Tabanan	13.800	13.923	14.245	14.608	14.494
3	Badung	16.567	17.063	17.325	17.628	17.503
4	Gianyar	13.766	14.222	14.376	14.623	14.544
5	Klungkung	10.852	11.005	11.318	11.484	11.376
6	Bangli	10.819	10.956	11.160	11.369	11.268
7	Karangasem	9.690	9.833	10.050	10.302	10.237
8	Buleleng	12.814	12.995	13.235	13.780	13.463
9	Kota Denpasar	19.084	19.364	19.698	19.992	19.723
10	Provinsi Bali	13.279	13.573	13.886	14.146	13.929

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

b. Jumlah Konsumsi Kalori

Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan asupan pangan yang dikonsumsi yang menentukan status gizi. Untuk mencapai status gizi yang baik, pangan yang dikonsumsi harus dalam jumlah yang cukup, bermutu dan beragam untuk memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jumlah, mutu dan ragam pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga tergantung pada daya beli rumah tangga tersebut. Semakin tinggi daya beli rumah tangga maka semakin tinggi peluang rumah

tangga tersebut untuk memilih pangan yang baik dari sisi jumlah maupun jenisnya (Mangkuprawira dalam Ariani, 1993).

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai status gizi penduduk adalah jumlah konsumsi kalori dan jumlah konsumsi protein. Semakin tinggi konsumsi kalori dan konsumsi protein, mengindikasikan status gizi yang lebih baik.

Penduduk Provinsi Bali selama periode tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan konsumsi kalori dan konsumsi protein. Konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 2016 sebesar 2.215,85 kkal, tahun 2017 sebesar 2.239,32 kkal, dan 2018 sebesar 2.282,83 kkal. Pada tahun 2019, konsumsi kalori penduduk Provinsi Bali menurun menjadi 2.257,48 kkal. Sedangkan pada tahun 2020, kembali meningkat menjadi 2.293,11 kkal.

Sementara konsumsi protein tahun 2017 juga meningkat menjadi 64,11 gr/hari dari 62,28 gram/hari pada tahun 2016, juga lebih tinggi dari tahun 2015 yang mencapai 61,60 gram/hari. Pada tahun 2018, konsumsi protein penduduk Provinsi Bali kembali meningkat menjadi 65,62 gram/hari. Pada tahun 2019 konsumsi protein meningkat menjadi 65,99 gram/hari dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 66,61 gram/hari.

Tabel 2.28.

Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein
Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2015-2020

No	Tahun	Konsumsi kalori per hari (kkal)	Konsumsi Protein (gr)
1	2015	2.183,09	61,60
2	2016	2.215,85	62,28
3	2017	2.239,32	64,11
4	2018	2.282,83	65,62
5	2019	2.257,48	65,99
6	2020	2.293,11	66,61

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat

kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk.

Penentuan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari menggunakan standar rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018. Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein.

Secara nasional rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2020 sebesar 2.112,06 kkal sudah berada di atas standar kecukupan dan untuk konsumsi protein sebesar 61,98 gram, juga sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein harian.

Begitu pula dengan konsumsi kalori dan protein penduduk Provinsi Bali yang sudah mencapai angka kecukupan gizi tersebut di atas. Pada tahun 2020, rata-rata konsumsi kalori penduduk Provinsi Bali adalah 2.293,11 kkal dan rata-rata konsumsi protein adalah sebesar 66,61 gram.

c. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan kesejahteraan petani secara umum. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang relatif baik. Selama kurun waktu 2015 hingga 2019 tingkat kesejahteraan petani Bali dipandang cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai NTP yang selalu diatas 100. Namun, kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020. Pada tahun 2020, indeks NTP Bali merosot turun menjadi 93,56 yang artinya kesejahteraan petani Bali tahun tersebut menurun.

Indeks NTP Provinsi Bali bulan Mei 2021 tercatat 91,93, turun 0,20 % dibandingkan bulan April 2021 yang tercatat 92,12. Indeks yang diterima petani (It) tercatat turun sedalam 0,65%, lebih dalam dibandingkan penurunan indeks yang dibayar petani (Ib), yang turun sedalam 0,45%.

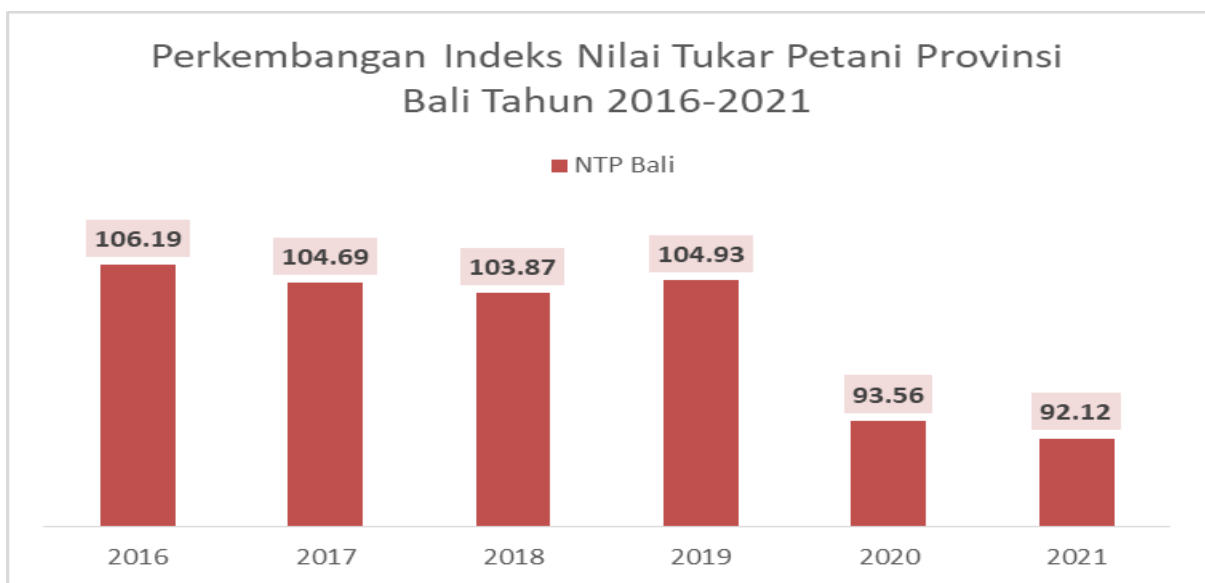
Penurunan indeks NTP pada bulan Mei 2021 tercatat pada hampir semua subsektor, kecuali subsektor tanaman perkebunan

rakyat yang naik setinggi 2,36%. Subsektor yang turun paling dalam, yaitu subsektor hortikultura sebesar 2,47%, disusul subsektor perikanan (-0,76%), subsektor tanaman pangan (-0,52%) dan subsektor peternakan (-0,39%).

Indeks Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Provinsi Bali bulan Mei 2021 turun sedalam 0,97% dari 93,02 pada bulan sebelumnya menjadi 92,12.

Dilihat dari subsektornya, Indeks NTUP pada bulan Mei 2021 tercatat menurun pada hampir semua subsektor kecuali subsektor tanaman perkebunan rakyat yang tercatat naik setinggi 1,69%. Penurunan NTUP terdalam tercatat pada subsektor hortikultura sebesar 3,31 %, disusul subsektor peternakan (-1,25%), serta subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan yang sama-sama turun sedalam 1,24%.

Pada bulan Mei 2021, Provinsi Bali tercatat deflasi perdesaan sebesar 0,82%. Kondisi ini berbeda dengan catatan inflasi perdesaan secara nasional yang tercatat inflasi sebesar 0,22%. Inflasi paling tinggi tercatat di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 1,15% dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,003%.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2021

Gambar 2.24.
Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2016-2021

d. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Pembangunan yang diharapkan dapat membawa penduduk ke arah yang lebih maju masih sering dibarengi dengan tindakan kriminalitas, terutama dari sisi kuantitasnya. Akibatnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu. Sebagian indikator keamanan, pencatatan statistik indikator kriminal menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Sepanjang tahun 2019, jumlah perkara pidana yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali sebanyak 3.844 kasus atau menurun dari tahun 2018 yang mencapai 4.037 kejahatan/tindak pidana yang dilaporkan. Pada bagian lain, jumlah penyelesaian tindak pidana pada tahun 2019 mencapai 82,36% atau meningkat dari tahun 2018 yang persentase penyelesaian tindak pidananya mencapai 75,35%.

BPS Provinsi Bali mencatat terdapat 2.619 perkara pidana yang masuk di Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2019 dimana jumlah perkara pidana yang tertangani adalah sebanyak 2.566 perkara dengan sisa 433 perkara.

Untuk perkara perdata, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Denpasar yang dihimpun oleh BPS Provinsi Bali, pada tahun 2019 terdapat 3.424 gugatan dan 2.329 permohonan yang masuk. Gugatan yang telah diputus tahun 2019 adalah sebanyak 3.229 perkara, dan permohonan yang diputus adalah sebanyak 2.237 perkara.

Jumlah kejadian/kecelakaan lalu lintas berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Bali sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 2.462 kejadian dimana Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu 691 kasus dan Kabupaten Gianyar di posisi kedua dengan 551 kasus.

Dari sisi penyalahgunaan narkoba di wilayah Bali terjadi 830 kasus selama tahun 2019. Angka ini naik dari tahun 2018 yang mencapai 818 kasus.

Pembangunan keamanan Bali harus dirancang dalam konteks untuk memenuhi 3 (tiga) kondisi, yaitu: *pertama*, Bali sebagai suatu wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Hindu dan memiliki kebudayaan tinggi; *kedua*, Bali sebagai suatu wilayah

yang menjadi tujuan wisata dunia; dan *ketiga*, Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menempatkan Bali pada konteks tersebut dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, utamanya guna menghadapi permasalahan dan tantangan yang bersifat lokal, nasional, dan global. Konsep Keamanan Bali berbasis kearifan lokal *Tri Hita Karana* adalah keamanan yang memakai pendekatan komprehensif yang menempatkan keamanan sebagai kebutuhan mendasar guna mendukung terwujudnya: kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa; kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama manusia; dan kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya.

Kebutuhan keamanan yang bersifat mendasar tersebut, harus dirumuskan, dijabarkan, dan diorientasikan dalam perspektif keamanan nasional yang menempatkan keamanan nasional sebagai keamanan manusia bersifat insani (*human security*) yang sejalan dengan keamanan berstandar internasional sebagaimana ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programs), yaitu suatu organisasi dibawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan demikian, konsep pembangunan keamanan Bali di masa yang akan datang, harus dibuat dengan memperhatikan pentingnya perubahan paradigma keamanan dari yang sebelumnya lebih menekankan keamanan negara atau keamanan untuk kepentingan negara semata harus berubah menjadi keamanan yang lebih menekankan kepada kebutuhan manusia yang bersifat insani atau kemanusiaan. Konsep pembangunan keamanan ini sesuai dengan tuntutan nilai-nilai universal dunia Internasional tanpa mengurangi kedaulatan nasional maupun lokal demi menjadikan Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

e. Kondisi Tata Ruang Wilayah

Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat

wilayah. Ketaatan terhadap RTRW dilihat dari persentase di tahun 2010 adalah sebesar 50%, tahun 2011 adalah sebesar 65%, tahun 2012 adalah sebesar 65%, tahun 2013 adalah sebesar 88% dan tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 100%. Pada tahun 2018, kesesuaian pembangunan dengan RTRW adalah 100% dan target tahun 2021 adalah 100%.

Persentase luas wilayah produktif di tahun 2010 adalah sebesar 60%, tahun 2011 sebesar 60%, tahun 2012 dan tahun 2013 masing-masing sebesar 68,85% dan pada tahun 2014 adalah sebesar 68,16%, sedangkan di tahun 2015 adalah sebesar 69,99%.

Persentase luas wilayah industri tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sama, yaitu 0,40%, tahun 2012 adalah sebesar 0,42% tahun 2013 dan tahun 2014 persentasenya juga sama, yaitu 0,43%, untuk tahun 2015 sebesar 0,49%.

Persentase luas wilayah banjir dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar 0,30%, sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,28% dan 0,04%.

Untuk persentase luas wilayah kekeringan di tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sebesar 22,21%, tahun 2012 dan tahun 2013 adalah sebesar 20,27%, sedangkan tahun 2014 adalah sebesar 20,07%, untuk tahun 2015 adalah sebesar 20,27%. Persentase luas wilayah perkotaan tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sebesar 8% dan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar 8,33%, sedangkan di tahun 2015 sebesar 10,16%.

f. Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi terdiri atas sarana prasarana transportasi darat, sarana prasarana transportasi laut, dan sarana prasarana transportasi udara.

1. Transportasi Darat

Jalan dan jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran transportasi darat. Total panjang jalan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali berdasarkan data BPS tahun 2019 adalah 8.582,65 Km dimana terdiri dari Jalan kewenangan nasional (negara) sepanjang

629,39 Km, Jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 743,34 Km, dan jalan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sepanjang 7.209, 92 Km.

Tabel 2.29.

Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Berdasarkan Status (Dalam Km)			
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah
Jembrana	72,62	29,48	1.075,93	1.178,03
Tabanan	65,88	136,72	863,22	1.065,82
Badung	63,47	61,18	663,41	788,06
Gianyar	64,33	85,52	515,24	665,09
Klungkung	37,71	9,34	453,80	500,85
Bangli	21,19	125,14	949,74	1.096,07
Karangasem	97,97	145,98	1.202,54	1.446,49
Buleleng	156,33	106,65	999,95	1.262,93
Denpasar	49,89	43,33	486,09	579,31
Jumlah	629,39	743,34	7.209,92	8.582,65

Sumber: BPS Bali 2021

2. Transportasi Udara

Pada transportasi udara sebagai jaringan transportasi paling vital dalam pembangunan sektor pariwisata Bali di bulan April 2021, jumlah penerbangan internasional tercatat sebanyak 32 unit, naik 3 unit (10,34%) dibandingkan dengan jumlah penerbangan di bulan Maret 2021. Penerbangan Internasional April 2021 didominasi oleh penerbangan tujuan Philipina dan Taiwan masing-masing sebanyak 9 penerbangan, disusul penerbangan tujuan Hongkong sebanyak 4 penerbangan, serta Australia dan Singapura masing-masing sebanyak 2 penerbangan. Jumlah penumpang yang diangkut masih menunjukkan hal yang sama seperti bulan sebelumnya. Tidak ada penumpang internasional yang diangkut dari Bandara Ngurah Rai pada bulan April 2021

Jumlah bagasi dan barang yang diangkut dari Bandara Ngurah Rai pada bulan April 2021 tercatat mengalami penurunan sebesar 17,88 persen (m-t-m) atau turun dari 574,75 ton pada bulan Maret 2021 menjadi 471,97 ton.

Pengiriman bagasi dan barang pada bulan April 2021 tercatat hanya ke tiga negara tujuan, yaitu Taiwan, Philipina, dan Hongkong

Jika dibandingkan dengan bulan April 2020 (y-o-y), jumlah penerbangan internasional pada bulan April 2021 tercatat turun sedalam 72,88 persen. Sementara itu kondisi jumlah bagasi dan barang penerbangan internasional tercatat turun sedalam 29,88 persen dibandingkan dengan keadaan bulan April 2020 (y-o-y) yang mencapai 673,07 ton.

Secara kumulatif Januari-April tahun 2021 jumlah pesawat yang berangkat tercatat sebanyak 128 penerbangan, turun sedalam 98,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 yang mencapai 7.864 penerbangan. Kondisi jumlah keberangkatan penumpang juga mengalami penurunan, bahkan hampir 100 persen, dari 1.348.543 pada periode Januari-April 2020 menjadi hanya 55 penumpang pada periode yang sama di tahun 2021. Jumlah bagasi dan barang internasional yang diangkut ke luar Bali pada periode Januari-April 2021 mencapai 1.800 ton, turun 93,76 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yang mencapai 28.843 ton.

Jumlah penerbangan domestik dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan April 2021 tercatat sebanyak 1.547 penerbangan, atau naik sebesar 6,10% dibandingkan kondisi bulan Maret 2021 (m-to-m) yang mencapai 1.458 penerbangan. Dari sepuluh daerah tujuan utama penerbangan domestik di bulan April 2021, hampir seluruhnya tercatat mengalami kenaikan jumlah penerbangan, kecuali tujuan Bandara Halim Perdana Kusuma (Jakarta) yang tercatat turun sedalam 9,68%. Kenaikan tertinggi tercatat pada penerbangan dengan tujuan Surabaya sebesar 21,39%.

Secara absolut, penerbangan tujuan Soekarno-Hatta (Jakarta) masih tercatat sebagai yang terbanyak pada bulan April 2021 yakni 583 penerbangan, dengan penumpang yang diangkut mencapai 73.753 orang atau 51,82% dari total jumlah penumpang domestik pada bulan April 2021. Selain

tujuan Soekarno-Hatta (Jakarta), daerah tujuan utama penerbangan domestik lainnya dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada April 2021 adalah Surabaya (227 penerbangan), Lombok Praya (107 penerbangan), Labuan Bajo (97 penerbangan), Ujung Pandang (74 penerbangan), Bandung (73 penerbangan), Jkt/Halim Pk (56 penerbangan), Kupang/Eltari (52 penerbangan), Bima (44 penerbangan), Tambolaka (34 penerbangan) dan lainnya sebanyak 200 penerbangan.

Bila dibandingkan dengan bulan April 2020 (y-o-y), jumlah penerbangan domestik tercatat meningkat sebesar 86,39% dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang tercatat sebesar 830 penerbangan (April 2020). Dari sepuluh daerah tujuan utama, kenaikan paling tajam tercatat pada penerbangan dengan tujuan Labuan Bajo yang naik hampir 2 kali lipat.

Dilihat dari jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Bandara Ngurah Rai pada bulan April 2021, tercatat kenaikan sebesar 21,56% (month to month), dari 117.088 orang penumpang pada bulan Maret 2021 menjadi 142.329 orang penumpang. Kenaikan penumpang tertinggi tercatat pada tujuan Bandung yang mencapai 39,78% (month to month), dari 5.038 orang penumpang pada bulan sebelumnya menjadi 7.042 orang penumpang. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (year on year), jumlah penumpang domestik mengalami kenaikan sekitar 2 kali lipat dari sebelumnya 44.201 orang penumpang yang tercatat pada April 2020. Kenaikan terbesar secara y-o-y tercatat pada tujuan Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) dengan kenaikan mencapai 5 kali lipat.

Jumlah bagasi dan barang penerbangan domestik yang diangkut pada bulan April 2021 dibandingkan dengan bulan Maret 2021 (m-t-m) secara umum tercatat meningkat, yaitu sebesar 8,80 %, dari 2.567,04 ton pada bulan Maret 2021 menjadi 2.792,82 ton. Kenaikan ini tercatat pada seluruh tujuan utama penerbangan domestik, dengan persentase kenaikan paling tinggi tercatat pada tujuan Bandara El Tari (Kupang), mencapai 66,34%. Apabila dibandingkan dengan

catatan bulan April 2020 (y-o-y), jumlah bagasi dan barang penerbangan domestik tercatat naik sebesar 120,60%, dengan persentase kenaikan paling tinggi tercatat pada penerbangan tujuan Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta) yang mencapai 155,58%.

Jumlah penerbangan domestik secara kumulatif Januari-April tahun 2021 tercatat sebanyak 5.899 penerbangan, turun sedalam 43,21% dari kondisi periode yang sama di tahun 2020 yang tercatat sebanyak 10.388 penerbangan. Jumlah penumpang penerbangan domestik secara kumulatif pada periode yang sama, turun sedalam 59,06% dari 1.098.372 orang penumpang pada tahun 2020, menjadi 449.644 penumpang pada tahun 2021. Begitu pula dengan jumlah kumulatif bagasi dan barang penerbangan domestik yang diangkut pada tahun 2021 juga tercatat menurun, yaitu sedalam 20,65% jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 (y-o-y).

3. Transportasi Laut

Pada jaringan transportasi laut yang turut memberikan dampak signifikan pada pembangunan ekonomi Bali khususnya pariwisata domestik, pada bulan April 2021, jumlah keberangkatan angkutan laut dari sejumlah pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebanyak 2.124 unit kapal. Bila dibandingkan dengan catatan bulan Maret 2021 (m-t-m), jumlah keberangkatan angkutan laut naik sebesar 3,81%. Kenaikan jumlah keberangkatan angkutan laut tersebut tercatat pada kelompok pelabuhan di luar Benoa-Denpasar yang naik sebesar 4,09%. Sementara itu, kelompok pelabuhan Benoa-Denpasar tercatat stabil. Bila dibandingkan bulan April 2020 (y-o-y), jumlah keberangkatan angkutan laut tercatat naik hampir dua kali lipat dari sebelumnya tercatat 715 unit kapal pada bulan April 2020.

Searah dengan kondisi jumlah keberangkatan angkutan laut yang meningkat secara rn-to-rn, jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat melalui beberapa pelabuhan di Provinsi Bali pada bulan April 2021 tercatat naik 30,99%, yaitu dari

64.635 orang pada bulan Maret 2021 menjadi 84.663 orang. Jika dibandingkan dengan bulan April 2020 (y-o-y), jumlah keberangkatan penumpang angkutan laut tercatat naik hampir 4 kali lipat dari capaian sebelumnya 18.067 pada bulan April 2020.

Jumlah barang yang diangkut melalui pelabuhan laut di wilayah Bali pada bulan April 2021 tercatat naik sebesar 58,77% dibandingkan dengan bulan sebelumnya (m-t-m), dari 33.871,90 ton pada bulan Maret 2021 menjadi 53.776,85 ton. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2020, jumlah barang yang diangkut juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai hampir 2 kali lipat dari sebelumnya yang tercatat 18.763,90 ton.

g. Infrastruktur Lainnya

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten/Kota yang tidak terpusat dalam satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik se-Bali dalam jangka panjang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan pembangkit listrik adalah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik yang murah untuk *Krama* Bali dan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk industri, perdagangan, dan komersial serta pariwisata. Di antaranya pembangkit listrik tenaga air (air laut, air terjun, danau), pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, perlu dibangun/dikembangkan pusat-pusat perekonomian yang baru di antaranya: pembangunan/pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar-Kabupaten/Kota se-Bali, pembangunan industri kreatif berbasis budaya *branding* Bali yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pelebagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pembangunan kawasan perekonomian untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Karangasem,

Tabanan, dan Gianyar, pembangunan taman kunjungan wisata di Kabupaten Jembrana. Mengoptimalkan/menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan. Memperkuat Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat. Pembangunan perekonomian tersebut dilakukan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah se-Bali yang dilakukan melalui investasi dengan skema penyertaan Pemerintah Daerah, swasta, dan pelaku ekonomi lokal Bali. Pembangunan pusat-pusat perekonomian tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) sosial.

Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 2.30**

Tabel 2.30.

Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2022

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN			
1.1	Pendidikan menengah	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
1.2	Pendidikan khusus	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2	KESEHATAN			
2.1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2.2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
3	PEKERJAAN UMUM			
3.1	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	Warga Negara.

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
3.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.	b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	Warga Negara.
4	PERUMAHAN RAKYAT			
4.1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
		2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
4.2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
		2. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
5	TRANTIBUMLIMNAS			
5.1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	100%	warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi.
6	SOSIAL			
6.1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penyandang disabilitas telantar.

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
6.2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.	b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial.	100%	anak telantar.
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Selain melihat konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan, dalam penyusunan perencanaan Tahun 2022 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2020 yang dilakukan berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi RKPD juga dilakukan untuk memastikan dan menilai pencapaian target kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun 2020 dan mengarahkan agar target kinerja program dan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan target dalam RPJMD. Berikut gambaran mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program/kegiatan.

A. Pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD

Evaluasi terhadap hasil RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi;

2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi.

B. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi terhadap RKPD dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing admin Perangkat Daerah menginput capaian kinerja dan realisasi keuangan Program/Kegiatan dalam aplikasi SiDalev setiap triwulan dan menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* laporan paling lambat tanggal 10 pada triwulan berkenaan.

C. Instrumen Evaluasi terhadap Hasil RKPD

Instrumen yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi RKPD adalah formulir E.53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan triwulan IV Tahun 2020 dari masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 diatas, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan formulir E.53.

Formulir E.53 memuat beberapa poin penting yaitu nama program/kegiatan, indikator program/kegiatan, jumlah anggaran dan target capaian indikator, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan semester I maupun secara kumulatif. Skala nilai peringkat kinerja dengan menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.31.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil rendah dan sangat rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

D. Kesesuaian Jumlah Program RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tahun 2020, dimana terdapat penggabungan Perangkat Daerah dan terbentuknya 2 (dua) perangkat daerah baru, berimplikasi pada jumlah Program dalam RKPD. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020. Ditemukan inkonsistensi jumlah program yang ditetapkan dalam RPJMD dengan jumlah program dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020.

Dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 merancang 282 program yang terdiri dari 63 program urusan

wajib pelayanan dasar, 80 program urusan wajib tidak pelayanan dasar, 54 program urusan pilihan, 78 program penunjang urusan pemerintahan dan 7 program urusan kekhususan. Sedangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dalam tabel 7.2 b untuk periode tahun 2020 merancang 296 program yang terdiri dari 60 program urusan wajib pelayanan dasar, 89 program urusan wajib tidak pelayanan dasar, 64 program urusan pilihan, dan 83 program penunjang urusan pemerintahan, seperti dapat dilihat pada tabel 2.28 berikut ini:

Tabel 2.32.
Kesesuaian Jumlah Program RKPD Tahun 2020 dengan
RPJMD SB Tahun 2018-2023

NO	URUSAN	RKPD SB PROV. BALI THN 2020	RPJMD SB PROV. BALI UTK PERIODE TAHUN 2020	KETERANGAN
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	63	60	
1	PENDIDIKAN	10	7	
2	KESEHATAN	20	19	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12	12	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	4	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	11	RPJMD termasuk urusan bencana
6	SOSIAL	7	7	
7	BENCANA	5	-	
II	WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR	80	89	
1	TENAGA KERJA	8	8	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3	4	
3	PANGAN	4	7	
4	PERTANAHAN	1	1	
5	LINGKUNGAN HIDUP	6	7	
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	3	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	

NO	URUSAN	RKPD SB PROV. BALI THN 2020	RPJMD SB PROV. BALI UTK PERIODE TAHUN 2020	KETERANGAN
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	1	
9	PERHUBUNGAN	9	9	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	5	
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	9	8	
12	PENANAMAN MODAL	9	7	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2	5	
14	STATISTIK	1	1	
15	PERSANDIAN	1	1	
16	KEBUDAYAAN	8	11	
17	PERPUSTAKAAN	4	4	
18	KEARSIPAN	2	2	
III	URUSAN PILIHAN	54	64	
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	13	
2	PARIWISATA	7	7	
3	PERTANIAN	18	18	
4	KEHUTANAN	8	13	
5	ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1	1	
6	PERDAGANGAN	8	8	
7	PERINDUSTRIAN	3	3	
8	TRANSMIGRASI	1	1	
IV	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	78	83	
1	PERENCANAAN	5	5	
2	KEUANGAN SUB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	5	17	
3	KEUANGAN SUB PENGELOLAAN PENDAPATAN	13		
4	KEPEGAWAIAN	6	4	
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4	5	
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5	2	
7	SEKRETARIAT DPRD	3	3	
8	SEKRETARIAT DAERAH	26	37	RPJMD (9 Biro)
	a. BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5		
	b. BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	6		

NO	URUSAN	RKPD SB PROV. BALI THN 2020	RPJMD SB PROV. BALI UTK PERIODE TAHUN 2020	KETERANGAN
	c. BIRO UMUM DAN PROTOKOL	3		
	d. BIRO HUKUM	4		
	e. BIRO ORGANISASI	4		
	f. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	4		
9	INSPEKTORAT	4	4	
10	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT	2	2	
11	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	5	4	
V	URUSAN KEKHUSUSAN	7	0	
1	PEMAJUAN DESA ADAT DI BALI	7	0	
	JUMLAH PROGRAM	282	296	

E. Capaian Target Kinerja

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung 7 prioritas pembangunan Tahun 2020 dengan melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan adalah 282 program dan 2.279 kegiatan.

Hasil ringkasan dari isian Formulir E.53 dalam aplikasi SiDalev dapat diketahui realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali rata-rata Interval Nilai Realisasi Kinerja sebesar 90,92% katagori “tinggi” yang ringkasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Realisasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2020

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH		PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja Per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			KATEGORI
			PROG	KEG			TW I			TW II			TW III			TW IV			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	
							KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)				
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	9	220	451,536,629,177.00	100.00	22,679,252,116.00	5.02	12.96	28,551,190,615.00	6.32	27.06	77,587,521,945.00	17.18	73.21	99,485,114,580.00	22.03	79.52	228,303,079,256.00	50.56	79.52	T
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	2	18	1,552,104,323.00	100.00	163,172,371.00	10.51	12.37	171,272,409.00	11.03	18.55	778,492,544.00	50.16	62.14	264,953,510.00	17.07	72.22	1,377,890,834.00	88.78	72.22	S
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	1	1	11	438,967,280.00	100.00	104,761,453.00	23.87	15.00	66,510,953.00	15.15	25.56	116,115,109.00	26.45	61.53	146,255,427.00	33.32	63.64	433,642,942.00	98.79	63.64	R
	(INDUK + 2 UPT)	1	12	249	453,527,700,780.00	100.00	22,947,185,940.00	5.06	13.44	28,788,973,977.00	6.35	23.72	78,482,129,598.00	17.30	65.63	99,896,323,517.00	22.03	71.79	230,114,613,032.00	50.74	71.79	S
2	DINAS KESEHATAN	1	10	47	37,458,822,045.00	100.00	3,859,807,948.00	10.30	9.21	6,106,133,309.00	16.30	61.26	9,952,941,156.00	26.57	74.22	9,794,628,648.00	26.15	95.98	29,713,511,061.00	79.32	95.98	ST
	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN	1	1	21	7,968,569,521.00	100.00	454,732,875.00	5.71	25.45	3,841,554,493.00	48.21	66.25	2,159,202,696.00	27.10	80.28	1,357,534,613.00	17.04	95.43	7,813,024,677.00	98.05	95.43	ST
	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	16	2,173,691,940.00	100.00	344,446,667.00	15.85	27.15	685,021,632.00	31.51	51.82	367,259,375.00	16.90	73.75	548,248,978.00	25.22	87.50	1,944,976,652.00	89.48	87.50	T
	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	1	1	18	1,493,459,671.00	100.00	285,400,412.00	19.11	31.72	507,672,136.00	33.99	76.73	272,205,564.00	18.23	83.96	351,053,693.00	23.51	94.44	1,416,331,805.00	94.84	94.44	ST
	UPTD RSUD BALI MANDARA	1	2	30	103,215,418,381.00	100.00	6,681,072,780.00	6.47	23.94	15,821,901,124.00	15.33	60.39	21,789,135,453.00	21.11	78.58	17,779,577,096.00	17.23	97.06	62,071,686,453.00	60.14	97.06	ST
	UPTD RUMAH SAKIT JIWA	1	2	5	35,846,662,562.00	100.00	0,00	0.00	24.70	13,341,840,125.00	37.22	63.66	14,250,923,407.00	39.76	86.77	3,490,451,327.00	9.74	99.43	31,083,214,859.00	86.71	99.43	ST
	UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA	1	2	2	52,861,944,272.00	100.00	1,339,340,232.00	2.53	20.43	22,696,639,176.00	42.94	68.74	8,716,974,477.00	16.49	80.52	14,229,396,110.00	26.92	96.93	46,982,349,995.00	88.88	96.93	ST
	UPTD LABORATORIUM DAN PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL	1	1	20	7,326,646,953.67	100.00	474,255,547.00	6.47	9.31	1,376,106,937.00	18.78	39.27	1,263,100,179.00	17.24	57.96	3,762,497,007.00	51.35	89.28	6,875,959,670.00	93.85	89.28	T

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH		PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja Per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			KATEGORI
			PROG	KEG			TW I			TW II			TW III			TW IV			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	
							KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)				
	(INDUK + 7 UPT)	1	20	159	248,345,215,345.67	100.00	13,439,056,461.00	5.41	21.49	64,376,868,932.00	25.92	61.02	58,771,742,307.00	23.67	77.01	51,313,387,472.00	20.66	94.51	187,901,055,172.00	75.66	94.51	ST
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	12	53	401,847,805,222.85	100.00	3,414,485,024.00	0.85	5.79	153,308,916,285.00	38.15	21.43	10,996,155,448.00	2.74	46.71	204,594,754,426.00	50.91	82.91	372,314,311,183.00	92.65	82.91	T
	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	1	2	17	869,583,550.00	100.00	136,998,088.00	15.75	4.43	222,672,837.00	25.61	41.36	118,338,700.00	13.61	62.47	360,308,827.00	41.43	88.24	838,318,452.00	96.40	88.24	T
	UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM	1	1	2	27,543,594,608.00	100.00	607,940,800.00	2.21	5.22	1,464,536,992.00	5.32	20.22	899,752,384.00	3.27	87.50	28,235,393,391.00	102.51	100.00	31,207,623,567.00	113.30	100.00	ST
	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	1	1	5	29,810,470,891.18	100.00	514,495,342.00	1.73	2.6	843,940,222.00	2.83	11.60	520,207,600.00	1.75	78.00	11,387,161,102.00	38.20	75.00	13,265,804,266.00	44.50	75.00	S
	(INDUK + 3 UPT)	1	16	77	460,071,454,272.03	100.00	4,673,919,254.00	1.02	4.51	155,840,066,336.00	33.87	23.65	12,534,454,132.00	2.72	68.67	244,577,617,746.00	53.16	86.54	417,626,057,468.00	90.77	86.54	T
4	SATPOL PP	1	6	33	22,340,329,136.00	100.00	4,300,034,203.00	19.25	24.71	5,783,079,335.00	25.89	41.25	4,789,168,428.00	21.44	50.31	6,615,202,249.00	29.61	82.54	21,487,484,215.00	96.18	82.54	T
5	DINAS SOSIAL P3A	1	9	41	4,716,037,616.00	100.00	317,425,800.00	6.73	15.11	1,035,030,765.00	21.95	25.38	1,217,895,765.00	25.82	67.48	1,413,025,126.00	29.96	74.89	3,983,377,456.00	84.46	74.89	S
	UPTD PELAYANAN SOSIAL	1	1	19	5,015,180,445.00	100.00	579,892,613.00	11.56	27.30	949,303,017.00	18.93	52.32	670,264,622.00	13.36	78.92	979,240,816.00	19.53	94.68	3,178,701,068.00	63.38	94.68	ST
	(INDUK + 1 UPT)	1	10	60	9,731,218,061.00	100.00	897,318,413.00	9.22	21.21	1,984,333,782.00	20.39	38.85	1,888,160,387.00	19.40	73.20	2,392,265,942.00	24.58	84.79	7,162,078,524.00	73.60	84.79	T
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	4	29	3,572,092,296.00	100.00	795,701,116.00	22.28	20.49	676,590,779.00	18.94	47.33	655,626,417.00	18.35	57.62	1,324,441,651.00	37.08	93.1	3,452,359,963.00	96.65	93.10	ST
	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH	1	1	18	9,737,297,980.00	100.00	1,557,654,459.00	16.00%	24.67	2,176,906,321.00	22.36%	58.94	2,197,953,244.00	22.57%	82.49	3,086,049,936.00	31.69%	100	9,018,563,960.00	92.62%	100.00	ST
	(INDUK + 1 UPT)	1	5	47	13,309,390,276.00	100.00	2,353,355,575.00	17.68	22.58	2,853,497,100.00	21.44	53.14	2,853,579,661.00	21.44	70.06	4,410,491,587.00	33.14	96.55	12,470,923,923.00	93.70	96.55	ST

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH		PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja Per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			KATEGORI
			PROG	KEG			TW I			TW II			TW III			TW IV			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	
							KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)				
7	DISNAKER DAN ESDM	2	7	54	3,468,017,970.00	100.00	880,463,558.00	25.39	6.69	1,159,632,866.00	33.44	41.43	587,501,341.00	16.94	41.83	759,051,778.00	21.89	92.63	3,386,649,543.00	97.65	92.63	ST
	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	2	2	23	609,634,736.00	100.00	93,318,343.00	15.31	9.43	192,205,960.00	31.53	46.30	124,848,581.00	20.48	50.39	188,133,335.00	30.86	82.61	598,506,219.00	98.17	82.61	T
	UPTD HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	2	1	20	398,540,650.00	100.00	67,117,050.00	16.84	16.80	58,904,796.00	14.78	44.60	24,901,031.00	6.25	48.35	238,524,742.00	59.85	75	389,447,619.00	97.72	75.00	S
	(INDUK + 2 UPT)	2	10	97	4,476,193,356.00	100.00	1,040,898,951.00	23.25	10.97	1,410,743,622.00	31.52	44.11	737,250,953.00	16.47	46.86	1,185,709,855.00	26.49	83.41	4,374,603,381.00	97.73	83.41	T
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	12	46	8,878,856,561.00	100.00	1,252,206,419.00	14.10	5.60	3,453,632,597.00	38.90	29.80	1,272,620,612.00	14.33	38.96	2,731,673,014.00	30.77	85.29	8,710,132,642.00	98.10	85.29	T
	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	2	1	18	829,359,770.00	100.00	88,726,789.00	10.70	0.67	353,844,014.00	42.66	38.84	77,316,965.00	9.32	54.73	282,158,524.00	34.02	94.4	802,046,292.00	96.71	94.40	ST
	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	2	1	17	2,143,271,215.00	100.00	416,484,879.00	19.43	20.00	895,568,891.00	41.79	29.41	330,160,513.00	15.40	42.16	387,139,223.00	18.06	100	2,029,353,506.00	94.68	100.00	ST
	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	2	1	13	1,240,914,605.00	100.00	360,756,067.00	29.07	19.23	386,580,064.00	31.15	21.90	160,292,217.00	12.92	32.58	288,522,158.00	23.25	100	1,196,150,506.00	96.39	100.00	ST
	UPTD BIBIT/BENIH PERKEBUNAN	2	1	14	2,089,892,690.00	100.00	822,824,695.00	39.37	8.93	422,285,747.00	20.21	8.93	199,122,158.00	9.53	8.93	637,070,422.00	30.48	100	2,081,303,022.00	99.59	100.00	ST
	UPTD LABORATORIUM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN	2	1	13	1,253,812,231.00	100.00	198,928,266.00	15.87	11.43	521,565,400.00	41.60	30.63	153,784,983.00	12.27	56.13	347,556,560.00	27.72	100	1,221,835,209.00	97.45	100.00	ST
	UPTD PERTANIAN TERPADU	2	2	19	4,910,460,526.00	100.00	818,880,514.00	16.68	12.00	1,741,555,556.00	35.47	23.40	741,036,368.00	15.09	26.03	1,492,843,318.00	30.40	97.66	4,794,315,756.00	97.63	97.66	ST
	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH	2	1	17	2,159,113,347.00	100.00	172,359,507.00	7.98	9.57	865,175,852.00	40.07	37.32	255,219,277.00	11.82	48.17	817,375,478.00	37.86	100	2,110,130,114.00	97.73	100.00	ST

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH		PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja Per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			KATEGORI
			PROG	KEG			TW I			TW II			TW III			TW IV			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	
							KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)				
	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2	1	13	1,283,237,466.00	100.00	342,171,728.00	26.66	11.54	425,192,456.00	33.13	11.54	166,362,028.00	12.96	11.54	338,878,074.00	26.41	100	1,272,604,286.00	99.17	100.00	ST
	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	2	1	12	264,545,466.00	100.00	40,778,084.00	15.41	18.86	77,121,810.00	29.15	21.36	25,978,532.00	9.82	27.2	103,191,990.00	39.01	75	247,070,416.00	93.39	75.00	S
	UPTD BALAI PERBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	2	1	8	305,892,777.00	100.00	18,303,135.00	5.98	6.23	269,350,800.00	88.05	9.25	5,400,000.00	1.77	16.21	9,825,000.00	3.21	100	302,878,935.00	99.01	100.00	ST
	(INDUK + 10 UPT)	2	23	190	25,359,356,654.00	100.00	4,532,420,083.00	17.87	11.28	9,411,873,187.00	37.11	23.85	3,387,293,653.00	13.36	32.97	7,436,233,761.00	29.32	95.67	24,767,820,684.00	97.67	95.67	ST
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2	8	38	10,519,946,597.00	100.00	1,610,994,575.00	15.31	35.79	3,125,006,013.00	29.71	36.44	1,220,651,272.00	11.60	42.44	1,730,720,622.00	16.45	100	7,687,372,482.00	73.07	100.00	ST
10	DINAS PERHUBUNGAN	2	5	29	5,744,697,579.00	100.00	1,299,339,452.00	22.62	18.60	1,143,196,392.00	19.90	36.00	855,448,388.00	14.89	64.09	2,190,666,073.00	38.13	100	5,488,650,305.00	95.54	100.00	ST
	UPTD. PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	2	1	16	823,747,689.00	100.00	111,082,556.00	13.49	25.00	134,276,049.00	16.30	48.44	86,276,984.00	10.47	75.00	487,886,289.00	59.23	100	819,521,878.00	99.49	100.00	ST
	UPTD. TRANS SARBAGITA	2	1	15	5,344,332,902.00	100.00	590,129,739.00	11.04	25.83	1,512,584,796.00	28.30	47.50	640,264,137.00	11.98	74.50	1,726,007,918.00	32.30	100	4,468,986,590.00	83.62	100.00	ST
	UPTD. PERLENGKAPAN JALAN PROVINSI	2	1	11	580,617,615.00	100.00	154,226,845.00	26.56	20.45	126,635,032.00	21.81	36.36	123,865,232.00	21.33	61.36	154,787,735.00	26.66	100	559,514,844.00	96.37	100.00	ST
	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	2	1	9	450,895,688.00	100.00	65,039,671.00	14.42	25.00	132,269,317.00	29.33	50.00	96,128,617.00	21.32	75.00	143,889,294.00	31.91	100	437,326,899.00	96.99	100.00	ST
	(INDUK + 4 UPT)	2	9	80	12,944,291,473.00	100.00	2,219,818,263.00	17.15	22.98	3,048,961,586.00	23.55	43.66	1,801,983,358.00	13.92	69.99	4,703,237,309.00	36.33	100	11,774,000,516.00	90.96	100.00	ST

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH		PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja Per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			KATEGORI
			PROG	KEG			TW I			TW II			TW III			TW IV			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	
							KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)				
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2	7	33	33,497,764,185.00	100.00	2,142,336,984.00	6.40	26.45	6,151,982,595.00	18.37	39.54	8,073,938,341.00	24.10	57.14	16,257,878,643.00	48.53	97.2	32,626,136,563.00	97.40	97.20	ST
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2	7	30	3,587,179,137.00	100.00	680,614,407.00	18.97	13.74	905,667,949.00	25.25	57.14	674,238,683.00	18.80	78.57	1,257,602,738.00	35.06	96.63	3,518,123,777.00	98.07	96.63	ST
	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM	2	1	15	4,116,855,583.00	100.00	84,011,185.00	2.04	36.42	388,398,484.00	9.43	66.97	1,535,619,305.00	37.30	83.72	1,758,860,460.00	42.72	98.56	3,766,889,434.00	91.50	98.56	ST
	(INDUK + 1 UPT)	2	8	45	7,704,034,720.00	100.00	764,625,592.00	9.93	25.08	1,294,066,433.00	16.80	62.06	2,209,857,988.00	28.68	81.145	3,016,463,198.00	39.15	97.595	7,285,013,211.00	94.56	97.60	ST
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	2	9	39	3,699,915,953.00	100.00	734,382,744.00	19.85	34.65	1,043,443,997.00	28.20	39.61	413,355,935.00	11.17	73.68	1,463,678,880.00	39.56	84.67	3,654,861,556.00	98.78	84.67	T
14	DINAS KEBUDAYAAN	2	5	42	13,783,890,784.00	100.00	2,435,581,665.00	17.67	4.75	3,120,265,817.00	22.64	14.28	1,700,592,729.00	12.34	14.28	6,168,088,887.00	44.75	99.95	13,424,529,098.00	97.39	99.95	ST
	UPTD TAMAN BUDAYA	2	1	26	5,597,596,109.00	100.00	471,810,144.00	8.43	0.32	805,561,484.00	14.39	4.17	1,450,305,797.00	25.91	4.17	2,673,979,791.00	47.77	100.00	5,401,657,216.00	96.50	100.00	ST
	UPTD MUSEUM BALI	2	1	24	4,922,117,528.00	100.00	377,626,374.00	7.67	5.52	723,888,797.00	14.71	9.69	1,101,071,128.00	22.37	9.69	2,163,360,956.93	43.95	100.00	4,365,947,255.93	88.70	100.00	ST
	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI	2	1	18	4,863,524,991.00	100.00	635,874,007.00	13.07	14.62	1,140,505,101.00	23.45	21.56	1,483,189,324.00	30.50	21.56	1,135,754,883.00	23.35	91.08	4,395,323,315.00	90.37	91.08	ST
	(INDUK + 3 UPT)	2	8	110	29,167,129,412.00	100.00	3,920,892,190.00	13.44	6.30	5,790,221,199.00	19.85	12.43	5,735,158,978.00	19.66	12.43	12,141,184,517.93	41.63	97.76	27,587,456,884.93	94.58	97.76	ST
15	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	2	6	37	1,925,018,548.00	100.00	686,096,913.00	35.64	24.71	454,704,268.00	23.62	59.73	321,018,868.00	16.68	86.79	454,828,687.00	23.63	91.83	1,916,648,736.00	99.57	91.83	ST
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3	9	38	3,724,457,954.00	100.00	402,760,363.00	10.81	6.51	1,494,274,090.00	40.12	29.07	423,811,916.00	11.38	29.07	748,648,080.00	20.10	100	3,630,079,688.00	97.47	100.00	ST
	UPTD INDUSTRI OLAHAN PANGAN DAN KEMASAN	3	1	15	306,184,142.00	100.00	111,727,858.00	36.49	41.17	169,021,008.00	55.20	67.84	15,198,520.00	4.96	67.84	10,066,886.00	3.29	96.67	306,014,272.00	99.94	96.67	ST
	UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	3	1	14	258,286,769.00	100.00	97,631,217.00	37.80	46.98	52,976,703.00	20.51	67.86	41,340,226.00	16.01	66.07	62,622,821.00	24.25	100	254,570,967.00	98.56	100.00	ST

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH		PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja Per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			KATEGORI
			PROG	KEG			TW I			TW II			TW III			TW IV			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	
							KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)				
	(INDUK + 2 UPT)	3	11	67	4,288,928,865.00	100.00	612,119,438.00	14.27	31.55	1,716,271,801.00	40.02	54.92	480,350,662.00	11.20	54.33	821,337,787.00	19.15	98.89	3,630,079,688.00	84.64	98.89	ST
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3	4	28	1,995,889,485.00	100.00	531,987,300.00	26.65	20.03	533,434,808.00	26.73	25.71	344,081,532.00	17.24	47.60	565,502,824.00	28.33	93.66	1,975,006,464.00	98.95	93.66	ST
	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	3	1	15	1,030,586,483.00	100.00	209,519,085.00	20.33	22.67	510,702,141.00	49.55	42.67	137,325,446.00	13.32	78.93	155,133,090.00	15.05	84.97	1,012,679,762.00	98.26	84.97	T
	UPT PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	3	1	15	729,223,479.00	100.00	105,542,179.00	14.47	20.84	291,689,598.00	40.00	56.18	128,677,993.00	17.65	95.58	160,629,335.00	22.03	94.86	686,539,105.00	94.15	94.86	ST
	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	3	1	11	577,836,016.00	100.00	140,172,388.00	24.26	13.90	186,370,332.00	32.25	45.51	102,451,232.00	17.73	83.77	145,600,406.00	25.20	82.9	574,594,358.00	99.44	82.90	T
	UPTD PELABUHAN PERIKANAN	3	1	12	66,999,848.00	100.00	9,355,251.00	13.96	1.84	13,444,124.00	20.07	1.84	20,496,747.00	30.59	34.27	16,607,598.00	24.79	100	59,903,720.00	89.41	100.00	ST
	(Induk + 4 UPT)	3	8	81	4,400,535,311.00	100.00	996,576,203.00	22.65	15.86	1,002,206,195.00	22.77	34.38	733,032,950.00	16.66	68.03	1,043,473,253.00	23.71	91.278	3,775,288,601.00	85.79	91.28	ST
18	DINAS PARIWISATA	3	7	33	2,820,987,435.56	100.00	888,172,407.00	31.48	14.71	62,410,378.00	2.21	66.44	498,798,497.00	17.68	69.47	905,838,029.56	32.11	94.68	2,355,219,311.56	83.49	94.68	ST
19	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3	7	34	2,811,695,639.00	100.00	993,360,793.00	35.33	14.87	633,111,482.00	22.52	25.00	406,079,923.00	14.44	67.43	692,406,218.00	24.63	78.36	2,724,958,416.00	96.92	78.36	T
	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN BALI UTARA	3	1	14	340,258,999.00	100.00	63,048,416.00	18.53	10.38	27,082,742.00	7.96	30.58	71,186,291.00	20.92	52.11	108,782,995.00	31.97	71.23	270,100,444.00	79.38	71.23	S
	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN BALI TIMUR	3	1	15	489,438,804.00	100.00	119,822,544.00	24.48	11.35	134,704,434.00	27.52	42.22	41,603,955.00	8.50	61.14	113,738,323.00	23.24	70.56	409,869,256.00	83.74	70.56	S
	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN BALI SELATAN	3	1	14	281,949,541.00	100.00	63,955,724.00	22.68	9.46	134,704,434.00	47.78	46.56	22,212,766.00	7.88	60.91	45,998,254.00	16.31	72.13	266,871,178.00	94.65	72.13	S
	UPTD KESATUAN PENGELOLA HUTAN BALI BARAT	3	1	13	1,220,405,510.00	100.00	23,335,816.00	1.91	12.21	27,082,742.00	2.22	43.29	17,633,655.00	1.44	58.17	113,338,682.00	9.29	74.61	181,390,895.00	14.86	74.61	S
	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI	3	1	13	153,212,023.00	100.00	28,119,724.00	18.35	14.32	50,595,560.00	33.02	31.55	10,525,112.00	6.87	51.31	62,945,331.00	41.08	71.11	152,185,727.00	99.33	71.11	S
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	3	1	4	212,350,376.00	100.00	54,165,040.00	25.51	11.83	31,285,632.00	14.73	42.09	45,595,560.00	21.47	63.12	61,618,755.00	29.02	68.26	192,664,987.00	90.73	68.26	S

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH		PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja Per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			KATEGORI
			PROG	KEG			TW I			TW II			TW III			TW IV			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	
							KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)				
	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH	3	1	14	10,206,676,543.00	100.00	1,303,441,552.00	12.77	8.33	13,584,312.00	0.13	33.42	1,420,293,732.00	13.92	56.11	3,850,616,434.00	37.73	70.09	6,587,936,030.00	64.55	70.09	S
	(INDUK + 5 UPT)	3	14	121	15,715,987,435.00	100.00	2,649,249,609.00	16.86	11.59	1,052,151,338.00	6.69	36.84	2,035,130,994.00	12.95	57.55	5,049,444,992.00	32.13	72.04	10,785,976,933.00	68.63	72.04	S
20	BAPPEDA	4	5	45	6,486,980,497.00	100.00	1,036,561,314.00	15.98	4.44	1,261,609,699.00	19.45	33.98	2,010,280,036.00	30.99	76.52	2,101,140,407.00	32.39	100	6,409,591,456.00	98.81	100.00	ST
21	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	4	5	31	9,777,203,473.00	100.00	1,721,060,620.00	17.60	33.92	3,842,328,528.00	39.30	51.10	604,564,290.00	6.18	76.53	1,698,636,379.00	17.37	92.37	7,866,589,817.00	80.46	92.37	ST
22	BADAN PENGHUBUNG	4	2	21	3,347,538,144.00	100.00	813,690,994.00	24.31	27.50	590,833,094.00	17.65	45.24	630,312,332.00	18.83	64.29	1,131,313,435.00	33.80	92.86	3,166,149,855.00	94.58	92.86	ST
23	INSPEKTORAT	4	4	40	5,063,701,050.00	100.00	1,203,995,201.00	23.78	0.52	984,404,596.00	19.44	20.35	942,138,069.00	18.61	52.61	1,552,497,163.00	30.66	91.35	4,683,035,029.00	92.48	91.35	ST
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4	5	42	11,711,960,150.00	100.00	2,900,224,464.00	24.76	45.83	3,126,221,886.00	26.69	94.29	1,316,339,005.00	11.24	100	3,960,447,671.79	33.82	100	11,303,233,026.79	96.51	100.00	ST
	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	4	1	4	1,270,022,510.00	100.00	561,020,010.00	44.17	22.92	709,002,500.00	55.83	75.00	0.00	0.00	77.75	0.00	0.00	77.75	1,270,022,510.00	100.00	77.75	T
	(INDUK + 1 UPT)	4	6	46	12,981,982,660.00	100.00	3,461,244,474.00	26.66	34.38	3,835,224,386.00	29.54	84.65	1,316,339,005.00	10.14	88.875	3,960,447,671.79	30.51	88.875	12,573,255,536.79	96.85	88.88	T
25	BADAN KESBANGPOL	4	5	26	2,578,333,648.00	100.00	293,637,575.00	11.39	0.00	967,212,542.00	37.51	41.09	453,385,187.00	17.58	50.82	803,415,178.00	31.16	92.56	2,517,650,482.00	97.65	92.56	ST
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH	4	4	31	12,850,451,283.00	100.00	3,548,258,620.00	27.61	26.67	3,336,149,737.00	25.96	48.30	2,399,468,493.00	18.67	78.47	82,562,858.00	0.64	85.61	9,366,439,708.00	72.89	85.61	T
	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4	1	11	603,629,241.00	100.00	270,152,640.00	44.75	50.00	21,961,302.00	3.64	75.55	143,584,600.00	23.79	76.27	76,049,460.00	12.60	85.36	511,748,002.00	84.78	85.36	T
	(INDUK + 1 UPT)	4	5	42	13,454,080,524.00	100.00	3,818,411,260.00	28.38	38.34	3,358,111,039.00	24.96	61.93	2,543,053,093.00	18.90	77.37	158,612,318.00	1.18	85.485	9,878,187,710.00	73.42	85.49	T
27	BIRO HUKUM	4	4	28	4,964,864,391.00	100.00	1,105,360,299.00	22.26	42.47	991,056,855.00	19.96	79.66	960,245,944.00	19.34	100.00	1,636,091,347.00	32.95	100.00	4,692,754,445.00	94.52	100.00	ST
28	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	4	4	18	9,919,185,053.00	100.00	580,767,973.00	5.85	20.99	8,242,651,117.00	83.10	38.74	148,232,677.00	1.49	90.12	686,039,669.00	6.92	90.12	9,657,691,436.00	97.36	90.12	T

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH		PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja Per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			KATEGORI
			PROG	KEG			TW I			TW II			TW III			TW IV			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	
							KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)				
29	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	4	3	28	51,146,625,584.00	100.00	5,058,160,937.00	9.89	22.18	10,016,873,990.00	19.58	46.61	7,232,177,659.00	14.14	55.54	25,061,516,819.00	49.00	96.82	47,368,729,405.00	92.61	96.82	ST
30	BIRO ORGANISASI	4	4	24	480,872,700.00	100.00	320,156,300.00	66.58	25.30	122,836,900.00	25.54	48.79	9,363,000.00	1.95	78.42	27,272,600.00	5.67	87.5	479,628,800.00	99.74	87.50	T
31	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4	6	19	2,959,431,297.00	100.00	532,213,070.00	17.98	31.79	429,558,630.00	14.51	42.63	748,177,405.00	25.28	62.68	1,189,796,744.00	40.20	90.32	2,899,745,849.00	97.98	90.32	T
32	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA	4	5	30	14,812,017,973.00	100.00	1,130,789,347.00	7.63	8.10	3,992,236,187.00	26.95	12.92	3,065,645,795.00	20.70	19.92	5,301,952,800.00	35.79	86.99	13,490,624,129.00	91.08	86.99	T
33	BADAN PENGEMBANGAN SDM	4	4	49	5,884,507,357.00	100.00	759,641,196.00	12.91	42.28	929,294,097.00	15.79	43.74	602,205,197.00	10.23	46.46	3,572,807,983.00	60.72	99.70	5,863,948,473.00	99.65	99.70	ST
34	SEKRETARIAT DPRD	4	3	34	85,747,498,100.00	100.00	14,905,248,637.00	17.38	6.02	17,198,438,393.00	20.06	45.96	16,636,106,057.00	19.40	63.88	36,618,572,829.00	42.71	76.01	85,358,365,916.00	99.55	76.01	T
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4	4	35	6,989,958,027.00	100.00	924,951,139.00	13.23	29.21	2,095,696,064.00	29.98	66.38	1,597,279,385.00	22.85	80.52	2,084,967,199.00	29.83	93.21	6,702,893,787.00	95.89	93.21	ST
	UPT. BULELENG	4	1	15	4,106,428,282	100.00	675,564,704.00	16.45	38.36	1,068,313,683.00	26.02	50.30	905,285,968.00	22.05	71.93	1,311,238,824.00	31.93	86.54	3,960,403,179.00	96.44	86.54	T
	UPT. JEMBRANA	4	1	15	1,706,371,562	100.00	266,715,939.00	15.63	31.81	512,106,431.00	30.01	48.18	354,634,221.00	20.78	75.77	501,047,641.00	29.36	90.32	1,634,504,232.00	95.79	90.32	T
	UPT. TABANAN	4	1	15	2,019,601,825	100.00	304,000,665.00	15.05	27.17	609,638,357.00	30.19	64.76	417,974,606.00	20.70	66.28	632,477,935.00	31.32	84.30	1,964,091,563.00	97.25	84.30	T
	UPT. BADUNG	4	1	15	4,340,941,960	100.00	1,187,307,547.00	27.35	24.96	1,083,507,264.00	24.96	53.76	802,836,582.00	18.49	60.43	1,086,454,433.00	25.03	76.48	4,160,105,826.00	95.83	76.48	T
	UPT. KOTA DENPASAR	4	1	15	4,532,632,460	100.00	672,058,409.00	14.83	35.39	1,303,368,587.00	28.76	61.77	1,083,237,709.00	23.90	61.77	1,260,443,199.00	27.81	81.46	4,319,107,904.00	95.29	81.46	T
	UPT. GIANYAR	4	1	15	3,195,621,300	100.00	488,989,972.00	15.30	27.93	1,076,336,578.00	33.68	54.54	664,561,821.00	20.80	56.21	916,405,729.00	28.68	71.12	3,146,294,100.00	98.46	71.12	S
	UPT. BANGLI	4	1	15	1,922,800,488	100.00	276,619,577.00	14.39	20.91	580,531,963.00	30.19	49.45	415,086,038.00	21.59	52.78	577,497,941.00	30.03	73.1	1,849,735,519.00	96.20	73.10	S
	UPT. KLUNGKUNG	4	1	15	1,991,484,488	100.00	286,020,160.00	14.36	36.36	562,602,324.00	28.25	60.98	414,201,048.00	20.80	62.65	619,845,569.00	31.12	74.71	1,882,669,101.00	94.54	74.71	S

NO	NAMA OPD	URUSAN	JUMLAH		PAGU (Rp.)	Bobot Kinerja Per Tahun (%)	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN												JUMLAH			KATEGORI
			PROG	KEG			TW I			TW II			TW III			TW IV			KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	
							KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)	KEUANGAN (Rp.)	KEU (%)	KIN (%)				
	UPT. KARANGASEM	4	1	15	1,648,845,460	100.00	251,196,945.00	15.23	25.90	533,244,094.00	32.34	45.51	437,645,833.00	26.54	50.85	482,741,837.00	29.28	72.63	1,704,828,709.00	103.40	72.63	S
	(INDUK + 9 UPT)	4	13	170	32,454,685,852	100.00	5,333,425,057.00	16.43	29.80	9,425,345,345.00	29.04	55.56	7,092,743,211.00	21.85	63.92	9,473,120,307.00	29.19	80.39	31,324,633,920.00	96.52	80.39	T
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT	5	7	32	532,882,650,728.00	100.00	447,414,720,373.00	83.96	12.99	2,861,491,262.00	0.54	30.90	0.00	0.00	30.90	78,405,867,040.00	14.71	100.00	528,682,078,675.00	99.21	100.00	ST
TOTAL JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN			282	2279	2,158,787,556,846.26	100.00	560,898,538,425.00	25.98	21.14	364,240,368,734.00	16.87	43.87	231,962,025,919	10.75	62.29	638,794,418,737.28	29.59	90.92	1,795,895,351,815.28	83.19	90.92	T

F. Kendala/Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya-Upaya Penyelesaian Permasalahan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) *Refocusing* anggaran karena *pandemic Covid-19* yang berpengaruh terhadap target indikator kinerja Program/Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, terlebih lagi untuk Program/Kegiatan yang anggarannya dinolkan.
- 2) Perangkat Daerah belum semuanya melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- 3) Adanya pergantian admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah sehingga admin yang baru perlu waktu untuk mempelajari SiDalev.
- 4) Rata-rata capaian kinerja program/kegiatan masih dihitung secara manual sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan laporan.
- 5) Adanya kelambatan admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah dalam melakukan input realisasi anggaran dan capaian target kinerja.
- 6) Perbaikan anggaran dan target indikator kinerja pada triwulan sebelumnya akibat *refocusing* anggaran pada aplikasi SiDalev masih memerlukan waktu dan tidak bisa dilakukan sekaligus.
- 7) Pada beberapa Perangkat Daerah yang mengalami perubahan akibat pemberlakuan Perda Nomor 7 Tahun 2019, capaian indikator kinerja terhadap capaian target akhir periode RPJMD sulit diukur.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan dukungan anggaran untuk Program/kegiatan yang dirasionalisasi pada tahun anggaran berikutnya atau dari sumber dana di luar APBD.

- 2) Dilakukan pencermatan terhadap indikator kinerja Program Prioritas/Program sehingga lebih SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve*) dalam mendukung aspek akuntabilitas pencapaian kinerja
- 3) Melakukan penginputan realisasi anggaran dan capaian kinerja Program/Kegiatan langsung di Bappeda Provinsi Bali bagi admin SiDalev yang baru dan yang lambat dalam melakukan penginputan.
- 4) Tetap melakukan penyempurnaan aplikasi sehingga SiDalev semakin mudah dan cepat dioperasikan.
- 5) Ke depannya akan membuat template/sistematika Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

2.2.2 Realisasi RPJMD

Pelaksanaan Urusan dan Program Kegiatan sampai dengan tahun 2020 mengacu pada target Pembangunan Provinsi Bali tahun 2018-2023 yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Evaluasi tahun 2020 merupakan tahun ketiga dalam mendukung pencapaian pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Berdasarkan RPJMD tersebut diatas, sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali dalam setiap tahunnya telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai kewenangan pelaksanaan urusan yang selanjutnya dituangkan dalam RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Adapun evaluasi hasil penyelenggaraan capaian urusan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2020 disesuaikan target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.34.
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	Persentase (%)	6,35	6,4 (6,20-6,60)	5,63	6,6 (6,40-6,80)	-9,31
2	Laju Inflasi	Persentase (%)	3,4	3,50±1	2,37	3,00±1%	0,55
3	PDRB per kapita	Jumlah (Juta)	54,62	53 – 58	58,24	56 – 61 juta	51,18
4	Indeks Gini	Persentase (%)	0,364	0,3582	0,37	0,3264	0,369
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persentase (%)	3,91	3,85	3,61	3,59	4,45
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	74,45	75,07 (74,97-75,17)	75,38	75,31 (75,21-75,41)	75,50
7	Angka Melek Huruf	Persentase (%)	89,17	92,56	94,53	92,77	94,80
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,72	10	8,84	10,28	8,95
9	Angka usia harapan hidup	tahun	71,4	71,8	71,99	72	72,13
10	Persentase balita gizi buruk	Persentase (%)	2	2	1,33	2	0,6
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase (%)	13,1	13,1	4,46	12,05	8,5
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase (%)	100	100	100	100	100
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2.478.567	2.533.567	2.466.230	2.588.567	2.567.920

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	75,51	75,77	73,87	75,03	74,32
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1,4	1,28	1,52	1,17	5,63
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	77	N/A	79	N/A
17	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	95.90	95.90	95,70	96,14	95,7
19	Penguatan cadangan pangan	Persentase (%)	20	20	20	20	20
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14,38	15,37	13,53	15,15	15,09
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	2,52	2,25	1,33	2,20	1,67
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persentase (%)	1,48	1,38	1,39	1,46	1,53
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persentase (%)	16,84	16,44	N/A	15,11	N/A

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023

Tabel 2.35.
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Aspek Daya Saing Daerah

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	Persentase (%)	17,45	17,14	17,35	16,83	17,55
2	Nilai Tukar Petani	Persentase (%)	103,87	104,10	104,93	104,50	93,56
3	Angka kriminalitas	Kasus	4.607	4.183	4.376	3.669	2.083
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	72,48 (2017)	72,48	N/A	73,98	N/A
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	45	45	23,26	45	18,37
6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	15	16	13,53	17,00	15,09

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023

Tabel 2.36.
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Aspek Pelayanan Umum

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1 Pendidikan									
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase (%)	79.1	80.1	32.97	81.1	82,3	BP PAUD dan DIKMAS BALI, Dukcapil dan Disdikpora	
1.2	Angka Partisipasi Kasar								
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	105.9	106.688	109.38	107.48	100,56	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	106.95	108.31	106.88	109.67	96,4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persentase (%)	100.4	101.20	98.00	102.01	100,30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan								
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	24.55	24.84	23.49	25.14	24,80	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	Persentase (%)	11.73	12.02	11.69	12.32	21,78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	23.41	23.7	23.89	24	38,59	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.4	Angka Partisipasi Murni								
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	96.06	100	99.63	100	92,06	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	84.54	100	88.72	100	79,22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	73.15	100	73.21	100	82,51	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah								
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99.56	99.56	99.71	99.56	99,21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	97.92	97.92	97.72	97.92	95,52	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	82.35	82.35	82.60	82.35	71,44	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.6	Angka Putus Sekolah								
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0.05	0.04	0.03	0.03	0,08	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0.10	0.09	0.12	0.08	0,08	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.25	0.24	0.55	0.23	0,06	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.7	Angka Kelulusan								
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	99.99	100	99.97	100	99,98	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.8	Angka Transisi (AT)								
1.8.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	96.24	97.3	96.73	98.36	98,74	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.8.2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	95.85	96.91	96.79	97.97	97,89	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.9	Fasilitas Pendidikan								
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	93.28	94.03	96.69	94.77	95,34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase (%)	92.07	92.82	97.46	93.56	94,31	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persentase (%)	96.00	96.47	99.34	96.93	97,06	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	63.77	63.82	7.04	63.87	7,32	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	18.12	23,61	0.86	22.73	23,08	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	60.61	62,36	66.27	64.99	63,84	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persentase (%)	61.27	63,82	61.97	67.17	65,83	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
	- SMA/MA (per 1000 murid)	Persentase (%)	78.88		70.93		72,38	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
	- SMK (per 1000 murid)	Persentase (%)	70.05		56.65		63,78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata								
1.14.1	SD/MI	Persentase (%)	0.03	0.03	1.54	0.03	0,03	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.14.2	SMP/MTS	Persentase (%)	0.09	0.09	2.01	0.09	0,09	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.14.3	SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.10	0.10	2.28	0.10	0,10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	100.00	106.94	99.97	106.94	99,98	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	99.87	99.87	99.93	99.88	99,94	BPS	
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	92.98	92.98	94.53	93.06	98,34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV								
1.18.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	87.96	75.19	98.86	75.88	76,85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.18.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	93.16	94.08	94.31	95.00	94,86	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.18.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	95.91	96.42	96.62	96.93	96,78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.18.4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persentase (%)	96.39	96.68	99.10	96.97	97,08	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
2 Kesehatan									
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4,55	10	5.04	10	5.51	Dinas Kesehatan	
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5.17	6.67	0.62	6.35	0.59	Dinas Kesehatan	
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	3.2	4,50	3.59	4.41	3.66	Dinas Kesehatan	
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	54.03	69	68	68	83.84	Dinas Kesehatan	
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persentase (%)	1.45	1.46	1.5	1.47	22.81	Dinas Kesehatan	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk								
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persentase (%)	1.17	0.029	0.029	0.029	0.027	Dinas Kesehatan	
2.6.2	Rasio klinik	Persentase (%)	0.021	0.021	0.021	0.021	0.025	Dinas Kesehatan	
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	Dinas Kesehatan	
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persentase (%)	0.016	0.016	0.016	0.016	0.018	Dinas Kesehatan	
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persentase (%)	0.35	0.36	1.56	0.38	0.620	Dinas Kesehatan	
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	Persentase (%)			2.83			Dinas Kesehatan	
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persentase (%)	1.85	1.94	1.85	2.04	2.630	Dinas Kesehatan	
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persentase (%)	1.07	1.12	1.02	1.18	1.46	Dinas Kesehatan	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase (%)	86.53	87.00	50.77	87.50	80.95	Dinas Kesehatan	
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	95.97	96	97.57	96.5	91.78	Dinas Kesehatan	
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persentase (%)	99.16	100	96	100	90	Dinas Kesehatan	
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.14	Case Detection Rate TBC	Persentase (%)	30	33	34	34	19	Dinas Kesehatan	
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persentase (%)	89	90	89	90	88	Dinas Kesehatan	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	21.1	110	116	108	269.94	Dinas Kesehatan	
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	70.20	100	64.12	100	100	Dinas Kesehatan	
2.19	Angka kematian Malaria	Persentase (%)	0	<1	0	<1	0	Dinas Kesehatan	
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	0.02	< 1	0.01	< 1	0.01	Dinas Kesehatan	
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	66.4	70	72	75	72	Dinas Kesehatan	
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	57.54	55	57	55	57	Dinas Kesehatan	
2.23	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persentase (%)	21	21	21	21.5	21	Dinas Kesehatan	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.25	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	102.92	100	100	100	99.92	Dinas Kesehatan	
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persentase (%)	80	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	Dinas Kesehatan	
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persentase (%)	94.49	94.6	94.65	95	86.91	Dinas Kesehatan	
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	Persentase (%)	96.81	97	88.03	97.5	89.94	Dinas Kesehatan	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	100	100	35.71	100	72.88	Dinas Kesehatan	
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	100	100	74.75	100	99.9	Dinas Kesehatan	
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.33	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	100	100	87.89	100	100	Dinas Kesehatan	
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
2.36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Persentase (%)	71.51	72.01	73.09	74.26	75.55	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	Persentase (%)	68.00	68.50	57.46	69.40	62.47	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.3	Panjang Pantai Terabrasi	Kilometer	118.69	118.39	127.34	118.09	118.69	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.4	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	80.81	77.44	82.66	77.71	78.52	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.5	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	58	60	65	64	62.82	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi yang bersertifikat	Persentase (%)	70	70	97.41	72	72.00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil Pelayanan pengujian laboratorium dan Peralatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.9	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	Persentase (%)	100	100	90.56	100	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.10	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	84	87	88	88.75	88.75	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.10.1	Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	Persentase (%)	86	87	85	89	87.58	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.11	Persentase penduduk yang berakses layanan air limbah di Provinsi Bali	Persentase (%)	82	87	91	89	87.26	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.12	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase (%)	90	91	100	92	92	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.4	Jumlah rumah terbangun kewenangan Provinsi	Unit	-	0	7	20	4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase (%)	12	24	12	36	0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4.6	Persentase kawasan kumuh	Persentase (%)	8.2	8.0	8.0	7.7	8.0	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase (%)	29.83	29.97	29.83	30,11	29,83	Satpol PP	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Satpol PP	
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	35.54	35.55	35.55	35.56	39,77	Satpol PP	
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	44.62	44.63	44.63	44.64	57,13	Satpol PP	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Satpol PP	
6 Sosial									
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	0.58	0,25	5.26	0.27	0,06	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	0.67	0,96	10.48	0.99	0,67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	0.41	0.63	10.29	0.65	0,43	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase (%)	0.96	100	-	100	N/A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	Persentase (%)	3,8	60	100	60	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	25	20	-	20	N/A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	60,03	60	17.81	60	52,63	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1 Tenaga Kerja									
1.1	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Persentase (%)	43	30	23 kasus 76,67%	56 kasus 100%	37 kasus,66 %	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah (PB)	18	155	12	26	18	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah (Orang)	4757	4113	2.005	9977	1.273	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persentase (%)	400	146	190	193	13 perusaha an,13,68 %	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Jumlah (Orang)	594,557	92,630	667	96,050	470,277	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persentase (%)	0	0	0	0	21,62	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Jumlah (Orang)	2,794	575	1.097	690	899	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Jumlah	174	183	208	226	327	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah (Orang)	126	368	448	32	0	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah (Orang)	240	75	256	90	0	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah (Orang)	20	75	300	261	0	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persentase (%)	7.13	0	18.50	7.73	12,65	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	46.03	46.23	47.29	46.43	47.53	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	9.09	9.90	14.11	11.90	16.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase (%)	46.70	47.10	49.47	47.60	37.71	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.4	Rasio KDRT	Persentase (%)	0.056	0.049	0.035	0.048	0.021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persentase (%)	-	-	-	-	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	72.55	72.65	65.86	72.75	70.75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/ A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.12	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	88.50	88.50	100	88.50	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persentase (%)	1.01	1.00	0.97	1.00	1.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persentase (%)	0.97	0.98	0.87	0.99	1.03	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persentase (%)	0.94	0.95	0.73	0.96	0.98	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persentase (%)	0.93	0.94	1.00	0.95	0.96	BPS	
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persentase (%)	0.93	0.94	0.94	0.95	0.999	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Pangan								
3.1	Ketersediaan Pangan Utama								
3.1.1	Padi	Ton	847,523	849,523	836,081	851,523	783,989	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1.2	Jagung	Ton	43,892	44,000	54,920	44,500	68,415	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.1.3	Kedelai	Ton	2,500	2,550	1,896	2,601	1,857	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	4,408	4,596	4,458	4,686	7,099	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	53,267	54,000	91,766	54,500	70,038	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	170	173	151	175	300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	25,042	25,543	15,610	26,054	27,774	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2,646	2,647	2,656	2,648	2,650	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Gram/Kap/Hari	63	63	63.10	63	64,31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	80.00	80.00	100.00	85.00	85	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
4 Pertanahan									
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persentase (%)	103.24	100	101	100	109	BPN	
5 Lingkungan Hidup									
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya	ya	ya	ya	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	,-
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	63,17	64.67	63.33	66.17	N/A	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.89	92.39	94.35	92.89	N/A	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	38,57	39.57	40.79	40.57	N/A	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.9	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	6	2	1	2	N/A	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.10	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1	1	1	1	Bappeda	
5.11	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Perusahaan	15 Perusahaan	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.12	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.13	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	17 perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	30 perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	25 Perusahaan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.14	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1	1	1	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.15	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase (%)	100	100	-		N/A	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.16	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persentase (%)	100	100	-	100	N/A	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.17	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persentase (%)	100	100	-	100	N/A	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.18	Penetapan hak MHA	Persentase (%)	100	100	-	100	N/A	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.19	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	30	0	-	30	731	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.20	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	100	100	100	100	-	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	30	40	-	40	731	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.22	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata	46 Sekolah Adiwiyata, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata	1 kalpataru	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	15	20	10	20 kasus	3 kasus	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	930.545.298	945.225.853	556.257,56	961.841.563	894.951,05	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
5.25	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persentase (%)	73	80	54,74	75	44,96	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persentase (%)	0,93	0,95	0,96	0,97	0,48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persentase (%)	84	86,67	96,13	89,17	92,08	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persentase (%)	40	45,38	37,33	50,38	42,76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	94,62	96,5	98,99	98,5	99,10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	33,64	41,5	42,07	45,5	43,91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persentase (%)	43,78	49,06	49,21	58,02	59,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persentase (%)	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persentase (%)	14,24	14,1	15,56	16,33	15,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persentase (%)	60,61	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persentase (%)	69,8	71,8	75,67	73,8	78,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	200	225	225	250	250	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	50	76,92	76,92	76,92	91,67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase (%)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	2,1	2,2	2,3	2,2	2,2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase (%)	29	33	33	35	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase (%)	13.73	15	15	17	17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	1	1	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	3	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	2	5	11	6	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persentase (%)	2.02	2,3	2,3	2,3	2,3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	57,9	57,9	79.95	57.5	82,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persentase (%)	36	30	32	29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase (%)	35.12	36.15	36.42	36.42	36,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase (%)	18.56	13.53	5.61	12.18	12,18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	43.46	43	47.49	42.45	42,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	29.6	24.6	92.39	24		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	Persentase (%)	87.80	87.70	87.90	91.16	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	Persentase (%)	85.2	86	78.2	87.0	91,16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	70.48	70.48	80.5	71.5	87,0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persentase (%)	77.2	77.2	87.7	80	84,3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persentase (%)	266	466	319	500	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase (%)	100	100	100	100	500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase (%)	88.6	90	88.17	91	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	1	1	91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase (%)	100	100	100	100	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase (%)	7	8	8	10	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	22,7	22,7	22.1	22,7	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	9.4	10.2	10.2	15.03	22,7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	
9 Perhubungan									
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum								
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	351.739	386.912	314.877	422.085	435.525	Dinas Perhubungan	
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	13.958.286	13.958.286	15.697.534	13.958.286	4.945.965	Dinas Perhubungan	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	23.779.178	23.800.000	24.169.561	23.900.000	5.806.270	Dinas Perhubungan	
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	141	145	96	150	96	Dinas Perhubungan	
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	146.324	147.787	148.167	150.728	114.498	Dinas Perhubungan	
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	8	8	8	8	11	Dinas Perhubungan	
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	2	1	2	1	Dinas Perhubungan	
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20	20	20	Dinas Perhubungan	
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	3	3	3	3	3	Dinas Perhubungan	
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	25,41	26,56	27,01	35,00	27,01	Dinas Perhubungan	
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:470	1:400	1:152	1:400	1:379,08	Dinas Perhubungan	
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum								
9.9.1	Angkutan Darat								
	- Orang	Jumlah	351.739	386.912	314.877	422.085	435.525	Dinas Perhubungan	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Barang	Jumlah	121.818	127.908	392.129	134.303	70.612	Dinas Perhubungan	
9.9.2	Angkutan Laut								
	- Orang	Jumlah	13.958.286	14.656.200	15.697.534	15.354.115	4.945.965	Dinas Perhubungan	
	- Barang	Jumlah	543.159.485	570.317.459	200.412.990	597.475.434	1.539.540	Dinas Perhubungan	
9.9.3	Angkutan Udara								
	- Orang	Jumlah	23.779.178	23.800.000	24.169.561	23.900.000	5.806.270	Dinas Perhubungan	
	- Barang	Jumlah	313.520.106	350.096.479	372.013.846	351.597.443	47.276.383	Dinas Perhubungan	
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun								
9.10.1	Dermaga								
	- Orang	Jumlah	13.958.286	14.656.200	15.697.534	15.354.115	4.945.965	Dinas Perhubungan	
	- Barang	Jumlah	543.159.485	570.317.459	200.412.990	597.475.434	2.425.410	Dinas Perhubungan	
9.10.2	Bandara								
	- Orang	Jumlah	23.779.178	23.800.000	24.169.561	23.900.000	5.806.270	Dinas Perhubungan	
	- Barang	Jumlah	313.520.106	350.096.479	372.013.846	361.597.443	47.276.383	Dinas Perhubungan	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.10.3	Terminal								
	- Orang / Barang	Jumlah	351.739 / 121.818	386.912/ 127.908	314.877/ 392.129	422.085/ 134.303	326.710/ 70.612	Dinas Perhubungan	
10 Komunikasi dan Informatika									
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kim	100	120	120	120	120	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)	50.00	60.00	N/A	65.00	64.97	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon								
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persentase (%)	93.62	93.75	78.69	93,90	94.93	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persentase (%)	5.34	4.48	3.51	4.34	3.65	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persentase (%)	46.42	51.23	54.08	57.72	85.67	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persentase (%)	33.25	35.50	23.50	45.23	25.82	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	87.42	87.92	79.67	88.42	88,42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persentase (%)	300,650	265,558	N/A	265,558	N/A	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	Persentase (%)	70	70	N/A	75	N/A	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
11.4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	312,967	313,467	326,009	313,967	313,967	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
11.5	Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk local	Persentase (%)	4.1	4.2	8.15	4.3	8,35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12 Penanaman Modal									
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	166	168	176	170	3,958	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	4.46	4.63	5.33	4.80	5,33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persentase (%)	34.16	29.68	28.53	29.39	2,47	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persentase (%)	0.16	0.16	0.16	0.16	-22,41	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86	86	86	92.99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
13 Kepemudaan dan Olah Raga									
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	76	77	77	78	78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	0.82	0.83	0.83	0.84	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	51.2	52	52	54	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	38.88	40	50	42	40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	3.31	5	6.5	7.5	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	924 Orang	177 Orang	180 orang	186 Orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	20 cabor	22 cabor	24 cabor	24 cabor	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
14 Statistik									
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9	9	9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15 Persandian									
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	91.30	91.30	93.62	93.48	100.00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
16 Kebudayaan									
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	4	3	2	Dinas Kebudayaan	
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan								
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19,336	19,336	2,435	19,336	22,809	Dinas Kebudayaan	
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97	67	97	493	Dinas Kebudayaan	
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	631	88	651	673	Dinas Kebudayaan	
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	4	5	16	Dinas Kebudayaan	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	328	328	226	328	532	Dinas Kebudayaan	
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu								
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	-	-	9	-	2.879	Dinas Kebudayaan	
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	-	-	2	-	47	Dinas Kebudayaan	
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	-	-	11	-	115	Dinas Kebudayaan	
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	-	-	4	-	4	Dinas Kebudayaan	
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	233	260	337	287	361	Dinas Kebudayaan	
17	Perpustakaan								
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persentase (%)	6	6,65	10,77	8,5	8,039	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	225.450	1.000	1,700	1.500	130.610	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	-	n/a	-	n/a	0,34	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	61.823	30.000	41.538	32.000	14.220	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	9.651	500	625	750	39.790	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	124	25	25	30	30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
18	Kearsipan								
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase (%)	42	20	11	20	20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	70	30	N/A	30	2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
LAYANAN URUSAN PILIHAN									
1 Pariwisata									
1.1	Kunjungan Wisatawan								
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	9.757.991	8.200.000	10.545.039	8.395.000	4.213.316	Dinas Pariwisata	
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	6.070.473	7.100.000	6.291.141	8.000.000	1.050.366	Dinas Pariwisata	
1.2	Lama Tinggal Wisatawan								
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	4,00	4,50	4,30	4,60	4,84	Dinas Pariwisata	
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	10,45	9,8	8,2	10,1	2,45	Dinas Pariwisata	
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persentase (%)	48,51	51,92		49,72	5,73	Dinas Pariwisata	
2 Pertanian									
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14,38	15,37	13,60	15,15	15,09	BPS	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	2,52	2,25	1,52	2,20	1.67	BPS	
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	Persentase (%)	1,48	1,38	1,35	1,46	1.53	BPS	
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	13,81	16,44	N/A	15,11	N/A	BPS	
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar								
2.5.1	Padi	Jumlah	60,70	60,12	59,09	62,14	60,47	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.5.2	Jagung	Jumlah	43,892	24,34	33,05	26,46	46,36	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.5.3	Kedelai	Jumlah	2,687	15,28	13,34	14,11	13,68	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase (%)	9,011	9.011	9.011	9.011	9.011	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 Kehutanan									
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase (%)	1,6%	2,72%	223.24%	2.63%	7,72%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	105.5	696	639.42	580.00	797,00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persentase (%)	60	60	73.15%	6000.00%	73,15%	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
4 Energi dan Sumber Daya Mineral									
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase (%)	100	99.49	100	99.67	100	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persentase (%)	80	80	80	80	100	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persentase (%)	30	50	17.14	60.00	31.00	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	
5 Perdagangan									
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persentase (%)	2	2.44	-40.98	2.6	21.55	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persentase (%)	15.09	18.87	15.09	22.64	15.09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
6 Perindustrian									
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persentase (%)	3.35	3.50	6.10	3.64	14.28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
7 Transmigrasi									
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persentase (%)	40	40	nihil	40	nihil	Dinas Ketenagakerjaan, Energi Sumber Daya Mineral	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8 Kelautan dan Perikanan									
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	136,496.55	220,706.50	127,869.66	228,873.48	127,695	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	34.56	31,17	31.77	32.2	38,83	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase (%)	100	60	100	70	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persentase (%)	107.36	60	183.88	70	118,23	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	97,157.60	99100.75	109,335.22	101,082.77	95.923,68	Dinas Kelautan dan Perikanan	
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persentase (%)	80	80	80	80	80	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persentase (%)	104.64	106.21	111.44	104.6	100,12	Dinas Kelautan dan Perikanan	
PENUNJANG URUSAN									
1 Perencanaan Pembangunan									
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Bappeda	
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Bappeda	
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Bappeda	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bappeda	
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100	98.52	100.00	95.27	Bappeda	
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Bappeda	
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Bappeda	
2 Keuangan									
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	
2.2	Persentase SILPA	Persentase (%)	6	6	6	6	2.79	BPKAD	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase (%)	6	6	6	6	2.79	BPKAD	
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persentase (%)	0	0	0	0	1 kegiatan	BPKAD	
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persentase (%)	20	20	20	20	29.63	BPKAD	
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persentase (%)	10	10	10	10	12.95	BPKAD	
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	26,70 : 73,30	25,21 : 74,78	28,15:71,85	26,66:73,33	31,78:68,2 2	BPKAD	
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1,249,485,906,461	1,629,026,199,757	1,302,125,715,639	1,702,672,669,256	1.054.74 8.783.17 1,60	BPKAD	
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	BKD	
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase (%)	32	80	41.67	48	47.23	BKD	
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase (%)	7.61	30.00	39.12	32.00	43.49	BKD	
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	45	46	44	49	41	BKD	
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4.355	252	250	252	4.652	BKD	

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	6.924	1.397	5.981	1.057	5.932	BKD	
4 Penelitian dan Pengembangan									
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Penerapan SIDA:		-	-	-	-	-	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	16,6 6/36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	66,6% 6/9	66,6% 6/8	66,6% 6/8	66,6% 6/8	77,8% 7/9	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 Pengawasan									
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase (%)	9	44	44	16	95.13	Inspektorat	
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase (%)	0.06	5	5	5	100	Inspektorat	
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persentase (%)	14	55	55	55	100	Inspektorat	
6 Sekretariat Dewan									
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD	

No	ASPEK/ FOKUS/ B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Keterangan
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sekretariat DPRD	

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, berupa: peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang juga telah menimbulkan permasalahan dan tantangan besar yang berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan wilayah Bali pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali, melainkan juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun pada masa mendatang mencakup 3 (tiga) area kunci, yakni yang berkaitan dengan:

- (1) Alam Bali;
- (2) *Krama* (manusia) Bali; dan
- (3) Kebudayaan Bali.

a. Permasalahan yang berkaitan dengan Alam Bali mencakup masalah pertanian, subak, air dan sumber mata air, seperti laut, danau, sungai, air terjun, mata air *kelebutan*, dan sumber lainnya, serta masalah lingkungan.

Masalah utama dalam bidang pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata, perumahan, dan properti lainnya. Selain itu, bidang pertanian juga menghadapi masalah derasnya perpindahan kepemilikan lahan kepada pihak luar Bali. Derasnya alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan tergerusnya subak sebagai penyangga utama budaya pertanian Bali. Di Kota Denpasar,

misalnya, tiga subak telah tereliminasi, yaitu Subak Kreneng, Subak Yang Batu, dan Subak Sanglah, sehingga Kota Denpasar sekarang ini hanya memiliki 36 subak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang semula memiliki jumlah subak terbesar di Bali, kini jumlah subak telah menurun drastis, sehingga mengancam posisi Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras Bali. Penurunan lahan pertanian telah mengakibatkan penurunan produksi pangan serta hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di bidang pariwisata dan industri jasa juga mengakibatkan semakin rusaknya pantai akibat abrasi, terjadinya penggerusan dan pendangkalan danau, berkurangnya jumlah sungai (termasuk *tukad*, *telabah*, *jelinjingan*) yang mengalirkan air, berkurangnya sumber mata air yang aktif mengalirkan air, serta semakin berkurangnya air terjun. Bersamaan dengan itu juga terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air, serta rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Tidak terkecuali juga muncul masalah-masalah lingkungan lain yang semakin kompleks, seperti perusakan hutan, pencemaran udara yang berupa polusi dan kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, serta penumpukan sampah.

Pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Bali belum tertata dengan baik dari sisi legislasi, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi, promosi, produk, industri, dan jasa pariwisata, serta sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar-Kabupaten/Kota di Bali. Lebih jauh lagi hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antar-Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara struktural dan sistematis mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan, baik dalam level antar-Kabupaten/Kota di Bali, pendapatan per kapita masyarakat Bali, maupun kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali belum tertata dengan baik di

seluruh wilayah Bali. Baik legislasi, kebijakan, maupun program pertanian dari hulu sampai ke hilir belum digarap sesuai dengan potensi alamiah yang dimiliki Kabupaten/Kota, khususnya pada bagian hilir masih sangat tertinggal baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi/komoditas. Kondisi ini telah mengakibatkan tidak tersedianya pangan untuk beberapa jenis pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali serta para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Bali, sehingga harus didatangkan dari luar Bali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat dan keagamaan pun, seperti janur, bunga, dan buah-buahan sebagian sudah mulai didatangkan dari luar Bali.

- b. Permasalahan dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah bahwa *Krama* Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap, dan perilaku kehidupan, baik dalam level individual maupun level sosial kolektif. Perubahan mendasar pada level individual, antara lain, berupa: dekadensi dan degradasi etika dan moral; pragmatisme; individualisme; materialisme; kehilangan identitas dan jati diri ke-Bali-an; kehilangan rasa percaya diri; dan meningkatnya penyakit gangguan mental. Adapun perubahan pada level sosial, antara lain, berupa: semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/*manyama braya*; melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan; melemahnya kesadaran kolektif; melemahnya etika sosial; meningkatnya kriminalitas dan premanisme; meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia. Selain itu juga terjadi peningkatan korban akibat penyalahgunaan narkoba, semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali, meningkatnya konflik sosial, penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.
- c. Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal juga terus mengalami kemunduran yang mencakup kuantitas dan kualitas,

baik dari segi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, maupun pranata budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari sisi politik legislasi dan politik anggaran, serta kurangnya komitmen, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir belum berjalan secara optimal, bahkan masih jauh dari harapan dan potensi besar yang dimiliki Bali.

Dari permasalahan pembangunan Daerah Bali tersebut, teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Bali. Isu-isu strategis dimaksud terutama mencakup tiga hal, yakni kebijakan, regulasi, dan tata kelola.

Dalam hal kebijakan, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan yang menjaga keharmonisan/keseimbangan/keselarasan secara *sakala* dan *niskala* yang bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran *Sad Kerthi*, mencakup: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*). Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan *taksu* Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.
- b. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan; pembangunan pertanian jauh tertinggal, tidak

selaras, dibandingkan dengan pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan, selain juga tidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.

- c. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik lokal masyarakat Bali dan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas dan kemacetan di beberapa wilayah tertentu, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang berakibat pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam hal regulasi, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam kurang mendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, Bali harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya kebudayaan yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dalam hal tata kelola, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kondisi fiskal sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang. Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Badung, di mana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat rendah ini mengakibatkan Pemerintah Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (kecuali Kabupaten Badung) tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk: memelihara alam dan lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; serta pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.

- b. Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri; kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Kondisi yang bersifat distorsi ini diakibatkan oleh adanya ego wilayah dan ego sektoral dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kepala Daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Selain akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, kondisi distorsi tersebut juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersifat politis, mengingat Kepala Daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda serta akibat dari kurangnya spirit kebersamaan dalam membangun wilayah Bali secara utuh. Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata

pengelolaan pembangunan Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam ego wilayah dan ego sektoral per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelola menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, satu pulau satu tata kelola satu komando (*one island one management one command*).

Perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata membuatnya sangat rentan akan bencana atau pandemi yang harus memaksa dilakukannya pembatasan aktivitas maupun perjalanan. Beberapa bencana alam maupun tragedy kemanusiaan sempat membuat kepariwisataan Bali terpuruk seperti misalnya Tragedi Bom Bali, Letusan Gunung Agung maupun gunung berapi aktif di sekitar Bali, dan yang terakhir adalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman paling serius yang dirasakan oleh Bali yang menyebabkan pariwisata Bali lumpuh dari awal tahun 2020 hingga pertengahan 2021 ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang terkait dengan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali hingga menyentuh minus.
2. Menurunnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang tiba di Bandara Ngurah Rai.
3. Ditutupnya hampir seluruh daerah wisata yang membuat jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel di sekitarnya menjadi anjlok.
4. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali akibat banyaknya pekerja sektor pariwisata yang harus dirumahkan
5. Meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Bali

Menindaklanjuti upaya mengembalikan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19, salah satu sektor yang perlu didorong peran dan pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Mendorong peran sektor pertanian dalam arti luas agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menopang tumbuhnya gairah ekonomi masyarakat Bali serta dapat

merangsang niat generasi muda untuk kembali ke desa dengan menggeluti sektor pertanian.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

- a) Kompetensi pedagogik (cara membimbing anak didik) dan profesional Guru masih kurang
- b) Kompetensi manajerial dan supervisi Kepala Sekolah masih kurang
- c) Tenaga Laboran yang masih kurang
- d) Tenaga Pustakawan yang masih kurang
- e) Masih lemahnya kinerja para Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah.
- f) Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah belum memadai.
- g) Belum optimalnya pemahaman peserta didik terhadap nilai nilai kearifan lokal
- h) Belum optimalnya prestasi, kompetensi dan profesionalitas peserta didik di tingkat Nasional dan Internasional

2. Kesehatan

- a) Belum semua kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap
- b) Belum semua Desa memiliki Ambulans yang terstandar untuk menangani kasus Gawat Darurat.
- c) Belum semua Kabupaten memiliki RS Kelas B.
- d) Pelayanan RS kelas D Pratama belum optimal.
- e) Belum tersedianya RS berstandar internasional
- f) Pelayanan kesehatan tradisional di Bali belum optimal
- g) Belum semua penduduk Bali memiliki Jaminan Kesehatan
- h) Sistem Informasi Kesehatan belum terintegrasi
- i) Masih ditemukan adanya Kematian Ibu, Bayi
- j) Belum tersedia Pusat Rehabilitasi Narkoba di Bali
- k) Penanganan Pandemi Covid-19.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah;
- b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik;
- c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit;
- d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi;
- e) Kepadatan lalu lintas/kemacetan pada beberapa ruas jalan arteri seperti ruas jalan antara Gilimanuk-Padangbai, di dalam Kota Denpasar dan sekitarnya;
- f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan;
- g) Kerusakan jalan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati melebihi tonase dari rencana;
- h) Penggunaan prasarana jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan disekitar atau sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya;
- i) Pelayanan air minum baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku;
- j) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
- k) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal;
- l) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
- m) Belum ada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dalam bentuk Peraturan Daerah;
- n) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan;
- o) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang;
- p) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU);
- b) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a) Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda/Perkada di Bali..

6. Sosial

- a) Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan
- b) Masih adanya penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang belum mendapat penanganan rehabilitas Sosial
- c) Belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
- d) Belum optimalnya perlindungan kepada korban bencana serta jaminan Sosial bagi masyarakat miskin
- e) Masih adanya penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya
- f) Belum optimalnya pelayanan sosial bagi penyandang keterlantaran.

7. Bencana

- a) Masih terdapatnya korban baik jiwa harta maupun benda akibat terjadinya bencana;
- b) Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat tentang Pengurangan Risiko Bencana;
- c) Masih kurangnya kajian Risiko Bencana dan Instrument-instrumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana;
- d) Penyebab risiko bencana belum terkelola dengan baik;

- e) Banyaknya Penduduk rentan baik fisik, sosial dan ekonomi; dan
- f) Masih kurangnya sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana terutama yang rentan terjadi di Bali.

B. URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

- a) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- b) Terbatasnya sertifikasi profesi (LSP) sektor pariwisata.
- c) Kurangpahaminya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri.
- d) Banyak perusahaan mengirim tenaga kerja ke luar negeri tidak memiliki ijin.
- e) Rendahnya kualitas tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan pasar.
- f) Kurang pahamnya tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri terhadap perlindungan dan hak-haknya.
- g) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja. Hal ini karena belum optimalnya pembinaan terhadap pengusaha.
- h) Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja akibat terbatasnya kemampuan perusahaan secara finansial.
- i) Belum ditetapkannya sanksi secara tegas terhadap perusahaan yang belum melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a) Masih rendahnya capaian IDG Provinsi Bali di tingkat Nasional dimana pada tahun 2018 adalah sebesar 64,8 atau pada rangking 29 dari 34 Provinsi se Indonesia.
- b) Keterlibatan Perempuan dilembaga Legislatif, Eksekutif masih rendah, hasil pileg 2018 hanya sebesar 9,09% jauh dibawah laki-laki, sedangkan perempuan yang menduduki

jabatan struktural dilingkungan pemerintah provinsi Bali tahun 2017 hanya 33,97%.

- c) Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2018 sebesar 72,54% masih dibawah dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 83,56%.
- d) Belum semua OPD memiliki data terpilah sehingga menyulitkan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- e) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2018 sebesar 46,03% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 53,97%.
- f) Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2018 sebesar 46,70% lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki sebesar 53,30%.
- g) Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO masih cukup tinggi di Provinsi Bali.
- h) Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- i) Munculnya berbagai kasus perlindungan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan seperti tindak pidana perdagangan orang atau trafficking.
- j) Munculnya berbagai kasus perlindungan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan seperti tindak pidana perdagangan orang atau trafficking.
- k) Masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar ramah anak
- l) Masih banyak rumah sakit dan puskesmas yang belum memenuhi standar ramah anak.
- m) Belum semua kab/kota memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar.
- n) Kasus kekerasan Seksual pada anak:
 - 1) Orang Tua menghamili Anak Kandung
 - 2) Paman menghamili keponakan
 - 3) Kakek menghamili Cucu
 - 4) Fedopilia

- o) Masih adanya kasus eksploitasi, penelantaran anak, dan pembuangan bayi.
- p) Masih tinggi kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
- q) Kasus perundungan atau *bullying*.

3. Pangan

- a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.
- b) Alih fungsi lahan pertanian produktif
- c) Persaingan pemanfaatan air irigasi
- d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal
- e) Menurunnya kesuburan lahan
- f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif
- g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil
- i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistem pemasaran hasil
- j) Akses permodalan usahatani terbatas
- k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil
- l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara ilegal
- m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis
- n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak

4. Pertanahan

- a) belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan di daerah

5. Lingkungan Hidup

- a) Belum optimalnya pengelolaan sampah dan kualitas pelayanan sampah TPA Regional.
- b) Belum optimalnya pelestarian ekosistem perairan danau, terumbu karang, dan mangrove

- c) Masih adanya pencemaran air sungai, pantai, laut, mata air, dan udara
- d) Masih adanya pelanggaran lingkungan (pelanggaran tata ruang/alih fungsi lahan, pelanggaran sempadan, pelanggaran baku mutu)
- e) Belum terakreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting
- b) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Masih lemahnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b) Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa,
- c) Kondisi prasarana/sarana desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan
- d) Peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang optimal
- e) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting
- f) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan
- g) Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk sesuai dengan kearifan lokal Bali

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Pertumbuhan Penduduk Yang Seimbang sesuai dengan kearifan lokal Bali.

9. Perhubungan

- a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata dengan kecepatan rata-rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam;
- b) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata-rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari;
- c) Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70% dari total perjalanan;
- d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal);
- e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

10. Komunikasi dan Informatika

- a) Rendahnya penyebarluasan informasi Program dan Kebijakan Pemerintah;
- b) Rendahnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal;
- c) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal;
- d) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral;

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Akses permodalan koperasi dan UKM yang masih terbatas
- b) Belum optimalnya validasi data KUMKM
- c) Rendahnya kompetensi SDM pengelola KUMK
- d) Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran koperasi UMKM
- e) Belum optimalnya jaringan kemitraan KUMKM

12. Penanaman Modal

- a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
- b) Belum memadainya insfrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
- c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
- d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing – masing Kabupaten/Kota.
- e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Belum optimalnya akses data tentang kepemudaan dan olahraga provinsi Bali.
- b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan, kepramukaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda
- c) Rendahnya frekuensi kegiatan olahraga, kompetisi/festival olahraga yang melibatkan masyarakat luas.
- d) Prestasi olahraga belum optimal
- e) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

14. Statistik

- b) Rendahnya penyebarluasan informasi Program dan Kebijakan Pemerintah;
- c) Rendahnya keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal;
- d) Kurangnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal;
- e) Rendahnya pengolahan, analisis data dan informasi sektoral;.

15. Persandian

- a) Rendahnya pengamanan data dan informasi.

16. Kebudayaan

- a) Kurangnya pelatihan seni dalam rangka memajukan seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat.
- b) Terbatasnya penggalan, revitalisasi, dan restorasi seni tradisi yang sudah punah dan atau hampir punah.
- c) Perlu dikembangkannya pembinaan lembaga seni.
- d) Perlunya pengoptimalan dalam Penggunaan Aksara, Bahasa, dan Sastra Bali serta Busana Adat Bali.
- e) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi lembaga seni.
- f) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- g) Masih perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali, sekaligus diisi dengan pelaksanaan kegiatan: Jantra Tradisi Bali dan pelaksanaan Perayaan Budaya Dunia (*Bali World Cultural Celebration*).
- h) Masih perlu ditingkatkannya pelaksanaan Festival Seni Bali Jani.
- i) Masih minimnya penyelenggaraan dan/atau memfasilitasi program misi diplomasi kebudayaan ke luar negeri.
- j) Masih minimnya kemitraan lembaga seni dengan PHRI dan ASITA.
- k) Perlu ditingkatkannya kegiatan alih aksara, alih bahasa, dan digitalisasi lontar-lontar Bali.
- l) Perlu ditingkatkannya sistem informasi dan databased mengenai kekayaan seni dan budaya Bali.
- m) Perlu ditingkatkannya usulan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

17. Perpustakaan

- a) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
- b) Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional
- c) Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan
- d) Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan *E-Library*

- e) Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan

18. Kearsipan

- a) Terbatasnya SDM Pengelola Kearsipan
- b) Minimnya anggaran berakibat kurangnya sarana dan prasarana penyelenggaraan kearsipan
- c) Arsip belum dilihat sebagai sumber informasi dan sebagai akuntabilitas kinerja di seluruh perangkat daerah
- d) Layanan informasi kearsipan melalui SIKD, SIKN, dan JIKN belum terimplementasi
- e) Pengawasan kearsipan melalui audit belum mendapatkan respon sebagaimana diharapkan

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2. Pariwisata

- a) Belum meratanya pembangunan pariwisata Bali
- b) Kurangnya koordinasi terkait pemasaran pariwisata dalam rangka menyoar pangsa pasar baru yang potensial
- c) SDM pariwisata Bali masih banyak yang belum memiliki sertifikat kompetensi
- d) Industri pariwisata Bali masih banyak yang belum memiliki sertifikat usaha.
- e) Pandemi Covid-19

3. Pertanian

- a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.
- b) Alih fungsi lahan pertanian produktif
- c) Persaingan pemanfaatan air irigasi
- d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal
- e) Menurunnya kesuburan lahan
- f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif

- g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil
- i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistim pemasaran hasil
- j) Akses permodalan usahatani terbatas
- k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil
- l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal
- m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis
- n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak

4. Kehutanan

- a) Belum optimalnya pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan
- b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan
- c) Masih tingginya gangguan keamanan hutan terutama kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, dan penebangan liar
- d) Masih banyaknya permasalahan tata batas
- e) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
- f) Rendahnya kepatuhan terhadap peraturan di bidang tata usaha kayu.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah.
- b) Kerjasama dengan stakeholder terkait kasusnya akademisi untuk pengembangan teknologi pemanfaatan teknologi terbarukan diperlukan.
- c) Minimnya sumber daya manusia yang kompeten.
- d) Diperlukan peningkatan kompetenssi sumber daya manusia yang menangani energy sumber daya mineral.

- e) Pengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan terjadinya intrusi/pencemaran air laut pada air tanah di wilayah pesisir.
- f) Ketahanan sumber daya air di daerah penurunan kualitas hidup

6. Perdagangan

- a) Masih rendahnya pemasaran produk lokal
- b) Masih berfluktuasinya harga kebutuhan pokok
- c) Belum optimalnya pertumbuhan ekspor non migas di Provinsi Bali
- d) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pentingnya hak konsumen
- e) Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor

7. Perindustrian

- a) Masih rendahnya daya saing industri Bali
- b) Masih rendahnya pemasaran produk lokal
- c) Masih berfluktuasinya harga kebutuhan pokok
- d) Belum optimalnya pertumbuhan ekspor non migas di Provinsi Bali
- e) Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pentingnya hak konsumen
- f) Belum optimalnya pelayanan pengujian dan sertifikasi produk komoditi unggulan orientasi ekspor

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a) Biro Hukum

- 1) Pengawasan efektifitas produk hukum Daerah belum optimal;
- 2) Penyusunan produk hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik;
- 3) Kesadaran hukum aparat dan masyarakat masih rendah;
- 4) Kompetensi sumberdaya manusia (SDM); dan
- 5) Kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi yang masih kurang

b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan)
- 2) SDM PBJ sebagian besar belum memenuhi standar kompetensi (sesuai arah reformasi PBJ penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan, SDM, dan dukungan sistem)
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan
- 4) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%- sd 40% dari total APBD)
- 5) Penyediaan kebutuhan sarana prasarana kerja Perangkat Daerah belum sesuai dengan standar kebutuhan (kendaraan operasional pejabat, dan sarana kerja pegawai)

c) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali yang mencakup:
 - Belum optimalnya perolehan nilai/skor penyusunan LPPD
 - Masih adanya potensi sengketa batas wilayah
 - Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan sradha dan bhakti di kalangan Krama Bali

d) Biro Umum dan Protokol

- 1) Kebutuhan peralatan dan perlengkapan dalam menunjang acara pimpinan yang dinamis dan fluktuatif
- 2) Tingginya dinamika pekerjaan yang membutuhkan atensi cepat dan tepat
- 3) Belum konsistennya PPTK melaksanakan rencana kegiatan dengan aliran kas yang sudah ditetapkan sehingga menjadi penumpukan anggaran di akhir tahun

- 4) Belum optimalnya penyusunan RKBMD yang mengacu pada rencana pengadaan barang dan rencana pemeliharaan barang

2. Sekretariat DPRD

- a) Belum optimalnya memfasilitasi Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD;
- b) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat;
- c) Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah-ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat;
- d) Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik; dan
- e) Sumber daya manusia yang ada saat ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi :
 - 1) Belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan karena sampai saat ini masih minta bantuan ke SKPD lain;
 - 2) Belum ada pegawai yang mempunyai keahlian khusus sebagai perencanaan/konsultan terutama dalam persiapan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset

- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
- b) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah

2. Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan

- a) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retirbusi daerah

- b) Kurangnya sarana prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak khususnya kendaraan operasional samling dan motor untuk optimalisasi razia door to door
- c) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah yang disebabkan masih lemahnya aturan dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak tertib
- d) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur dalam pengelolaan PAD dan pengasaan IT
- e) Kondisi sosial ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan untuk membayar pajak menurun.

3. Kepegawaian

- a) Sistem Perencanaan dan Informasi pegawai belum optimal
- b) Kompetensi dan kinerja pegawai belum optimal
- c) Penataan PNS belum berdasarkan kualifikasi

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a) Jumlah ideal Widyaiswara dan kompetensi substantifnya belum memadai.
- b) Perencanaan dan pengelolaan Kediklatan belum optimal.
- c) Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan belum digerakkan secara optimal karena keterbatasan SDM pengelola.
- d) Pengelolaan Diklat belum Berdayasaing.
- e) Belum terpenuhinya kebutuhan Anggaran untuk Peningkatan Kompetensi Aparatur 20 JP setiap tahun.
- f) Kebijakan Diklat Satu Pintu perlu disinergikan.
- g) Sarana dan prasarana pembelajaran belum memadai

5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

- a) Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun tamu yang menginap di wisma

- b) Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan umat Hindu di Jakarta yang dilaksanakan Badan Penghubung padahal minat umat untuk menerima pembinaan sangat tinggi
- c) Pemanfaatan Anjungan Daerah Bali sebagai show window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal
- d) Kurangnya sarana promosi dan informasi serta SDM yang berkompetensi di bidang promosi seni dan budaya

F. UNSUR PENGAWAS

- 1. Inspektorat Daerah
 - a. Pengelolaan keuangan dan asset sering menjadi temuan
 - b. Penanganan tindak lanjut untuk pemeriksaan SKPD terkait belum maksimal
 - c. Adanya potensi penyelewengan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat kepada desa
 - d. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bansos oleh penerima banyak yang tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan proposal pekerjaan
 - e. Adanya laporan masyarakat terkait penyalahgunaan kewenangan

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

- 1. Kesejahteraan Bangsa
 - a. Menurunnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsesus Dasar Nasional,
 - b. Radikalisme & terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat Bali,
 - c. Menurunnya Kesadaran Sebagai Sebuah Bangsa Yang Multi Culture Secara Nasional Yang Akhirnya Berimbas Ke Daerah,
 - d. Masih Terbatasnya Pendidikan Politik Pada Masyarakat Dan Generasi Muda

H. UNSUR KEKHUSUSAN

1. Pemajuan Desa Adat
 - a. Tata kelola pemerintahan desa adat belum mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali
 - b. Tata kelola perekonomian desa adat belum optimal
 - c. Tata kelola hukum adat (awig-awig & perarem) belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
 - d. Tata kelola perencanaan pembangunan desa adat belum berjalan optimal
 - e. Subak dan Subak abian belum tertata dengan baik

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Strategi		Arah Kebijakan	
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"	
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi	
3	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali	"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali	
4	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	
5	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali	
6	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)	
7	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali	
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	1	Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi

Strategi		Arah Kebijakan	
		2	Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi
9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali		Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan ekspor	1	Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor
		2	Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor		Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas		Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan
13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1	Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian

Strategi		Arah Kebijakan	
		2	Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor produk hasil pertanian dalam arti luas
		3	Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
15	Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali	
16	Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas	1	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Provinsi Bali diatas Nasional
		2	Meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga pendidik
17	Pendidikan gratis 12 tahun	Memberikan beasiswa bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera-I dan Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali	
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan ke pemerintah pusat	

Strategi		Arah Kebijakan	
19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai <i>Entrepreneur</i>	1	Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan
		2	Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali
		3	Membangun hubungan kerjasama antara <i>Government To Government</i> (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan sosial Krama Bali	1	Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/BPJS Kesehatan Provinsi Bali
		2	Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali
		3	Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)
21	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja	
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan	1	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali

Strategi		Arah Kebijakan	
		2	Membangun hubungan kerjasama antara <i>Government To Government</i> (G To G) dan pemerintah dengan swasta pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri
23	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal		Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali
24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali		Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i>
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan		Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya seni, sastra, dan budaya
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya		Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistic
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastruktur di wilayah kawasan suci Pura	1	Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan
		2	Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para <i>Sulinggih/Pemangku</i>
		3	Meningkatkan <i>sradha</i> dan <i>bhakti</i> umat Hindu
		4	Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan <i>Pratima</i> Pura
		5	Perlindungan terhadap aset Pura (<i>Pelaba</i> Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya

Strategi		Arah Kebijakan	
		6	Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan)
28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama	
29	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dan subak	1	Memperkuat desa adat dalam melaksanakan fungsi <i>Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan</i> , serta <i>awig-awig</i> dan <i>pararem</i> , sehingga desa adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan desa
		2	Memberdayakan desa adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal)
		3	Memberdayakan desa adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk <i>sekehe teruna-teruni</i> (generasi muda)
		4	Memberdayakan desa adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, dan Toko Moderen)
		5	Memperkuat dan memberdayakan organisasi <i>sekaha teruna</i> dan <i>pecalang</i> di desa adat sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi

Strategi		Arah Kebijakan	
		6	Memperkuat desa adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i>
		7	Menjadikan <i>wantilan</i> desa adat sebagai wahana <i>Balinese Culture Meeting Point</i> yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya
		8	Memelihara, merevitalisasi, dan memperkuat hukum adat/ <i>awig/perarem</i> di desa adat
		9	Memberi perlindungan terhadap aset desa (milik/ <i>druwe</i> desa)
		10	Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali
30	<i>Event</i> , atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian, dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata	Memberdayakan <i>event</i> , atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya yang mempunyai nilai ekonomis	
31	Kebudayaan kabupaten/kota Provinsi Bali yang beranekaragam sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	Pengembangan sarana prasarana budaya, dan adat istiadat sesuai dengan potensi daerah	
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (<i>promotion mix</i>) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	Mempromosikan distinasasi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali	
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	Pengendalian pelaku usaha industri pariwisata melalui pemenuhan Standar minimal (SPM) Pariwisata yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali	

Strategi		Arah Kebijakan	
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1	Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau <i>size</i> /jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		2	Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (<i>size</i> /jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara
		3	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi <i>brand</i> Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali	
36	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali	Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi	
37	Mengembangkan pertokoan modern berbasis ekonomi lokal	Mempermudah akses permodalan dan memperluas pemasaran produk ekonomi local	
38	Mengenalkan, mempromosikan/mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan <i>brand</i> Bali di pasar lokal dan ekspor	Meningkatkan kerjasama promosi produk <i>branding</i> Bali	
39	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	1	Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang berdaya saing tinggi

Strategi		Arah Kebijakan	
		2	Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
		3	Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
40	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor		Fasilitasi infrastruktur untuk pengembangan Koperasi, industri kecil menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
41	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali		Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang terinteragi dan konektivitas antara kabupaten /kota Provinsi Bali dengan wilayah lain di Indonesia
42	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik		Pembangunan infrastruktur untuk konektivitas antar kab/kota di Provinsi Bali
43	Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturn pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman		Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali
44	Peningkatan koordinasi antara aparaturn pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata		Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan

Strategi		Arah Kebijakan	
45	Memperkuat masyarakat madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	Masyarakat madani menjadi tulang punggung kehidupan demokratis, perlakuan hukum yang adil, dan dalam menjalankan hak-hak konstitusi kehidupan Krama Bali	
46	Kesetaraan gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI	
47	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tata ruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan
		2	Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi baru
48	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan perilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali	
49	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan	
50	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya	
51	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber pendapatan asli daerah	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah termasuk pendirian beberapa BUMD sesuai dengan kajian dan kebutuhan daerah	

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri.

Tantangan Global yang akan dihadapi dan harus diantisipasi dampak negatifnya oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2021 ini adalah berupa:

1. Perang Dagang Amerika Serikat dengan Republik Rakyat Tiongkok.
2. Penyebarluasan pandemi COVID-19 dengan varian baru yang lebih mudah menular.
3. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok.

Tantangan global tersebut di atas harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Bali karena berdampak signifikan pada perekonomian Bali khususnya pada kabupaten/kota atau kawasan yang bergantung pada sektor pariwisata, industri, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Adapun dampak yang diterima oleh perekonomian Bali secara jangka pendek adalah berupa:

1. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan
2. Berkurangnya pasokan impor bahan baku industri
3. Menurunnya permintaan ekspor komoditas perikanan dan perkebunan
4. Menurunnya arus perdagangan
5. Meningkatnya inflasi

Sedangkan pada jangka panjang, tantangan global tersebut akan menimbulkan dampak berupa:

1. Berkurangnya kapasitas produksi
2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatnya PHK dan angka pengangguran
4. Meningkatnya angka kemiskinan

Salah satu tantangan nasional (yang berasal dari permasalahan global) yang terjadi di tahun 2021 dan mempengaruhi perekonomian Provinsi Bali secara signifikan adalah pandemi COVID-19. Dalam lingkup nasional, permasalahan terkait aspek finansial akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini antara lain:

1. Meningkatnya nilai tukar mata uang asing khususnya Dollar Amerika terhadap Rupiah.
2. Pertumbuhan ekonomi nasional mengalami tekanan pada tahun 2020 dimana mengalami kontraksi sedalam -2,07% atau yang terendah selama 5 tahun terakhir .
3. Ketersediaan anggaran yang terbatas untuk penanganan COVID-19 dalam APBD TA 2021;
4. Adanya PHK bagi usaha-usaha yang tutup khususnya pariwisata dan industri ; dan
5. Potensi penerimaan APBD dari Jenis Pendapatan Asli Daerah (terutama pajak dan retribusi) tidak optimal dan Penyerapan APBD tidak maksimal karena dampak kebijakan *Work from Home*

Pemerintah melalui RKP 2022 telah merumuskan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022 dengan tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dimana di dalamnya telah mencakup strategi pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. Sesuai dengan tema tersebut pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%

- b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp352,5 Trilyun
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
 3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
 4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
 5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR

- f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
 7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
 8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
 - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
 9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
 - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sasaran pembangunan nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 sesuai dengan RKP Tahun 2022 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24 – 5,52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Untuk Provinsi Bali, target kontribusi nasional yang telah ditetapkan dalam RKP 2022 yang menjadi rujukan dalam penetapan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2022 adalah sebagai berikut:

1. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5-6,3%
2. Target Tingkat Kemiskinan sebesar 1,9%

3. Target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 0,98%

Untuk dapat mencapai sasaran nasional di atas, pemerintah sudah menetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan data dari Bappenas, pada tahun 2021 dan 2022 kinerja ekonomi Bali diperkirakan akan mengalami akselerasi. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2021 dan 2022 adalah berupa;

1. Pembangunan infrastruktur transportasi massal yaitu: Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Pembangunan jalur kereta api listrik bandara menuju Kuta, dan Pembangunan Pelabuhan Benoa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi
2. Pemulihan sektor pariwisata seiring dengan pemulihan ekonomi

Untuk dapat membantu pemulihan ekonomi Bali, Bappenas merekomendasikan transformasi ekonomi Bali baik pada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pada jangka pendek, rekomendasi strategi pemulihan ekonomi Bali adalah sebagai berikut:

1. Penanganan COVID-19

Penanganan COVID-19 dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

- a. Pengendalian jumlah kasus harian covid -19
- b. Distribusi vaksinasi sesuai dengan *timeline*

2. Akselerasi Belanja Daerah

Untuk mendorong percepatan belanja daerah, strategi yang direkomendasikan adalah akselerasi belanja bansos, belanja penanganan covid, belanja modal, sertape rcepatan penyerapan anggaran.

3. Pemilihan Program Prioritas

Program-program yang direkomendasikan untuk menjadi prioritas untuk pemulihan ekonomi Bali adalah program yang memiliki daya ungkit, penyerapan tenaga kerja, dan *multiplier effect* yang tinggi disertai dengan panduan protokol kesehatan bagi sektor berisiko tinggi.

4. Pemberian Bantuan Dan Insentif Pariwisata Untuk Menarik Wisatawan Nusantara

Pariwisata merupakan sektor yang paling terpuruk akibat Pandemi COVID-19. Untuk itu, bantuan dan insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Potongan tiket perjalanan domestik (kereta dan pesawat terbang)
- b. Pengadaan event atau festival
- c. MICE dari pemerintah
- d. Bantuan pelaku usaha.
- e. Relaksasi/penundaan pembayaran pinjaman (cicilan dan bunga)
- f. Kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman
- g. Keringanan tagihan listrik untuk usaha (tidak ada batas minimal pemakaian)
- h. Bantuan modal usaha
- i. Penundaan pembayaran pajak
- j. Bantuan pemasaran

5. Pembukaan Sektor Pariwisata

Selain insentif dan bantuan, strategi untuk mendorong hidup kembalinya sektor pariwisata Provinsi Bali adalah dengan membukanya kembali kepada wisatawan. Bappenas merekomendasikan pembukaan sektor pariwisata harus dibarengi dengan sertifikasi CHSE hotel dan restoran.

Pembukaan sektor pariwisata Provinsi Bali dilakukan dengan:

- a. Program vaksinasi bagi seluruh masyarakat Bali (tidak hanya nakes, lansia, dan pelayanan publik) – sejumlah 2,25 juta org.
- b. Peningkatan regulasi dan infrastruktur penunjang sektor pariwisata
- c. Koordinasi antara pemerintah daerah provinsi bali dan pelaku usaha tentang implementasi program CHSE sebagai prasyarat pemulihan pariwisata Bali
- d. Koordinasi titik masuk wisatawan menuju Bali (jalur laut dan udara)
- e. Peningkatan pemasaran pariwisata Bali, penetapan hari libur dan cuti bersama, pemberian insentif tertentu bagi wisatawan domestik dan asing, dan MICE
- f. Penciptakan proyek padat karya (inklusif, swadaya, dan swakelola); pelibatan masyarakat sekitar dalam mewujudkan *quality tourism*

6. Kerjasama Internasional Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara Dengan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan.

Selain membuka pariwisata untuk wisatawan domestik, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan membuka pariwisata untuk wisatawan asing. Pembukaan pariwisata internasional ini dilakukan melalui kerjasama dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk *Travel Bubble* Antara Dua Atau Lebih Negara (Rencana Semetara Dengan 5 Negara: China, Korsel, Singapura, UEA , Turki)
- b. Rencana Karantina Bagi Pelaku Perjalanan Internasional Yang Menggunakan Visa Business Essentials

7. Mendorong sektor yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi

Sektor yang memiliki dampak pertumbuhan dan dampak domestik yang tinggi perlu perhatian khusus pemerintah daerah agar upaya pemulihan ekonomi berjalan efektif. Sektor-sektor ini adalah sebagai berikut;

- a. Peternakan
- b. Perkebunan
- c. Perikanan
- d. Industri makanan dan minuman
- e. Industri kerajinan
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor
- h. Penyediaan akomodasi
- i. Penyediaan makan minum

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, rekomendasi strategi pemulihan ekonomi Bali adalah sebagai berikut:

1. Diversifikasi Ekonomi Atau Peningkatan Nilai Tambah Sektor Jasa
2. Identifikasi Sektor Unggulan Provinsi Bali
3. Penguatan Rantai Pasok Pariwisata
4. Mendorong Sektor Unggulan Bali Menjadi Rantai Pasok Daerah Lain
5. Penguatan Klaster Ekonomi Kreatif Dan Digital Bali
6. Peningkatan Ekspor Produk Ekonomi Kreatif Asal Bali Dengan Memanfaatkan Bali Sebagai Tourism Hub
7. Peningkatan *Startup* Di Bali Melalui Penguatan Ekosistem Digital Dan Bisnis
8. Peningkatan Nilai Tambah Sektor Jasa Melalui *Quality Tourism*

Menurut data Bank Indonesia, perekonomian Bali pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif seiring dengan dimulainya distribusi vaksin COVID-19 yang berdampak pada perbaikan *level of confidence* pelaku usaha dan perbaikan mobilitas domestik.

Disamping itu rencana peningkatan investasi swasta dan pemerintah juga turut mendorong pertumbuhan di tahun 2021.

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Distribusi vaksin dan terkendalinya angka Covid-19
2. Perbaikan kunjungan wisatawan nusantara
3. Penambahan proyek investasi swasta dan pemerintah
4. Peningkatan kapasitas fiskal

Sedangkan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Bali adalah sebagai berikut.

1. *Fear Factor* wisman yang masih tinggi.
2. Daya beli yang masih belum pulih ke level pre-COVID-19.
3. Kapasitas produksi belum kembali ke level pre COVID-19
4. Restriksi Perlintasan Orang Antar Negara yang masih berlaku hingga semester II 2021.

Untuk dapat memastikan pertumbuhan ekonomi Bali mengalami akselerasi (progresif), Bank Indonesia merumuskan saran-saran perbaikan ekonomi makro Bali melalui strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi wisatawan nusantara
2. Optimalisasi desa wisata dalam *buble tourism*
3. Mendorong MICE Hybrid
4. Akselerasi penanganan Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi
5. Akselerasi realisasi belanja pemerintah
6. Akselerasi reaktivasi wisatawan mancanegara melalui mekanisme *travel bubble*
7. Akselerasi hilirisasi tambang di Bali dan Nusa Tenggara
8. Akselerasi realisasi investasi melalui pembentukan *investment Center & Create Financing*
9. Peningkatan produktivitas pertanian melalui digitalisasi pertanian

Disamping data tersebut di atas, Pemerintah juga melakukan upaya strategis guna membantu memulihkan perekonomian Bali dan pariwisatanya sekaligus pariwisata nasional melalui rencana pembukaan kembali Kawasan Sanur, Nusa Dua, dan Ubud yang akan dilakukan pada pertengahan tahun 2021 ini. Langkah

strategis ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu Tahap I, Tahap II, dan Tahap III.

Pada Tahap I yang rencananya dilakukan pada Bulan Maret hingga April 2021, dilakukan vaksinasi masal pada penduduk dan pekerja pada ketiga kawasan yang dibarengi dengan penyiapan infrastruktur kesehatan pendukung agar protokol kesehatan dapat tetap berjalan lebih optimal.

Pada Tahap II, yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Mei hingga Juli tahun 2021, Kawasan Sanur, Ubud, dan Nusa Dua akan mulai dibuka untuk wisatawan domestik. Pembukaan ketiga kawasan ini akan dibarengi dengan penerapan prokes ketat bagi pekerja, penduduk, dan wisatawan yang keluar-masuk ketiga kawasan tersebut.

Pada Tahap III, yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Juli hingga Agustus tahun 2021, Bali akan mulai dibuka untuk wisatawan asing khususnya pada Kawasan Sanur, Ubud, dan Nusa Dua.

Diharapkan dengan mulai dibukanya pariwisata internasional ke Provinsi Bali dapat membantu mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga target LPE Provinsi Bali baik oleh Bappenas maupun Pemerintah Provinsi Bali dapat terpenuhi.

Pemerintah Provinsi Bali diharapkan dalam jangka pendek:

- Menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi sektor-sektor yang memiliki risiko penularan yang tinggi agar dapat menghentikan laju penyebaran covid dan juga menggerakkan perekonomian;
- Mempercepat realisasi belanja daerah untuk penanganan covid dan pemulihan ekonomi;
- Memilih program prioritas yang memiliki daya ungkit dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pertanian khususnya Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, Industri Makanan dan Minuman serta Konstruksi.
- Dampak Tenaga kerja dapat diminimalkan dengan berbagai program prioritas diantaranya bantuan sosial, insentif perpajakan, dan bantuan kredit UMKM

Upaya pemulihan ekonomi Provinsi Bali jangka menengah dilakukan dengan melakukan transformasi ekonomi dengan:

- Meningkatkan produktivitas di sektor-sektor unggulan Bali khususnya di sektor pertanian dan industri pengolahan, seperti tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri mamin;
- Meningkatkan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi.
- Mendorong sektor unggulan Bali untuk dapat menjadi rantai pasok provinsi lain di Indonesia.
- KUNCI: Investasi selektif di sector Unggulan (Modal + Teknologi + TK + UMKM)

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Bidang Pariwisata

- a. Penurunan kualitas pariwisata Bali
- b. Semakin berkembangnya destinasi wisata dunia
- c. Ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata
- d. Eksternalitas negatif pariwisata
- e. Promosi event pariwisata yang belum terintegrasi

2. Tantangan Bidang Infrastruktur

Keterbatasan kapasitas Bandara Ngurah Rai dalam kondisi pariwisata normal

3. Tantangan Bidang Pertanian

- a. Alih fungsi lahan pertanian
- b. Ketergantungan pasokan dari daerah lain

4. Tantangan Bidang Ekspor

- a. Rendahnya daya saing komoditas ekspor Bali
- b. Melambatnya kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali

5. Tantangan Keuangan Daerah

Realisasi belanja belum optimal

Tantangan ekonomi Bali meliputi:

1. Penurunan Kualitas Pariwisata Bali

Kinerja Pariwisata Bali Terus Menunjukkan Perlambatan Jumlah Kunjungan Wisman, sejalan dengan itu Kualitas (*spending*) Wisman juga Menurun. Kualitas wisman mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh turunnya *spending* wisman baik berdasarkan data Disparda maupun data Superwisman Bali.

Penurunan kualitas wisman Bali sejalan dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman Tiongkok, dengan tingkat *spending* dan *length of stay* (LOS) yang terendah diantara negara utama Wisman Bali.

2. Berkembangnya Destinasi Wisata Dunia

Semakin berkembangnya tujuan destinasi negara lain, mendorong semakin meningkatnya kunjungan wisman ke negara tersebut sehingga Bali perlu terus berbenah, termasuk dalam hal promosi untuk semakin menarik wisman ke Bali.

Beberapa contoh destinasi wisata dunia yang tengah berkembang antara lain: Phuket-Thailand, Nha Trang-Vietnam, Boracay-Filipina, Sabah-Malaysia. Destinasi wisata tersebut memiliki keunggulan seperti misalnya Transportasi dan fasilitas umum yang lebih baik, biaya lebih murah, lebih tenang, dan lingkungan yang lebih alami.

3. Ketergantungan Ekonomi Bali Terhadap Pariwisata

Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) Mendominasi baik dari sisi kontribusi ekonomi, penyaluran kredit, maupun jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2019, penyaluran kredit perbankan sektor pariwisata adalah 42% dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 33%.

Ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata kembali dibuktikan dengan ikut menurunnya pertumbuhan ekonomi Bali ketika pariwisata mengalami dampak baik secara eksternal maupun internal. Contohnya pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Bali sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 akibat erupsi Gunung Agung. Sektor yang paling berdampak dengan meletusnya Gunung Agung adalah Sektor Pariwisata

karena mengakibatkan ditutupnya Bandara Ngurah Rai untuk sementara waktu yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat okupansi akomodasi wisata di Bali.

Pada tahun 2020, pariwisata Bali kembali diuji dengan mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia. Pandemi ini menyebabkan segala aktivitas masyarakat dibatasi, daerah wisata ditutup, perjalanan dalam negeri dibatasi, dan perjalanan internasional ditutup sementara waktu. Pembatasan aktivitas dan perjalanan ini menjadi penyebab anjloknya sektor pariwisata Bali. Dengan anjloknya pariwisata Bali, perekonomian Bali turut mengalami penurunan. Tercatat Bali mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi paling rendah selama 5 tahun terakhir.

4. Eksternalitas Negatif Pariwisata

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, berdampak pada sejumlah eksternalitas negatif seperti kelangkaan air bersih, kemacetan (di Badung Selatan), tingginya harga bahan makanan akibat tingginya permintaan, serta penumpukan sampah.

5. Promosi Event Belum Terintegrasi

Promosi *event* di Bali belum terintegrasi, sebagian dipromosikan dalam *calender of event* Nasional. Bali sendiri belum memiliki *Calender of Event* terintegrasi sendiri.

6. Keterbatasan Kapasitas Bandara Ngurah Rai

Dalam kondisi normalnya, Bandara Ngurah Rai sudah tidak mampu menampung lonjakan penumpang angkutan udara di Bali. Berbagai upaya peningkatan kapasitas bandara yang telah dan sedang dilakukan seperti perluasan apron dan terminal serta perpanjangan runway dan pembuatan *rapid taxi way* hanya mampu meningkatkan kapasitas Bandara Ngurah Rai sampai dengan tahun 2026. Selebihnya, peningkatan kapasitas Bandara Ngurah Rai sudah tidak lagi dimungkinkan sehingga perlu adanya bandara baru di Bali.

7. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian rata-rata di Provinsi Bali diperkirakan adalah seluas 537 Ha/tahun atau 0,67% tiap tahunnya (Berdasarkan paparan BPS Provinsi Bali Tahun 2020). Angka alih fungsi lahan pertanian ini tergolong tinggi karena berada di atas target yaitu 0,5%. Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki rata-rata penurunan luas lahan pertanian di atas 1% tiap tahunnya.

8. Daya Saing Ekspor Barang Bali Rendah

Komoditas ekspor Bali memiliki daya saing ekspor yang rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar komoditas ekspor Bali memiliki nilai RCA yang rendah (sekitar 1)

9. Melambatnya Kinerja Ekonomi Negara Mitra Dagang Utama

Kinerja ekonomi mitra dagang utama Bali diperkirakan melambat dan lemahnya daya saing ekspor Bali.

10. Realisasi Belanja Daerah Terkonsentrasi Pada Triwulan IV

Realisasi keuangan daerah terkonsentrasi pada triwulan IV di setiap tahun, sehingga kontribusi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Struktur keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah ;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan

daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
 - a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan

asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.

- ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
 - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
 - ✓ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif / biaya sesuai ISO 9001 – 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
 - ✓ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
 - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
 - ✓ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat *Corner*, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :
- ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 3.2.

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020 (Permendagri 13 Tahun 2006)

No Rek	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.041.195.258.456,21	3.398.472.278.306,41	3.718.499.635.346,14	4.023.156.314.134,59	3.069.474.217.923,49
4.1.1	Pajak Daerah	2.593.093.540.850,00	2.872.354.212.630,00	3.230.732.169.802,50	3.463.996.393.584,00	2.607.990.396.693,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	63.858.566.092,00	46.431.881.689,84	40.241.780.029,00	33.841.782.964,00	18.966.859.393,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	172.408.361.957,52	188.456.139.544,28	170.219.137.368,48	171.076.247.197,42	177.395.020.194,90
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	211.834.789.556,69	291.230.044.442,29	277.306.548.146,16	354.241.890.389,17	265.121.941.642,59
4.2	Dana Perimbangan	1.867.010.930.284,00	2.535.995.754.659,00	2.493.979.973.047,00	2.548.063.873.035,00	2.564.355.199.688,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	171.994.343.152,00	169.597.184.795,00	182.554.549.512,00	126.532.557.975,00	206.614.864.352,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	850.144.224.000,00	1.260.842.523.000,00	1.268.585.388.000,00	1.325.847.555.000,00	1.204.700.789.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	844.872.363.132,00	1.105.556.046.864,00	1.042.840.035.535,00	1.095.683.760.060,00	1.153.039.546.336,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	340.811.565.515,65	57.693.635.493,03	46.888.000.000,00	74.318.684.000,00	84.510.282.004,00
4.3.1	Hibah	4.890.000.000,00	15.654.526.300,77	5.388.000.000,00	5.884.278.000,00	5.708.000.004,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	41.500.000.000,00	68.434.406.000,00	78.802.282.000,00
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	330.921.565.515,65	34.539.109.192,26	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	5.249.017.754.255,86	5.992.161.668.458,44	6.259.367.608.393,14	6.645.538.871.169,59	5.718.339.699.615,49

Sumber : Realisasi APBD 2016-2020

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian proyeksi Pendapatan Daerah. Adapun proyeksi pendapatan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.

**Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 dan 2022 (PP Nomor 12 Tahun 2019)**

NO	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	6.035.277.798.137,00	4.217.952.282.405,00	-1.817.325.515.732,00
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.176.436.045.037,00	2.799.077.312.130,00	-377.358.732.907,00
4.1.1.	Pajak Daerah	2.748.282.229.488,00	2.394.661.342.388,00	-353.620.887.100,00
4.1.2.	Retribusi Daerah	19.360.440.700,00	20.679.807.850,00	1.319.367.150,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	144.305.193.850,00	128.396.352.052,00	-15.908.841.798,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264.488.180.999,00	255.339.809.840,00	-9.148.371.159,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.853.133.753.100,00	1.413.166.970.275,00	-1.439.966.782.825,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.853.133.753.100,00	1.413.166.970.275,00	-1.439.966.782.825,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.815.549.490.100,00	1.413.166.970.275,00	-1.402.382.519.825,00
	- DBH	161.216.599.100,00	171.900.657.275,00	10.684.058.175,00
	- DAU	1.241.266.313.000,00	1.241.266.313.000,00	0,00
	- DAK	1.413.066.578.000,00	0,00	-1.413.066.578.000,00
4.2.1.2	Dana insentif Daerah	37.584.263.000,00	0,00	-37.584.263.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1	Bagi Hasil Dari Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	0,00
4.3.1	Hibah	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU	0,00	0,00	0,00

Sumber: Proyeksi APBD 2021 & 2022

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro

ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2022 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.

3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja bunga

- d. Belanja subsidi
 - e. Belanja hibah
 - f. Belanja bantuan sosial
2. Belanja Modal
- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.
3. Belanja Tak Terduga
- Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer
- Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Tabel 3.4.**Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

No Rek	Uraian	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.857.588.696.862,33	4.348.259.186.136,59	4.495.096.869.911,27	4.679.217.628.960,53	4.273.707.904.538,51
5.1.1	Belanja Pegawai	753.993.266.108,00	1.493.989.761.722,94	1.571.381.339.168,00	1.567.790.821.733,00	1.572.773.890.739,53
5.1.3	Belanja Subsidi	9.990.000.000,00	10.000.000.000,00	9.566.400.000,00	9.903.628.000,00	4.936.000.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	1.116.809.328.526,00	1.122.239.172.548,00	1.072.780.454.888,96	981.767.655.575,81	916.157.568.906,50
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	155.774.827.000,00	11.143.000.000,00	3.189.000.000,00	3.884.500.000,00	3.581.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.026.250.937.576,02	1.098.555.278.556,60	1.207.451.785.444,09	1.302.125.715.639,33	1.054.748.783.171,60
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	794.578.160.468,85	612.177.419.409,05	630.540.390.410,22	812.562.590.085,21	386.649.305.012,58
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	192.177.183,46	154.553.900,00	187.500.000,00	1.182.717.927,18	334.861.356.708,30
5.2	Belanja Langsung	1.563.344.832.441,20	1.722.277.737.598,69	1.503.450.162.370,54	1.839.096.237.361,88	2.084.413.570.725,10
5.2.1	Belanja Pegawai	96.558.764.493,00	13.311.657.356,00	19.056.178.494,00	22.820.243.180,75	24.912.936.161,15
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	735.861.830.573,66	1.048.533.246.877,49	1.043.683.821.530,14	1.259.521.491.822,09	1.601.051.747.498,12
5.2.3	Belanja Modal	730.924.237.374,54	660.432.833.365,20	440.710.162.346,40	556.754.502.359,04	458.448.887.065,83
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.420.933.529.303,53	6.070.536.923.735,28	5.998.547.032.281,81	6.518.313.866.322,41	6.358.121.475.263,61

Sumber : Realisasi APBD 2016-2020

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian proyeksi Belanja Daerah. Belanja Daerah dirinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Tidak lagi diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Adapun proyeksi belanja daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 dan Tahun 2022 (PP Nomor 12 Tahun 2019)

NO	URAIAN	PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	8.537.890.262.352,00	4.760.200.427.351,00	-3.777.689.835.001,00
5.1	Belanja Operasi	4.761.429.797.936,00	3.222.095.436.484,00	-1.539.334.361.452,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.833.334.389.243,00	1.673.632.252.367,00	-159.702.136.876,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.853.567.058.693,00	1.387.096.678.917,00	-466.470.379.776,00
5.1.3	Belanja Bunga	17.775.000.000,00	2.775.000.000,00	-15.000.000.000,00
5.1.4	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	37.500.000,00	-9.962.500.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	994.253.350.000,00	158.434.005.200,00	-835.819.344.800,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	52.500.000.000,00	120.000.000,00	-52.380.000.000,00
5.2	Belanja Modal	2.165.983.388.530,00	354.837.239.325,00	-1.811.146.149.205,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	682.745.000.000,00	7.500.000.000,00	-675.245.000.000,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	92.701.939.237,00	26.857.152.819,00	-65.844.786.418,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.251.305.103.695,00	315.853.996.606,00	-935.451.107.089,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.489.898.830,00	3.550.210.000,00	-108.939.688.830,00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	26.741.446.768,00	1.075.879.900,00	-25.665.566.868,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	54.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-4.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	54.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-4.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	1.556.477.075.886,00	1.133.267.751.542,00	-423.209.324.344,00
5.3.1	Belanja Bagi Hasil	1.084.845.438.642,00	960.335.426.110,00	-124.510.012.532,00
5.3.2	Belanja Bantuan Keuangan	471.631.637.244,00	172.932.325.432,00	-298.699.311.812,00

Sumber : Proyeksi APBD 2021 & 2022

Penurunan beberapa komponen belanja seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja hibah disebabkan antara lain karena belum masuknya Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian pinjaman daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
2. Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
3. Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.6.**Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2016-2020**

No Rek	Uraian	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2018	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020
	Surplus (Defisit)	-171.915.775.047,67	-78.375.255.276,84	260.820.576.111,33	127.225.004.847,18	-639.781.775.648,12
6.	Pembiayaan Daerah	624.677.370.022,76	486.687.088.163,58	441.524.809.255,14	704.590.522.601,47	832.637.635.863,48
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	674.677.370.022,76	486.687.088.163,58	441.914.809.255,14	704.590.522.601,47	832.637.635.863,48
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	674.677.370.022,76	452.761.594.975,09	404.137.168.978,49	702.345.385.366,47	831.863.603.723,48
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	33.925.493.188,49	37.777.640.276,65	2.245.137.235,00	774.032.140,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	674.677.370.022,76	486.687.088.163,58	441.914.809.255,14	704.590.522.601,47	832.637.635.863,48
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	0,00	390.000.000,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50.000.000.000,00	0,00	390.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	452.761.594.975,09	408.311.832.886,74	702.345.385.366,47	831.815.527.448,65	192.855.860.215,36

Sumber : Realisasi APBD 2016-2020

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian proyeksi pembiayaan daerah. Adapun proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021 dan Tahun 2022 (PP Nomor 12 Tahun 2019)

NO	URAIAN	PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
	Surplus (Defisit)	-2.502.612.464.215,00	-542.248.144.946,00	1.960.364.319.269,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	2.502.612.464.215,00	542.248.144.946,00	-1.960.364.319.269,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.547.612.464.215,00	642.248.144.946,00	-1.905.364.319.269,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	1.047.612.464.215,00	642.248.144.946,00	-405.364.319.269,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000.000,00	0,00	-1.500.000.000.000,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	100.000.000.000,00	55.000.000.000,00
6.1.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00		0,00
6.1.2	Penyertaan Modal	45.000.000.000,00		-45.000.000.000,00
6.1.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
6.1.4	Pemberian Dana Pinjaman	0,00		0,00
6.1.5	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00		0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Proyeksi APBD 2021 & 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Tahun 2022 disusun mengacu pada sasaran pada Perda RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Semesta Berencana tahun 2022 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
2. Tujuan dan Sasaran pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2022.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2022. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2022 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang disusun dengan tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 arahan presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan

dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) Pengembangan industri pendukung EBT.
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) Pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan

- 6) Pengembangan industri halal.
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
 - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) Pengelolaan Impor;
 - 4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
 - 5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
 - 6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
 - 7) Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
 - h. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
 - 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
 - 3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
 - 4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata; dan
 - 5) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,

- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
 - 1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - 3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 - 4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) Kesejahteraan Sosial.
- c. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
 - 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - 5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
 - 2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
 - 3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - 5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - 2) Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - 3) Kualitas Pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 - 3) Reforma Agraria; dan
 - 4) Perhutanan Sosial.
- g. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
 - 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 - 3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
 - 4) Prestasi Olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan

kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b. Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;

- 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
 - 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan Budaya Literasi;
 - 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan

- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:
 - a. Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - 3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 - 6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
 - b. Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Konektivitas Jalan;
 - 2) Konektivitas Kereta Api;
 - 3) Konektivitas Laut;
 - 4) Konektivitas Udara; dan
 - 5) Konektivitas Darat.
 - c. Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Transportasi Perkotaan; dan
 - 2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
 - d. Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
 - e. Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - 2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
 - 3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
 - c. Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 - 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 - 3) Pengembangan Industri Hijau.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 - 2) Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan; dan
 - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
 - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 - 2) Transformasi pelayanan publik;
 - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 - 2) Penguatan Keamanan Laut; dan
 - 3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

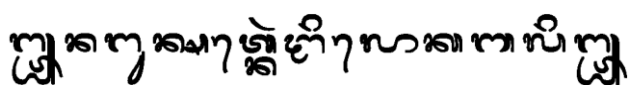
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama lima tahun mendatang yaitu tahun 2018-2023. Visi adalah gambaran arah pembangunan dan kondisi yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023) yang nantinya diwujudkan ke dalam misi. Penyusunan visi dan misi Provinsi Bali dalam RPJMD 2018-2023 memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Visi dan misi RPJMD Provinsi Bali 2018-2023

kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

4.1.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Provinsi Bali tahun 2005-2025 untuk tahap ketiga dan keempat. Tahapan dan prioritas ketiga dan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023. Adapun visi RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:



“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

menuju BALI ERA BARU

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *Krama* dan *gumi* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan *Krama* Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang bisa disebut dengan Genuine Bali.

Sebagaimana halnya manusia biasa, *Krama* Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Dalam memenuhi kehidupan tersebut Negara telah hadir sebagaimana tujuan kemerdekaan Indonesia yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3(tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan *Krama* Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, *Krama* (manusia), dan Kebudayaan Bali (*Genuine* Bali); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Sejalan dengan orientasi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan kebudayaan Bali harus ditempatkan sebagai hulu pembangunan Bali dalam berbagai sektor/bidang secara komprehensif atau mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali; serta pembangunan pertanian dan kebudayaan Bali harus diposisikan sebagai fundamental atau pilar utama dalam membangun perekonomian Bali. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ke depan, arah regulasi daerah dan kebijakan pembangunan sumber daya Bali terutama sektor pertanian dan kebudayaan harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk kebutuhan dasar air dan listrik bagi *Krama* Bali.

Oleh karena itu, orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bali ke depan harus ditata kembali yang diselenggarakan secara terpolo, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali yang berpihak dan taat asas pada *Genuine* Bali yaitu dengan menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana guna

mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia serta mewujudkan Gumi /wilayah Bali yang sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno, Bapak Proklamator dan Bapak Bangsa yaitu: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam koridor Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Orientasi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep *Tri Semaya: Atita* (masa lalu), *Nagata* (masa kini), dan *Wartamana* (masa datang), yaitu kondisi Bali di masa lalu, kondisi Bali di masa kini, dan kondisi Bali di masa datang. Bali di masa lalu ditandai oleh masa keemasan kebudayaan Bali, sebagai masa Romantika; Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan *Krama* Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika.

Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama:

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, *Krama*, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Bali :

- i. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Bali; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara *Pakertih Yadnya* secara periodik, yaitu: *Atma*

Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.

- ii. Sedangkan secara *sakala*, upaya memelihara dan melestarikan Alam Bali dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Bali menjadi hijau, indah, dan bersih.
- iii. Menjadikan Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) *Krama* Bali :

- i. Mengembangkan tata kehidupan *Krama* Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat *Sad Kertih* baik secara *sakala* maupun *niskala: Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.*
- ii. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas *Krama* Bali sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali, yaitu: Pertama, tampilnya jatidiri *Krama* Bali dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas *Krama* Bali dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas *Krama* Bali dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- i. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai ke hilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- ii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Bali yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali; mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Bali.
- iii. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Bali.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan.

- 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar *Krama* Bali: pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 2) Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja *Krama* Bali.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi *Krama* Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 4) Terpenuhinya pendapatan per kapita, dan tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kebutuhan bagi *Krama* Bali.
- 5) Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan *Krama* Bali.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

- 1) Penguatan dan pelembagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
- 2) Pengarusutamaan sumber daya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
- 3) Peningkatan daya saing *Krama* Bali.
- 4) Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindh terhadap Bali.
- 5) Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif *Krama* Bali.

Dengan tiga dimensi tersebut akan terwujud kehidupan *Krama* Bali dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

4.1.2. Misi, Tujuan, dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi “***Nangun Sat Kerthi Loka Bali***” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, maka ditempuh dengan misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI		
T. Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni
	4	Terkendalnya Stabilitas Harga Pangan
MISI 2. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN PANGAN, MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PERTANIAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI		
T. Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali
MISI 3. MENGEMBANGKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL DAN BERKUALITAS SERTA DIDUKUNG DENGAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN DATA BASE RIWAYAT KESEHATAN KRAMA BALI BERBASIS KECAMATAN.		
T. Meningkatnya derajat kesehatan Krama Bali	1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali
	2	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali
	3	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	
MISI 4. MEMASTIKAN TERSEDIA NYA PELAYANAN PENDIDIKAN YANG TERJANGKAU, MERATA, ADIL, DAN BERKUALITAS SERTA MELAKSANAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN		
T. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun
MISI 5. MENGEMBANGKAN SISTEM PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH BERBASIS KEAGAMAAN HINDU DALAM BENTUK PASRAMAN DI DESA PEKRAMAN/DESA ADAT		
T. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pasraman	
MISI 6. MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING TINGGI YAITU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS: BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERMORAL SERTA MEMILIKI JATI DIRI YANG KOKOH YANG DIKEMBANGKAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KRAMA BALI		
T. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	
MISI 7. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL SECARA KONPREHENSIF DAN TERINTEGRASI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI SEJAK MULAI KELAHIRAN, TUMBUH DAN BERKEMBANG SAMPAI AKHIR MASA KEHIDUPANNYA		
T. Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bali	
MISI 8. MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG KOMPETEN, PRODUKTIF, BERKUALITAS DAN MEMILIKI DAYA SAING TINGGI SERTA MEMPERLUAS AKSES KESEMPATAN KERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
T. Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
	2	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri
MISI 9. MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA YANG KOMPERHENSIF, MUDAH DIJANGKAU, BERMUTU, DAN TERINTEGRASI BAGI KRAMA BALI YANG BEKERJA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI		
T. Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	
T. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.	

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	
MISI 11. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI SECARA SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH		
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	
MISI 12. MEMPERKUAT KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DESA PAKRAMAN/DESA ADAT DAN SUBAK DALAM MENYELENGARAKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG MELIPUTI PARAHYANGAN, PAWONGAN, DAN PALEMAHAN		
T. Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak	
MISI 13. MENGEMBANGKAN DESTINASI DAN PRODUK PARIWISATA BARU BERBASIS BUDAYA DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT YANG TERINTEGRASI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI		
T. Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas
	2	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali
MISI 14. MENINGKATKAN PROMOSI PARIWISATA BALI DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI SECARA BERSINERGI ANTAR KABUPATEN/KOTA SE-BALI DENGAN MENGEMBANGKAN INOVASI DAN KREATIFITAS BARU		
T. Meningkatnya pasar pariwisata Bali	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global	
MISI 15. MENINGKATKAN STANDAR KUALITAS PELAYANAN KEPARIWISATAAN SECARA KONPREHENSIF		
T. Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata
MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas		
T. Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI		
T. Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali
MISI 18. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (DARAT, LAUT DAN UDARA) SECARA TERINTEGRASI SERTA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN SERTA AKSES DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI BALI		
T. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi	
MISI 19. MENGEMBANGKAN SISTEM KEAMANAN TERPADU YANG DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN		
T. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI-NILAI BUDAYA BALI		
T. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	
MISI 21. MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN KRAMA BALI, MENATA WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH		
T1. Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan	

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD
T2. Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH	
T1. Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik
T2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
	2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan
- Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan
- Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- Prioritas 5 : Pariwisata
- Prioritas 6 : Penguatan Infrastruktur
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.2.

Perbandingan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah	
1	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1	Pangan, Sandang dan Papan

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Daerah	
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2	Pariwisata
3	Meningkatkan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5	Penguatan Infrastruktur
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	6	Kesehatan dan Pendidikan
7	Memperkuat Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik	7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.3.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
1	Pangan, Sandang dan Papan	-	Meningkatnya ketahanan pangan bagi <i>Krama</i> Bali
		-	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin
		-	Meningkatnya rasio rumah tangga <i>Krama</i> Bali memiliki rumah layak huni
		-	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan
		-	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal
		-	Meningkatnya kualitas hasil pertanian <i>Krama</i> Bali

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
		-	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian <i>Krama Bali</i>
		-	Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak <i>Krama Bali</i>
		-	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal
		-	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor
		-	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah <i>Krama Bali</i>
2	Kesehatan dan Pendidikan	-	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh <i>Krama Bali</i>
		-	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan <i>Krama Bali</i>
		-	Meningkatnya peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat
		-	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		-	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun
		-	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pesraman
		-	Meningkatnya daya saing SDM <i>Krama Bali</i>
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	-	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
		-	Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri
		-	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	-	Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.
		-	Meningkatnya kualitas tata kehidupan <i>Krama Bali</i> berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi
		-	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak
		-	Meningkatnya keharmonisan tata kehidupan <i>Krama Bali</i> berbasis wilayah dan lingkungan

Prioritas Pembangunan Daerah		Sasaran Pembangunan Daerah	
5	Pariwisata	-	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas
		-	Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali
		-	Meningkatnya pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global
		-	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan
		-	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata
		-	Meningkatnya rasa aman dan nyaman <i>Krama</i> Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
		-	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali
6	Penguatan Infrastruktur	-	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan
		-	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	Meningkatnya peran serta <i>Krama</i> Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis
		-	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik
		-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
		-	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2022, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai berikut :

**“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN
BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN
INDUSTRI”**

4.3. Paradigma Pembangunan Bali

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi

Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi *Krama* Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi *Sakala Niskala*

Pembangunan yang mengandung dimensi *sakala* dan *niskala* yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan *Hyang Widhi Wasa* sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-

Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya

berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, *lascarya*, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin Gumi Bali*, guna menjaga dan memelihara *Genuine Bali*; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Provinsi Bali terdiri dari 9 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana. Masing-masing wilayah kabupaten dan kota memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Provinsi Bali sendiri memiliki arah pengembangan wilayah yang disusun untuk dapat menjadi *guide lines* bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayahnya. Tujuannya adalah agar tercipta keserasian dan keterpaduan pengembangan baik antar wilayah maupun dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.

5.1. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota

Sebagai bentuk optimal dalam membangun wilayah Provinsi Bali maka ditetapkan arahan pengembangan skala wilayah kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi yang lebih teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

A. Kabupaten Badung

Kabupaten Badung, yang menjadi pintu gerbang internasional Provinsi Bali sekaligus pusat pariwisatanya, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 Km² atau 7,42% dari luas wilayah Provinsi Bali.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Badung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator

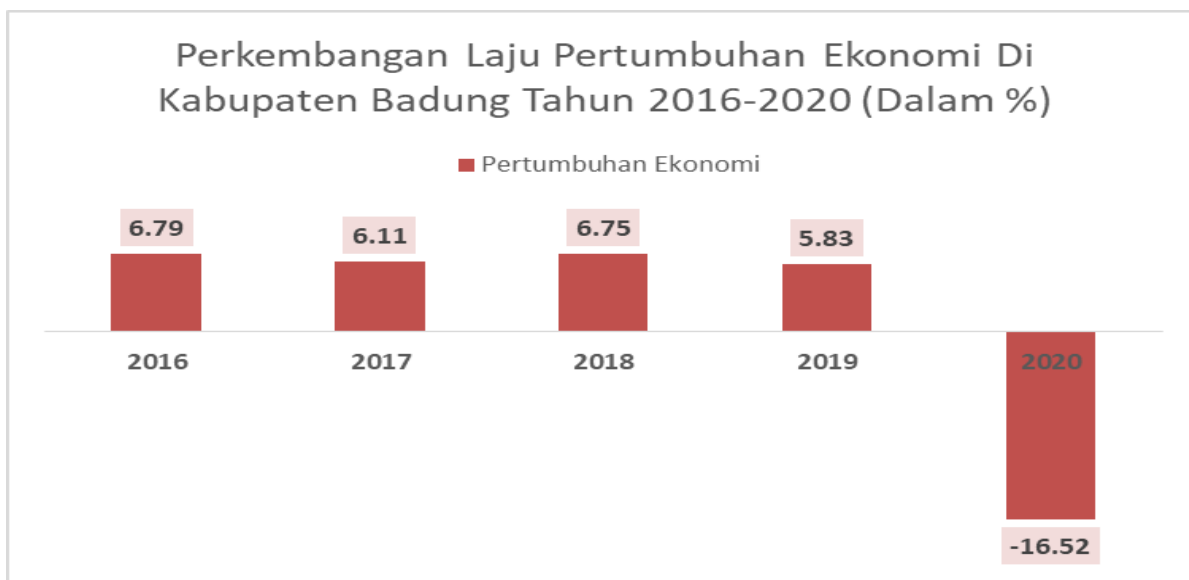
yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan menurun pada periode tahun 2016-2020. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,79% dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -16,52%.

Kontraksi pada laju pertumbuhan ekonomi Badung pada tahun 2020 merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Bahkan angka ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mengalami kontraksi -9,31% pada tahun 2020.

Kabupaten Badung yang mengandalkan sektor pariwisata dan transportasi sebagai tulang punggung ekonominya tentu mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 paling besar di Provinsi Bali. Adanya penutupan pintu masuk internasional bagi wisatawan asing, pembatasan wisatawan domestik, dan penutupan sebagian kawasan wisata menyebabkan perekonomian Kabupaten Badung mengalami penurunan di tahun 2020.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021

Gambar 5.1.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung
Tahun 2016-2020

b. Angka Kemiskinan

Meskipun pertumbuhan ekonominya mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun angka kemiskinan Kabupaten Badung memiliki trend positif selama periode 2016-2020. Angka kemiskinan di Kabupaten Badung mengalami penurunan secara bertahap namun sedikit meningkat di tahun 2020. Pada tahun 2016 tercatat terdapat 2,06% penduduk di Kabupaten Badung yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019, angka penduduk miskin ini berkurang menjadi hanya 1,78%. Namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,02%

Angka kemiskinan Kabupaten Badung pada tahun 2020 berada jauh di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,45% dan Nasional dengan angka kemiskinan 10,19%. Kabupaten Badung, pada tahun 2020, tercatat memiliki angka kemiskinan paling rendah di Provinsi Bali bahkan jauh melampaui kabupaten/kota lainnya.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021

Gambar 5.2.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung
Tahun 2016-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun pada jalur yang positif pada periode 2016-2019. Pada tahun 2016 tercatat angka pengangguran sebesar 0,34%. Pada tahun 2017 angka pengangguran mengalami peningkatan menjadi 0,48% atau meningkat 0,14 poin. Namun, trend positif terjadi yaitu angka pengangguran mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,44% dan kembali menurun di tahun 2019 menjadi 0,38%.

Pada tahun 2020 terjadi lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Badung menjadi 6,92%. Lonjakan secara massif dan dalam waktu singkat ini merupakan imbas dari pembatasan sosial skala besar yang dilakukan di Kabupaten Badung. Pembatasan aktivitas sektor pariwisata sebagai strategi pencegahan penyebarluasan pandemi Covid-19 memberikan dampak ditutupnya kawasan wisata dan akomodasi wisata di Kabupaten Badung. Akibatnya banyak pekerja di sektor pariwisata yang harus dirumahkan.

Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Badung pada tahun 2020 lebih tinggi dari Provinsi Bali dengan TPT 5,63%. Selama periode 2015-2019, TPT Kabupaten Badung selalu di bawah 0,5% sedangkan Provinsi Bali di atas 1%. Bahkan TPT Kabupaten Badung merupakan yang terendah di Bali selama periode tersebut.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021

Gambar 5.3.

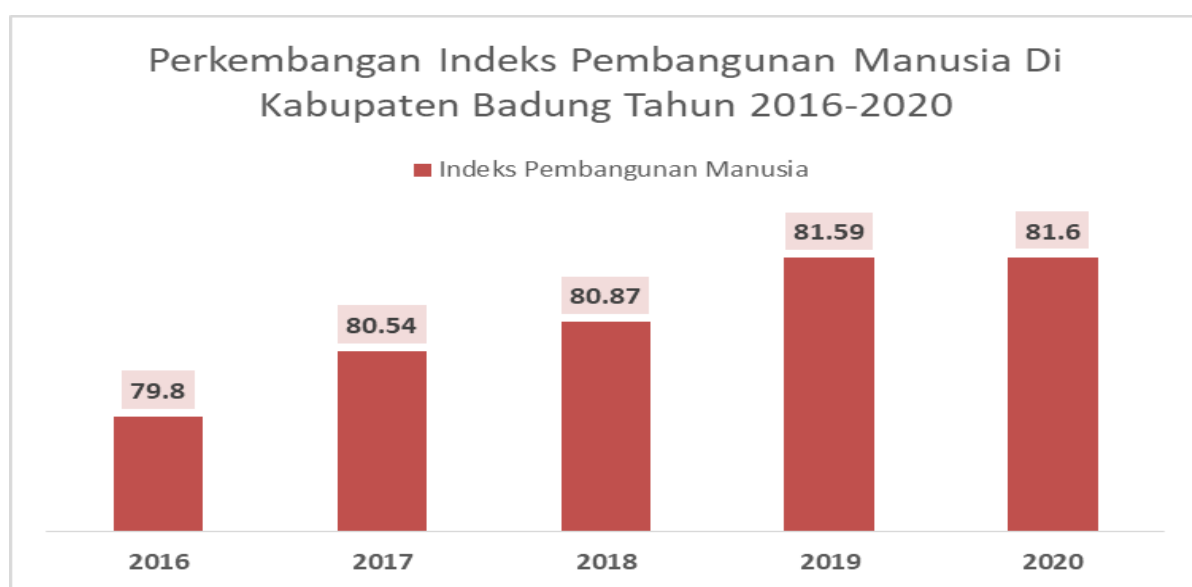
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2016-2020 yang menandakan kualitas sumber daya manusia-nya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 tercatat IPM Kabupaten Badung adalah 79,80 dan pada tahun 2020 meningkat 81,60.

IPM Kabupaten Badung pada tahun 2020 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 maupun IPM Nasional yang hanya 71,94. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Badung lebih baik dari rata-rata wilayah lainnya

baik di Provinsi Bali maupun nasional. Pada tahun 2020, IPM Badung merupakan tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang memiliki IPM di atas Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021

Gambar 5.4.

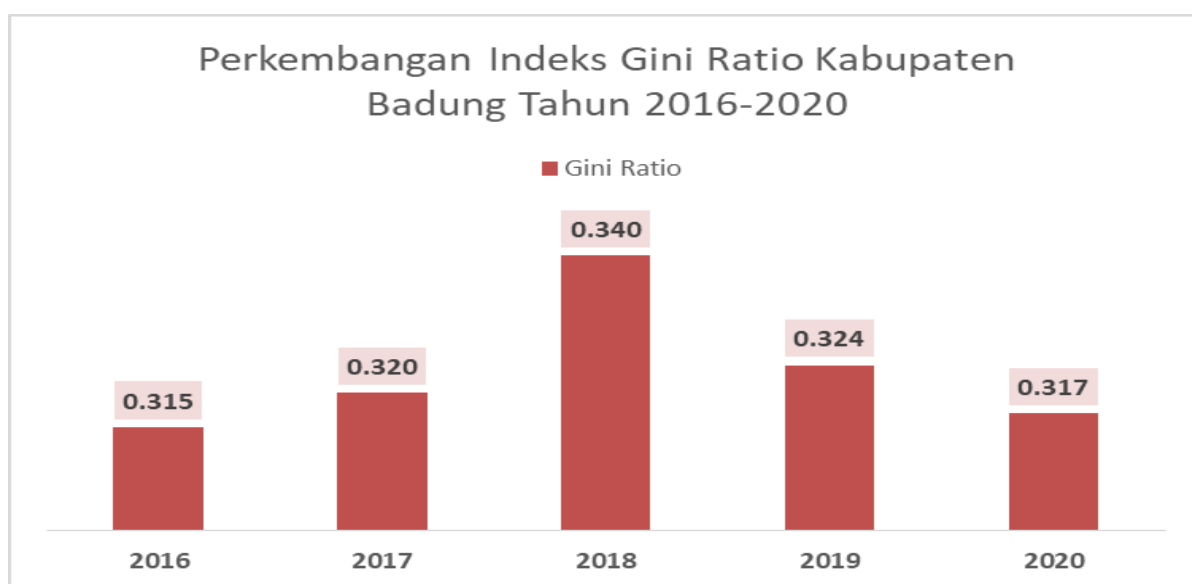
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

e. Gini Ratio

Gini ratio di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama periode 2016-2020 namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam Kabupaten Badung semakin menurun meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2016-2018, Kabupaten Badung tergolong pada kelompok wilayah dengan ketimpangan rendah.

Indeks Gini Ratio tertinggi dialami oleh Kabupaten Badung pada tahun 2018 yaitu dengan indeks 0,340 meningkat dari tahun 2017 dengan indeks 3,20. Pada tahun 2019 Gini Ratio Badung menurun menjadi 0,324 dan

kembali menurun tahun berikutnya menjadi 0,317. Meskipun pada tahun 2020 Kabupaten Badung mengalami imbas yang cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan jatuhnya laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, namun ketimpangan antar kelompok penduduk justru menurun. Meskipun dalam keadaan terpuruk, antar kelompok penduduk di Kabupaten Badung mengalami perbaikan kesetaraan kualitas dan kuantitas pendapatan. Meskipun tidak signifikan tapi menurunnya Indeks Gini Ratio dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pemerataan pembangunan di Kabupaten Badung.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021

Gambar 5.5.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung
Tahun 2016-2020

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Penyelarasan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Badung terhadap tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG
“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI”	“PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REVITALISASI SEKTOR UNGGULAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN”

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Badung tahun 2022 yang sudah terselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG
1	Pangan, Sandang dan Papan	6. Pembangunan Ekonomi 4. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
2	Kesehatan dan Pendidikan	1. Pendidikan, Riset dan Inovasi 2. Kesehatan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	3. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
5	Pariwisata	4. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
6	Penguatan Infrastruktur	5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan Dan Permukiman 8. Penataan ruang dan lingkungan hidup.
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 9. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung 2022 adalah sebagai berikut.

A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
2. Revitalisasi sistem pertanian organik
3. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian
4. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah
5. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :

1. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif
4. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan
5. Peningkatan kualitas layanan mulai pustu, puskesmas hingga RSUD
6. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru
7. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :

1. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah
2. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi
3. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja
4. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja
6. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja

D. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya :

1. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama
2. Memperkuat pelaksanaan *sradha bakti* yang berbasis pada penguatan budi pekerti
3. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya
4. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka
5. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.

E. Bidang Pariwisata :

1. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan
2. Memperkuat citra dan “*positioning*” kepariwisataan Kabupaten Badung
3. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan
4. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan
5. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi-destinasi baru yang berkualitas
6. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.

F. Penguatan Infrastruktur :

1. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
2. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).

4. Pembangunan daya tarik wisata baru

G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Badung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2022

No	Indikator	Target Capaian 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	2-3%
2	Angka Kemiskinan	1,9-2,1%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,01-6,50%
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,60-81,70
5	Gini Ratio	0,339-0,345

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021

B. Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem, yang merupakan kabupaten di ujung timur Provinsi Bali sekaligus menjadi pintu gerbang bagian Timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem memiliki luas wilayah 839,54 Km² atau 14,89% dari total luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan

Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Selat.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Karangasem merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem pada periode 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi ekonomi Kabupaten Karangasem terjadi pada tahun 2016 yaitu berada pada angka 5,92%. Namun, angka ini kemudian menurun menjadi 5,50% di tahun 2019.

Angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 masih berada di bawah Provinsi Bali yaitu 5,60%. Artinya, secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem tergolong rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem merupakan ketiga terendah setelah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem di tahun 2020 belum dapat dipastikan karena belum adanya rilis data resmi dari Pemerintah Kabupaten Karangasem.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021

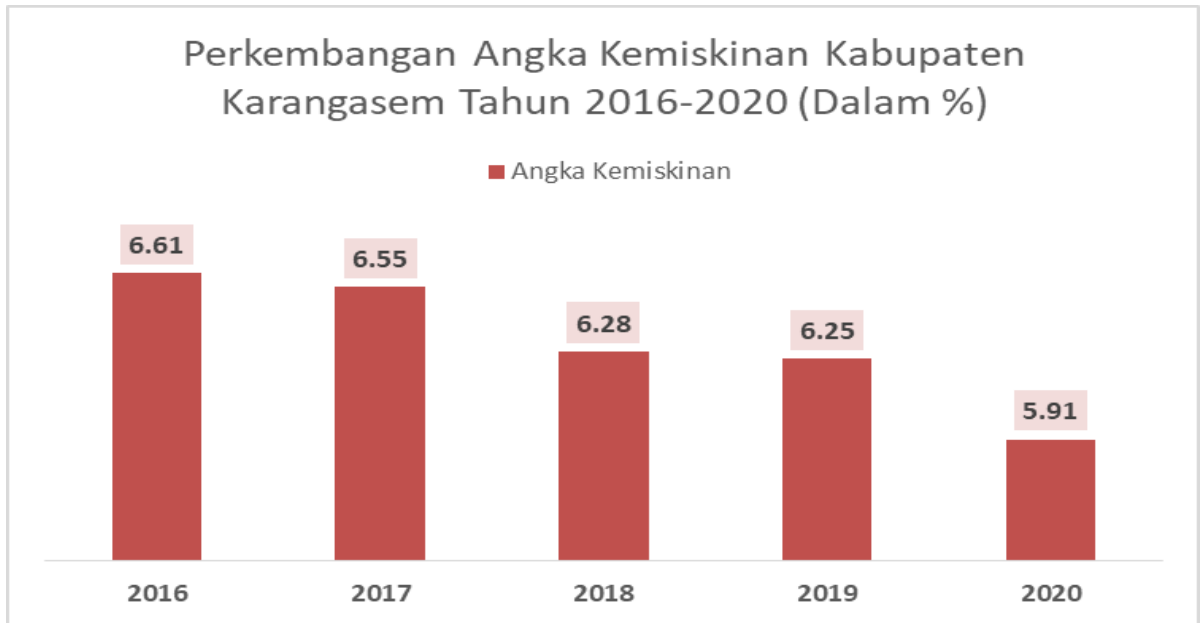
Gambar 5.6.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem
Tahun 2016-2020

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Pada tahun 2020, angka penduduk miskin di Kabupaten Karangasem adalah 5,91% yang merupakan terendah selama 5 tahun terakhir. Angka penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,61%. Pada tahun berikutnya yaitu 2017, menurun menjadi 6,55%. Penurunan ini terus berlanjut hingga ke tahun 2020.

Meskipun memiliki trend yang sangat positif, namun angka kemiskinan Kabupaten Karangasem pada tahun 2020 masih berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,45% dan di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,19%. Artinya, angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem tergolong tinggi di Provinsi Bali.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021

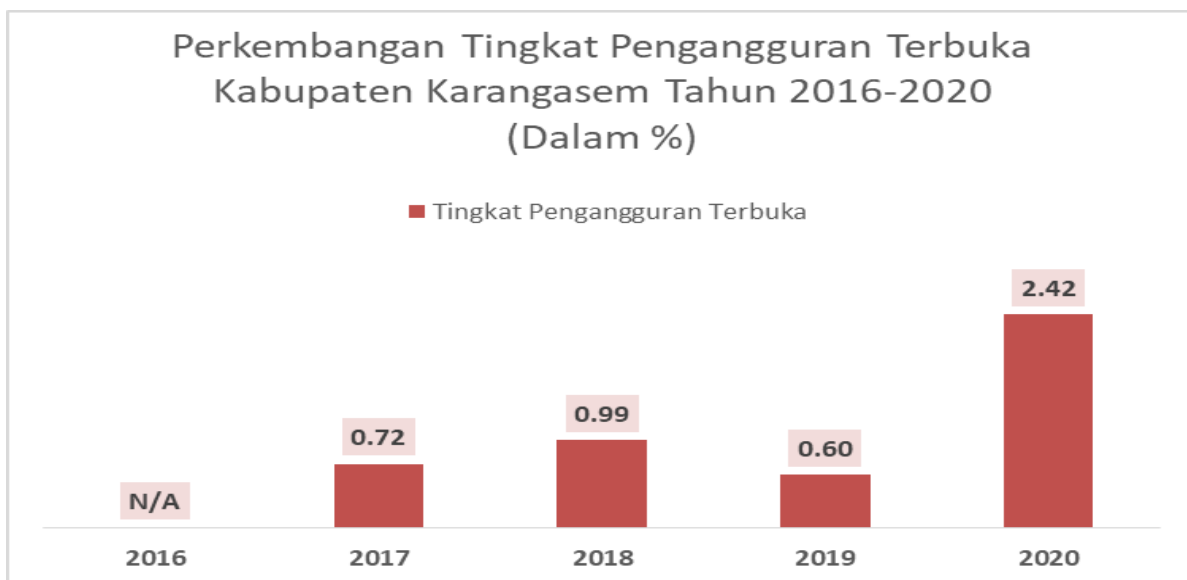
Gambar 5.7.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem
Tahun 2016-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem mengalami fluktuasi pada periode tahun 2016-2020. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 2,42%. Artinya terdapat 2,42% penduduk yang menganggur pada penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2020 jauh berada di bawah Provinsi Bali yaitu dengan angka 5,63%. Artinya, tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali. Namun demikian, lonjakan TPT Karangasem tergolong signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun 2019 TPT Kabupaten Karangasem tercatat hanya 0,60%.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Gambar 5.8.

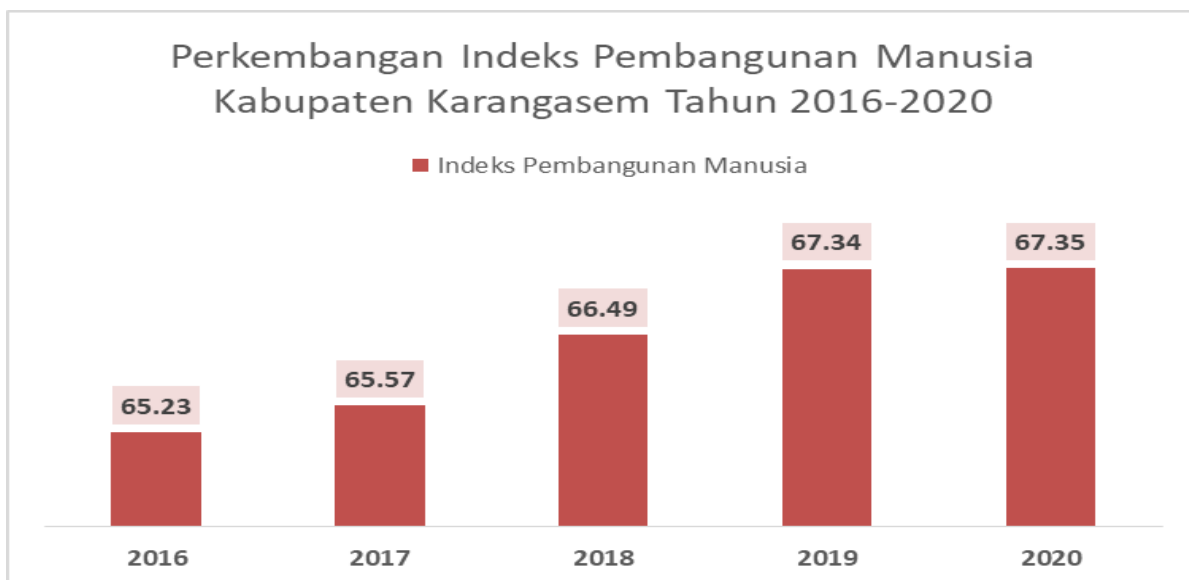
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki manfaat, salah satunya, adalah sebagai tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka kualitas sumber daya manusia masyarakatnya juga semakin baik.

IPM Kabupaten Karangasem mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir dimana secara bertahap terus meningkat selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016, IPM Kabupaten Karangasem adalah 65,23 dan pada tahun 2020 adalah 67,35.

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Karangasem pada tahun 2020 ini masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 maupun IPM Nasional yaitu 71,94. Artinya kualitas sumberdaya manusia masyarakat di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali bahkan menjadi yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021

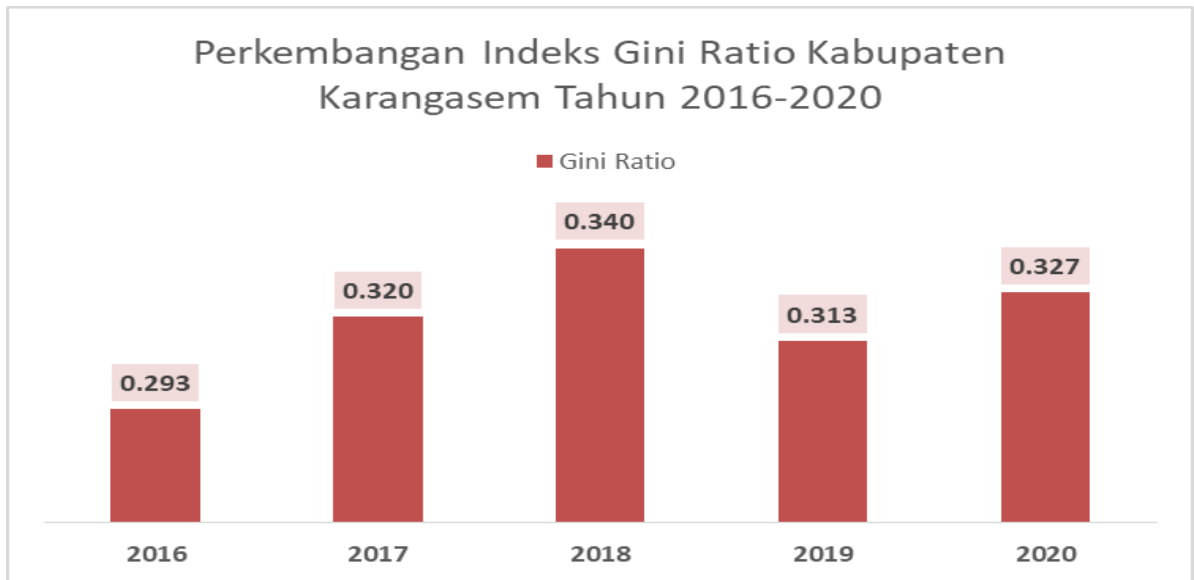
Gambar 5.9.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem
Tahun 2016-2020.

e. Gini Ratio

Gini Ratio Kabupaten Karangasem, sebagai salah satu indikator ketimpangan antar wilayah, menunjukkan angka yang fluktuatif selama periode 2016-2020. Gini ratio tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 0,340 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 0,293.

Kecenderungan indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir. Periode tahun 2016-2018, Indeks Gini Ratio Karangasem mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu 0,047 poin. Meskipun kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 0,313 namun kembali meningkat menjadi 0,327 di tahun 2020. Meskipun mengalami kecenderungan meningkat, Kabupaten Karangasem masih berada di dalam klasifikasi wilayah dengan ketimpangan antar kelompok penduduk yang rendah karena memiliki Indeks Gini Ratio <0,390. Namun, yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah adalah perlunya program dan kebijakan khusus agar trend Indeks Gini Ratio yang meningkat selama 5 tahun terakhir tidak terjadi di periode berikutnya.



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Gambar 5.10.

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020.

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Penyelarasan tema pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM
“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI”	“PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL MELALUI PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG TANGGUH DAN MANDIRI, PENGEMBANGAN SDM YANG HANDAL, PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN BUDAYA, DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI”

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Keselarasan antara prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM
1	Pangan, Sandang, Papan	Bidang Pangan, Sandang dan Papan
2	Kesehatan dan Pendidikan	Bidang Kesehatan dan Pendidikan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Pariwisata	Bidang Pariwisata
6	Penguatan Infrastruktur	Penguatan Infrastruktur
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021

Arah kebijakan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

a) Bidang Pangan, Sandang dan Papan

1) Bidang Pangan

diarahkan untuk :

- a. Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan Karangasem
- b. Memetakan potensi pertanian (kacang tanah, kacang merah dan jagung), perkebunan (salak, jambu mente dan kelapa), peternakan (sapi, babi, ayam dan kambing), kelautan (tangkapan ikan nelayan) dan perikanan (gurami, nila dan lele) di Kabupaten Karangasem

- c. Memetakan dan mengembangkan potensi industri pengrajin arak
- d. Program yang mendukung peningkatan kedaulatan pangan dengan melalui kedaulatan beras
- e. Mengembangkan pertanian Taman Gumi Banten
- f. Mendorong pemanfaatan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi
- g. Pengembangbiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka
- h. Mendorong Program Revitalisasi Subak Lestari/ Subak Abadi

2) Bidang Sandang

diarahkan untuk :

- a. Penyediaan bahan baku tenun (Perkebunan/ulat sutra)
- b. Pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha tenun
- d. Pembentukan dan penguatan koperasi perajin tenun
- e. Fasilitas pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun

3) Bidang Papan :

diarahkan untuk :

- a. Pemberian bantuan untuk membangun/ merehabilitasi rumah yang tidak layak huni
- b. Penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin
- c. Pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM
- d. Pembangunan tempat-tempat pembuangan sampah
- e. Pembangunan dan normalisasi sanitasi pemukiman

b) Bidang Kesehatan dan Pendidikan

1) Bidang Kesehatan

diarahkan untuk :

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan standar dan kualitas yang sama :
Merevitalisasi dan penyediaan tenaga kesehatan bagi POSKESDES dan POLINDES/PUSTU di masing-masing desa.
- b. Menyediakan mobil keliling pelayanan kesehatan ke desa-desa (pelayanan kegawat darurat) atau antar jemput pasien.
- c. Membangun puskesmas rawat inap yang berkualitas sesuai standar ISO dengan model bangunan dan standar yang sama disemua kecamatan bersinergi dengan Provinsi Bali.
- d. Pengangkatan tenaga medis dan paramedis untuk ditugaskan di Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan RSUD yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan.
- e. Pengadaan Dokter Spesialis Kandungan dan anak melalui Pola Ikatan Dinas yang ditugaskan di Puskesmas Rawat Inap.
- f. Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap, dan RSUD.
- g. Pengembangan sistem dan data based riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan Krama Karangasem berbasis desa.

2) Bidang Pendidikan

diarahkan untuk:

- a. Pemenuhan kebutuhan pendidikan PAUD/TK
 - 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan PAUD/TK di desa adat : pendidikan PAUD/TK berbahasa Bali, pendidikan PAUD/TK Hindu
 - 2) Pemenuhan sarana dan prasaran pendidikan : Alat Peraga Edukasi (APE)

- 3) Pemenuhan guru PAUD/TK
 - 4) Pendidikan PAUD/TK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat
- b. Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar (SD dan SMP).
- 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan SD dan SMP.
 - 2) Peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP.
 - 3) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan : Laboratorium, Perpustakaan, penyediaan buku – buku pelajaran, pemberian subsidi untuk buku pelajaran, sarana untuk olahraga, seni, dan budaya, sarana teknologi informasi (TI), sarana untuk usaha kesehatan sekolah (UKS) dan sarana untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
- c. Pemenuhan kebutuhan program Wajib Belajar 12 tahun bersinergi dengan Provinsi Bali.
- 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA dan SMK, dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.
 - 2) Pemenuhan Guru SMK dan Guru SMK Pendidikan Agama Hindu sesuai dengan kebutuhan pendidikan vokasi (keahlian / keterampilan) bersinergi dengan Provinsi Bali.
 - 3) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan *workshop*.
- d. Memperjuangkan Pendidikan Tinggi Akademi Komunitas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan Krama Karangasem.

c) Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

- 1) Bidang Jaminan Sosial

diarahkan untuk :

- a. Pemberian santunan dan tunjangan kepada penderita cacat permanen dan lanjut usia
- b. Pemberian Santunan Kematian Masyarakat (Santimas)
- c. Fasilitas dan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara Pitra Yadnya : Ngaben Gotong Royong

2) Bidang Ketenagakerjaan :

diarahkan untuk :

- a. Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri (investasi dalam dan luar negeri).
- b. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan antar kabupaten.
- c. Memberi pinjaman lunak kepada masyarakat Karangasem yang ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja muda dan pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja.
- d. Mewajibkan kepada para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Adat).
- e. Membantu memfasilitasi Pedagang Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berciri khas Karangasem.
- f. Meningkatkan Kompetensi Produktivitas dan daya saing tenaga kerja : Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) misalnya : Bidang Pariwisata, Bidang Pengerajin Arak, Pertukangan, Bengkel, Tenun Ikat, Inovasi Pertanian, Kerajinan anyaman (ate, bambu dan daun lontar).

d) Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

1) Bidang Adat :

diarahkan untuk :

- a. Program Penguatan Keberadaan Desa Adat.

1. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa Adat : Banjar, Sekeha Teruna dan Sekeha-sekeha lainnya, dan lembaga lainnya.
2. Membantu kebutuhan Prajuru (Prajuru Desa Adat dan Prajuru Banjar) yang dipilih sesuai dengan awig-awig/pararem yang berlaku di wilayah Desa Adat.
3. Melaksanakan pelatihan Prajuru untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan adat meliputi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan.
4. Menyediakan pecalang dan busananya sesuai dengan kebutuhan yang memiliki identitas sesuai dengan Pakem (tata busana, estetika, dll) yang berlaku di Desa Adat dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Melaksanakan pelatihan untuk memberi pemahaman mengenai tugas pecalang yang berkaitan dengan keamanan di wilayah/wewidangan Desa Adat bekerja sama dengan kepolisian setempat.
6. Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan pecalang.
7. Memberi bantuan fasilitas dan anggaran untuk program di Desa Adat.
8. Mendorong dan memfasilitasi Desa Adat untuk memiliki kantor yang Refresentatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan Adat.
9. Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat hukum Adat/awig/perarem di Desa Adat.
10. Memberi perlindungan terhadap aset (milik/Druwe Desa)
11. Memperkuat perekonomian berbasis Desa Adat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat)

- b. Memberdayakan Desa Adat sebagai lembaga untuk melaksanakan fungsi :
 - 1. Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non formal)
 - 2. Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan bagi Krama Karangasem termasuk sekeha teruna teruni (generasi muda)
 - 3. Pengembangan jati diri Krama Karangasem sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.
 - c. Memfasilitasi membangun dan menyediakan kebutuhan kantor Majelis Madya Desa Adat yang Refresentatif dengan sarana prasarana serta fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan Adat
 - d. Memelihara, Merevitalisasi, dan mengembangkan Adat Istiadat dan tradisi masyarakat Karangasem
- 2) Bidang Agama :
- diarahkan untuk :
- a. Membantu Merehabilitasi Pura Kahyangan Desa dan Pura Maksan serta pura lainnya (melalui hibah)
 - b. Memberi bantuan sarana peribadatan Pura Kahyangan Desa dan Pura Maksan serta pura lainnya
 - c. Menata kawasan / lingkungan Pura agar menjadi tempat yang Nyaman, Aman, Damai, Indah
 - d. Memperhatikan tempat parkir, fasilitas MCK, dan fasilitas lain yang layak di kawasan Pura Kahyangan Jagat yang ada di wilayah Karangasem
 - e. Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku
 - f. Memperhatikan sradha dan bhakti umat Hindu :
 - 1. Menyelenggarakan kegiatan dharmawacana di Pura di Desa Adat, atau tempat umum
 - 2. Penyebarluasan buku pendidikan keagamaan untuk umat Hindu di Desa Adat

3. Mengadakan program pemahaman dan pelatihan keagamaan kepada umat Hindu terutama generasi muda
- g. Memberdayakan dan membantu Parisada Hindu Dharma Indonesia kabupaten dan kecamatan agar mampu berperan secara optimal dalam membina umat Hindu di Karangasem.
- h. Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura
- i. Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikat dengan Peraturan Bupati / Peraturan lainnya.
- j. Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral melalui peraturan
- k. Mengangkat guru kontrak Agama Hindu untuk memenuhi pendidikan Agama Hindu yang ditugaskan di SD dan SMP
- l. Fasilitas dan pemberdayaan kepada Penyuluh Agama dan Penyuluh Bahasa Bali
- m. Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama di seluruh Kabupaten Karangasem

3) Bidang Tradisi, Seni dan Budaya :

diarahkan untuk :

- a. Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Karangasem dengan pelembagaan dan internalisasi nilai – nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, non formal dan informal guna memperkokoh jati diri Krama Karangasem dan memperkuat integritas moral Krama Karangasem
- b. Menjadikan tradisi, seni, dan budaya sebagai identitas dalam segala aspek kehidupan Krama Karangasem
- c. Program untuk memajukan kebudayaan di Karangasem melalui peningkatan perlindungan,

pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan objek – objek pemajuan kebudayaan di Karangasem

- d. Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan tradisi, seni, sastra, dan budaya Krama Karangasem
- e. Mengembangkan tata kehidupan Krama Karangasem berupa perayaan dan peringatan hari – hari secara sekala dan niskala yang bersumber dari nilai – nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih
- f. Memberi apresiasi dan fasilitasi mengenai keberadaan seni, sastra, dan budaya yang mencakup :
 - 1) Membangun dan memperkuat kelembagaan seni, sastra dan budaya (Sanggar, Yayasan, Sekaa dan lain lain) dengan menerapkan standarisasi dan sertifikasi
 - 2) Memfasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan seni, sastra dan budaya Karangasem
 - 3) Memanfaatkan tenaga kontrak yang bertugas mengajar seni, sastra dan budaya serta agama hindu untuk membina sanggar – sanggar dan lembaga lain yang ada di desa adat.
 - 4) Memberikan apresiasi kepada pelaku seni yang bertugas mengajar seni, sastra dan budaya serta agama hindu untuk membina sanggar-sanggar dan lembaga lain yang ada di desa adat.

e) Bidang Pariwisata

diarahkan untuk :

- 1) Mengembangkan destinasi Wisata Baru : Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam, Wisata Minat.
- 2) Pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan *green tourism* / penggunaan material yang *renewable* (natural dan ramah lingkungan)
- 3) Pengembangan wisata pedesaan/wisata budaya

- 4) Pengembangan objek wisata baru yang menjadi wisata alternatif
- 5) Membangun kawasan wisata terpadu
- 6) Pengembangan SDM Pariwisata :
 - a. Memberikan pelatihan tentang kepariwisataan kepada masyarakat
 - b. Menerapkan standarisasi dan sertifikasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang jasa pariwisata (Hotel, Restoran, Travel, Pramuwisata, Sovenir dan jasa penunjang wisata lainnya) dengan mengutamakan *Local Genius*.
- 7) Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara konprehensif, infrastruktur, jasa transportasi, sarana prasaran perhotelan, restoran, SDM Pariwisata, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja
- 8) Memfasilitasi penetapan standarisasi tarif hotel
- 9) Mengotimalkan kerjasama dengan para pihak pelaku pariwisata
- 10) Meningkatkan sistem promosi pariwisata secara terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi
- 11) Membina dan mengawasi beroperasinya usaha dan jasa pariwisata ilegal sehingga mampu meningkatkan kompetisi yang sehat (villa-villa yang belum berijin)

f) Penguatan Infrastruktur

diarahkan untuk :

- 1) Pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan publik dan pendukung pariwisata
 - a. Infrastuktur Jalan
- 2) Standarisasi kualitas infrastruktur jalan
- 3) Pembangunan/pengembangan jalan penghubung kecamatan dan desa
- 4) Peningkatan jalan menuju destinasi wisata

- a. Mengoptimalkan pelabuhan kapal pesiar di padang bai bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pusat
 - b. Penyediaan fasilitas penyeberangan kapal wisata Padang Bai – Gili Trawangan – Lombok – Nusa Penida dan tujuan wisata lainnya.
- 5) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan air
- a. Pendataan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain
 - b. Perlindungan sumber air, danau, sungai, air terjun, dan sumber air lain
 - c. Pembangunan jaringan air ke rumah – rumah Krama Karangasem
 - d. Kebutuhan air bersih untuk Krama Karangasem (Kecamatan Kubu, Abang, Karangasem), Industri dan jasa serta kebutuhan air untuk mendukung pertanian dan subak
 - e. Melanjutkan jaringan pipanisasi air bersih Telaga Waja.

g) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

diarahkan untuk mewujudkan *good governance* (Peningkatan akuntabilitas kinerja, Reformasi Birokrasi) melalui :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
- 2) Peningkatan kualitas penatausahaan aset dan pelaporan keuangan
- 3) Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengawasan.
- 4) Penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik prima.

Untuk dapat mencapai arah pembangunan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan Kabupaten

Karangasem yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2022

No	Indikator	Target Capaian 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,62
2	Angka Kemiskinan	5,46%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1%
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,98
5	Gini Ratio	0,3224

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Karangasem Tahun 2021

C. Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar, yang menjadi salah satu episentrum pariwisata budaya dan sejarah di Provinsi Bali, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Payangan. Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 Km² atau 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali.

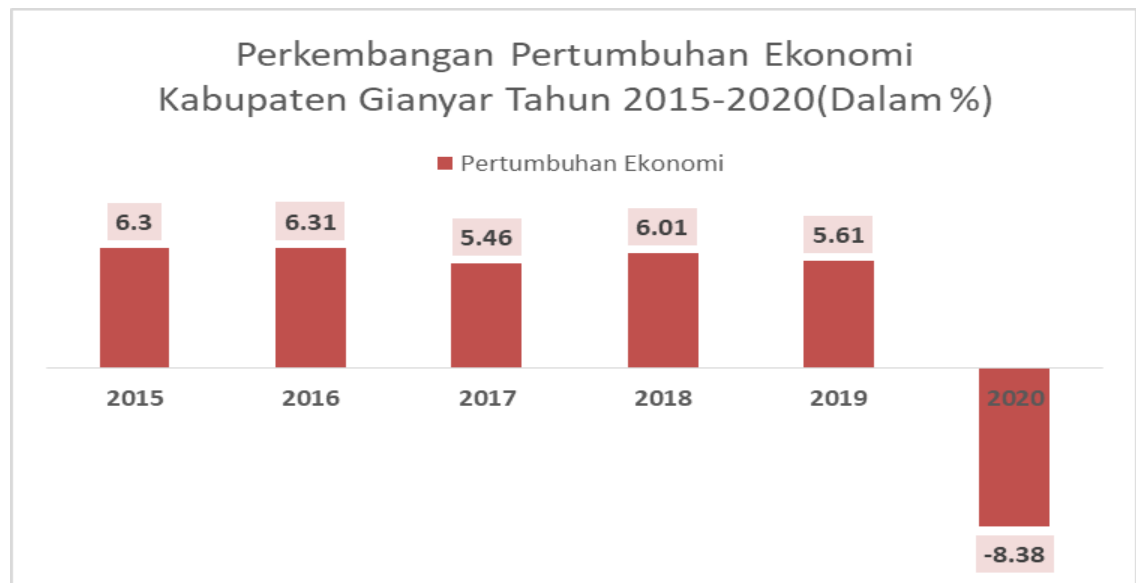
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Gianyar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2015-2020 namun cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6.31%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 menurun menjadi 5,46%. Indikasinya adalah meskipun tumbuh, laju ekonomi Kabupaten Gianyar semakin melambat kian tahun.

Pada tahun 2020, ekonomi Kabupaten Gianyar mengalami kontraksi yang sangat dalam yaitu -8,38% dan merupakan yang terendah sepanjang 5 tahun terakhir. Angka ini sedikit lebih baik angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu -9,31%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2021

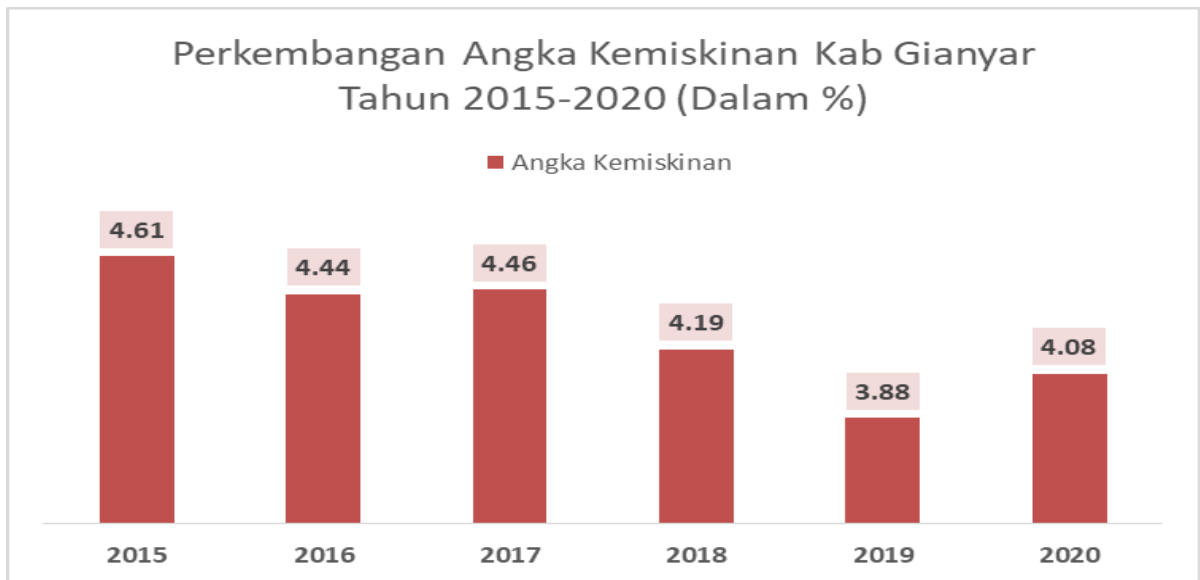
Gambar 5.11.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar
Tahun 2015-2020

b. Angka Kemiskinan

Meskipun laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gianyar mengalami trend penurunan, perkembangan angka kemiskinannya mengalami kondisi positif setidaknya hingga tahun 2019. Pada periode tahun 2015-2019, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,61% dan menurun secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 3,88%.

Angka kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,08% namun masih berada di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,45%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2021

Gambar 5.12.

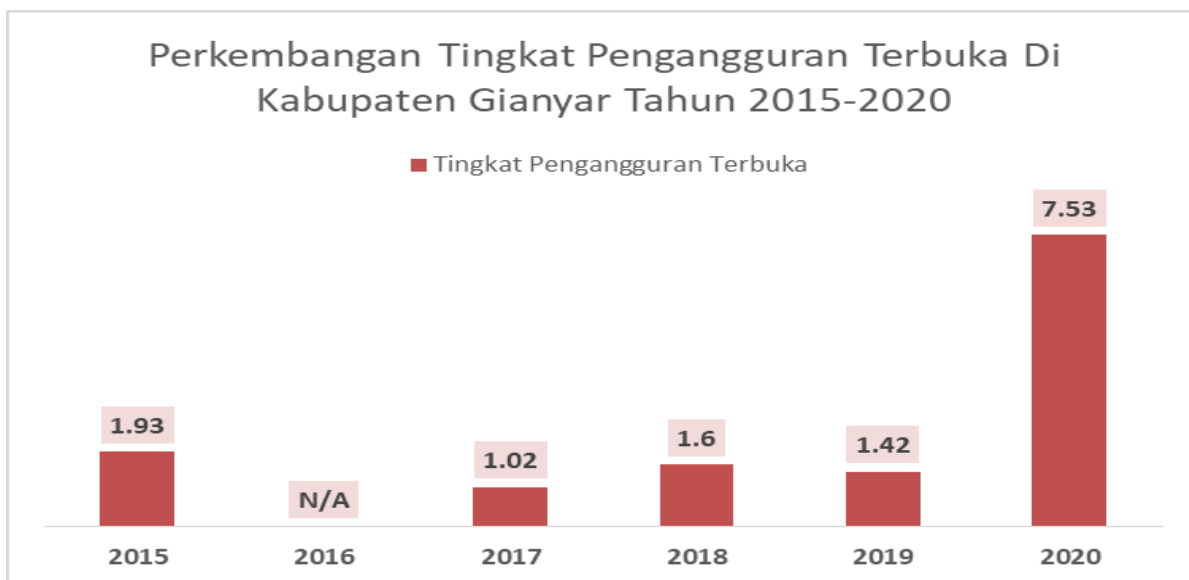
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Tahun 2015-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,93% dan terus mengalami penurunan di tahun berikutnya.

Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka turun drastis menjadi 0,44%. Angka ini berada jauh di bawah Provinsi Bali yaitu 1,52%. Bahkan, Kabupaten Gianyar merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran terendah kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Badung.

Namun pada tahun 2020, TPT Kabupaten Gianyar melonjak tajam menjadi 7,53%. Tingginya TPT Kabupaten Gianyar ini terjadi karena imbas penutupan kawasan pariwisata dan pembatasan aktivitas akomodasi wisata sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan banyaknya pekerja pariwisata yang dirumahkan dalam waktu singkat.



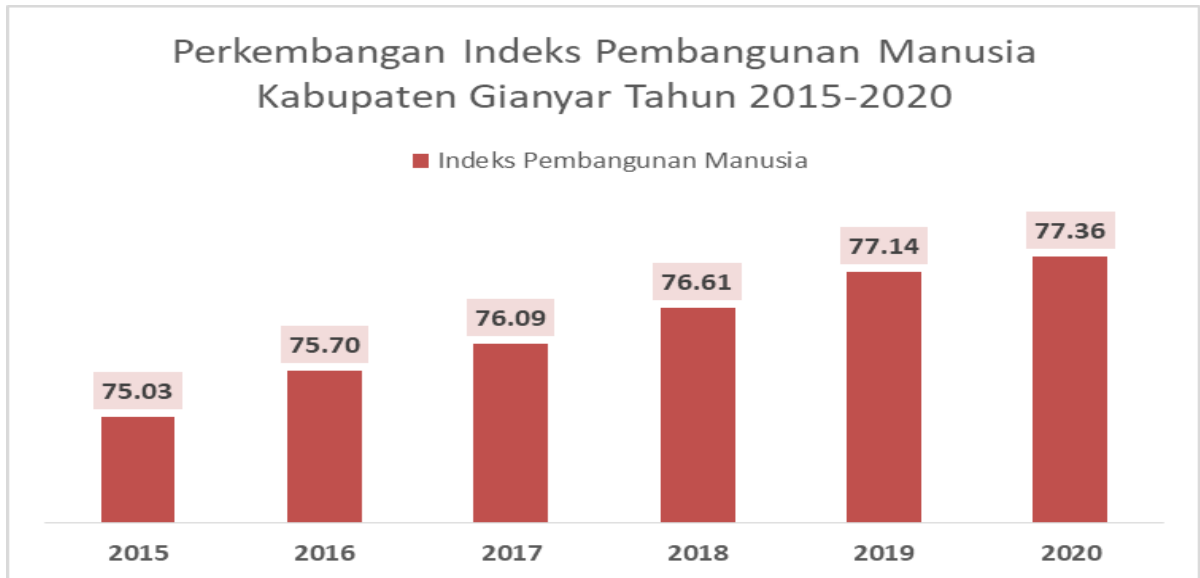
Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2021

Gambar 5.13.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Tahun 2015-2020

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kabupaten Gianyar sebesar 75,03 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 77,36 di tahun 2020. IPM Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 maupun IPM Nasional yaitu 71,94.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2021

Gambar 5.14.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar
Tahun 2015-2020

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 adalah sebesar 0,317 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,287. Peningkatan Indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Gianyar semakin meningkat jaraknya mengingat pendapatan masyarakat cenderung kurang tersebar.

Apabila ditarik ke 5 tahun ke belakang, pada periode 2016-2020, Indeks Gini Ratio Kabupaten Gianyar memang mengalami kecenderungan meningkat. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Gianyar tercatat terjadi di tahun 2020 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 0,270. Angka Gini Ratio di Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 berada jauh di atas Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,369.



Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2021

Gambar 5.15.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2015-2020

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2022 dengan tema pembangunan Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7.

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR
“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI”	“MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN SEKTOR DAN POTENSI UNGGULAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA, KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT”

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2021

Keselarasn prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.8.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022.

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR
1	Pangan, Sandang, Papan	Pangan, Sandang, Papan
2	Kesehatan dan Pendidikan	Pendidikan dan Kesehatan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya
5	Pariwisata	Pariwisata
6	Penguatan Infrastruktur	Penguatan Infrastruktur
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan ekonomi

- a) Pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, sebagai pilar kesejahteraan rakyat. Hak ekonomi menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah memiliki kewajiban utama yang bertanggungjawab mencapai kesejahteraan. Pemerintah daerah, sebagai representasi pemerintah, mempunyai tanggungjawab untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Di sisi lain pemerintah daerah dapat melancarkan reformasi pelayanan publik dan

kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial.

- b) Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah peningkatan nilai PDRB per Kapita, Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2020, Kabupaten Gianyar tahun 2019, masih memiliki PDRB per Kapita yang rendah dengan rata-rata pendapatan 4,65 juta per bulan sedikit bawah rata-rata Provinsi Bali yang mencapai 4,85 juta per bulan. Untuk itu isu strategis yang menjadi agenda utama adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dibarengi dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Gianyar yang cerdas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi.
- c) Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar yang kini masih di bawah rata-rata Provinsi Bali. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Data BPS. Kab. Gianyar tahun 2020 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) di Gianyar tahun 2019 mencapai 1,42 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,60 persen dan persentase penduduk miskin mencapai 3,88%.

- d) Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kondisi IPM Kabupaten Gianyar masih di bawah IPM Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, walaupun sudah diatas rata-rata Provisi Bali, sehingga diperlukan upaya percepatan peningkatan IPM. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposisi tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu wilayah yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang, dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan perkapita yang disesuaikan. Isu strategis sebagai agenda utama dalam peningkatan IPM menuju masyarakat Gianyar yang cerdas adalah peningkatan umur harapan hidup melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan rata-rata lama sekolah melalui peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat.
- e) Pemerataan Pendapatan, tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia yang tinggi untuk menciptakan

kemakmuran bersama. Ketidakmerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah dapat menciptakan ketimpangan pendapatan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan. Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar

2) Kesejahteraan sosial

Indikator kesejahteraan sosial yang penting diperhatikan adalah angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan sosial sebagian besar masih di bawah capaian rata-rata Provinsi Bali, sehingga isu strategis terkait peningkatan kesejahteraan sosial adalah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

b. Peningkatan Pelayanan Umum

1) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Efektif (*Good Governance and Clean Government*)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik harus didukung perbaikan tata pemerintahan dan aparatur meliputi kelembagaan, manajemen kepegawaian, tata kelola keuangan dan aset, perencanaan, pengawasan, pelayanan publik, tata laksana administrasi, sehingga terbentuk birokrasi pemerintah daerah yang profesional dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan

perizinan dan administrasi kependudukan, administarsi keuangan dan pelaporan kinerja, makin berkurangnya tingkat korupsi, serta makin banyaknya keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*, beberapa isu strategis yang menjadi agenda prioritas antara lain: (a) penguatan kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur, (b) peningkatan kesejahteraan aparatur, (c) penguatan pengetahuan dan kemampuan aparatur, (d) penguatan partisipasi masyarakat, dan (e) peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Gianyar Bersih dan Bermartabat.

2) Peningkatan Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Isu stretegis dalam upaya peningatan pelayanan umum urusan wajib pelayanan dasar antara lain:

- a) Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan;
- b) Ketersediaan infrastruktur wilayah dan prasarana daerah;
- c) Peningkatan kesejahteraan sosial;
- d) Peningkatan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan
- e) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3) Peningkatan Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Adapun isu strategis peningkatan pelayanan umum urusan wajib non pelayanan dasar meliputi:

- a) Penciptaan lapangan kerja;

- b) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pelestarian budaya dan lingkungan hidup;
- d) Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e) Peningkatan ketersediaan pangan;
- f) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g) Pengendalian penduduk; dan
- h) Peningkatan investasi.

4) Peningkatan Pelayanan Umum Urusan Pilihan

Sesuai dengan amanat UU. No. 23 tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum urusan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

c. Peningkatan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah harus menjadi *goal* dari semua upaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, kolaboratif, demokratis dan akuntabel. Daya saing didefinisikan sebagai kondisi institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah. Pilar pendukung daya saing yaitu: institusi, infrastruktur, makroekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi. Merujuk pilar pendukung sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan daya saing merupakan dampak pembangunan lintas sektor, mulai dari bidang pemerintahan umum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang fisik prasarana.

d. Program Prioritas Daerah

Bersasarkan Isu strategis dan sasaran yang telah diurasikan selumnya, disusunlah program prioritas yang nantinya akan membawa kabupaten Gianyar pada sasaran yang ingin dicapai. Program Prioritas tersebut diantaranya :

- 1) Peningkatan ketersediaan Pangan, Sandang, dan Papan

- 2) Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- 4) Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- 5) Pembangunan Bidang Pariwisata;
- 6) Penguatan Infrastruktur dan Pelestarian lingkungan
- 7) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

e. Program Inovasi Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gianyar, teridentifikasi isu-isu strategis ketahanan pangan antara lain :

- 1) Belum mantapnya ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan konsumsi) di Kabupaten Gianyar
- 2) SKOR PPH (Pola Pangan Harapan) mengalami peningkatan namun belum mencapai standar dengan komposisi komoditas pangan nabati didominasi oleh beras, belum beranekaragam
- 3) Pola pendekatan implementasi pembangunan yang digunakan selama ini, belum menunjukkan keberhasilan secara optimal. Oleh karena itu, kedepannya perlu dilakukan pembenahan/inovasi sehingga diharapkan bisa meningkatkan kemandirian pangan dan ekonomi yang berdampak pada pengendalian tingkat inflasi akibat fluktuasi harga komoditas pangan dan stabilitas keamanan sosial dalam arti luas. Sehingga upaya meningkatkan kemandirian ketahanan pangan pada tingkat masyarakat terkecil (keluarga) berdampak lebih luas pada pengendalian inflasi. Inilah yang diharapkan akan terwujud melalui inovasi **PUSPA AMAN**.

Arti kata:

PUSPA AMAN (Pusat Pangan Alami, Mandiri, Asri dan Nyaman)

- Pusat Pangan (PUSPA):

Sebuah wilayah/kawasan yang memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk menjamin ketersediaan beragam kebutuhan pangan bagi keluarga.

- Alami (A):
Produk pangan segar yang bebas dari kontaminasi zat-zat berbahaya
- Mandiri (M):
Produksi dan konsumsi pangan segar yang mana peran produsen dan konsumen dilakukan oleh satu pemeran dengan ketergantungan ekonomi pada pihak lain sangat minimal.
- Asri (A):
Indah dan sedap dipandang mengusung konsep luhur lokal
- Nyaman (N):
Segar, sehat dan enak bagi indera manusia.

Cakupan Ruang Lingkup :

PUSPA AMAN mencakup usaha setiap rumah tangga untuk menyediakan pangan segar dengan memanfaatkan lahan pekarangannya, membangun konektivitas antar rumah tangga serupa, dicirikan dengan adanya rumah bibit bersama yang berfungsi optimal, hingga terwujud penyediaan pangan segar skala kawasan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, didukung seluruh lembaga pemangku kepentingan terkait.

Mencakup:

- a) Pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan
- b) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal
- c) Konservasi genetik pangan (tanaman, ternak, ikan)
- d) Menjaga kelestarian melalui kebun bibit desa
- e) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

f. Kebijakan Penanganan COVID-19

Kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam penanganan COVID-19 adalah:

1. Penetapan Status Siaga Darurat Bencana
2. Pencegahan dengan pembentukan gugus tugas COVID-19, Sosialisasi, Penempatan Hand Sanitizer, Pemasangan bilik disinfektan, Penyediaan Thermometer Infrared, Penyemprotan Disinfektan, Pembatasan Waktu Kegiatan Usaha, Penegakan Hukum.
3. Penanggulangan dengan penyediaan masker, penyediaan APD, Penyediaan PCR, Isolasi Mandiri, Penyediaan Ruang Karantina, Penyediaan RS Rujukan COVID-19, Penyediaan Tempat Istirahat untuk Nakes, Penyediaan RS Darurat COVID-19.
4. Pengendalian Dampak dengan ketersediaan pangan utama, pengangguran, bantuan keluarga miskin, pengangguran.

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Gianyar yang harus terwujud di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2022

No	Indikator	Target Capaian 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,72%
2	Angka Kemiskinan	4,10%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,05%
4	Indeks Pembangunan Manusia	77,53
5	Gini Ratio	0,279

Sumber: Bappedalitbang Kab Gianyar Tahun 2021

D. Kabupaten Bangli

Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku. Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bali yang tidak memiliki garis pantai. Kabupaten Bangli

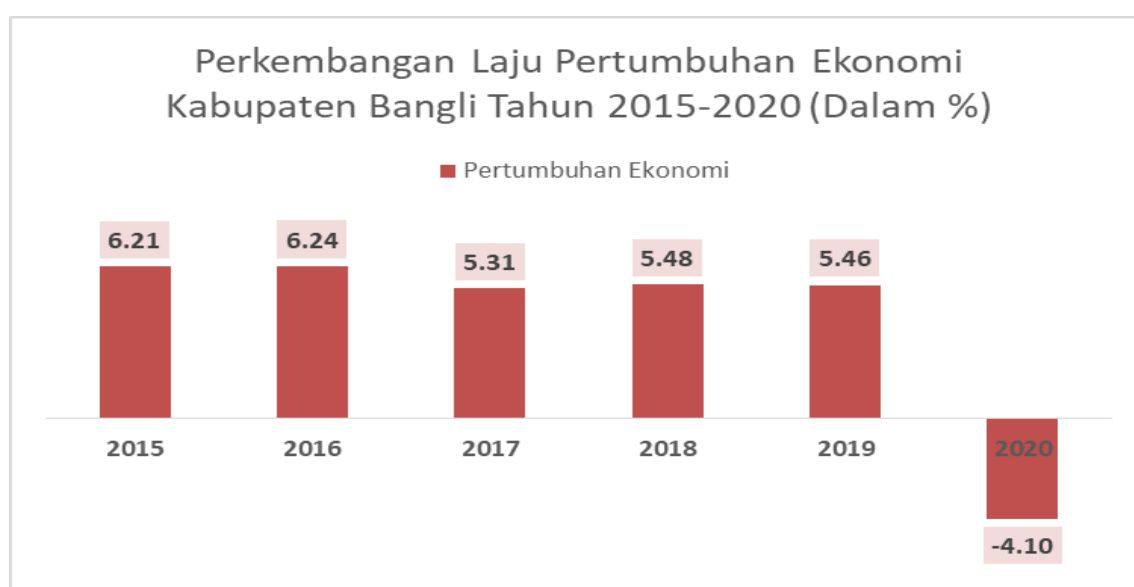
memiliki luas 520,81 Km² atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Bangli merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi pada periode tahun 2015-2019. Tahun 2016 tercatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli adalah 6,24% meningkat dari tahun 2015 yaitu 6,21%. Namun, pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi hanya 5,31%. Pada tahun 2018, mengalami peningkatan menjadi 5,48% namun kembali menurun di tahun 2019 menjadi 5,46%. Pada tahun 2020, ekonomi Kabupaten Bangli mengalami kontraksi sebesar -4,10% dan merupakan yang terdalam selama 5 tahun terakhir.



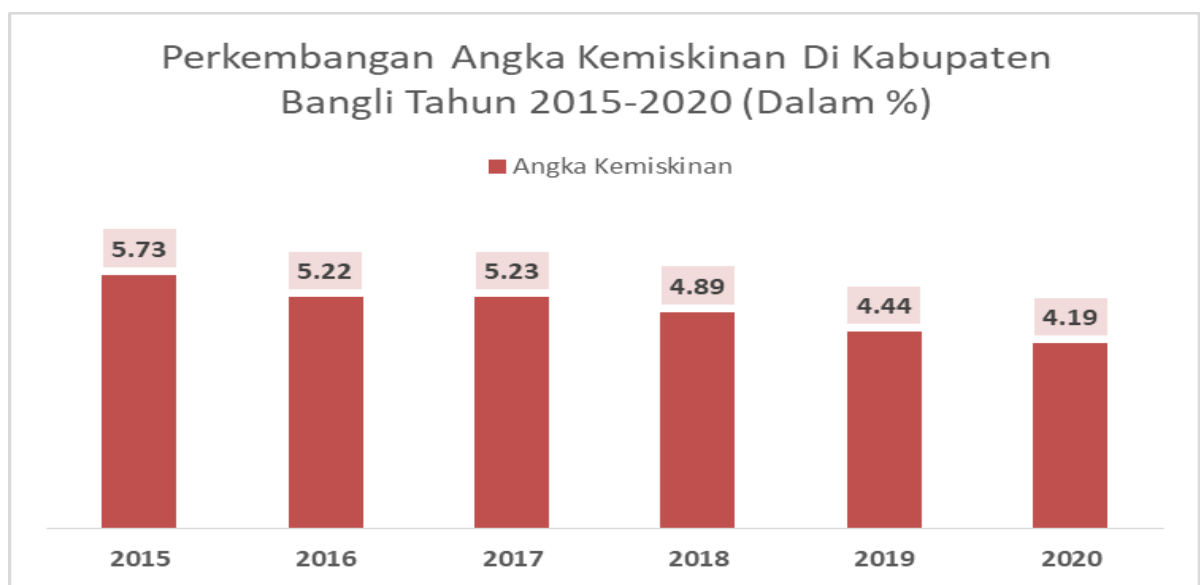
Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2021

Gambar 5.16.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2015-2020

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2015-2020, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan dengan gap yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,73% dan menurun secara signifikan pada tahun 2019 menjadi 4,44%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 4,19%.



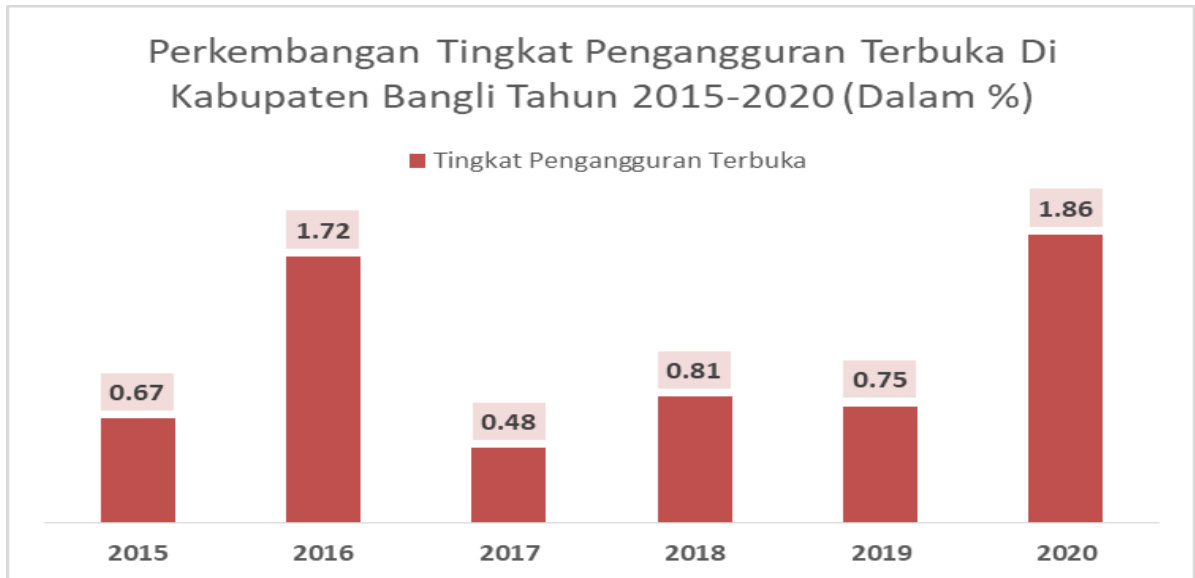
Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2021

Gambar 5.17.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli
Tahun 2015-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang positif. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 0,67% dan meningkat tajam di tahun berikutnya yaitu 1,72%. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat drastis menjadi 1,86%.



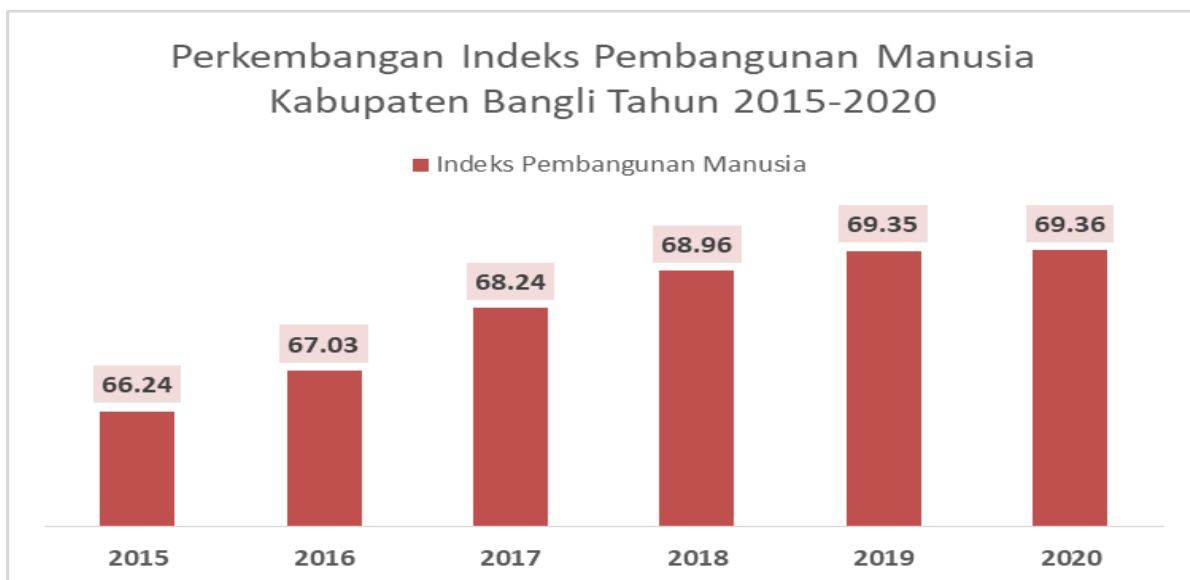
Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2021

Gambar 5.18.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli
Tahun 2015-2019

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kabupaten Bangli sebesar 66,24 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 69,36 di tahun 2020. IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2020 ini berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 maupun IPM Nasional yaitu 71,94.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2021

Gambar 5.19.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli
Tahun 2015-2020

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Bangli pada tahun 2020 adalah sebesar 0,283 atau naik 0,009 poin dari tahun 2019 sebesar 0,274. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Bangli semakin lebar jaraknya meskipun tidak signifikan. Pada periode tahun 2016-2020, kecenderungan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bangli adalah menurun meski di tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Bangli tercatat terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 0,354. Secara umum ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam wilayah Kabupaten Bangli merupakan yang terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Bahkan jauh di atas Indeks Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,369.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2021

Gambar 5.20.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2016-2020

2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bangli tahun 2022 adalah Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian dan Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Dalam menyelaraskan antara tema dan prioritas pembangunan antara Provinsi Bali, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 5.10.

Keselarasn Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.	Pangan, Sandang dan Papan	Pemenuhan kebutuhan dasar Krama Bangli di bidang pangan, sandang, dan papan dengan kualitas yang layak
2.	Kesehatan dan Pendidikan	Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan
3.	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penyediaan Jaminan Sosial Terpadu dan Ketenagakerjaan
4.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pemajuan kebudayaan adat Bali yang adiluhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi
5.	Pariwisata	Memperkuat sektor perekonomian melalui penguatan sektor pariwisata dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian
6.	Penguatan Infrastruktur	Memantapkan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata kelola birokrasi pemerintah dan pelayanan public yang efektif dan efisien

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2021

Guna mewujudkan prioritas pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 5.11.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2022

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1	Pemenuhan kebutuhan dasar Krama Bangli di bidang pangan, sandang, dan papan dengan kualitas yang layak	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bangli
		Meningkatnya industri kerajinan rakyat berbasis budaya dan branding Bangli
		Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bangli memiliki rumah layak huni
		Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap kemandirian
2	Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan	Terjaminnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bangli
		Terjaminnya Mutu Sumber Daya manusia Kesehatan Kabupaten Bangli
		Meningkatnya cakupan peserta dalam sistem jaminan kesehatan masyarakat
		Terjaminnya Keamanan ketersediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman bagi Krama Bangli
		Meningkatnya pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
		Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dalam bentuk pesraman

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		<p>Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</p> <p>Meningkatnya kualitas partisipasi Kepemudaan</p> <p>Meningkatnya prestasi olahraga</p> <p>Cakupan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pengendalian penduduk</p>
3	Penyediaan Jaminan Sosial Terpadu dan Ketenagakerjaan	<p>Meningkatnya kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krama Bangli.</p> <p>Meningkatnya akses bagi tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja</p> <p>Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan</p>
4	Pemajuan kebudayaan adat Bali yang adiluhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi	<p>Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi lembaga Adat dan Subak</p> <p>Terwujudnya pemajuan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan adat, tradisi dan seni</p>
5	Memperkuat sektor perekonomian melalui penguatan sektor pariwisata dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian	<p>Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan destinasi pariwisata</p> <p>Meningkatnya pasar pariwisata di pasar domestik dan global</p> <p>Pengembangan ekosistem ekonomi Kreatif</p> <p>Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata</p> <p>Meningkatnya Investasi</p> <p>Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal</p>
6	Memantapkan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
		Meningkatnya pembangunan Infrastruktur Terpadu dan Berkualitas
		Meningkatnya Layanan Air Bersih dan sanitasi layak
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli
7	Tata kelola birokrasi pemerintah dan pelayanan public yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2021

Untuk dapat mencapai arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Bangli tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.12.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2022

No	Indikator	Target Capaian 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	2-4%
2	Angka Kemiskinan	3%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1%
4	Indeks Pembangunan Manusia	70,56
5	Gini Ratio	0,29

Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2021

E. Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten satu-satunya yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan (Kecamatan Nusa Penida). Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 Km² atau 5,59%

dari wilayah Provinsi Bali yang menjadikannya kabupaten dengan luas wilayah paling kecil kedua setelah Kota Denpasar.

1. Kondisi Umum Wilayah

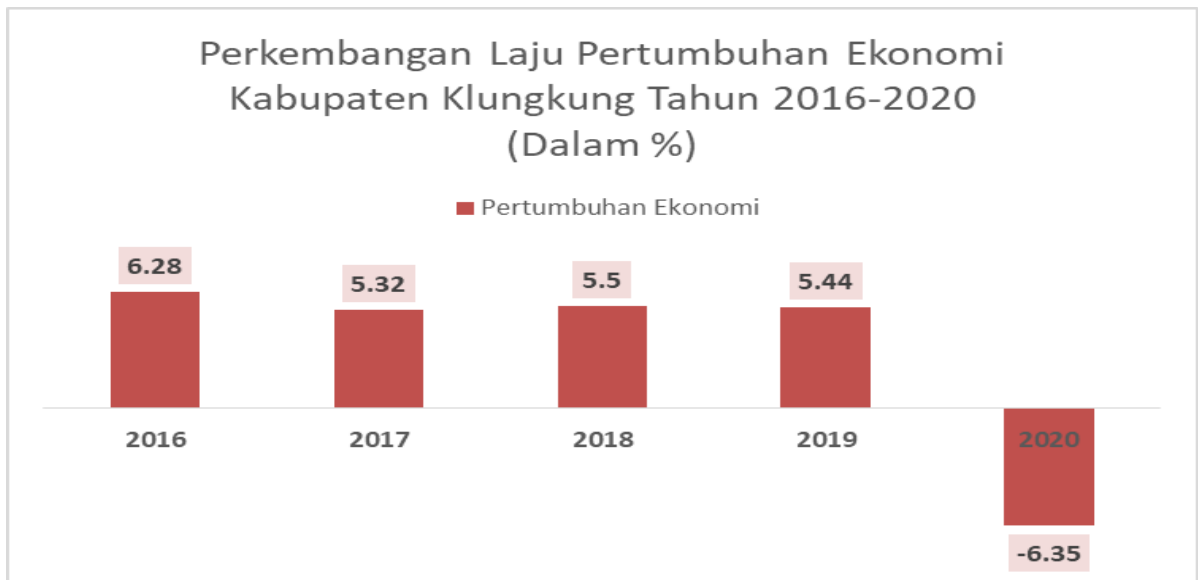
Kondisi umum wilayah Kabupaten Klungkung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mengalami trend fluktuatif pada periode tahun 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6,28%. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung berada pada angka 6,11%. Pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,96 poin menjadi 5,32%. Artinya perekonomian Kabupaten Klungkung mengalami perlambatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Klungkung (5,44%) mengalami pertumbuhan yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu 5,63%.

Tahun 2020, ekonomi Klungkung mengalami kontraksi paling dalam selama 5 tahun terakhir menjadi -6,35%. Kondisi ini terjadi akibat imbas pandemi Covid-19 yang menghantam sektor pariwisata. Kabupaten Klungkung merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan sektor pariwisata yang sangat menjanjikan. Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan merupakan salah satu daya tarik wisata baru yang selama 5 tahun terakhir merupakan favorit bagi wisatawan.

Meski pertumbuhan mengalami kontraksi yang dalam, pertumbuhan ini masih lebih baik dibandingkan Provinsi Bali yang mengalami kontraksi hingga -9,31%



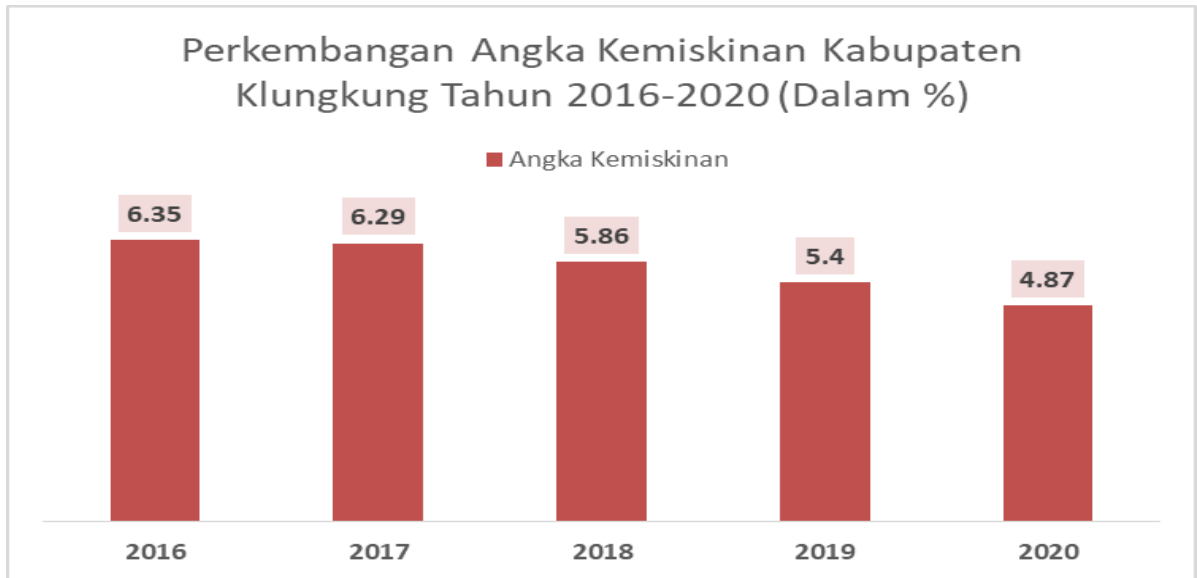
Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2021

Gambar 5.21.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung
Tahun 2016-2020

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2016-2020, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan dengan gap yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,29% dan menurun secara signifikan pada tahun 2020 menjadi 4,87%. Meskipun penurunannya signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 masih berada di atas Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,45%. Namun, di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,19%.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2021

Gambar 5.22.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung
Tahun 2016-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Klungkung mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Terjadi peningkatan pada angka pengangguran terbuka meskipun tidak terlalu signifikan.

Pada tahun 2017 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 0,94% dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung menjadi 5,42%, tertinggi selama 5 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang cukup signifikan pada peningkatan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan di Kabupaten Klungkung yang berimbas pada tingkat pengangguran terbuka meningkat secara drastis.



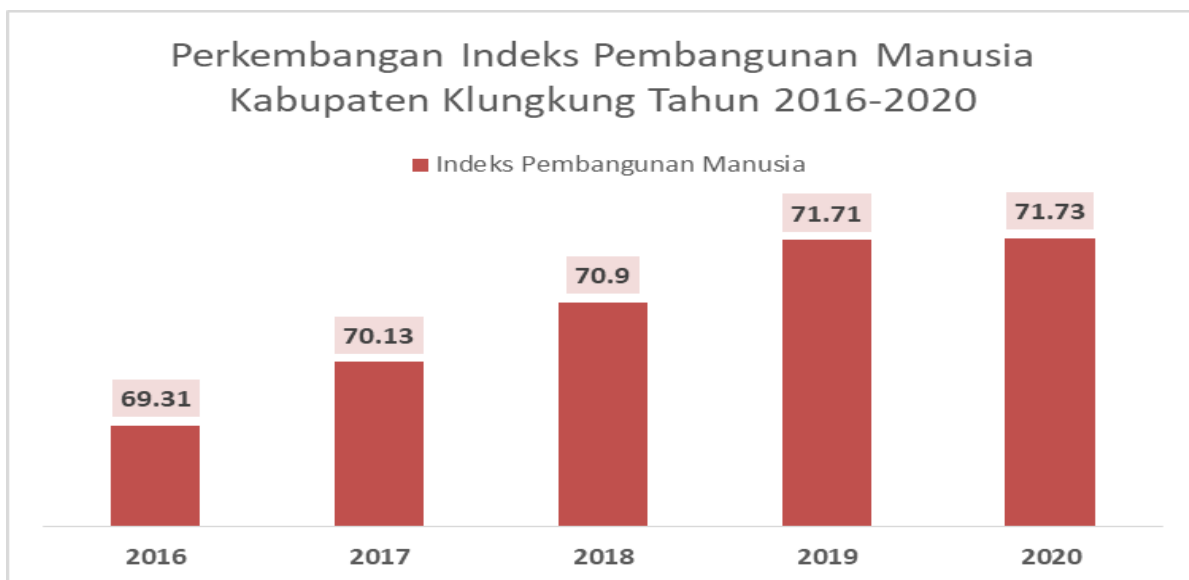
Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2021

Gambar 5.23.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung
Tahun 2017-2020

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 69,31 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 71,73 di tahun 2020. IPM Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 maupun IPM Nasional yaitu 71,94.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2021

Gambar 5.24.

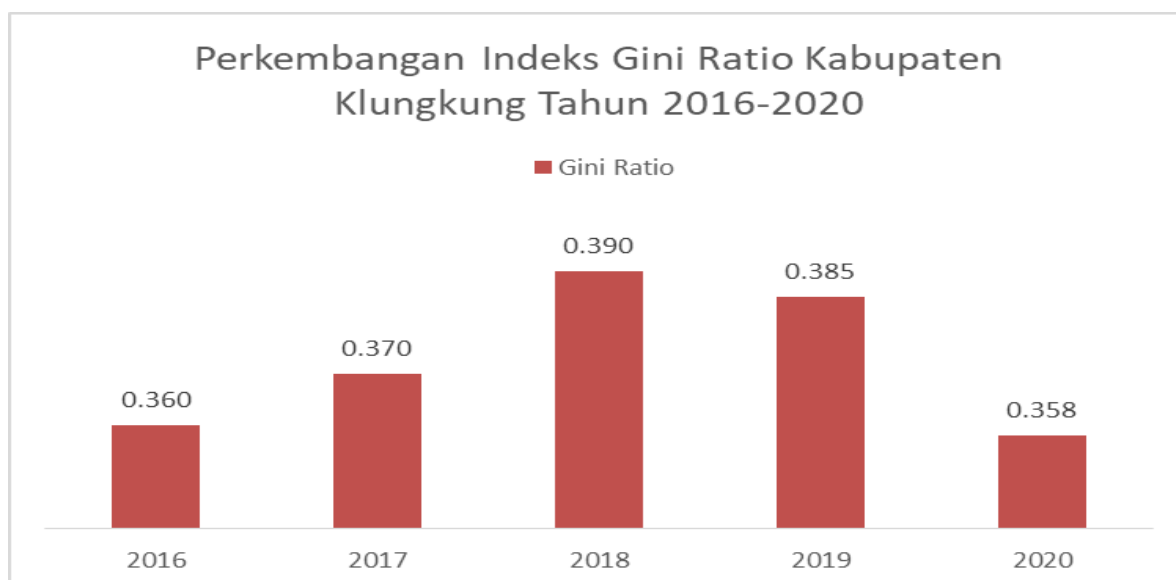
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung
Tahun 2016-2020

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah. Indeks Gini Ratio Kabupaten Klungkung mengalami dinamika yang positif selama 5 tahun terakhir. Selama periode tahun 2018-2020, Indeks Gini Ratio terus mengalami penurunan yang mengindikasikan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk mengalami penurunan

Indeks Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 0,390 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 0,358. Dengan semakin baiknya pemerataan pendapatan diantara kelompok penduduk, mengindikasikan pembangunan di Kabupaten Klungkung sudah semakin merata. Kabupaten Klungkung sendiri merupakan wilayah yang meliputi daratan dan kepulauan yang menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu kendala. Pembangunan di Klungkung kepulauan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan di daratan akibat kendala aksesibilitas. Namun dengan berkembangnya pariwisata

di Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menyebabkan perekonomian masyarakat di Klungkung kepulauan mengalami peningkatan dan turut memberikan andil penurunan Indeks Gini Ratio.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2021

Gambar 5.25.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2020

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.13.

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KLUNGKUNG
" PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI "	" PERCEPATAN PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MELALUI PEMERATAAN PERTUMBUHAN EKONOMI "

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2021

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KABUPATEN KLUNGKUNG
1.	Pangan, Sandang dan Papan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2.	Kesehatan dan Pendidikan	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
3.	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
4.	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia
5.	Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
6.	Penguatan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
7.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2021

Untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2022, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
- 2) Penegerian TK-TK
- 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi guru melalui PKG dan PKB
- 4) Pemenuhan SPM bidang Pendidikan
- 5) Pengembangan Rs Pratama menjadi Klas C
- 6) Pengembangan AGD KRIS di kecamatan Nusa Penida dan pengadaan ambulan jenazah di Nusa Penida
- 7) Pemenuhan operasional Pengadaan Ambulan Laut tahun 2021
- 8) Pembangunan gedung bersalin Puskesmas Banjarangkan I dan perluasan gedung perbekalan kesehatan
- 9) Penataan dan rehab pustu
- 10) BLUD Puskesmas
- 11) UHC 5% penduduk Klungkung yang tersisa dan bayi baru lahir
- 12) Pengelolaan Rusun Nusa Penida
- 13) Pemenuhan sarana prasarana pendukung dalam upaya meningkatkan kualitas dan pengembangan RSUD Kab. Klungkung sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan Peningkatan kualitas RSUD sebagai RS kelas B
- 14) Pemenuhan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) RSUD kab. Klungkung sebagai Rumah sakit umum kelas B Pendidikan
- 15) Pemenuhan sarana prasarana pendukung RSUD sebagai rumah sakit rujukan kedaruratan bali timur
- 16) Biaya operasional pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD Dipasang sesuai target pendapatan
- 17) Pemenuhan SPM bidang Kesehatan
- 18) Harmonisasi RDTR dan KLHS RDTR serta Penyusunan Naskah Akademis RDTR Kec. Klungkung, Kec. Dawan, Kec. Banjarangkan (DPUPRPKP)
- 19) Peningkatan Jalan kabupaten dan akses objek wisata kondisi mantap
- 20) koordinasi pelaksanaan Pemb. Tanggul Pengaman Pantai dgn BWS Bali Penida

- 21) Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 22) Peningkatan kualitas rumah layak huni (RLH)
- 23) Pengembangan dan peningkatan layanan air minum
- 24) Peningkatan layanan sanitasi (limbah, sampah dan drainase)
- 25) Pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 26) Harmonisasi RDTR dan KLHS RDTR serta Penyusunan Naskah Akademis RDTR Kec. Klungkung, Kec. Dawan, Kec. Banjarangkan (DPUPRPKP)
- 27) Pemenuhan SPM bidang Ketentraman dan Keteriban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- 28) Mitigasi Bencana
- 29) Bedah dan rehab rumah
- 30) Penanganan Disabilitas
- 31) Penanganan Tuna Sosial
- 32) Menyusun dokumen-dokumen dan surat usulan, mengadakan seminar, menyiapkan surat rekomendasi, memfasilitasi Tim Pengkaji Pusat untuk Verifikasi terkait penetapan tokoh Ida I Dewa Agung Istri Kanya atau Ida Dewa Agung Jambe sebagai Pahlawan Nasional
- 33) Verivali data BDT
- 34) Pelaksanaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
- 35) Pemenuhan SPM bidang Sosial
- 36) Mempersiapkan dan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan bagi generasi muda yang ada di Kab. Klungkung
- 37) Pembekalan IT kepada wirausahawan
- 38) Mempersiapkan dan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan
- 39) Mempersiapkan dan pelaksanaan kompetisi
- 40) Pendidikan, Pelatihan dan Penyaluran Tenaga Kerja ke Luar Negeri
- 41) Melakukan sertifikasi kompetensi terhadap tenaga kerja
- 42) Mewujudkan Kota Layak Anak (terbentuknya 15 Desa/kelurahan Layak Anak)
- 43) Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- 44) Pemberdayaan Organisasi Wanita
- 45) Diverifikasi pangan
- 46) Penyelesaian pensertifikatan tanah aset daerah
- 47) Pembangunan TOSS Center di Karang Dadi Kusamba
- 48) Pembuatan IPLT di Nusa Penida
- 49) Kartu Identitas Anak (KIA)
- 50) Santunan kematian bagi masyarakat Klungkung
- 51) BUMDes
- 52) Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Desa
- 53) Lomba Desa
- 54) Prioritas KB meningkatkan kualitas keluarga)
- 55) DAK BOKB sesuai dengan juknis
- 56) DAK Fisik sesuai dengan juknis
- 57) Pelaksanaan angkutan siswa gratis di 3 Kecamatan (Klungkung, Dawan, banjarangkan)
- 58) Pembangunan pelabuhan pesinggahan dan Lanjutan pembangunan Pelabuhan Bias Munjul
- 59) Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida
- 60) Peningkatan pelayanan smart city
- 61) Kajian dan Pengembangan Holding Company dalam rangka menciptakan sumber-sumber ekonomi alternatif
- 62) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
- 63) Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu menerapkan sistem OSS
- 64) Sport Center
- 65) Program Ngaben Massal
- 66) Pelestarian Budaya
- 67) Penjajagan untuk mempersiapkan E-arsip
- 68) Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Nelayan Garam dan melakukan MoU dengan propinsi terkait kewenangan (DKPP)
- 69) Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Nelayan Rumput Laut dan melakukan MoU dengan Provinsi terkait kewenangan
- 70) Pembenahan kelembagaan kelompok
- 71) Penyusunan kajian akademis pembentukan UPT

- 72) Mengoptimalkan kawasan pariwisata
- 73) Pembangunan Objek Wisata unggulan berdasarkan dari hasil kajian FS
- 74) Peningkatan pengembangan Desa Wisata dengan pembentukan Pokdarwis masing-masing Desa Wisata
- 75) Beroperasinya UPT Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida
- 76) Pelaksanaan Festival Pariwisata di 4 Kecamatan
- 77) Tersedianya ruang peristirahatan ruang publik di dekat destinasi wisata batu Klotok
- 78) Pembangunan Infrastruktur Pertanian, Pembinaan kelompok tani dalam pengelolaan alsintan dan permodalan
- 79) Demplot di 4 BPP Kecamatan
- 80) Pembinaan Gapoktan, Petani, PPS dan KWT
- 81) Membuat Kawasan Pertanian Ramah Lingkungan di Subak Kabupaten Klungkung
- 82) Membuat Demplot / Demfam
- 83) Tahapan Breeding Center
- 84) SIWAB
- 85) Pembinaan Kelompok Ternak
- 86) Melanjutkan revitalisasi Pasar Umum Semarapura dan pasar desa
- 87) DEKRANASDA
- 88) meningkatkan produksi garam beriodium dan perluasan pemasaran ke toko swalayan (DISKOPDAG)
- 89) Peningkatan kapasitas kelembagaan
- 90) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 91) Batas Wilayah dan kerjasama daerah
- 92) Koordinasi pengendalian inflasi
- 93) Peningkatan Kapabilitas APIP
- 94) Asistensi/pendampingan meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; pengadaan barang dan jasa; operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dan pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

- 95) Pelaksanaan reviu-reviu dokumen rencana pembangunan daerah, rencana kerja perangkat daerah, RKA SKPD, LKPD, laporan kinerja, penyerapan anggaran, penyerapan penagadaan barang dan jasa
- 96) Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 97) Peningkatan implementasi sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah.
- 98) Updating data dan informasi pembangunan daerah.
- 99) Peningkatan pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah.
- 100) Penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah tepat waktu.
- 101) Peningkatan kapabilitas aparatur di bidang perencanaan melalui sosialisasi dan/atau bimtek.
- 102) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 103) Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.
- 104) Peningkatan penataan dan pengelolaan aset daerah berbasis sistem informasi manajemen BMD.
- 105) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian
- 106) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional
- 107) Pengembangan dan penguatan inovasi daerah
- 108) Penyelenggaraan kajian prioritas pembangunan daerah.

Dengan arah pembangunan wilayah tersebut, sasaran atau target capaian pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2022

No	Indikator	Target Capaian 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,12%
2	Angka Kemiskinan	3,39%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,70%

No	Indikator	Target Capaian 2022
4	Indeks Pembangunan Manusia	74,13
5	Gini Ratio	0,360

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2021

F. Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan. Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 Km² atau 14,89% dari luas wilayah Provinsi Bali.

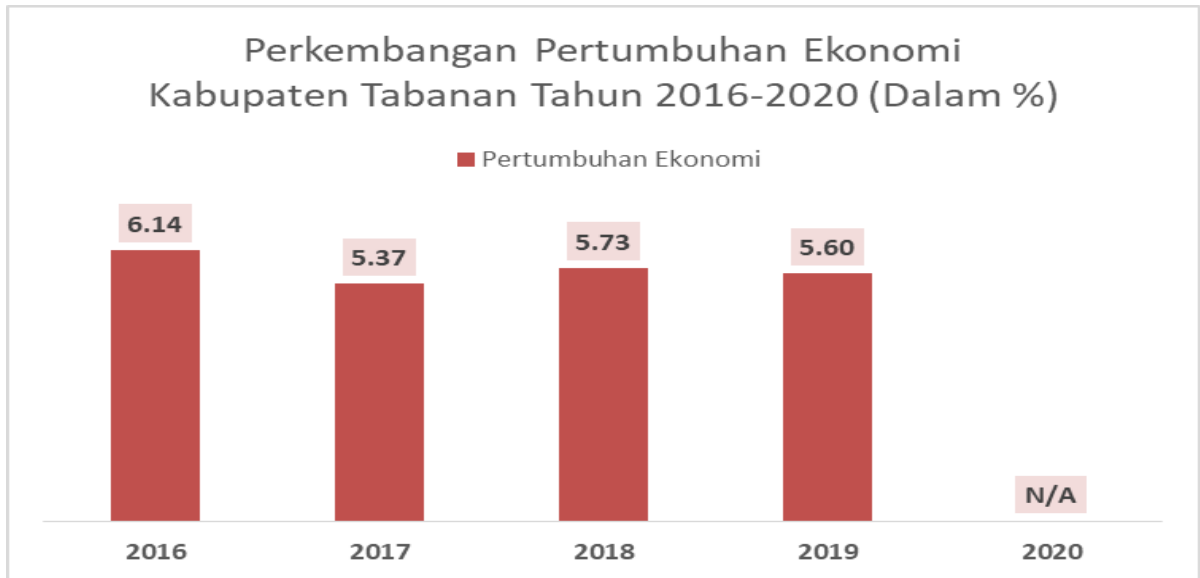
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Tabanan merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan mengalami trend penurunan pada periode tahun 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6,14%. Pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019, ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami pertumbuhan sebesar 5,60% atau sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali namun menurun cukup signifikan dari tahun 2016.

Sayangnya, belum ada data terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat diketahui pasti apakah Kabupaten Tabanan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi seperti halnya Provinsi Bali dengan angka -9,31%.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2021

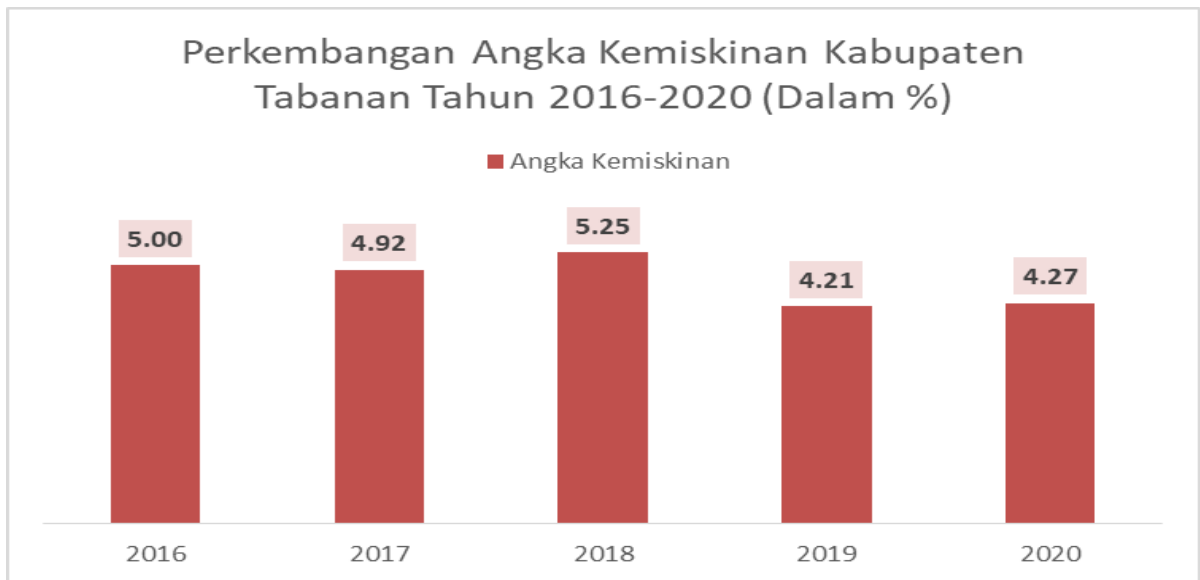
Gambar 5.26.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan
Tahun 2016-2020

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2016-2020, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,00% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 4,27%.

Angka kemiskinan Kabupaten Tabanan di tahun 2020 masih lebih baik dari angka kemiskinan Provinsi Bali. Angka kemiskinan Provinsi Bali adalah 4,45%. Angka kemiskinan Kabupaten Tabanan juga lebih baik dari angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,19%.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2021

Gambar 5.27.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan
Tahun 2016-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayahnya dengan cukup baik. Tahun 2017 tercatat TPT Kabupaten Tabanan adalah 1,79% dimana kemudian menurun menjadi 1,28% pada tahun 2019. Pada periode ini, TPT Kabupaten Tabanan selalu berada di bawah TPT Provinsi Bali.

Namun pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tabanan melonjak tajam menjadi 4,27%. Seperti halnya kabupaten lainnya yang mengalami kondisi serupa, imbas pandemi Covid-19 merupakan faktor utama penyebab banyaknya pengangguran yang muncul secara tiba-tiba di tahun 2020.



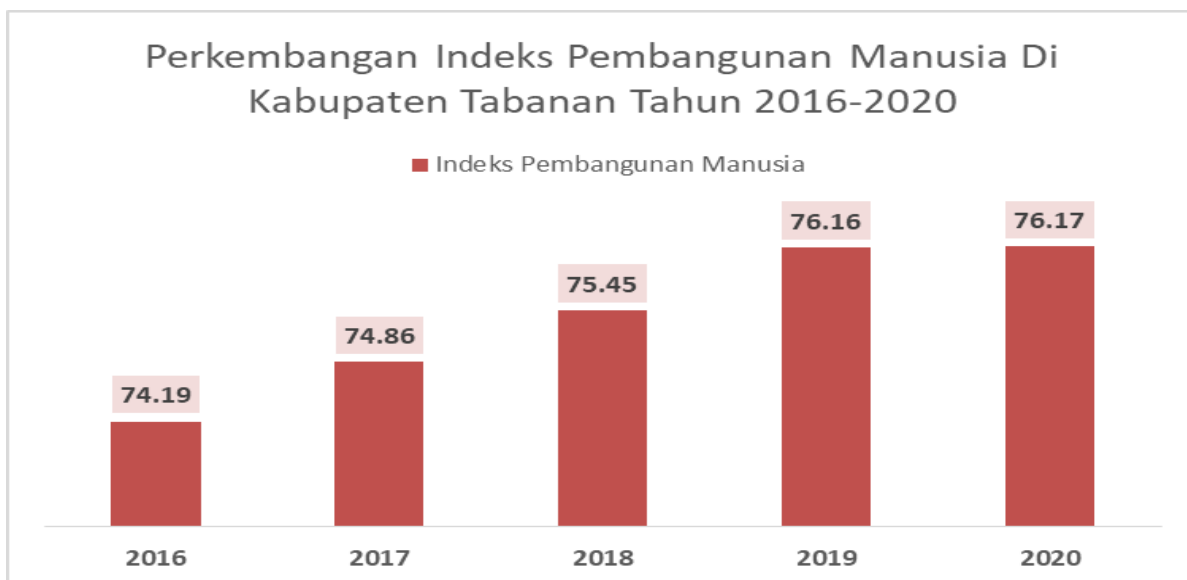
Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2021

Gambar 5.28.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 tercatat IPM Kabupaten Tabanan sebesar 74,19 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 76,17 di tahun 2020. IPM Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 maupun IPM Nasional yaitu 71,94. Bahkan selama 5 tahun terakhir, IPM Kabupaten Tabanan selalu berada di atas IPM Provinsi Bali. Artinya adalah kualitas SDM penduduk Kabupaten Tabanan di atas rata-rata Provinsi Bali dan nasional.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2021

Gambar 5.29.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,324 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,308. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kabupaten Tabanan semakin lebar jaraknya. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kabupaten Tabanan cenderung terpolarisasi pada wilayah tertentu.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 0,344. Sedangkan terendah terjadi di tahun 2019 yaitu 0,308. Angka Gini Ratio di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 berada di atas Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,369.



Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2021

Gambar 5.30.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16.

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN TABANAN
" PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI "	"PEMULIHAN EKONOMI MENUJU TABANAN ERA BARU YANG AMAN, UNGGUL, MADANI"

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2021

Keselarasn prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.17.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KABUPATEN TABANAN
1	Pangan, Sandang dan Papan	Kedaulatan Pangan
2	Kesehatan dan Pendidikan	Pendidikan
		Kesehatan Semesta
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pemulihan Ekonomi
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Pariwisata	
6	Penguatan Infrastruktur	Infrastruktur
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- a) Pemeliharaan kualitas pelayanan dasar untuk karakteristik masyarakat mandiri
- b) Pengembangan lanjut kompetensi SDM masuk persaingan global.
- c) Pengembangan daya saing regional dan internasional produk unggulan daerah
- d) Pengembangan lanjut infrastruktur menuju awal kemajuan teknis dan professional penunjang daerah Agrowisata
- e) Konservasi hutan dan sumber-sumber mata air dan tindakan pencegahan terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Tabanan yang harus terwujud di tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2022

No	Indikator	Target Capaian 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00%
2	Angka Kemiskinan	4,00%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,67%
4	Indeks Pembangunan Manusia	77,16
5	Gini Ratio	0,31

Sumber: Bappelitbang Kab Tabanan Tahun 2021

G. Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng, yang merupakan wilayah paling utara di Provinsi Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busung Biu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Tejakula. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365,88 Km² atau sebesar 24,23% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya kabupaten dengan wilayah terluas.

1. Kondisi Umum Wilayah

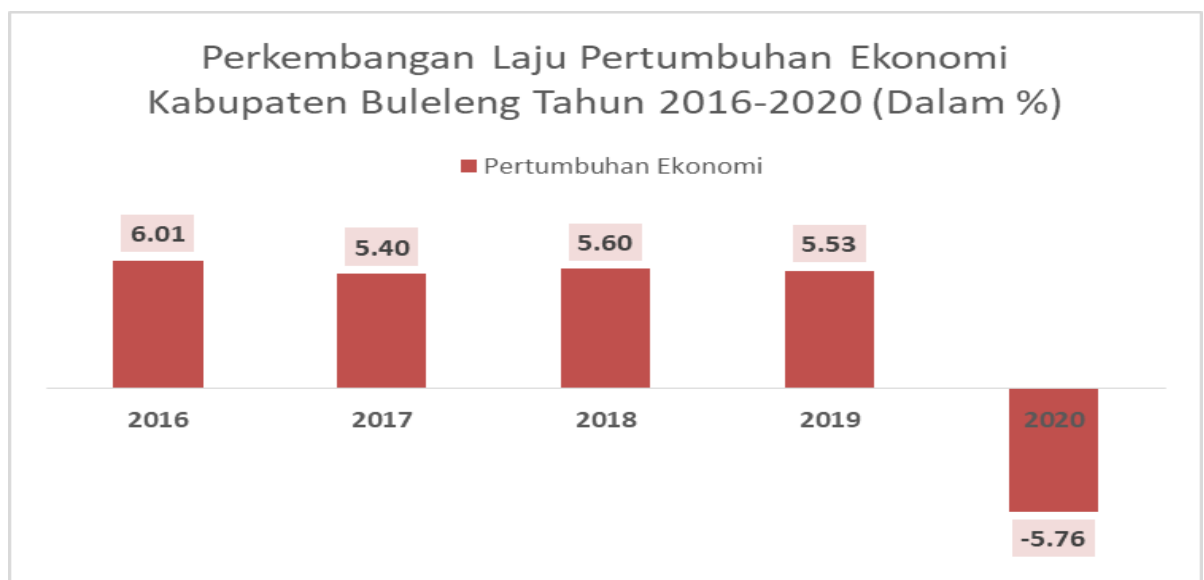
Kondisi umum wilayah Kabupaten Buleleng merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi pada periode tahun 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6,01%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 5,40%. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Artinya adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tergolong

rendah dibandingkan dengan rata-rata wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -5,76% sebagai akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Meskipun mengalami kontraksi yang cukup dalam, namun masih lebih baik dari pertumbuhan Provinsi Bali yang mencapai -9,31%.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2021

Gambar 5.31.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2016-2020, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2016 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,79% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 5,32%. Kondisi yang patut untuk dicatat disini adalah meskipun mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng tidak mengalami

lonjakan yang berarti meskipun terjadi peningkatan dari tahun 2019. Namun demikian, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng masih lebih tinggi dari Provinsi Bali. Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Provinsi Bali adalah 4,45%. Namun, masih jauh di bawah Nasional dengan angka kemiskinan 10,19%.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2021

Gambar 5.32.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng
Tahun 2016-2020

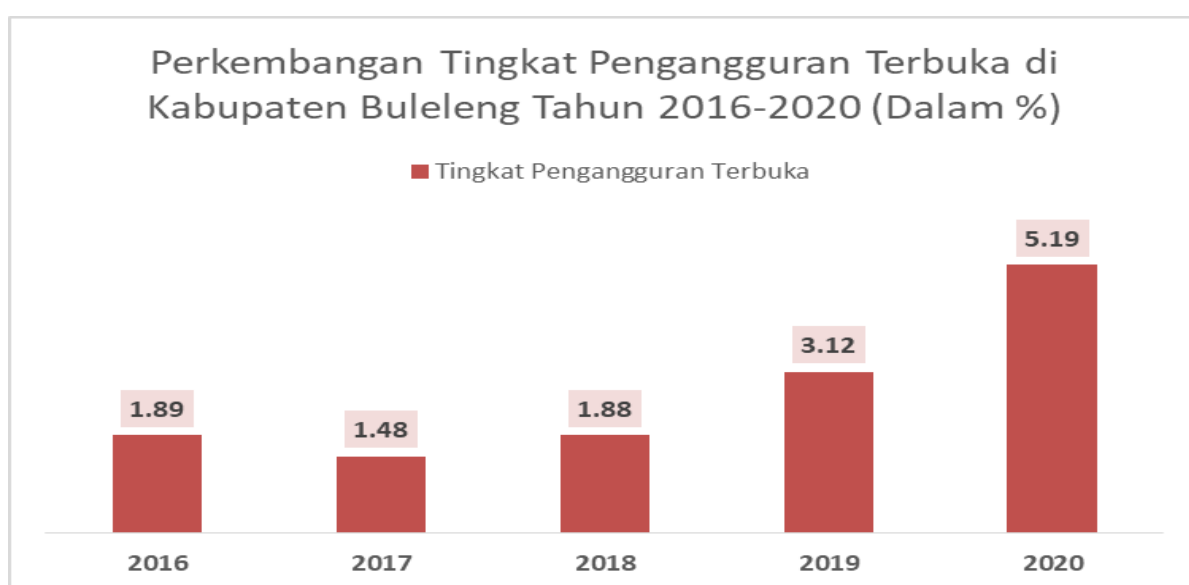
c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,89% dan kemudian meningkat secara drastis di tahun 2020 menjadi 5,19%.

Tahun 2020 merupakan tahun dimulainya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Provinsi Bali dimana sektor-sektor ekonomi unggulan mengalami penghentian secara paksa dan mendadak selama kurun waktu yang belum bisa dipastikan. Akibatnya banyak tenaga kerja yang harus dirumahkan termasuk di Kabupaten Buleleng. Itulah

menjadi penyebab mengapa pada tahun 2020 lonjakan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng menjadi sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Bali, TPT Kabupaten Buleleng masih lebih rendah. Provinsi Bali memiliki TPT 5,63% pada tahun 2020 dimana mengalami lonjakan tajam dari tahun 2019 sebesar 1,57%.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2021

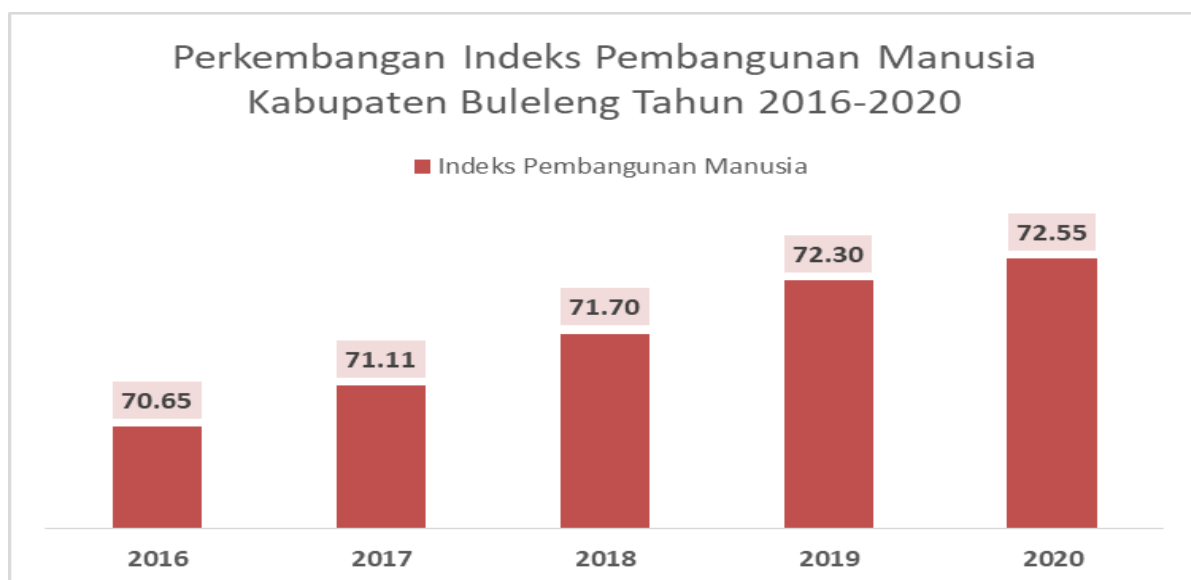
Gambar 5.33.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 tercatat IPM Kabupaten Buleleng sebesar 70,65 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,55 di tahun 2020. IPM Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 71,94. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia

di Kabupaten Buleleng tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2021

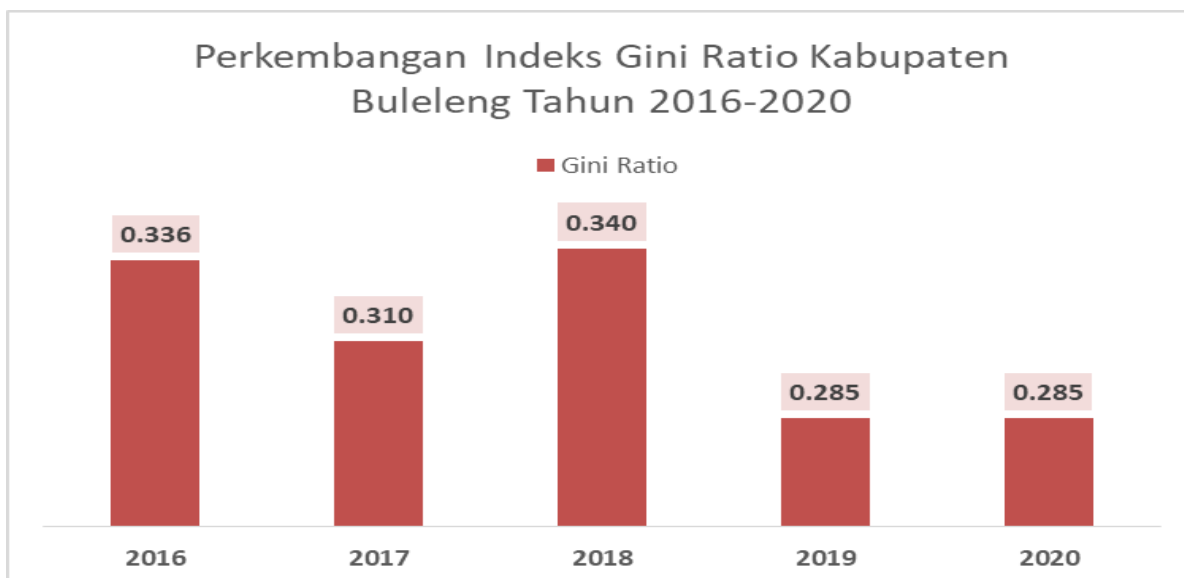
Gambar 5.34.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 adalah sebesar 0,285 atau tidak mengalami perubahan dari tahun 2019. Selama 5 tahun terakhir, ketimpangan antar kelompok penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif. Meskipun fluktuatif pada periode 2016-2018, namun pada periode 2018-2020, Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,340 dan menurun drastis di tahun 2019 menjadi 0,285.

Gini Ratio Kabupaten Buleleng merupakan yang terendah kedua setelah Kabupaten Bangli. Angka Gini Ratio di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sendiri berada jauh di atas Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,369.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2021

Gambar 5.35.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.19.

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BULELENG
" PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI "	"PEMANTAPAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI INTEGRASI PERTANIAN DENGAN PARIWISATA YANG DIDUKUNG INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR"

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2021

Keselarasn prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.20.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

NO	PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KABUPATEN BULELENG
1	Pangan, Sandang dan Papan	Peningkatan integrasi perekonomian daerah berbasis kawasan
2	Kesehatan dan Pendidikan	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Pengembangan seni budaya dan perlindungan sosial
5	Pariwisata	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
6	Penguatan Infrastruktur	Penguatan infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur strategis
7	Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata pemerintahan berbasis IPTEK

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- 1) Pengembangan sentra-sentra produksi dan Kawasan pertanian
- 2) Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan Kawasan industri
- 3) Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- 4) Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM
- 5) Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi
- 6) Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal
- 7) Pemenuhan hak masyarakat mendapatkan layanan Pendidikan merata dan berkualitas jenjang SD / MI
- 8) Pemenuhan hak masyarakat mendapatkan layanan Pendidikan merata dan berkualitas jenjang SMP / MTs
- 9) Peningkatan SPM dan standar nasional Pendidikan dasar
- 10) Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

- 11) Pemenuhan kualitas sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlit olahraga
- 12) Peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak
- 13) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu melahirkan
- 14) Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi, terutama untuk ibu hamil, anak, dan balita
- 15) Penyediaan layanan kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal bidang Kesehatan
- 16) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
- 17) Pengembangan dan pemeliharaan lembaga adat yang memiliki keunikan dan adiluhung
- 18) Melestarikan benda situs dan kawasan cagar budaya
- 19) Memetakan kondisi dan kebutuhan infrastruktur transportasi serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan secara terpadu
- 20) Memetakan kondisi dan kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perumahan, air minum, air limbah dan drainase yang layak dan berkelanjutan
- 21) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui " Gotong Royong "
- 22) Mengembangkan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
- 23) Mendukung penyelenggarakan pemilihan legislatif, presiden, dan DPD secara langsung, umum, bebas, rahasia, berbudaya, dan damai
- 24) Peningkatan sarana prasarana persampahan dan menumbuhkan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah

- 25) Penerapan sistem rekrutmen dan pengembangan karier ASN secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based)
- 26) Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, IKU, RKT, PK, dan LAKIP)
- 27) Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan, peningkatan pemahaman melalui sosialisasi, asistensi, pendampingan uuntuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Untuk mendukung arah pembangunan di atas, target capaian pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.21.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,79%
2	Persentase Kemiskinan	4,85%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,9%
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,04%
5	Gini Ratio	0,3230

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2021

H. Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten paling barat di Provinsi Bali yang menjadi pintu gerbang dengan kawasan Barat Indonesia. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah 841,80 Km² atau 14,93% dari luas wilayah Provinsi Bali atau terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Jembrana merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator

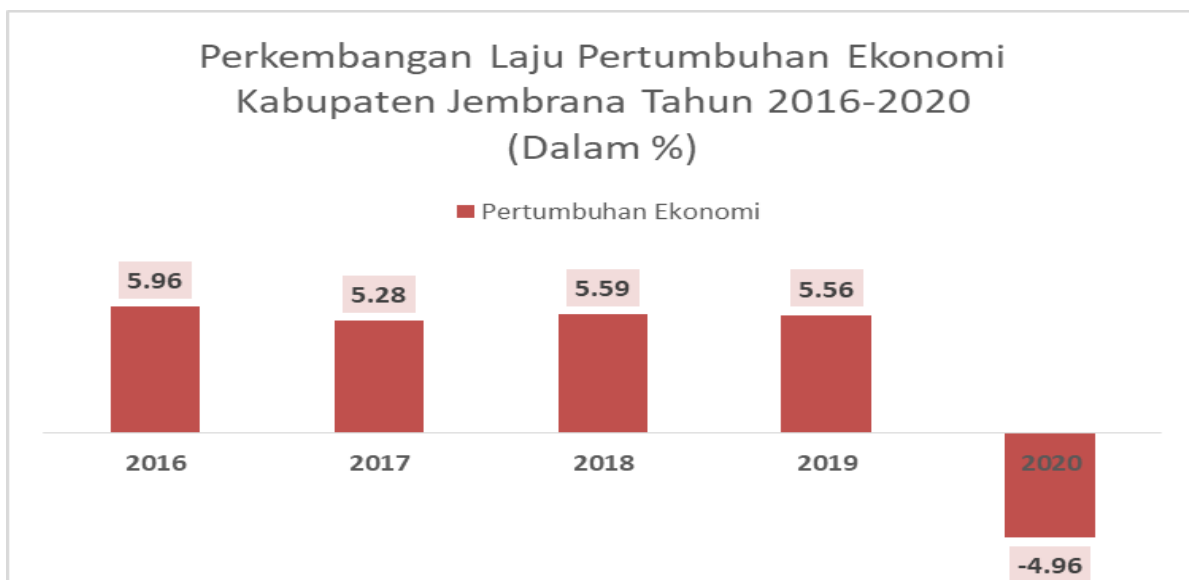
yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi pada periode tahun 2016-2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 5,96%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2020 yaitu sebesar -4,96%.

Sebelum tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi. Tertinggi tercatat di tahun 2016 yaitu 5,96% dan terendah di tahun berikutnya (2017) yaitu dengan laju 5,28%.

Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana anjlok ke angka -4,96%. Seperti halnya daerah lain dengan LPE yang mengalami kontraksi, Kabupaten Jembrana mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Meskipun secara struktur sektor pertanian masih mendominasi PDRBnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sektor transportasi dan pariwisata memegang peranan penting bagi roda perekonomian Kabupaten Jembrana. Kedua sektor ini merupakan yang paling terpuruk pada era pandemi sehingga menyebabkan daerah dengan pendapatan dominan dari kedua sektor pasti mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2021

Gambar 5.36.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana
Tahun 2016-2020

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jembrana mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2016-2020, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2016 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,33% dan menurun secara signifikan pada tahun 2020 menjadi 4,51%.

Angka kemiskinan Kabupaten Jembrana semakin mendekati angka kemiskinan Provinsi Bali. Pada tahun 2019, angka kemiskinan Jembrana 5,56% sedangkan Provinsi Bali 3,61%. Pada tahun 2020, angka kemiskinan Provinsi Bali adalah 4,45% sedangkan Kabupaten Jembrana adalah 4,51%. Meskipun masih di bawah rata-rata Provinsi Bali namun telah terjadi progress yang cukup baik yang menyebabkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Jembrana terus menurun.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jember Tahun 2021

Gambar 5.37.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Jember mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 0,67%. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember meningkat sangat signifikan menjadi 4,52%. Peningkatan yang sangat signifikan ini terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang memaksa banyak usaha khususnya di bidang pariwisata, perdagangan, industri, dan transportasi tutup dalam waktu yang belum bisa dipastikan. Sehingga banyak karyawan yang harus dirumahkan.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2021

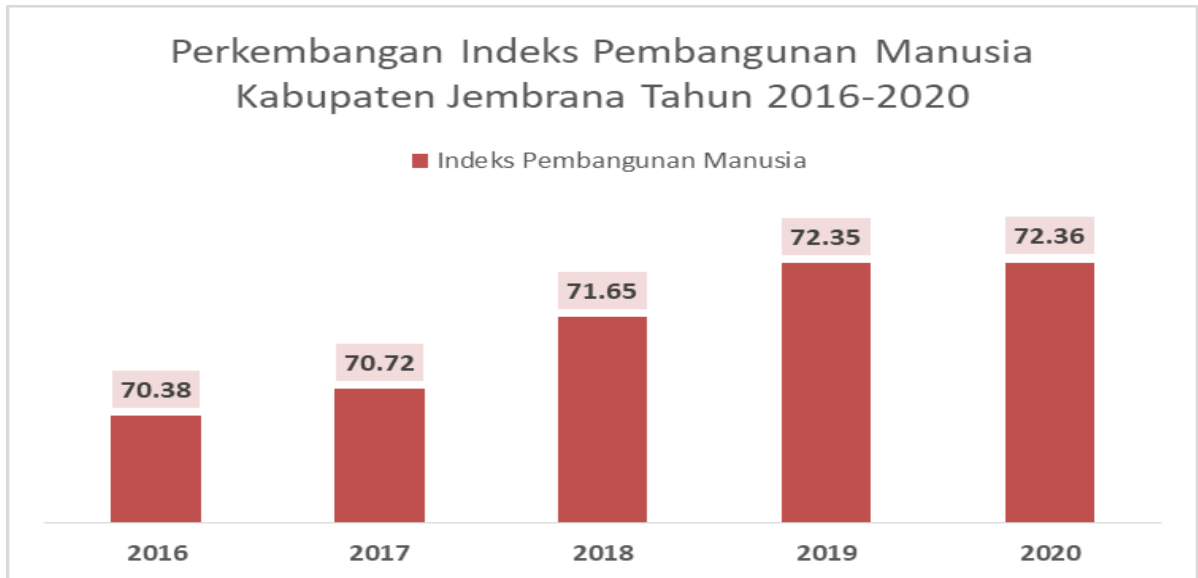
Gambar 5.38.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana
Tahun 2016-2020

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 tercatat IPM Kabupaten Jembrana sebesar 70,38 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 72,36 di tahun 2020.

IPM Kabupaten Jembrana pada tahun 2020 ini lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 namun lebih tinggi dari IPM Nasional yaitu 71,94. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jembrana tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jemberana Tahun 2021

Gambar 5.39.

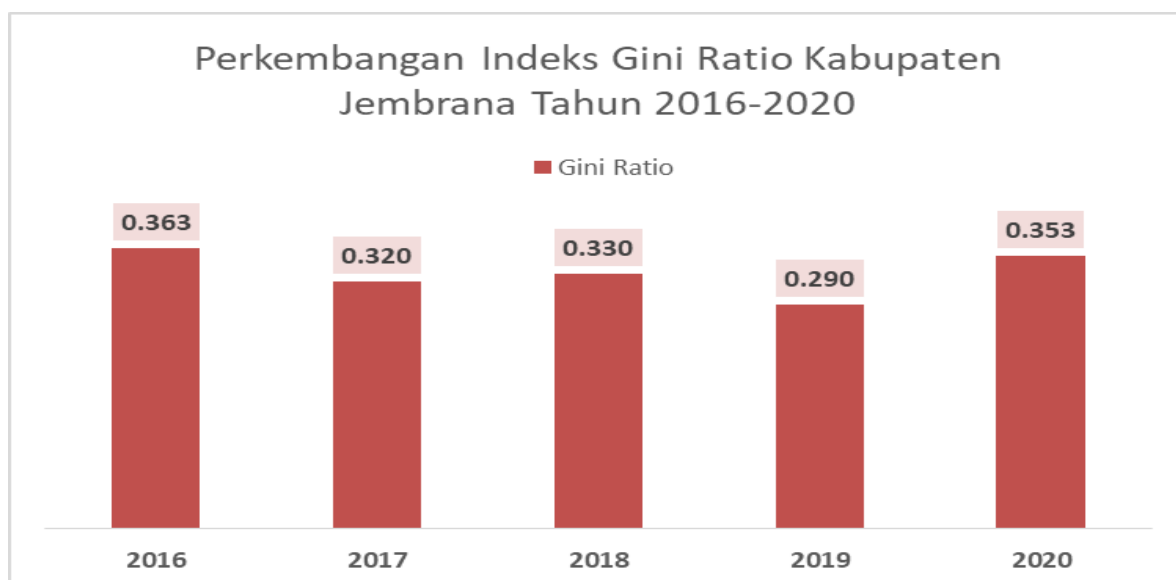
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jemberana Tahun 2016-2020

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Jemberana pada tahun 2020 adalah sebesar 0,353 atau meningkat dari tahun 2019 dengan indeks 0,290.

Indeks Gini Ratio Kabupaten Jemberana merupakan kedua tertinggi di Provinsi Bali setelah Kabupaten Klungkung. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jemberana merupakan salah satu wilayah dengan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk tertinggi di Provinsi Bali.

Meskipun tertinggi di Bali, namun Kabupaten Jemberana termasuk ke dalam wilayah dengan ketimpangan antar kelompok penduduk rendah karena memiliki Indeks Gini Ratio <0,390.



Sumber: Bappedalitbang Kab Jember Tahun 2021

Gambar 5.40.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jember
Tahun 2016-2020

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Jember terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.22.

Keselarasn Tema Pembangunan Kabupaten Jember Terhadap Tema
Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBER
" PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI "	"Peningkatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Jember didukung keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sesuai dengan kearifan lokal melalui sinergi seluruh potensi menuju masyarakat Jember yang bahagia"

Sumber: Bappedalitbang Kab Jember Tahun 2021

Keselarasn prioritas pembangunan Kabupaten Jember terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.23.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pangan, Sandang dan Papan	1. Pangan, Sandang dan Papan
2	Kesehatan dan Pendidikan	2. Kesehatan dan Pendidikan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Pariwisata	5. Pariwisata
6	Penguatan Infrastruktur	6. Penguatan Infrastruktur
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Bappedalitbang Kab Jembrana Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Pangan, Sandang, dan Papan

- a. Pelestarian hutan bakau dan Budidayanya serta industrialisasi Blue Carbon
- b. Penguatan lembaga subak dan subak abian untuk pelestarian hutan
- c. Pembangunan ekosistem, pusat riset dan sistem informasi potensi pertanian
- d. Pembangunan call center untuk pengaduan petani
- e. Pengembangan ragam komoditas pertanian yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar
- f. Kemitraan Tripartit Pertanian Berbasis Subak
- g. Pengembangan ragam komoditas perikanan yang berorientasi pada potensi lokal dan kebutuhan pasar

2. Pendidikan dan Kesehatan

- a. Pemberian uang saku anak sekolah (SD, SMP) dari keluarga miskin
- b. Pemberian beasiswa berprestasi ke program S1, S2, dan S3, dalam negeri maupun luar negeri dan dukungan sumber daya untuk pendirian perguruan tinggi baru.

- c. JKJ Plus (pelayanan kesehatan tingkat I gratis dalam bentuk dokter/bidan keluarga dan layanan door to door oleh perawat)
 - d. JKJ Swab Mobile mempercepat pemeriksaan covid-19 hanya dalam 1 jam dan fasilitas lab standar rumah sakit rujukan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- a. Penyediaan layanan bimbingan Pra Nikah, Ibu Hamil bahagia dan Balita Sehat
 - b. Bantuan makan gratis setiap hari bagi jompo miskin dan bantuan khusus untuk lansia
 - c. Penyediaan Diklat Ketrampilan Usaha untuk Wanita dan Penyediaan Uji Sertifikasi
 - d. Kompetensi dan Profesi untuk SDM berdaya saing
 - e. Membangun Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis untuk mencetak wirausaha sukses
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- a. Pelestarian dan pengembangan adat, bahasa bali, seni budaya tradisional dan modern
 - b. Meningkatkan kesejahteraan pemuka dan pelayan keagamaan serta perangkat desa dan adat
 - c. Ngaben Masal di lima kecamatan sebagai obyek wisata terintegrasi
 - d. Membangun Museum Banten dan Lontar sebagai pelestarian budaya asli Bali.
 - e. Pelestarian tradisi yadnya wana kerthi dan wana laba, danu kerthi, segara kerthi, jagat kerthi
 - f. Pelestarian dan pengembangan jegog, gong, angklung, bambung, kendang berbasis sekeha sebunan
5. Pariwisata
- a. Penataan obyek wisata religi yang terintegrasi
 - b. Pengembangan obyek wisata adventure yang terintegrasi

6. Penguatan Infrastruktur

- a. Pompanisasi dan pipanisasi untuk ketersediaan air bagi pertanian dan rumah tangga
- b. Pengembangan dan penataan sirkuit untuk otomotif, pacuan kuda, makepung, balap jukung, balap merpati dan lomba layangan
- c. Pembangunan ekosistem, pusat riset dan sistem informasi potensi perikanan

7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN melalui manajemen ASN yang modern
- b. Mengoptimalkan fasilitas publik (kebun raya Jagadnatha, rest area, anjungan cerdas, cold storage, pabrik es, pabrik sampah, perusda, TPA, Bus Sekolah dan J-Net)
- c. Pengelolaan sampah terpadu di tiap desa / kelurahan dan pusat-pusat perekonomian (Gerakan Jembrana Olah Sampah Mandiri)
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (smart city)
- e. Peningkatan kerjasama antar wilayah dan lembaga (sister city).
- f. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan pemangkasan pelayanan perijinan dengan standar ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2013 serta jaminan hubungan bepartit yang harmonis
- g. Membangun Desa mandiri, berbudaya hidup sehat, disiplin dan peduli lingkungan berbasis keluarga

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka target capaian pembangunan Kabupaten Jembrana tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 5.24.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,00-4,00%
2	Persentase Kemiskinan	4,5%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,5-4,0%
4	Indeks Pembangunan Manusia	73
5	Gini Ratio	0,310-0,330

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Jembrana Tahun 2021

I. Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota yang terdapat di Provinsi Bali yang sekaligus menjadi Ibu Kota dan pusat kegiatan di Provinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,78 Km² atau 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya wilayah dengan luas terkecil.

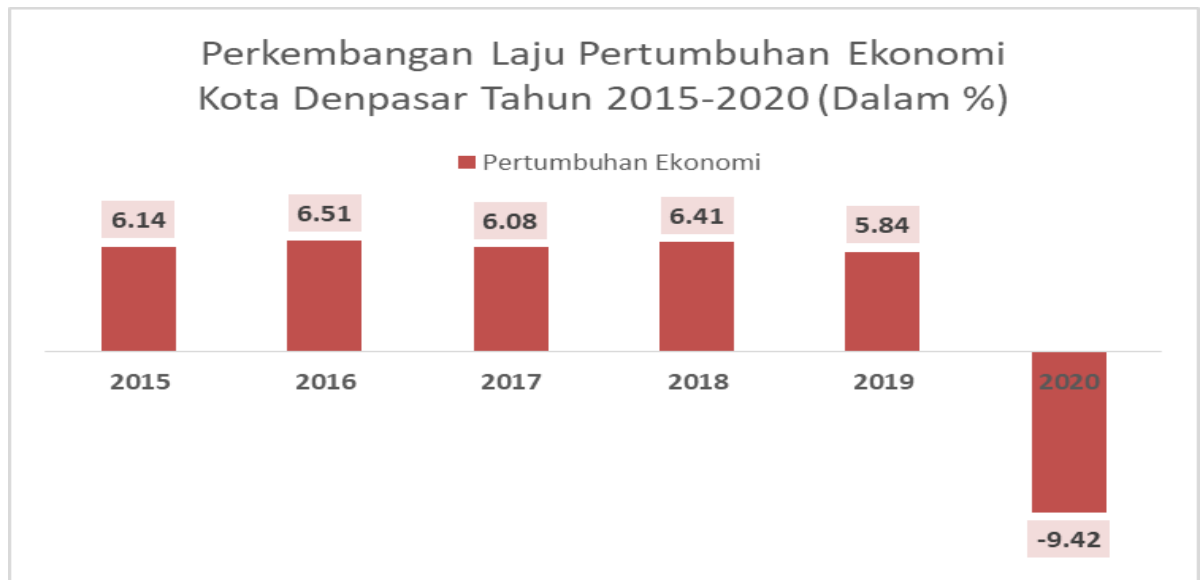
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kota Denpasar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2015-2020. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dimana tercatat mencapai angka 6,51%. Terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu mengalami kontraksi sedalam -9,42. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yaitu -9,31%. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi

Kota Denpasar merupakan salah satu yang terendah di tahun 2020 selain Kabupaten Badung.



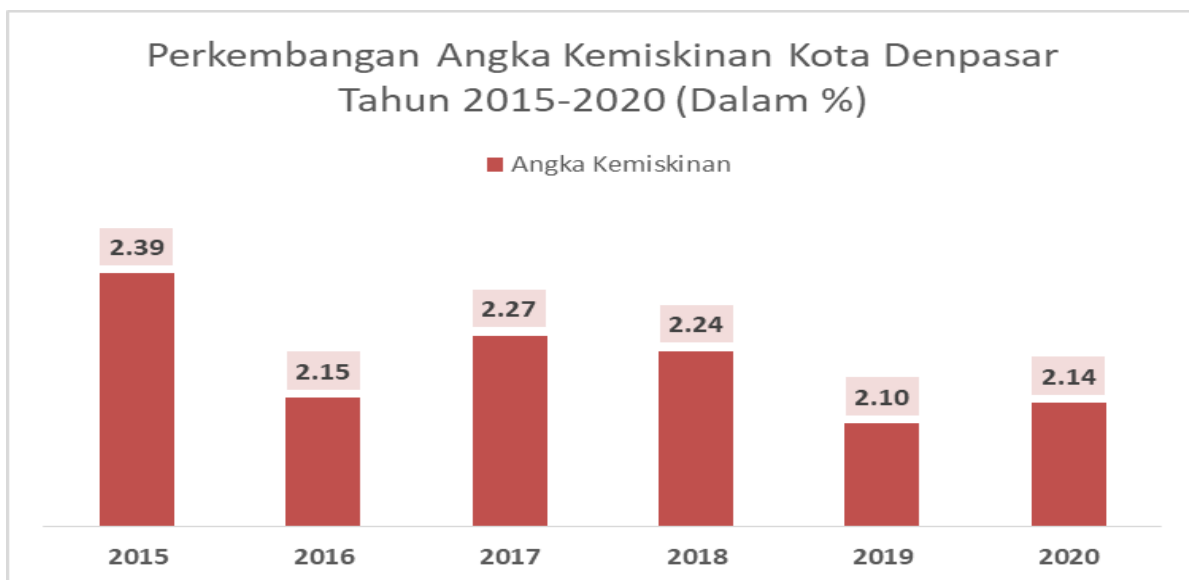
Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021

Gambar 5.41.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2015-2020

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kota Denpasar mengalami kondisi positif selama 5 tahun terakhir. Pada periode tahun 2015-2020, angka kemiskinan terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2015 angka kemiskinan tercatat sebesar 2,39% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 2,14%. Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan selama 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Kota Denpasar pada tahun 2020 berada jauh di bawah Provinsi Bali yang memiliki angka kemiskinan 4,45%.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021

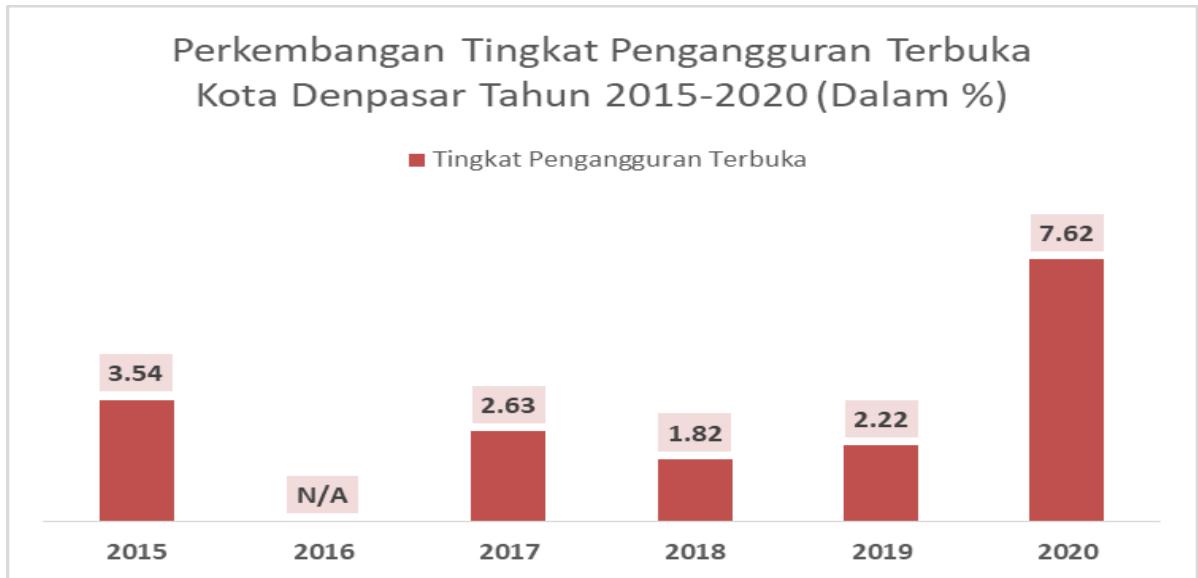
Gambar 5.42.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar
Tahun 2015-2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kota Denpasar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 3,54% dimana kemudian mengalami penurunan signifikan di tahun 2017 menjadi 2,63%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kota Denpasar berada pada angka 2,22%. Angka ini berada jauh di atas Provinsi Bali yaitu 1,52%. Artinya, secara rata-rata, tingkat pengangguran di Kota Denpasar tergolong tinggi bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.

Pada tahun 2020, TPT Kota Denpasar melambung menjadi 7,62% akibat tingginya jumlah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau dirumahkan sebagai dampak pembatasan sosial berskala besar dan skala mikro yang dilakukan pemerintah.



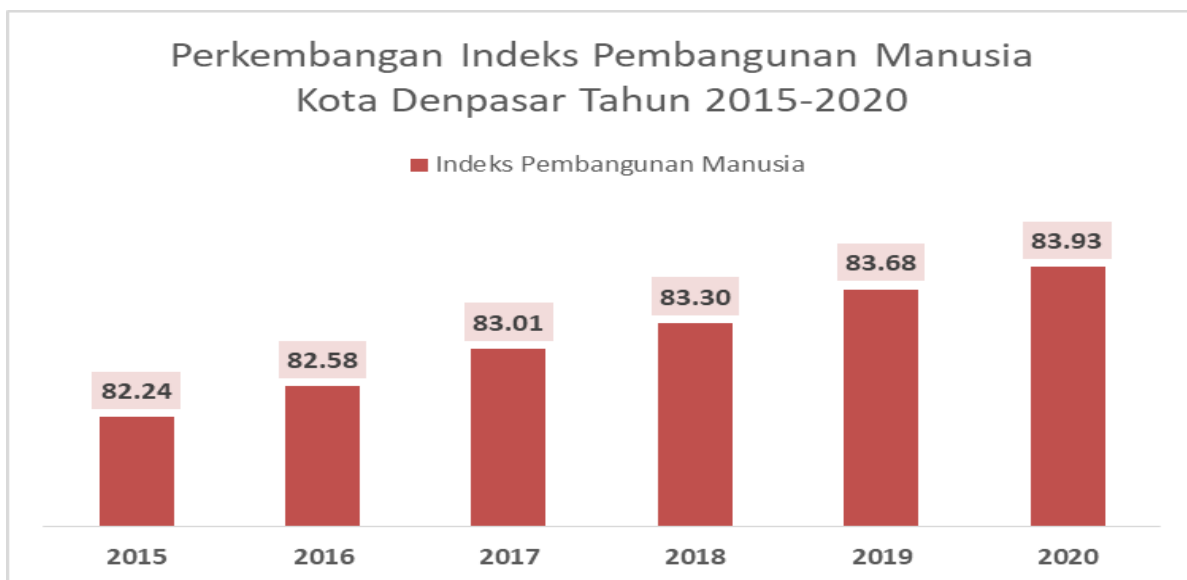
Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021

Gambar 5.43.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar
Tahun 2015-2020

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2015-2020. Pada tahun 2015 tercatat IPM Kota Denpasar sebesar 82,24 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 83,93 di tahun 2020 dan menjadi yang tertinggi diantara wilayah lainnya di Provinsi Bali. IPM Kota Denpasar pada tahun 2020 ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 75,50 maupun Nasional yaitu 71,94. Artinya, secara rata-rata, kualitas sumber daya manusia di Kota Denpasar tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021

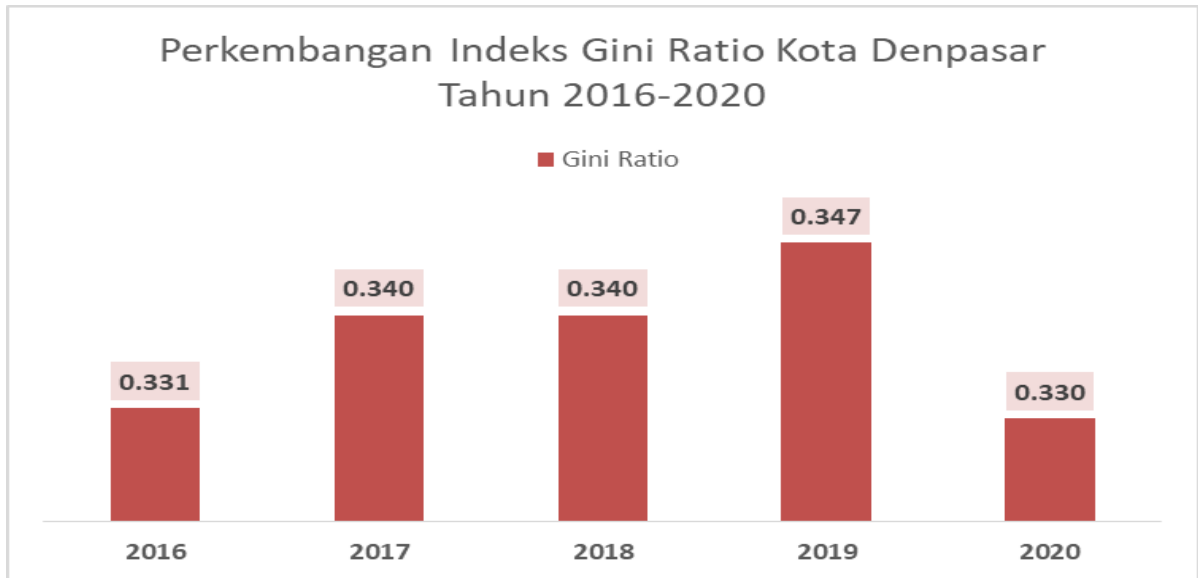
Gambar 5.44.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar
Tahun 2015-2019

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kota Denpasar pada tahun 2020 adalah sebesar 0,330 atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 0,347. Menurunnya indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan, semakin menyempit. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kota Denpasar cenderung untuk semakin merata, dimana antar kecamatan atau kawasan memiliki tingkat perekonomian yang cenderung merata.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 0,347 sedangkan terendah terjadi di tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Gini Ratio Kota Denpasar berada di atas Provinsi Bali dengan indeks 0,369



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021

Gambar 5.45.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2016-2020

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kota Denpasar terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25.

Keselarasn Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR
" PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI: PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI "	"PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL DAN EKONOMI MENUJU DENPASAR MAJU"

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021

Keselarasn prioritas pembangunan Kota Denpasar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.26.

Keselarasn Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas
Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2022

PRIORITAS PROVINSI BALI	PRIORITAS KOTA DENPASAR
1. Pangan, Sandang dan Papan	1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Kesehatan dan Pendidikan	2. Sosial dan
3. Jaminan Sosial dan	Ketenagakerjaan
4. Ketenagakerjaan	3. Ekonomi dan Pariwisata
5. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4. Infrastruktur
6. Pariwisata	5. Reformasi Birokrasi
7. Penguatan Infrastruktur	
8. Pelayanan Publik	

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021

Guna mewujudkan tema, dan prioritas pembangunan, di atas, maka ditetapkan target capaian pembangunan di Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.27.

Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	0,53%
2	Persentase Kemiskinan	2,1%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,42%
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,95
5	Gini Ratio	0,300

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2021

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan, selain memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, juga sangat dibutuhkan landasan perencanaan yang *SMART* (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*) yang ditempuh melalui pendekatan secara Tematik sesuai agenda pembangunan, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* (lintas sektor), dan *Spatial* (titik koordinat) lokasi kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian program pembangunan yang dirancang harus memperhatikan :

1. Keterkaitan antara penganggaran dan sasaran yang dituju;
2. Memperhatikan kemanfaatan kegiatan, efektifitas dan efisiensi dalam anggaran; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran yang tertib.

PRIORITAS 1 : Pangan, Sandang dan Papan



Gambar 6.1
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1

Berdasarkan gambar 6.1 yang menempatkan bidang Pangan, Sandang dan Papan sebagai prioritas 1 daerah Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) mengatasi kerentanan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin sangat penting dilakukan mengingat perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam upaya, (1) penyediaan bantuan rumah layak huni, (2) pembuatan sumur bor untuk wilayah yang belum mendapat pelayanan PDAM, (3) pembangunan instalasi pengolahan sampah, (4) pembangunan dan normalisasi sanitasi permukiman.
4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, (3) promosi penganekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) mengolah hasil pertanian pasca panen, (2) memastikan nilai jual harga hasil pertanian menguntungkan bagi petani.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pendampingan industri tenun, (2) mendorong pemberdayaan koperasi tenun, (3) fasilitasi pemasaran, promosi dan optimalisasi penyerapan produk kerajinan tenun, (4) pemberian bantuan kredit dengan bunga ringan.

7. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) peningkatan pemasaran produk lokal, (2) pelaksanaan pasar murah melalui operasi pasar.

PRIORITAS 2 : Kesehatan dan Pendidikan



Gambar 6.2

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

Berdasarkan Gambar 6.2 yang menggambarkan prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Penguatan fasilitas pelayanan dasar, melalui kegiatan prioritas dalam rangka, (1) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTP, (2) Peningkatan pelayanan kesehatan di FKTL, (3) penanggulangan bencana kluster kesehatan, (4) peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, (5) peningkatan obsteri neonatal emergency komprehensif/Ponek.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan prioritas dalam upaya, (1) peningkatan kesehatan gizi masyarakat, (2) peningkatan kesehatan keluarga, (3) pengembangan promosi kesehatan dan penggerakan masyarakat hidup sehat, (4) upaya

kesehatan kerja, (5) upaya kesehatan olah raga, (6) peningkatan kesehatan masyarakat melalui dana BOK, (7) penanganan stunting.

3. Jaminan kesehatan karma Bali sejahtera, dilakukan melalui kegiatan (1) penguatan jaminan kesehatan karma Bali.
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/Kota, membangun atau mengembangkan laboratorium sarana dan prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) menetapkan regulasi tentang SPM pendidikan menengah, (3) penetapan pemenuhan sarana prsarana pendidikan sesuai dengan SPM.

PRIORITAS 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan



Gambar 6.3

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

Berdasarkan Gambar 6.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan ditentukan oleh 5 (lima) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Program revitasilsasi Balai Latihan Kerja (BLK). Revitalisasi atau pemberdayaan dilakukan sesuai dengan potensi kearifan lokal

masyarakat. Pelatihan pariwisata, pertukangan, perbengkelan, industri kerajinan dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.

2. Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah. Program prioritas ini akan dilaksanakan dalam bentuk bedah rumah bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah layak huni serta akses lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
3. Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas, melalui (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, (3) pelayanan lanjut usia di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
4. Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui, (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, (2) pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia.
5. Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (job fair), (2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) bagi calon TKI ke luar negeri, (3) penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja melalui bursa kerja online (BKOL), (4) pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan tenaga kerja penyebaran informasi lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS), (5) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (6) pembinaan penggunaan tenaga kerja asing, (7) pengelolaan informasi pasar kerja, (8) penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja atau siswa, (9) perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK), (10) penerapan dan pembekalan teknologi padat karya (TPK) sistem kelompok, (11) pembinaan tenaga kerja mandiri.

PRIORITAS 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya



Gambar 6.4

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4

Berdasarkan Gambar 6.4 yang menguraikan tentang prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan karma Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu :

1. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui, (1) pembinaan desa adat, (2) pendidikan dan pelatihan desa adat.
2. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan (1) pembinaan subak dan subak abian, (2) pembinaan penyusunan awig-awig/perarem subak dan subak abian.
3. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
4. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan (1) penyusunan purana pura, (2) pembinaan permuseuman.
5. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui kegiatan (1) Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) peragaan dan pementasan seni budaya, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan

SDM tenaga kebudayaan, (5) festival seni masa kini, (6) penghargaan seni, (7) pameran seni rupa, (8) standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa).

6. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita.

PRIORITAS 5 : Pariwisata



Gambar 6.5

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

Berdasarkan Gambar 6.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, Pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan filosofi tri hita karena dalam menjaga keharmonisan alam semesta, manusia dan kebudayaan sebagai genuine Bali. Pada program prioritas pariwisata terdapat 5 (lima) dimensi yaitu :

1. Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu (1) Pengembangan kawasan wisata berbasis budaya, (2) Pengembangan kawasan wisata berbasis alam, dan (3) Pengembangan kawasan wisata berbasis buatan.

2. Peningkatan pemasaran pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) analisa pasar dan indeks kepuasan masyarakat, (2) penyusunan data MICT dan statistic kepariwisataan.
3. Pengembangan standar industry pariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan (1) pengawasan usaha jasa pariwisata, (2) pengawasan usaha sarana pariwisata, (3) penyusunan perda tentang kontribusi pariwisata (passanger fee).
4. Pengembangan SDM pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan (1) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, (2) peningkatan peran serta kelembagaan kepariwisataan.
5. Pengembangan produk pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW buatan, (2) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW alam, (3) pengembangan produk wisata unggulan berbasis DTW budaya.

PRIORITAS 6 : Penguatan Infrastruktur



Gambar 6.6

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

Berdasarkan Gambar 6.6 yang menggambarkan Prioritas Penguatan Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas. Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industry yang akan mendukung konektivitas antar daerah. Terdapat 5 (lima) Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) peningkatan penyebarluasan informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistic daerah, (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.
3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan (1) validasi kebijakan perencanaan

penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, (3) pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, (3) peningkatan layanan air limbah.
5. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, (2) pengendalian atau pengamanan pantai.

PRIORITAS 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Gambar 6.7

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7

Berdasarkan Gambar 6.7 yang menguraikan Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), ditentukan oleh 6 (enam) dimensi/Program Prioritas yaitu :

1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan melalui kegiatan, (1) penerapan atau implementasi sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah, (2) penyusunan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah/KDH tentang penjabaran APBD.

2. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah, program prioritas ini dilaksanakan melalui, pelatihan, pendidikan dan melalui pemberian bantuan pendidikan.
3. Efektifitas, efisiensi dan transparansi, kegiatan ini dilaksanakan melalui, (1) pengawasan program prioritas, (2) pengembangan potensi pembiayaan daerah, (3) perumusan kebijakan daerah.
4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan, (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, (2) penyusunan peraturan dokumen NJKB.
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan pengembangan pemerintahan.
6. Peningkatan kinerja aparatur dan pelayanan publik, program ini dilaksanakan dalam upaya, (1) untuk mengetahui tingkat indeks kepuasan masyarakat/IKM, (2) meningkatkan pelayanan public, dan (3) peningkatan pelaksanaan kerjasama dalam mendorong bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Berikut adalah pemetaan nomenklatur program sesuai RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan nomenklatur program sesuai Permedagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 6.1
Pemetaan Program RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali
Tahun 2018-2023 berdasarkan Nomenklatur pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	01		Pendidikan	
1	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	01	02*	Peningkatan akses dan mutu pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan
1	01	03*	Peningkatan kualitas Pendidikan Khusus dan Bahasa	
1	01	04*	Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1	01	05	Pengembangan Teknologi Pendidikan UPT BPTEKDIK	Program Pengelolaan Pendidikan
1	01	06*	Pengembangan layanan Pendidikan berbasis Nilai-Nilai Hindu	Program Pengembangan Kurikulum Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
1	01	07*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jana Kerthi	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
1	02		Kesehatan	
1	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	02	10*	Pengembangan Sistem Database Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehtaan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	02	02*	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehtaan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	02	03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	
1	02	04	Penguatan Surveilans dan Imunisasi	
1	02	05*	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	
1	02	06*	Jaminan Kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)	
1	02	09*	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
1	02	11	Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	
1	02	12	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	
1	02	14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bali Mandara	
1	02	15*	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	
1	02	16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	
1	02	17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD RSUD Bali Mandara	
1	02	18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	02	19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara	Program Pemenuhan Upaya Kesehtaan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	02	07	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
1	02	08*	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	13	Pelatihan Tenaga Kesehatan	
			-	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	03	02	Peningkatan Kapasitas Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1	03	03*	Perlindungan Sumber Daya Air	
1	03	04*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Segara Kerthi	
1	03	05*	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Provinsi	Penyelenggaraan Jalan
1	03	06*	Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
1	03	07	Peningkatan Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	03	08	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengujian Laboratorium dan Peralatan	Pengembangan Jasa Konstruksi
1	03	09	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1	03	10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1	03	11*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Jagat Kerthi	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1	03	11*		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1	03	12*	Peningkatan kualitas penataan ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	
1	04	02	Pengembangan Perumahan	Pengembangan Perumahan
1	04	03*	Peningkatan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	
1	04	04*	Pengembangan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1	05		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1	05	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pol PP	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	05	03	Penegakan Produk Hukum Daerah	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	05	04*	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
1	05	05*	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
1	05	06	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	
1	05	07	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	05	08	Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Program Penanggulangan Bencana
1	05	09	Penanganan darurat bencana, peralatan, dan logistik kebencanaan	
1	05	10	Pemulihan Pasca Bencana	
1	05	11	Pengendalian Bencana	
1	06		Sosial	
1	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1	06	02*	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial
1	06	03*	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan Bencana
1	06	04*	Penanganan Fakir Miskin	Perlindungan dan Jaminan Sosial
1	06	05*	Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial
1	06	06*	Pemenuhan sandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	-

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
1	06	07*	Pelayanan Sosial	-
			-	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
			-	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
2			URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR	
2	01		Tenaga Kerja	
2	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	01	02*	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	01	03*	Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)/Techno Park	
2	01	04*	Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja	
2	01	05*	Peningkatan kualitas penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
2	01	06*	Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal	
2	01	07*	Perlindungan Tenaga Kerja	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
2	01	08*	Peningkatan kualitas lingkungan kerja dan kesehatan kerja	
2	02		Pemberdayaan dan Perlindungan anak	
2	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	02	02*	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	02	03	Peningkatan Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan
2	02	04	Peningkatan Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak
			-	Peningkatan Kualitas Keluarga
			-	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
			-	Perlindungan Khusus Anak
2	03		Pangan	
2	03	02*	Peningkatan ketersediaan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
2	03	03*	Stabilisasi harga Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2	03	04*	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan
2	03	05*	Peningkatan Keamanan Pangan Segar	-
2	03	06*	Peningkatan Sertifikasi Mutu Pangan Segar	Program Pengawasan Keamanan Pangan
2	03	07*	Revitalisasi Fungsi Lumbung Sebagai Penyangga Stock Pangan Daerah	-
2	04		Pertanahan	
2	04	01	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Program Penatagunaan Tanah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	05		Lingkungan Hidup	
2	5	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2	05	02*	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	05	06**	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Danu Kerthi	
2	05	03*	Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Perencanaan Lingkungan Hidup
				Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2	05	04	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2	05	05*	Peningkatan Kualitas Pelayanan Persampahan	Pengelolaan Persampahan
2	05	07*	Peningkatan Pengelolaan Sampah	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	06	02	Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	06	03	Peningkatan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	07	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	07	02	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
2	07	03*	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
2	07	05	Peningkatan Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat	
				Program Peningkatan Kerjasama Desa
2	08		Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	
2	08	01	Program Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2	09		Perhubungan	
2	09	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	09	02*	Pengembangan infrastruktur transportasi publik	Program Pengelolaan Perkeretaapian
2	09	04	Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2	09	05	Peningkatan Pengawasan LLAJ	
2	09	07	Peningkatan pengendalian persimpangan berbasis alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) Provinsi	
2	09	06*	Peningkatan pelayanan angkutan Trans Sarbagita	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	09	08	Peningkatan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	Jalan (LLAJ)
2	09	03*	Pengembangan manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran
2	09	09	Peningkatan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional Provinsi Bali	
2	10		Komunikasi Dan Informatika	
2	10	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	10	02*	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4	05	14	Peningkatan Layanan Informasi	
4	5	15	Peningkatan Pelayanan Kehumasan	
2	10	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
2	10	04	Pengembangan Infrastruktur TIK	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2	10	05*	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
2	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	11	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	11	02*	Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
2	11	03	Peningkatan Pengawasan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
2	11	04*	Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan UMKM
2	11	05*	Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
2	11	06*	Pengembangan Kelembagaan Subak Sebagai Koperasi Tani	-
2	11	07*	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2	11	08*	Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	-
2	12		Penanaman Modal	
2	12	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2	12	02*	Pengembangan investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	12	03	Pengembangan promosi penanaman modal	Promosi Penanaman Modal
2	12	04	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	12	05*	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Penanaman Modal

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	12	06	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan A	Pelayanan Penanaman Modal
2	12	07	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan B	
			-	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2	13		Kepemudaan dan Olah Raga	
2	13	02	Pemberdayaan Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	13	03*	Pengembangan Pemuda	
2	13	04	Pembudayaan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
2	13	05*	Peningkatan Prestasi Olahraga	
			-	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2	14		Statistik	
2	14	01*	Pengembangan Data Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
2	15		Persandian	
2	15	01	Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2	16		Kebudayaan	
2	16	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	06*	Penguatan Desa Adat	Pemajuan Masyarakat Adat Bali
2	16	07*	Penguatan Subak	
2	16	08*	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Keamanan Tradisional	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	16	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	16	02*	Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi	Program Pembinaan Sejarah
2	16	03*	Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
2	16	04*	Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
2	16	05*	Pemajuan Bahasa Aksara dan Sastra	Program Pengembangan Kebudayaan
2	16	09	Pengembangan UPTD Taman Budaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengembangan Kebudayaan
2	16	10	Pengembangan UPTD Museum Bali	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Permuseuman
2	16	11	Pengembangan UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Permuseuman
2	17	02*	Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	-
2	17	03	Pengembangan Perpustakaan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
2	17	04	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
2	18		Kearsipan	
2	18	01*	Peningkatan Pengolahan Arsip	Program Pengelolaan Arsip
2	18	02	Peningkatan, Pengembangan Kearsipan	
			-	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			-	Program Perizinan Penggunaan Arsip
3			URUSAN PILIHAN	
3	01		Kelautan dan Perikanan	
3	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
3	01	02*	Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3	01	03*	Pengembangan Budidaya Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	01	06	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional Kabupaten/Kota	-
3	01	07	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	01	08*	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	01	09	Peningkatan Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3	01	10	Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	01	11	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	01	12	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	01	13	Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	02		Pariwisata	
3	02	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
3	02	03*	Pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	02	04*	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
3	02	07**	Pengembangan Informasi Pariwisata	
3	02	02*	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
3	02	05*	Pengembangan Produk Pariwisata	
3	02	06**	Pengembangan Standar Industri Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
3	03		Pertanian	
3	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
3	03	02	Pendukung Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Kedaulatan Beras	-
3	03	03*	Pengembangan Pertanian Taman Gumi Banten	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	03	06*	Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	07*	Peningkatan sarana produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	11*	Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Ramah Lingkungan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
3	03	12*	Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	03	13*	Pengembangan Pertanian Organik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	03	14*	Pengembangan Pertanian Hidroponic Perkotaan (Urban Farming)	-
3	03	15*	Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Program Penyuluhan Pertanian
3	03	16	Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	17	Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
3	03	22	Peningkatan Produktivitas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	24*	Peningkatan Populasi Ternak Lokal Bali	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	25*	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	03	26*	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	03	27	Pengembangan Semen	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	03	28	Penjaminan Mutu Hasil Pengujian Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Program Pengembangan Bibit	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	04		Kehutanan	
3	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
3	04	02*	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
3	04	03*	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi	Pengelolaan Hutan
3	04	04	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	04	05	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	Pengelolaan Hutan
3	04	06	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3	04	07	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	Pengelolaan Hutan
3	04	08	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3	04	09	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	Pengelolaan Hutan
3	04	10	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	04	11	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	Pengelolaan Hutan
3	04	12	Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3	04	13	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Wana Kerthi di UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	
3	05		Energi dan Sumber daya Mineral	
3	05	01*	Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan
				Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
3	06		Perdagangan	
3	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
3	06	02	Perlindungan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
3	06	05	Pengembangan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	
3	06	03*	Pengembangan Produk Lokal Krama Bali	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3	06	04*	Penguatan distribusi produk lokal	
3	06	07*	Peningkatan Aksesibilitas Produk Sandang Lokal Bali	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
3	06	06*	Pengembangan sarana distribusi perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3	06	08*	Peningkatan ekspor industri kreatif	Program Pengembangan Ekspor
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
3	07		Perindustrian	
3	07	01	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Olahan Pangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
3	07	02*	Pengembangan Industri Kreatif Kerajinan Rakyat	
3	07	03*	Peningkatan Produksi Sandang Lokal Bali	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
3	08		Transmigrasi	
3	08	01	Perencanaan Pengembangan Ketransmigrasian	-
4			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	
4	01		Perencanaan	
4	01	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	01	02*	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	01	03	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4	01	04	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
4	01	05	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
4	02		Penelitian dan Pengembangan	
4	02	01	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan
4	02	02	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	02	01*	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	02	02*	Pengembangan Kawasan Pusat-Pusat Perekonomian berbasis sinergi pariwisata dengan pertanian	-
4	03		Kepegawaian	
4	03	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	03	02	Peningkatan pelayanan Pengadaan Pemberhentian Informasi dan Fasilitas ASN	Kepegawaian Daerah
4	03	03	Pengembangan Manajemen Karir	-

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	03	04	Peningkatan Penilaian Kinerja ASN	-
4	04		Pendidikan dan Pelatihan	
4	04	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	04	02	Peningkatan Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	04	03	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
4	04	04	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural	
4	04	05*	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif	
4	05		Sekretariat Daerah	
4	05	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	05	04*	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	05	03	Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali berdasarkan Nilai-nilai Atma Kerthi	Kesejahteraan Rakyat
4	05	06*	Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Program Penataan Organisasi
4	05	07*	Peningkatan Reformasi Birokrasi	
4	05	08*	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	05	10	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	05	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	
4	05	17*	Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
4	05	18*	Peningkatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	
4	05	19*	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	
4	05	21*	Peningkatan Pelayanan Produk Hukum Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	05	22	Pengembangan Produk Hukum	
4	05	23	Bantuan Hukum dan HAM	
4	05	26	Pengembangan Produksi Daerah	Perekonomian dan Pembangunan
4	05	27	Pengembangan Industri Pariwisata dan Perhubungan	
4	05	28*	Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah	
4	05	29*	Pengembangan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	05	35	Pengendalian Administrasi Pembangunan	Kebijakan Administrasi Pembangunan
4	05	36*	Peningkatan Administrasi Pembangunan	
4	05	37	Pelayanan Aparatur	
4	05	35	Pengendalian Administrasi Pembangunan	
4	05	36*	Peningkatan Administrasi Pembangunan	
4	05	37	Pelayanan Aparatur	
4	06		Inspektorat	
4	06	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	06	02	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
4	06	04*	Peningkatan Maturitas SPIP	
4	06	03*	Peningkatan Kapabilitas APIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
4	07		Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	
4	07	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	07	02*	Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	07	03*	Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
4	07	04*	Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
4	08		Sekretariat Dewan	
4	08	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
4	08	02*	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
4	08	03	Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	
4	09		Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset	
4	09	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	09	02*	Peningkatan Kualitas Perencanaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan keuangan daerah
4	09	03*	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	
4	09	04*	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

KODE			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (semula sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (sesuai Pemutakhiran Permen No.90 Tahun 2019)
4	09	06	Peningkatan Perencanaan, Pengembangan, dan Regulasi Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4	09	07*	Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	09	08	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	
4	09	09	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
4	10		Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah	
4	10	01	Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
4	10	02	Pelayanan komunikasi dan penyebarluasan Informasi Potensi Daerah	Program Pelayanan Penghubung

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2022, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2022. Program-program diatas akan *dibreak down* ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Khusus dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 terutama pada sektor ekonomi, dilakukan berbagai upaya melalui pengembangan sektor primer, sekunder, dan tersier. Program dan aktifitas kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel 6.2
Penanganan Dampak Pandemi COVID-19

No	Penanganan	Program
1	Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan c. Program Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup	a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan c. Program Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

No	Penanganan	Program
		<p>f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>g. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>h. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>i. Program Pengembangan Ekspor Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan</p> <p>j. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata</p> <p>k. Program Pemasaran Pariwisata Pada Dinas Pariwisata</p> <p>l. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Dinas Pariwisata</p> <p>m. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pada Dinas Pariwisata</p> <p>n. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (bersumber dari Dana PEN dan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali)</p>

No	Penanganan	Program
		o. Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (bersumber dari Dana PEN dan digunakan untuk Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali)
3	Penyediaan jaring pengaman sosial/ <i>social safety net</i>	a. Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, agenda prioritas yang rencana akan dilanjutkan pada tahun 2022 yaitu:

1. Pembangunan infrastruktur pendukung bidang kebudayaan yaitu membangun Pusat Kebudayaan Bali dalam satu Kawasan di Gunaksa Kabupaten Klungkung, meliputi: panggung terbuka berkapasitas besar, gedung kesenian/panggung tertutup, museum tematik, dan Bali *Convention Center*, yang dimulai dari perencanaan pengadaan lahan termasuk lahan untuk Normalisasi Tukad Unda.
2. Pelindungan kawasan suci Besakih, yang meliputi lanjutan pengadaan lahan, pembangunan fasilitas penunjang, Penataan Pelataran Manik Mas dan Penataan Kawasan Bencingah.

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022

Program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2022 dilihat berdasarkan urusan sebagaimana ditunjukkan pada ***Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022.***

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			897.095.177.312				1.080.406.136.004					
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	685.134.338.069			81 nilai	842.313.004.165			
1	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 dokumen	28.742.900			8 dokumen	75.500.000			
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	6 dokumen	24.533.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 dokumen	70.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	4.209.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	5.500.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	21 laporan	673.597.000.342				21 laporan	841.387.504.165		
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayar tepat waktu	6158 orang	673.459.624.262	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6158 orang	841.387.504.165	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	1500 dokumen	113.909.090	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1500 dokumen	500.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	21 laporan	23.466.990	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	21 laporan	510.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Dokumen Laporan BMD yang tersusun tepat waktu	2 dokumen 100 persen	100.000.000				2 dokumen 100 persen	125.000.000		
1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	3 laporan	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 laporan	125.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100 persen	53.724.670				100 persen	125.000.000		
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	266 laporan	53.724.670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	266 laporan	125.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	1.107.260.405				100 persen	2.462.250.000		
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	47 jenis	686.876.105	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	47 jenis	1.450.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	63.674.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	10 jenis	115.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 jenis	48.025.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	135.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 kali	19.125.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 kali	45.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi	12 laporan	289.560.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	12 laporan	717.250.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
1	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dan siap digunakan	100 persen	2.203.984.000			100 persen	10.000.000.000			
1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan siap digunakan	1 unit	2.203.984.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	10.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 persen	6.828.766.024					100 persen	6.051.452.000	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik	1000 surat	4.452.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1000 surat	26.452.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu	3 rekening	682.653.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 rekening	725.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan yang disediakan	6 jasa	6.141.661.024	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 jasa	5.300.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 persen	1.214.859.728					100 persen	850.000.000	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	24 unit	557.903.728	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	24 unit	850.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik	1 unit	197.876.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	5.780.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	8 jenis	459.080.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	8 jenis	328.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	100 persen 40.06 nilai	211.900.839.293					100 persen 40.06 nilai	237.868.131.839	
1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Atas Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Atas	50 persen 43 angka	133.279.005.810					50 persen 43 angka	212.015.000.000	
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang dibangun dan siap digunakan	8 sekolah	61.485.124.128	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	8 sekolah	105.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	20 Ruang kelas	9.045.458.304	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	20 Ruang kelas	52.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan peserta didik yang akan diadakan dan siap digunakan	1 sekolah	4.841.775.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	1 sekolah	5.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	82 sekolah	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	82 sekolah	2.400.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	82 sekolah	57.746.647.928	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	82 sekolah	47.500.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang terbina	82 sekolah	30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	82 sekolah	80.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS dengan baik	82 sekolah	30.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	82 sekolah	35.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Nilai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Kejuruan Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	41 angka 47 persen	69.107.756.993				41 angka 47 persen	139.303.131.839		
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan	3 sekolah	12.871.556.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	3 sekolah	55.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Kelas Baru yang ditambah dan siap digunakan	2 sekolah	1.152.800.000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	2 sekolah	13.200.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	3 sekolah	603.000.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	3 sekolah	3.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah personil peserta didik yang tersedia	509 siswa	4.835.355.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	509 siswa	1.100.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kretivitas	53 sekolah	87.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	53 sekolah	4.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	670 Guru	49.500.046.158	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	670 Guru	35.500.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terbina	53 sekolah	57.999.835	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	53 sekolah	1.650.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus Nilai Standar Pelayanan Pendidikan (SNP) Sekolah Luar Biasa	43.77 persen 40 angka	9.514.076.490				43.77 persen 40 angka	25.853.131.839		
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	3 sekolah	1.589.824.884	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	3 sekolah	6.350.347.740	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	jumlah ruang serba Guna/Aula yang di bangun dan siap digunakan	2 sekolah	987.783.360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	2 sekolah	2.771.404.240	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang di Rehabilitasi dan siap digunakan	1 sekolah	165.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	1 sekolah	700.315.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	6 sekolah	1.094.709.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	6 sekolah	4.030.691.669	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	jumlah personil peserta didik pendidikan khusus yang tersedia	12 Sekolah	25.642.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	12 Sekolah	31.782.960	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu	12 sekolah	40.000.000		2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	12 sekolah	152.495.420	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 01 02 1.03 49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan khusus	12 sekolah	5.550.517.306	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	12 sekolah	6.594.230.755	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK	14 sekolah	39.999.440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	14 sekolah	387.464.055	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 02 1.03 53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik	14 sekolah	20.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar PLB	14 sekolah	23.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan	86.00 persen	59.999.950				86.00 persen	225.000.000	
1 01 04 1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dipindahkan sesuai kebutuhan Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	100 orang 62.89 persen	59.999.950				100 orang 62.89 persen	225.000.000	
1 01 04 1.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdistribusikan dengan baik	1000 orang	59.999.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Guru dan Tenaga Pendidikan	1000 orang	225.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	4.15 persen	249.999.930				4.15 persen	3.125.000.000	
2 19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi Jumlah pemuda yang telah mengikuti program penyadaran, berprestasi dan berdaya saing	268 orang 268 orang	249.999.930				268 orang 268 orang	3.125.000.000	
2 19 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	jumlah peserta seleksi Paskibraka, Gita Bahana Nusantara, dan Jambore Pemuda Daerah	178 orang	249.999.930	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pemuda	178 orang	3.125.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	100 medali	4.274.882.700				100 medali	8.820.000.000	
2 19 03 1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Jumlah kejuaraan Olaharag tingkat provinsi yang diselenggarakan	5 kegiatan 5 kegiatan	4.000.000.000				5 kegiatan 5 kegiatan	8.100.000.000	
2 19 03 1.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga dan jumlah Atlet serta ofisial yang mengikuti Multi Event dan Single Event	32 cabang olahraga	4.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Atlet	32 cabang olahraga	8.100.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	jumlah atlet yang berpartisipasi pada Kejuaraan Single event dan Multi event tingkat Nasional jumlah atlet yang meraih medali pada Single event dan Multi event tingkat Nasional	450 orang 1210 orang	49.883.040				450 orang 1210 orang	20.000.000	
2 19 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga	10 data	49.883.040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Atlet	10 data	20.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2 19 03 1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina melalui program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase organisasi olahraga yang berprestasi	52 organisasi 20 persen	224.999.660				52 organisasi 20 persen	700.000.000	
2 19 03 1.04 01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Lembaga yang memenuhi Standar Keorganisasian	20 organisasi	49.999.660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Organisasi Keolahragaan	20 organisasi	50.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/Organisasi keolahragaan	25 lembaga	175.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Organisasi Keolahragaan	25 lembaga	650.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			500.000.000					2.500.000.000	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			500.000.000					2.500.000.000	
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat provinsi	25 kegiatan	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan		25 kegiatan	2.500.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3.850.544.849					5.918.717.376	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	2.980.328.579				81 nilai	3.818.717.376	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 persen	2.453.385.589				100 persen	2.800.000.000	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayar tepat waktu	14 Orang	2.453.385.589	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	14 Orang	2.800.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlayani	100 persen	88.479.510				100 persen	378.000.000	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik	43 Jenis	58.009.510	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	43 Jenis	210.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Tersedia	4 Jenis	4.194.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 Jenis	10.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	3 Jenis	3.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 Jenis	8.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	30 Laporan	22.776.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	30 Laporan	150.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	376.764.480				100 persen	456.717.376	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	800 Surat	2.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	800 Surat	7.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor	10 Orang	374.764.480	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	10 Orang	449.717.376	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 persen	61.699.000				100 persen	184.000.000	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai	2 Kendaraan	48.699.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 Kendaraan	130.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam keadaan baik	1 Paket	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	25.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik	1 Paket	10.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	29.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah SMA/SMK yang memiliki ruang multimedia Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	35.82 persen 50 persen	870.216.270				35.82 persen 50 persen	2.100.000.000	
1 01 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	85 sekolah	529.076.740				85 sekolah	1.100.000.000	
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMA	88 Sekolah	508.292.140	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	88 Sekolah	700.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas	270 Orang	20.784.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMA	270 Orang	400.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	53 sekolah	341.139.530				53 sekolah	1.000.000.000	
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK	55 Sekolah	320.455.270	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	55 Sekolah	600.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	270 Orang	20.684.260	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar SMK	270 Orang	400.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			27.770.870.323					30.096.124.607	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	2.469.082.207				81 nilai	2.586.124.607	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase laporan pertanggung jawaban keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 persen	2.144.359.919				100 persen	2.213.009.919	
1 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya tepat waktu	13 orang	2.144.359.919	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	13 orang	2.213.009.919	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	43.865.600				100 persen	83.898.000	
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia dan siap digunakan	20 jenis	14.981.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	20 jenis	25.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	4 jenis	8.699.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 jenis	11.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 jenis	1.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 jenis	3.600.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi	31 laporan	18.584.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	31 laporan	44.298.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 persen	225.858.688				100 persen	226.858.688	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terregistrasi dengan baik	200 surat	1.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	200 surat	2.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopor untuk Menunjang Urusan Kantor	6 orang	224.858.688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 orang	224.858.688	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 persen	54.998.000				100 persen	62.358.000		
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	1 unit	54.998.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	62.358.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	51.37 persen	274.997.300				51.37 persen	510.000.000		
1 01 03 1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan menengah yang ditetapkan	8 Kompetensi Dasar	224.998.050				8 Kompetensi Dasar	435.000.000		
1 01 03 1.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pada satuan pendidikan menengah	1 dokumen	130.029.250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Menengah	1 dokumen	185.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1 01 03 1.01 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	jumlah analisis dokumen awal muatan lokal pendidikan menengah	1 dokumen	50.209.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Menengah	1 dokumen	150.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1 01 03 1.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	50 orang	44.759.350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Menengah	50 orang	100.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1 01 03 1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang ditetapkan	6 Kompetensi Dasar	49.999.250				6 Kompetensi Dasar	75.000.000		
1 01 03 1.02 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum Muatan lokal pendidikan khusus	80 orang	49.999.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Pelajar Pendidikan Khusus	80 orang	75.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase implementasi penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan	70 persen	25.026.790.816				70 persen	27.000.000.000		
1 01 06 1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah tim penyuluh Bahasa Bali Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	687 orang 90 persen	25.026.790.816				687 orang 90 persen	27.000.000.000		
1 01 06 1.01 02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah gaji penyuluh Bahasa Bali yang dibayarkan	667 orang	25.026.790.816	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Penyuluh Bahasa Bali	667 orang	27.000.000.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			75.403.015.563						83.549.965.312	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	24.720.980.420						81 nilai	27.423.649.771
1 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	1.19 Persen	42.336.930						1.19 Persen	337.423.271

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	12.122.100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	235.139.396	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	3.905.130	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	11.395.235	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	6.368.400	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	14.752.775	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA perubahan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	6.360.600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	15.431.735	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	5.188.400	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	25.420.520	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	4.459.750	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 dokumen	23.156.400	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	21.932.317.320				100 Persen	26.602.866.500	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	26 Dokumen	21.872.847.750	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan 2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	26 Dokumen	26.393.487.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2000 spj	43.714.370	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2000 spj	43.717.888	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang di susun	13 Laporan	15.755.200	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		Aparatur	13 Laporan	165.661.612	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	1.503.172.670				100 Persen	1.503.172.670	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.196.300			Aparatur		10.196.300	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 Paket	247.311.770	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Paket	247.311.770	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			991.688.000			Aparatur		991.688.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11.829.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur		11.829.600	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material			87.385.000			Aparatur		87.385.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			154.762.000			Aparatur		154.762.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 Persen	483.360.000				100 Persen	483.360.000	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	50 surat	3.360.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	50 surat	3.360.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			480.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur		480.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	759.793.500				100 Persen	119.903.500	
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas pejabat yang di pelihara	1 unit	39.950.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	125.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas lapangan yang di pelihara Jumlah kendaraan roda 2 yang di pelihara	23 unit 2 unit	474.940.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	23 unit 2 unit	474.940.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	1 Tahun	119.903.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun	119.903.500	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	125.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun	125.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS)	85 persen	18.498.806.616				85 persen	27.856.078.989	
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase layanan UKP, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah sesuai standart	100 Persen	18.452.383.816				100 Persen	26.817.006.844	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan	2000 penduduk	36.054.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	2000 penduduk	45.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Presentase KLB Provinsi yang ditangani < 18 Jam	100 %	254.787.550	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	100 %	356.696.700	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Yankestrad Terintegrasi	33 Fasyankes	65.185.650	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	33 Fasyankes	300.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Penyakit Tidak Menular	1 Dokumen	722.335.136	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	1 Dokumen	4.236.793.753	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Jumlah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dalam penyelenggaraan JKN	1 Dokumen 75 FKTL	17.374.021.480	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Kabupaten/Kota, Ibu, Anak, Usia Produktif, Lansia	1 Dokumen 75 FKTL	23.793.740.244	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e- Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	77.77 Persenn	46.422.800				77.77 Persen	295.472.145	
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan e- Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	7 Kabupaten/Kota	46.422.800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Kabupaten/Kota, Fasilitas Kesehatan	7 Kabupaten/Kota	295.472.145	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	60 persen	32.006.865.427				60 persen	26.463.509.552		
1	02	03	1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	100 Persen	31.994.179.072				100 Persen	25.563.509.552		
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1 Dokumen	31.994.179.072	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya, Tenaga Non Kesehatan	1 Dokumen	25.563.509.552	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi di Fasyankes Pemerintah	100 Persen	12.686.355				100 Persen	900.000.000	
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Aktif yang dibina di Fasyankes Pemerintah	100 %	12.686.355	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan, Non Kesehatan dan Kesehatan Lainnya	100 %	900.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kab/Kota Dengan Ketersediaan Obat Esensial	81 persen	32.363.100				81 persen	541.727.000	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat distribusi cabang farmasi dan rekomendasi izin cabang distribusi alat kesehatan yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	19.643.800				100 Persen	365.833.700	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan PAK Cabang yang Dibina dan Diawasi	30 Sarana	19.643.800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	PBF, PAK, Kabupaten/Kota	30 Sarana	365.833.700	Dinas Kesehatan
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase hasil evaluasi dan verifikasi permohonan sertifikat produksi UKOT yang dikeluarkan tepat waktu	100 Persen	12.719.300				100 Persen	175.893.300	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah UKOT yang Dibina dan Diawasi	15 Sarana	12.719.300	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	UKOT	15 Sarana	175.893.300	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	0,5 nilai	144.000.000				0,5 nilai	1.265.000.000	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/kota yang memiliki rumah tangga ber PHBS > 80%	40 Persen	144.000.000				40 Persen	660.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mendukung Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	4 Jenis	144.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Kabupaten/Kota	4 Jenis	660.000.000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1 02 01	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	6.085.212.131					81 nilai	8.921.206.141	
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	3.943.142.031				100 Persen	4.092.822.797	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Jumlah Dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	3.943.142.031	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	4.092.822.797	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	157.140.400				100 Persen	2.877.424.300	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	7 Jenis	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 Jenis	30.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Paket	21.490.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	16 Paket	2.577.576.600	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	31.516.300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 Paket	116.314.700	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	25.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun	25.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	3 Paket	13.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 Paket	13.600.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Bakar Minyak/Gas	2 Jenis	35.533.500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 Jenis	71.067.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.722.411.200				100 Persen	1.685.840.544	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	1 Jenis	2.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Jenis	3.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Jenis	633.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 Jenis	633.500.000	Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	1.086.911.200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	1.049.340.544	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	262.518.500				100 Persen	265.118.500	
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	12.258.500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	13.258.500	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	25.360.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 unit	24.360.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di pelihara	7 Paket	124.900.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	7 Paket	127.500.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	100.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Unit	100.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100 persen	155.038.900				100 persen	1.400.000.000	
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelatihan sesuai hasil TNA	100 Persen	155.038.900				100 Persen	1.400.000.000	
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Kurikulum Pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar Persentase Peserta Pelatihan yang lulus sesuai hasil TNA	100 % 100 %	155.038.900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur, Tenaga Kesehatan, Non Kesehatan dan Kesehatan Lainnya	100 % 100 %	1.400.000.000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			20.485.629.030					254.728.489.537	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	19.254.191.330					81 nilai	13.823.542.072
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	14.557.640.000					100 Persen	11.859.400.000
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	14.557.640.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	11.859.400.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	432.705.150					100 Persen	700.049.672
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	1 paket	13.731.150	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 paket	35.274.032	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	155.721.200	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 paket	301.227.360	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik akntor yang tersedia	1 paket	190.602.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 paket	143.900.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 paket	72.650.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 paket	193.244.800	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 Persen	3.809.957.280					100 Persen	777.000.000
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	2 jenis	1.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	5.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 rekening	537.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 rekening	772.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	1 tahun	3.271.957.280	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	3.392.870.400	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	100 Persen	453.888.900				100 Persen	428.092.400	
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 tahun	245.798.900	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	186.472.400	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	1 tahun	208.090.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	241.620.000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan	81,5 persen	1.231.437.700				81,5 persen	240.904.947.465	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar	100 Persen	1.231.437.700				100 Persen	239.771.742.785	
1 02 02 1.01 04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan	1 Unit kerja	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Labkesda, Masyarakat	1 Unit kerja	1.910.398.496	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance center yang dikembangkan	2 kab/kota	200.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Labkesda, Masyarakat	2 kab/kota	2.676.260.530	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat dan bahan laboratorium kesehatan serta peralatan kesehatan yang tersedia dan terpelihara	6 jenis	1.001.437.700	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Labkesda, Masyarakat	6 jenis	235.185.083.759	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.113.661.837					5.793.916.346	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	3.997.302.637				81 nilai	4.007.650.500	
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	2.370.943.287				100 Persen	2.774.642.000	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	100 %	2.370.943.287	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	2.774.642.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	85.892.590				100 Persen	173.136.500	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan lainnya	3 jenis	2.606.190	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 jenis	6.727.500	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis	16.725.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	14 jenis	59.575.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase bahan logistik kantor yang tersedia	100 %	25.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	28.750.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	9 jenis	6.170.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	9 jenis	16.077.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	persentase bahan / material yang tersedia	100 %	35.390.800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	53.092.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.321.771.360				100 Persen	682.585.000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	71.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	93.150.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase jasa pelayanan umum kantor	100 %	1.250.771.360	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	586.035.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	218.695.400				100 Persen	377.287.000	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	6.337.300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	22.080.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan-kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 unit	16.944.800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 unit	70.840.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	45.413.300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 %	76.745.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan gedung	1 paket	150.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 paket	207.622.000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Pelayanan Yang Melaksanakan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	3 persen	116.359.200				3 persen	1.786.265.846	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	3 Persen	116.359.200				3 Persen	1.786.265.846	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kunjungan Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Olahraga	728 Kunjungan	40.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Pengobat Tradisional, Kabupaten/Kota	728 Kunjungan	422.467.000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah kunjungan pelayanan kesehatan tradisional	338 Kunjungan	76.359.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Pengobat Tradisional, Kabupaten/Kota	338 Kunjungan	931.307.950	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			192.077.496.881						368.902.488.965
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RSUD Bali Mandara	90 persen	192.077.496.881				90 persen	221.722.241.165	
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	58.098.114.817				100 Persen	76.871.226.797	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	364 SPP/SPM	58.098.114.817	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	364 SPP/SPM	76.871.226.797	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			419.600.000					461.560.000	
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Sesuai SOP	100 Persen	419.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	2. Kesehatan dan Pendidikan		100 Persen	461.560.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	48.390.816.064				100 Persen	49.851.014.368	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	5.307.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 Persen	5.307.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Terbayarkan Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sesuai Standar	100 Persen 759 Orang	43.083.816.064	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 Persen 759 Orang	44.544.014.368	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168.966.000					185.862.600	
1 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	168.966.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	2. Kesehatan dan Pendidikan		100 Persen	185.862.600	Dinas Kesehatan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 02 01 1.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100 Persen	85.000.000.000				100 Persen	95.000.000.000	
1 02 01 1.1 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang Dilayani UPTD RSUD Bali Mandara	100 Persen	85.000.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Aparatur, RSUD Bali Mandara	100 Persen	95.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				136.847.339.636				112.134.412.626	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Jiwa Provinsi Bali	81,5 nilai	96.696.101.044				81,5 nilai	96.468.511.108	
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	71.581.990.642				100 Persen	64.722.695.186	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	71.581.990.642	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	64.722.695.186	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.114.110.402				100 Persen	1.295.815.922	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	1.114.110.402	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	1.295.815.922	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100 Persen	24.000.000.000				100 Persen	30.450.000.000	
1 02 01 1.1 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang dilayani UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	25791 kunjungan	24.000.000.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Aparatur, RS Jiwa Provinsi Bali	25791 kunjungan	30.450.000.000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan ODGJ Berat Yang Dilayani	55 persen	40.151.238.592				55 persen	15.665.901.518	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan	100 Persen	40.151.238.592				100 Persen	15.665.901.518	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Sarana, Prasarana dan Gedung/Bangunan Rumah Sakit yang diadakan di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tersedianya Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan serta Pengembangan SDM di UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1 tahun 1 tahun	40.151.238.592	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Rumah Sakit Jiwa, ODGJ	1 tahun 1 tahun	15.665.901.518	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				77.199.805.146				80.277.696.406	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD RS Mata Bali Mandara	81 persen	77.199.805.146				81 persen	80.277.696.406	
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	25.300.896.406				100 Persen	26.277.696.406	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 Persen	25.300.896.406	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	100 Persen	26.277.696.406	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	99 Persen	51.898.908.740				99 Persen	54.000.000.000	
1 02 01 1.1 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	99 Persen	51.898.908.740	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Aparatur, RS Mata Bali Mandara	99 Persen	54.000.000.000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				10.844.092.115				16.441.897.226	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	9.838.323.515				81 nilai	9.900.638.544	
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen	2.655.782.303				100 Persen	3.256.505.119	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPJ/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	2.655.782.303	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 Tahun	3.256.505.119	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen	724.716.700				100 Persen	996.909.762	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik/ penerangan yang tersedia	2 jenis	6.801.600	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		Aparatur	2 jenis	11.270.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan/perengkapan kantor yang tersedia	15 paket	407.736.900	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	15 paket	529.403.022	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan bakar minyak dan upacara keagamaan yang tersedia	2 jenis	198.600.000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	215.736.320	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	8 jenis	4.947.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	8 jenis	15.467.040	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah alat kebersihan dan alat kerja yang tersedia	3 paket	63.323.200	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 paket	131.736.180	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman tamu	324 kotak	6.750.000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	324 kotak	8.366.250	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitas pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bimtek	1 tahun	36.558.000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	69.980.950	Dinas Kesehatan

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.978.999.000				100 Persen	2.324.390.350		
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 unit	197.790.000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 unit	287.500.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	2 jenis	104.184.000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	2 jenis	119.811.600	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	6 paket	1.677.025.000	Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	6 paket	1.917.078.750	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	4.084.771.712				100 Persen	2.898.152.573		
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	1 tahun	3.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	3.910.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	4 jenis	1.141.000.000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 jenis	1.312.150.000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	34 orang	2.940.371.712	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	34 orang	1.582.092.573	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen	394.053.800				100 Persen	424.680.740		
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit	32.583.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	3 unit	43.257.710	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara	1 tahun	5.000.000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	11.500.000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 tahun	196.482.200	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	1 tahun	174.078.030	Dinas Kesehatan				
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	159.988.000	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur	4 unit	195.845.000	Dinas Kesehatan				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	95 persen	1.005.768.600				95 persen	6.541.258.682					
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar	70 Persen	500.000.000				70 Persen	3.264.332.049					
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah laporan ketersediaan sediaan farmasi di instalasi farmasi	11 dokumen	500.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/Kota	11 dokumen	3.264.332.049	Dinas Kesehatan				
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase sarana pengembangan dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar	50 Persen	505.768.600				50 Persen	3.276.926.633					
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase produksi obat dan bahan obat tradisional di P4TO sesuai kebutuhan	70 %	505.768.600	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		Masyarakat, Kesehatan Tradisional, Kabupaten/Kota	70 %	3.276.926.633	Dinas Kesehatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										7.645.212.845			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	85 Nilai	2.808.777.586				85 Nilai	3.364.760.139					
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	2.014.802.214				100 %	2.347.842.939					
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	13 Orang	2.014.802.214	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	13 Orang	2.347.842.939	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 %	155.246.280			100 %	263.987.000		
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	12.030.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	19.837.500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 Unit	67.314.280	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 Unit	77.510.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	27.772.500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	14.667.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	16.335.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koran	1 Tahun	5.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	6.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Ketersediaan makanan dan minuman	1 Tahun	2.295.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	2.645.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar dan dalam daerah	1 Tahun	23.940.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	113.387.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang tertangani	100 %	132.100.000				100 %	168.700.000	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000	110 lembar	1.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	110 lembar	1.100.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya layanan air, listrik, internet, dan telepon	1 Tahun	51.100.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	61.800.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya layanan kebersihan kantor	1 Tahun	80.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	105.800.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tertangani	100 %	506.629.092				100 %	584.230.200	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas	6 Unit	203.631.300	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	6 Unit	234.183.700	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	38 Unit	20.510.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	38 Unit	25.114.500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	1 Tahun	282.487.792	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	324.932.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	100 %	2.448.714.116				100 %	4.280.452.706	
1 03 11 1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Informasi dan pelayanan Alat Berat, Pengujian Kualitas Air, Tanah dan Bahan Bangunan	1 tahun	2.448.714.116				1 tahun	4.280.452.706	
1 03 11 1.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya pemeliharaan dan tersedianya pengadaan alat-alat pengujian kualitas air, tanah dan bahan bangunan, dan peralatan pendukung alat berat	2 Paket	2.448.714.116	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Paket	4.280.452.706	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				34.852.961.471				35.900.000.000	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Minum	85 Nilai	1.505.775.583				85 Nilai	1.900.000.000	
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %	1.505.775.583				100 %	1.900.000.000	
1 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	11 orang	1.505.775.583	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	11 orang	1.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan Air Minum	100 %	33.347.185.888				100 %	34.000.000.000	
1 03 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Air Minum ke PDAM/Pelanggan	7 Layanan	33.347.185.888				7 Layanan	34.000.000.000	
1 03 03 1.01 09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM Regional Yang dikelola dengan baik	5 SPAM	33.347.185.888	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 SPAM	34.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						12.791.635.933	23.500.000.000					
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pengelolaan Air Limbah	85 Nilai				1.643.537.533	85 Nilai	2.500.000.000				
1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %			1.643.537.533	100 %	2.500.000.000				
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	12 orang		1.643.537.533	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	12 orang	2.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah.	100 %			11.148.098.400				100 %	21.000.000.000	
1	03	05	1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional yang dikelola dengan baik	1 SPALD			11.148.098.400				1 SPALD	21.000.000.000	
1	03	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Layanan Air Limbah/Sambungan Rumah (SR) pada SPALD Regional	15000 SR		11.148.098.400	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	15000 SR	21.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						305.555.052.751				1.008.091.744.655	
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 nilai			26.052.939.421				85 nilai	34.676.239.261	
1	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	17 Dokumen			837.099.511				17 Dokumen	1.227.077.678	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	8 Dokumen		462.845.925	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri		aparatur	8 Dokumen	630.322.290	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	6 Dokumen		374.253.586	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	aparatur	6 Dokumen	546.857.463	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %			21.173.395.176				100 %	28.590.000.000	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM	144 orang		21.173.395.176	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	144 orang	28.590.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan			672.808.930				18 Layanan	826.642.930	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun		24.221.500	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	24.221.500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 Tahun	76.751.430	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	76.751.430	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah ketersediaan sarana upakara keagamaan	1 Tahun	85.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	85.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	85.080.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	85.080.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan koraan	1 Tahun	32.520.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	32.520.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah ketersediaan makanan dan minuman : - snack kotak - nasi kotak	2676 kotak	24.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2676 kotak	57.780.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas luar dan dalam daerah	1 Tahun	345.236.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	465.290.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan	114.998.600				18 Layanan	67.650.000	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 Unit	114.998.600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	4 Unit	67.650.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan	865.476.448				18 Layanan	1.109.906.805	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah ketersediaan benda pos : - materai 10.000	300 Lembar	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	300 Lembar	3.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah luran DSDP, Air, Listrik, dan Telepon	1 Tahun	500.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	529.430.357	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ketersediaan hari besar yang tertangani	11 Hari Besar	50.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	11 Hari Besar	340.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah layanan kebersihan kantor	1 Tahun	312.476.448	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	237.476.448	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	03	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	18 Layanan	2.389.160.756				18 Layanan	2.854.961.848		
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara : roda 4, roda 2 roda 6	39 Unit	1.201.202.240	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	39 Unit	1.700.506.440	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	119 Unit	299.788.452	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	119 Unit	299.879.344	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	7 Unit	888.170.064	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	7 Unit	854.576.064	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	49 %	3.945.488.440				49 %	66.818.575.357	
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana Sumber Daya Air yang meningkat kondisinya	5 Prasarana SDA	255.588.400				5 Prasarana SDA	40.647.675.337	
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang dipelihara Jumlah prasarana SDA yang dipelihara (Panjang Pantai) Jumlah prasarana SDA yang dipelihara (saluran pembuang)	4 Embung 118.09 Km 4362 m	255.588.400	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	4 Embung 118.09 Km 4362 m	3.217.258.212	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14 DI	3.689.900.040				14 DI	26.170.900.020	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah data serta dokumen perencanaan dan pengawasan yang sesuai ketentuan yang berlaku	1 Dokumen	413.645.216	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	3.636.777.020	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang ditangani dengan rehabilitasi	6400 meter	259.807.828	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	6400 meter	18.020.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Daerah Irigasi yang di Operasikan dan dipelihara	14 DI	3.016.446.996	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	14 DI	4.513.623.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	92 %	4.763.398.336				92 %	53.601.646.794	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM	4.763.398.336				5 SPAM	53.601.646.794	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	03 03 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	4 paket	1.199.246.336	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	4 paket	1.485.806.345	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03 03 1.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan SPAM yang disusun sesuai ketentuan	3 paket	152.152.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 paket	1.645.600.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03 03 1.01 03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	SPAM dengan jaringan perpipaan yang dibangun	2 Paket	3.412.000.000	Kab. Buleleng, Gerokgak, Pengulon Kab. Buleleng, Busungbiu, Subuk Kab. Karangasem, Rendang, Besakih	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Paket	45.528.957.399	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	72 %	249.366.963.108				72 %	435.874.666.886	
1	03 09 1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	27 bangunan	249.366.963.108				27 bangunan	435.874.666.886	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 03 09 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang disusun sesuai ketentuan	4 paket	226.892.660	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	4 paket	331.357.653	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 03 09 1.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen laporan supervisi pelaksanaan Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	22 paket	6.010.308.668	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	22 paket	5.814.050.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/penataan kawasan yang dibangun	27 paket	243.129.761.780	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	27 paket	429.729.259.233	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	80.21 % 80.21 %	18.892.769.016				80.21 % 80.21 %	409.016.655.925	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	743.34 Km	18.892.769.016				743.34 Km	409.016.655.925	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	320.972.896	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	1.387.425.200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Kabupaten yang Jumlah Jalan Provinsinya tersertifikat	4 Kabupaten/Kota	600.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	4 Kabupaten/Kota	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen pelaksanaan Leger Jalan yang dikelola	1 Dokumen	208.211.568	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	879.750.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen kondisi jalan dan jembatan yang disusun sesuai ketentuan	3 Dokumen	59.506.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 Dokumen	2.135.425.200	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dibangun dengan pelebaran	743.34 Km	404.337.832	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	743.34 Km	231.344.519.837	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	743.34 Km	14.490.600.101	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	743.34 Km	38.183.696.832	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Bencana/Tanggap Darurat pada Jalan Provinsi yang ditangani	40 Kegiatan	2.749.503.723	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	40 Kegiatan	6.140.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah paket Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	18 Paket	59.636.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	18 Paket	11.728.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa kontruksi kewenangan provinsi yang bersertifikat	16,51 %	1.301.489.382				16,51 %	1.827.000.000	
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota	9 Kegiatan	436.365.777				9 Kegiatan	805.000.000	
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota Jumlah Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 Kab/Kota	310 Orang 12 Kegiatan	436.365.777	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	310 Orang 12 Kegiatan	805.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	03	11	1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang Memperoleh Sosialisasi Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	100 %	865.123.605				100 %	1.022.000.000		
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	6 Kegiatan	865.123.605	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	6 Kegiatan	1.022.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	94 %	1.232.005.048			94 %	3.979.752.200		
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	2 Dokumen	662.288.032			2 Dokumen	2.175.284.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	3 Paket	662.288.032	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 Paket	542.897.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	100 %	237.381.960				100 %	16.747.300	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen informasi pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	237.381.960	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	2 Dokumen	14.809.800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	5 dokumen	332.335.056			5 dokumen	1.500.000.000		
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali	1 Dokumen	189.905.752	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Bali	1 Dokumen	142.429.304	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				1.566.035.214				6.629.169.044		
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan/Rehabilitasi/ Relokasi korban bencana provinsi dan dampak program pemerintah daerah provinsi	70 %	1.043.108.826				70 %	5.663.683.320		
1	04	02	1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket	444.418.538				1 Paket	2.571.238.880		
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai	1 Dokumen	17.430.750	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	1.464.100.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 04 02 1.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah susun yang terkelola dengan baik	1 Paket	426.987.788	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Paket	1.107.138.880	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 02 1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			598.690.288					3.092.444.440	
1 04 02 1.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana yang dibangun	140 Unit	598.690.288	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	140 Unit	3.092.444.440	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase kawasan kumuh	45 %	522.926.388				45 %	965.485.724	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	8,5 %	522.926.388				8,5 %	965.485.724	
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Permukiman yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket	54.075.250	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Paket	162.114.340	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah PSU Permukiman yang dibangun	3 Paket	442.694.688	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 Paket	590.411.384	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Penyediaan PSU Permukiman	3 Buku	26.156.450	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	3 Buku	212.960.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									469.589.900	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	40 %	124.885.000				40 %	469.589.900		
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen	124.885.000				1 Dokumen	469.589.900		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen	124.885.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Dokumen	469.589.900	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			41.305.062.225					64.540.000.000	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5 nilai	23.533.315.943				82.5 nilai	39.560.000.000	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	13.000.000				24 Dokumen	22.000.000	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	13 dokumen	5.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	13 dokumen	12.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman	11 dokumen	8.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 dokumen	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	20.694.985.919				100 Persen	35.576.000.000	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	149 dokumen	20.694.985.919	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	149 dokumen	35.576.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	282.386.200				8 Jenis	810.000.000	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik	12 bulan	29.783.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	4 jenis	55.536.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 jenis	300.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan	12 bulan	75.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	80.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang siap edar	12 bulan	34.130.400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji	12 bulan 800 kotak	87.936.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan 800 kotak	360.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.074.927.376				12 bulan	1.392.000.000	
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	300 Materai	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 Materai	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu	12 bulan	142.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	80.210.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	200.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	849.717.376	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	990.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	1.468.016.448				12 bulan	1.760.000.000	
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	39 unit	1.468.016.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	39 unit	1.760.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100 persen	17.771.746.282				100 persen	24.980.000.000	
1 05 02 1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	205 pelanggaran	17.550.171.418				205 pelanggaran	24.210.000.000	
1 05 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali Jumlah Obyek Sasaran Pengawasan yang dilaksanakan Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1080 Obs 600 Obs 205 Orang/ Badan Hukum	2.437.742.454	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1080 Obs 600 Obs 205 Orang/ Badan Hukum	4.640.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 05 02 1.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat	2 Dokumen 100 orang 355 orang	37.476.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	2 Dokumen 100 orang 355 orang	1.035.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Pol PP se Bali yang bersertifikat Jumlah Pejabat Fungsional Pol PP se Bali yang bersertifikat	120 orang 120 orang	37.476.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	120 orang 120 orang	405.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan	4 Laporan dan Dokumen	37.476.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	4 Laporan dan Dokumen	380.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia Jumlah Tenaga Satpam yang handal	1 aplikasi 350 orang	14.999.999.620	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 aplikasi 350 orang	17.750.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	320 kasus	221.574.864				320 kasus	770.000.000	
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah obyek sasaran yang berpotensi melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	48 Obs	37.476.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat/Badan Hukum	48 Obs	180.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	320 Orang/ Badan Hukum	184.098.416	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat/Badan Hukum	320 Orang/ Badan Hukum	590.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN		10.608.328.954				16.091.710.806					
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,93 Persen	10.608.328.954			82,93 Persen	16.091.710.806				
1	05	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen	5.782.000		100 Persen	84.076.794				
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (BPBD)	12 dokumen	3.546.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	12 dokumen	27.099.160	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen LKIP yang tersusun	21 dokumen	2.236.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	21 dokumen	56.977.634	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	8.901.537.922				100 Persen	12.454.559.575		
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	70 dokumen	8.901.537.922	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	70 dokume	12.454.559.575	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	109.308.850				100 Persen	1.086.973.437		
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	23 jenis	29.176.450	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	23 jenis	957.144.132	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia	1 tahun	75.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	84.466.405	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah cetakan dan biaya foto copy yang tersedia	5 jenis	5.132.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	5 jenis	45.362.900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	13.760.000				1 Tahun	36.300.000		
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan yang tersedia	4 jenis	13.760.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	4 jenis	36.300.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	318.803.190				100 Persen	433.301.000	
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang tersedia	150 lembar	1.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	150 lembar	7.986.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan	12 bulan	120.000.750	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 bulan	169.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	12 bulan	197.302.440	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	12 bulan	255.915.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1.259.136.992				1 Tahun	1.996.500.000	
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku	36 unit	1.259.136.992	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	36 unit	1.996.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			10.170.533.253					12.539.200.758	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82,93 Persen	8.198.518.953					82,93 Persen	6.533.811.038
1 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	4.131.991.375					100 Persen	4.989.109.598
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	42 dokumen	4.131.991.375	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	42 dokumen	4.989.109.598	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	4.910.350					100 Persen	53.240.000
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	72 jenis	4.910.350	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	72 jenis	53.240.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen	425.493.784					100 Persen	879.670.000
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan telepon, listrik dan jasa komunikasi yang terbayarkan	1 tahun	267.591.292	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	665.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	1 tahun	157.902.492	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun	214.170.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	3.636.123.444					1 Tahun	611.791.440
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang terpelihara dengan baik dan memiliki syarat ketentuan yang berlaku	1 tahun 15 unit	3.576.468.444	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	1 tahun 15 unit	611.791.440	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan kantor yang diperbaiki/ terpelihara/ terjaga dengan baik	24 jenis	59.655.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah	24 jenis	65.620.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan	100 Persen	1.972.014.300				100 Persen	6.005.389.720		
1	05	03	1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 Kabupatenn/Kota	426.624.000				9 Kabupaten/Kota	1.098.752.600		
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat, aparaturnya daerah risiko bencana yang mendapat sosialisasi dan KIE rawan bencana	9 Kabupaten/Kota	426.624.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	9 Kabupaten/Kota	1.098.752.600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							3.103.894.420		
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah daerah risiko bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana	9 Kabupaten/Kota	525.390.300	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	9 Kabupaten/Kota	3.103.894.420	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	05	03	1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	9 Kabupaten/Kota	1.020.000.000				9 Kabupaten/Kota	1.802.742.700		
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah menara INA Tsunami Early Warning System, Emergency Announcement System Gunung Api yang terawat dengan baik dan tersusunnya peta evakuasi tsunami	9 Menara INA- TEWS	1.020.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	9 Menara INA- TEWS	1.802.742.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			21.299.575.866				18.413.184.350		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A nilai	17.215.674.166				A nilai	16.838.184.350	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	7 Dokumen	29.996.700				7 Dokumen	30.960.600	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	23.450.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintah	2 dokumen	27.393.400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan capaiankinerja	6 dokumen	6.546.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintah	6 dokumen	3.567.200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	1 layanan	14.297.123.826				1 layanan	13.448.029.060	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	14.297.123.826	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur Pemerintah	14 Dokumen	13.448.029.060	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	7 layanan	143.139.100				7 layanan	229.930.890	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	9.997.900	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	3 jenis	15.993.100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis tersediannya peralatan gedung kantor	7 jenis	25.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	7 jenis	81.946.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga	6 jenis	100.955.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	6 jenis	120.991.990	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan	5 jenis	7.186.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	5 jenis	10.999.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3 Layanan	371.247.040				3 Layanan	434.250.000	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis tersedianya sarana surat menyurat	1 jenis	1.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Perangkat daerah	1 jenis	3.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air telepon dan internet	1 Tahun	180.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Perangkat daerah	1 Tahun	231.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	100 Persen	189.997.040	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan Prasarana Perangkat daerah	100 Persen	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 layanan	2.374.167.500				3 layanan	2.695.013.800	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi kendaraan dinas	42 unit 16 orang	865.979.168	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	42 unit 16 orang	1.102.914.868	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor jumlah tenaga pengamanan gedung kantor	3 unit 7 Orang	382.231.136	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	3 unit 7 Orang	435.783.136	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah Tenaga Administasi tersedia	20 jenis 10 jenis 27 Orang	1.125.957.196	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	20 jenis 10 jenis 27 Orang	1.156.315.796	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	8,22 persen	62.059.670				8,22 persen	400.000.000	
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	27 Kelompok dunia Usaha	6.985.020				27 Kelompok dunia Usaha	30.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 06 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah kelompok dunia usaha dan LKS yang mendapatkan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UGB/PUB	27 Klp. dunia usaha/LKS	6.985.020	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Kelompok dunia usaha	27 Klp. dunia usaha/LKS	30.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1 06 02 1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	57 TKSK	55.074.650				57 TKSK	370.000.000	
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK yang mengikuti bimbingan teknis	57 orang	55.074.650	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	57 orang	370.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	17,91 persen	3.624.286.735				17,91 persen	655.000.000	
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah layanan bagi penyandang disabilitas terlantar dalam panti swasta	1 layanan	231.999.655				1 layanan	275.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan PMT	100 Orang	31.999.755	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penyandang disabilitas terlantar	100 Orang	75.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50 Orang	199.999.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Penyandang disabilitas terlantar	50 Orang	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	3 layanan	26.203.555				3 layanan	50.000.000	
1 06 04 1.02 12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	40 COTA	26.203.555	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti swasta	40 COTA	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti swasta yang terehabilitasi sosial	3 layanan	66.705.455			3 layanan	100.000.000		
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	300 Orang	8.999.600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti swasta	300 Orang	35.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasi	9 Paket	57.705.855	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan		Lanjut usia terlantar dalam panti swasta	9 Paket	65.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah layanan pemulangan orang terlantar bagi gelandangan dan pengemis	1 layanan	3.292.128.200			1 layanan	230.000.000		
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asalnya Jumlah pembayaran perawatan pasien terlantar di RSJ Provinsi Bali	300 Orang 1 Tahun	3.292.128.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Gelandangan dan pengemis	300 Orang 1 Tahun	230.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			7.249.870				7.974.857		
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang bagi PMKS	25 orang	7.249.870	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan		25 orang	7.974.857	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	0	7.535.540				0	50.000.000	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengelolaan data fakir miskin	2 layanan	7.535.540				2 layanan	50.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin	1 laporan	7.535.540	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Fakir miskin	1 laporan	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	260.019.755				100 persen	470.000.000	
1 06 06 1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah layanan untuk perlindungan korban bencana alam dan sosial	2 layanan	260.019.755				2 layanan	470.000.000	
1 06 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani	629 orang	260.019.755	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Korban bencana alam dan sosial	629 orang	470.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	06	07								
1	06	07								
1	06	07	1.01	02						
1	06	07	1.01	02						
2										
2	08									
2	08	02								
2	08	02	1.02							
2	08	02	1.02	01						
2	08	06								
2	08	06	1.02							
2	08	06	1.02	01						

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						8.307.140.094					
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A nilai	7.892.545.438			A nilai	7.147.411.644			
1	06	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan	1 layanan	5.872.352.618			1 layanan	5.101.628.276			
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di UPTD Pelayanan Sosial	12 Bulan	5.872.352.618	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Aparatur perangkat daerah	12 Bulan	5.101.628.276	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	6 layanan	123.765.100				6 layanan	17.217.200		
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dan Panti	1 Tahun	14.955.100	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	1 Tahun	17.217.200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	15.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	1 unit	16.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1 Tahun	85.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	1 Tahun	93.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	3.810.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	5 jenis	4.191.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat Jumlah Perjalanan Dinas	60 kotak 20 orang/kali	5.000.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	60 kotak 20 orang/kali	5.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	3 layanan	9.829.600				3 layanan	10.812.560		
1	06	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	3 jenis	9.829.600	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perangkat daerah	3 jenis	10.812.560	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 layanan	234.459.000			2 layanan	24.959.000		
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	4 jenis	209.500.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliaseh, Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu, Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	4 jenis	230.450.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya bahan/alat kebersihan kantor yang terpenuhi	100 Persen	24.959.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	100 Persen	24.959.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah	3 layanan	1.652.139.120				3 layanan	2.003.607.168	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas Roda 2 yang terpelihara jumlah kendaraan dinas Roda 4 yang terpelihara jumlah tenaga pengemudi Tersedianya Bahan bakar minyak/gas untuk kelancaran operasional dan pelayanan kantor dan panti	4 unit 5 unit 4 orang 1 tahun	203.837.144	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliaseh, Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu, Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	4 unit 5 unit 4 orang 1 tahun	440.545.792	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa tenaga keamanan Tersedianya pemeliharaan gedung kantor/panti	8 orang 1 tahun	344.803.584	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliaseh, Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu, Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	2. Kesehatan dan Pendidikan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	8 orang 1 tahun	448.211.584	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor Jumlah tenaga administrasi, Tenaga Juru Masak dan Tenaga Pengasuh Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun 29 orang 1 Tahun	1.103.498.392	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliaseh, Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu, Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana perangkat daerah	1 Tahun 29 orang 1 Tahun	1.114.849.792	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	17,91 persen	1.220.372.500				17,91 persen	1.159.728.450	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah layanan bagi anak terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial	8 layanan	589.870.000				8 layanan	1.159.728.450	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	70 orang	135.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu, Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	316.360.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pemberian makanan	70 orang	190.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	242.125.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sandang	70 orang	21.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	198.750.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	70 orang	5.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	41.175.300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	70 orang	32.960.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	98.351.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- hari	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	70 Orang	74.810.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 Orang	88.806.350	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	70 orang	122.100.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kaliuntu Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	122.100.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	70 orang	9.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Kalibukbuk Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Anak terlantar dalam panti pemerintah	70 orang	52.060.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah layanan bagi lanjut usia terlantar dalam panti pemerintah yang terehabilitasi sosial	5 layanan	630.502.500				5 layanan	693.552.750	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan PMT di panti	130 orang	465.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	130 orang	511.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan pengobatan ringann dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah	130 orang	10.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	130 orang	11.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bimbingan aktivitas sehari-hari	130 orang	117.502.500	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	130 orang	129.252.750	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut usia yang terseleksi dan mendapatkan pelayanan home visit	130 orang	8.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	130 orang	8.800.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
1 06 04 1.03 12	Pemulasaraan	Jumlah jenazah yang terkremasin dan pelayanan sosial dalam panti pemerintah	24 orang	30.000.000	Kab. Buleleng, Banjar, Kaliasem Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Lanjut usia terlantar dalam panti	24 orang	33.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				3.688.318.267				4.272.859.362	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A nilai	3.680.338.267				A nilai	4.149.190.362	
2 08 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	1 layanan	3.152.309.860				1 layanan	3.086.958.954	
2 08 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN di UPTD.PPA	12 BULAN	3.152.309.860	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur perangkat daerah	12 BULAN	3.086.958.954	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	5 layanan	26.430.300				5 layanan	125.835.200	
2 08 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5 jenis	1.967.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana perangkat daerah	5 jenis	5.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis tersedianya perlengkapan gedung kantor	2 jenis	19.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana perangkat daerah	2 jenis	114.834.400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	5 jenis	5.463.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana perangkat daerah	5 jenis	6.000.800	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 layanan	5.000.000				1 layanan	50.000.000	
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, listrik, air, telepon dan internet	1 jenis	5.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana perangkat daerah	1 jenis	50.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan bagi barang milik daerah	3 layanan	496.598.107				3 layanan	886.396.208	
2 08 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah tenaga pengemudi	6 unit 2 orang	124.546.296	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana barang milik daerah	6 unit 2 orang	233.391.496	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor Jumlah tenaga pengamanan	1 unit 1 orang	40.299.668	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana barang milik daerah	1 unit 1 orang	315.252.564	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2 08 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah tenaga administrasi Jumlah tenaga penyuluhan atau pendampingan	3 jenis 1 Tahun 1 orang 6 orang	331.752.143	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Sarana dan prasarana barang milik daerah	3 jenis 1 Tahun 1 orang 6 orang	337.752.148	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
2	08	03													
2	08	03													
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jangkauan kasus layanan korban kekerasan perempuan dan anak Jumlah penerimaan kasus yang tertangani dan terselesaikan Jumlah tenaga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80 orang 80 orang 6 orang	7.980.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Perempuan korban kekerasan	80 orang 80 orang 6 orang	123.669.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5.741.231.714					13.663.250.000		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	5.616.081.214					82,5	6.163.250.000	
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	1 Jenis	4.929.414.386					1 Jenis	5.000.000.000	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	4.929.414.386	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi keuangan	14 Dokumen	5.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	7 Jenis	31.306.200					7 Jenis	402.500.000	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	2 Jenis	3.188.400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	2 Jenis	12.500.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	4 Jenis	10.617.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	4 Jenis	220.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	2 Jenis	13.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	2 Jenis	25.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 Jenis	3.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	90.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 Jenis	900.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	2.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	2 Jenis	211.374.092				2 Jenis	235.750.000	
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	1 Jenis	24.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	36.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1 Jenis	187.374.092	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	199.750.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	443.986.536				3 Jenis	525.000.000	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	2 Unit	301.036.536	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	2 Unit	400.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 Unit	120.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	3 Unit	35.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 Jenis	22.950.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	3 Jenis	90.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	30 persen	125.150.500				30 persen	7.500.000.000	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang mengikuti latihan kerja	560 Orang	125.150.500				560 Orang	7.500.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi	16 Orang	125.150.500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pencari Kerja	16 Orang	7.500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				3.661.809.936				5.470.700.000	
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	3.510.809.936				82,5	4.370.700.000	
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	1 Jenis	3.191.600.000				1 Jenis	3.600.000.000	
2 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	3.191.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi keuangan	14 Dokumen	3.600.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	6 Jenis	31.314.840				6 Jenis	207.500.000	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	4 Jenis	5.081.200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	4 Jenis	17.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	4 Jenis	13.233.640	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	4 Jenis	130.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	1 Jenis	13.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	14.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	91.319.096				3 Jenis	113.200.000	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1 Jenis	1.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	1.200.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	1 Jenis	12.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	12.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1 Jenis	78.119.096	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	196.576.000				3 Jenis	370.000.000	
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 Unit	116.830.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	3 Unit	150.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	20.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	1 Unit	50.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 Jenis	59.746.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	5 Jenis	170.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	100 Persen	151.000.000				100 Persen	1.100.000.000	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya	100 Persen	151.000.000				100 Persen	1.100.000.000	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya	100 Persen	151.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Perusahaan	100 Persen	1.100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						31.965.000.000					
2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	21.148.317.081			82,5	25.575.000.000			
2	07	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan	4 Jenis	17.772.344.169			4 Jenis	20.049.000.000			
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	17.772.344.169	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan administrasi keuangan	14 Dokumen	20.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	7 Jenis	282.489.200				7 Jenis	1.054.500.000		
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	9 Jenis	13.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	9 Jenis	15.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	16 Jenis	62.682.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	16 Jenis	165.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	2 Jenis 1 jenis	94.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	2 Jenis 1 jenis	90.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	60.008.400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	2 Jenis	45.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 Jenis	9.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	35.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	1 Jenis	1.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	4.500.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi,dan koordinasi, Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat	4 Kegiatan 2 Jenis	41.548.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	4 Kegiatan 2 Jenis	700.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	1.176.500.032				3 Jenis	1.221.500.000		
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1 Jenis	1.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	1.500.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	3 Jenis	576.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	3 Jenis	600.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	1 Jenis	599.000.032	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pelayanan perkantoran	1 Jenis	620.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	07	01	1.09											
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Jenis	1.916.983.680			3 Jenis	2.900.000.000			
2	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	13 Unit	794.757.584	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	13 Unit	1.700.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	169.905.792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	1 Unit	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	7 Jenis	952.320.304	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Sarana dan prasarana	7 Jenis	1.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali	4 kawasan	179.010.100				4 kawasan	775.000.000	
2	07	04	1.01		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan	4 Kawasan	179.010.100				4 Kawasan	200.000.000	
2	07	04	1.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal	4 kawasan	179.010.100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Masyarakat	4 kawasan	200.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	6.71 persen	55.000.000				6.71 persen	1.000.000.000	
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan diawasi dan dibina norma ketenagakerjaan	395 Perusahaan	55.000.000				395 Perusahaan	1.000.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme penyelesaian Hubungan Industrial dan Data Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	2 Keputusan Gubernur 16 Perusahaan 48 Perusahaan	55.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Pekerja dan Perusahaan	2 Keputusan Gubernur 16 Perusahaan 48 Perusahaan	1.000.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	11 MW	221.359.392				11 MW	500.000.000	
3 29 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Kapasitas energi bersih dan energi baru terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	11 MW	221.359.392				11 MW	500.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif			
3 29 05 1.04 07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan pengawasan badan usaha di bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pengusahaan Sektor Sumber Daya Mineral Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan	200 Pengusaha 1.1 %	221.359.392	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	200 Pengusaha 1.1 %	500.000.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			374.858.688						337.771.725		
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target	100 Persen	212.429.344						100 Persen	111.810.227	
2 12 02 1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber- KTP-el per satuan penduduk	99 Persen	212.429.344						99 Persen	111.810.227	
2 12 02 1.01 04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah blanko KTP-el yang difasilitasi Jumlah Data Agregat Jumlah Laporan Monitoring Kependudukan Provinsi Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen Jumlah Profil Kependudukan Provinsi Jumlah sosialisasi pendataan penduduk non permanen	150000 Keping Blanko KTP 2 Data Agregat 2 Laporan 2 Laporan Pendataan 1 Profil Kependudukan 1 Kali	212.429.344	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	150000 Keping Blanko KTP 2 Data Agregat 2 Laporan 2 Laporan Pendataan 1 Profil Kependudukan 1 Kali	111.810.227	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target 0-18 tahun mencapai target	100 Persen	162.429.344				100 Persen	225.961.498	
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	77 Persen	162.429.344				77 Persen	225.961.498	
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Kali	162.429.344	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Pemerintah	1 Kali	225.961.498	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,65 Nilai	15.632.733.537				82,65 Nilai	17.386.710.417	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.06 Persen	290.710.044				0.06 Persen	472.003.338	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	19.424.100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	118.797.800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	271.285.944	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Pemerintah Desa	1 Dokumen	353.205.538	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen	13.030.019.729				100 Persen	14.653.800.809	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	64 Pegawai	12.888.097.955	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	64 Pegawai	14.538.910.950	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen verifikasi	9 Dokumen	141.921.774	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 Dokumen	114.889.859	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	352.926.760				12 Bulan	1.349.313.086	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	5.495.900	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	6.045.490	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 Bulan	128.247.360	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	779.062.196	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang tersedia	12 Bulan	93.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	102.300.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan	12 Bulan	11.299.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	18.150.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Tersedianya bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	12 Bulan	4.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	10.120.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat - rapat, tamu, lembur yang tersedia	12 Bulan	13.200.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	14.520.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 13 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Tersedianya fasilitas pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 Bulan	97.484.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	419.115.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen	9.140.000				100 Persen	10.054.000	
2 13 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	9.140.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	10.054.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100 Persen	733.536.076				100 Persen	813.627.184	
2 13 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	250.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	275.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan	483.536.076	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	12 Bulan	538.627.184	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen	1.216.400.928				100 Persen	87.912.000	
2 13 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	1.177.800.928	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	51.612.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	38.600.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana Prasarana Kantor	12 Bulan	36.300.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Desa yang mengalami peningkatan PADes	25 Desa	174.952.706				25 Desa	272.192.587		
2	13	03	1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	3.93 Persen 7.86 Persen	174.952.706				3.93 Persen 7.86 Persen	272.192.587		
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Desa di Lintas Kabupaten/ Kota	25 Desa	174.952.706	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota / pihak ketiga	25 Desa	272.192.587	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	66,98 Persen	854.129.984				66,98 Persen	682.038.441		
2	13	04	1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	71.7 Persen	854.129.984				71.7 Persen	682.038.441		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan fungsi manajemen pemerintahan desa	71.7 Persen	299.905.792	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admi n SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan	71.7 Persen	182.287.871	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang mengikuti lomba desa	9.59 Persen	554.224.192	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admi n SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan	9.59 Persen	499.750.570	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Mandiri	36.32 Persen	7.064.643.712				36.32 Persen	7.381.668.432	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	80 Persen	7.064.643.712			80 Persen	7.381.668.432		
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang melakukan pendataan Sarana dan Prasarana	60 Desa	249.905.792	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan	60 Desa	211.692.906	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 13 05 1.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas Usaha Ekonomi Desa	9 Desa	424.905.792	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan	9 Desa	732.325.706	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2 13 05 1.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah potensi sumber daya alam yang terdata	170 Potensi SDA	312.428.794	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan	170 Potensi SDA	1.015.098.803	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 13 05 1.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase PKK dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK	15.84 Persen	6.077.403.334	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK di tingkat desa/kelurahan	15.84 Persen	5.422.551.017	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			480.057.499					172.128.711	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan Keluarga Berencana	7 Sektor	480.057.499				7 Sektor	172.128.711	
2 14 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	1350 Orang	480.057.499				1350 Orang	172.128.711	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	14	03	1.01	02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sektor yang memanfaatkan informasi pengendalian penduduk dan KB Krama Bali	7 Sektor	480.057.499	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat, Siswa setingkat SMA/SMK	7 Sektor	172.128.711	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			15.649.009.115					22.716.064.711	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,99 Persen	13.249.951.485				83,99 Persen	15.720.407.560	
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	45.069.750				8 Dokumen	28.300.000	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	2 Dokumen	27.677.300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 Dokumen	25.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	17.392.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	3.300.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.282.805.286				1 Dokumen	11.761.857.560	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan	1 Tahun	9.257.811.946	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	11.715.857.560	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	1 Dokumen	24.993.340	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	46.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	7 Dokumen	269.667.775				7 Dokumen	604.750.000	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	1 Tahun	3.031.200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	4.750.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor, Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dan Siap Pakai	1 Tahun	50.818.775	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	168.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pelaksanaan Sesajen dan Upakara	1 Tahun	75.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	80.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan Spanduk yang di Cetak dan di Gandakan	1 Tahun	5.113.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	25.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia dan siap edar	1 Tahun	20.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	27.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Jumlah laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat,konsultasi, koordinasi, seminar,bitek dan pameran yang disusun sesuai ketentuan - Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur yang siap saji	1 Tahun	115.704.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	300.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	1.200.000.000				3 Dokumen	500.000.000	
2 15 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Eselon III yang tersedia	2 Unit	1.200.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 Unit	500.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	3 Dokumen	633.948.082				3 Dokumen	724.000.000	
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	200 Lembar	2.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	200 Lembar	2.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan tepat waktu	1 Tahun	275.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	350.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar tepat waktu	1 Tahun	356.948.082	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	372.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Dokumen	1.818.460.592				5 Dokumen	2.101.500.000	
2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai : Roda 4 dan Roda 2	1 Tahun	531.589.392	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	726.500.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	1 Tahun	39.960.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	75.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	5 Gedung	1.046.911.200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 Gedung	1.300.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	1 Tahun	200.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	220.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0.78 Rasio	1.474.293.380				0.78 Rasio	1.713.616.213	
2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase peningkatan keselamatan pengguna jaringan jalan	100 Persen	812.052.512				100 Persen	1.021.000.000	
2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	jumlah kendaraan diperiksa hasil pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk Provinsi yang ditindaklanjuti	38 Kali	812.052.512	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	38 Kali	1.021.000.000	Dinas Perhubungan

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
2	15	02	1.06	Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi yang ditindaklanjuti	75 Persen	50.000.000				75 Persen	78.000.000		
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan	8 Rekomendasi	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	8 Rekomendasi	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah lokasi pengawasan rekomendasi andalalin yang dikeluarkan	8 Lokasi	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	8 Lokasi	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Abdiyasa yang dibina serta Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat /Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi	1 Paket	612.240.868				1 Paket	544.616.213	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Provinsi yang membuat masyarakat /Penyelenggara Angkutan semakin memahami aspek keselamatan transportasi	1 Paket	612.240.868	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Paket	544.616.213	Dinas Perhubungan
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25 persen	687.382.010				25 persen	1.782.040.938	
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kajian Rencana induk Pelabuhan	1 Dokumen	687.382.010				1 Dokumen	1.700.000.000	
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen kajian Persentase pelabuhan pengumpan regional yang menerapkan manajemen keselamatan	2 Dokumen 33 %	687.382.010	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Dokumen 33 %	1.700.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	15	05												
2	15	05	1.01											
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase dokumen rencana induk perkeretaapian yang ditetapkan dengan keputusan gubernur	100 Persen	237.382.240	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	100 Persen	2.000.000.000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01												
2	15	01	1.02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	1.904.908.192				79 Persen	2.186.580.606	
2	15	01	1.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.719.983.456				1 Dokumen	1.900.115.606	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan	1 Tahun	1.719.983.456	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	1.900.115.606	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	57.827.340				1 Dokumen	120.175.000	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu hemat energi 20 watt yang tersedia	40 Buah	2.160.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		Aparatur	40 Buah	2.530.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan Bahan Komputer yang Tersedia	1 Paket	13.296.740	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	57.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Foto Copy Yang Tersedia	5500 Lembar	2.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5500 Lembar	2.420.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Koran/Media Cetak Yang Tersedia	1 Tahun	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	3.795.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota Yang Tersedia	1 Tahun	37.170.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	56.350.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	15	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	42.422.148			1 Dokumen	52.785.000			
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Tersedia	100 Lembar	1.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	100 Lembar	1.150.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Perabot Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Yang Tersedia	1 Paket 1 Orang	41.422.148	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket 1 Orang	51.635.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	84.675.248					1 Dokumen	113.505.000	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar dan Pelumas, Tenaga Pengemudi, Pembayaran Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Alat Angkutan	1 Paket	76.425.248	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	103.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Alat Pendingin, Pemeliharaan Komputer	1 Paket	8.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	10.005.000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Layanan Angkutan	0.78 Rasio	337.382.240				0.78 Rasio	1.437.382.240	
2	15	02	1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah simpang simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali	14 Simpang	337.382.240					14 Simpang	1.437.382.240	
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Berkurangnya tundaan lalu lintas di simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali Tenaga Administrasi	14 Simpang 5 Orang	237.382.240	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	14 Simpang 5 Orang	387.382.240	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah simpang terkoordinasi ATCS Provinsi Bali yang terpelihara sarana dan prasarananya	14 Simpang	100.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	14 Simpang	1.050.000.000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	1.945.853.643				79 Persen	2.713.460.294	
2	15	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.530.947.267					1 Dokumen	1.965.980.294	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan	1 Tahun	1.530.947.267	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	1.965.980.294	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	39.305.240					1 Dokumen	153.360.000	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu hemat energi 8 watt dan lampu hemat energi 23 watt yang tersedia	34 Buah	683.900	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	34 Buah	2.640.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor siap pakai	1 Paket	6.971.340	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	18.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Sesajen yang tersedia	1 Tahun	15.000.000	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	36.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Buku Operasional yang tersedia Jumlah Fotocopy Jumlah Map	130 Buku 7225 Lembar 200 Buah	7.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	130 Buku 7225 Lembar 200 Buah	19.680.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	1 Tahun	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	5.040.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman, dan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tersedia	488 Org/Kali	6.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	488 Org/Kali	72.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	38.100.000				1 Dokumen	89.280.000	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	170 Lembar	400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	170 Lembar	2.040.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, listrik, dan air yang terbayarkan	1 Tahun	17.700.000	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	33.240.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	1 Paket	20.000.000	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	54.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	337.501.136				1 Dokumen	504.840.000	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa tenaga kerja administrasi dan jasa sopir Jumlah Jasa Pertamax Pajak kendaraan dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia	7 Orang 7439 Liter 1 Tahun	328.451.136	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	7 Orang 7439 Liter 1 Tahun	492.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC, komputer (PC), laptop, dan printer yang tersedia	13 Unit	9.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	13 Unit	12.840.000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem transportasi Bali	75 persen	3.666.675.096				75 persen	11.250.000.000	
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP tersedia sesuai standar serta Paket Sarana dan Prasarana Trans SARBAGITA yang terpelihara	2 Dokumen	3.666.675.096				2 Dokumen	11.250.000.000	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Biaya Tenaga Pengawas Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum AKDP Trans Sarbagita yang tersedia sesuai standar Pembelian Kuota Data Internet Perawatan Peralatan Pembayaran Elektronik Tab Perawatan Rutin dan Insidental Bus Trans SARBAGITA	1 Tahun 4368 RIT 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	3.666.675.096	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat	1 Tahun 4368 RIT 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	10.000.000.000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			2.173.029.974					5.054.265.168	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	1.655.932.174				79 Persen	1.765.215.168	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.508.455.916				1 Dokumen	1.549.817.548	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pemenuhan gaji dan tunjangan	1 Tahun	1.508.455.916	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	1.549.817.548	Dinas Perhubungan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	48.006.110			1 Dokumen	84.035.754			
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	5.634.110	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	9.387.554	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	2.472.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	3.110.800	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan rapat dan konsultasi	1 Tahun	39.900.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	71.537.400	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	1.000.000					1 Dokumen	1.089.000	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	99 Lembar	1.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	99 Lembar	1.089.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	98.470.148					1 Dokumen	130.272.866	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jasa tenaga kerja administrasi/tenaga jasa sopir Jumlah BBM pajak kendaraan, dan biaya pemeliharaan kendaraan yang tersedia	1 Orang 5490 Liter 1 Tahun	92.520.148	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Orang 5490 Liter 1 Tahun	122.638.866	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC, PC, laptop, dan Printer,	10 Unit	5.950.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	10 Unit	7.634.000	Dinas Perhubungan
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional	50 persen	517.097.800					50 persen	3.289.050.000	
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan di Jalan Provinsi Bali dalam kondisi baik dan siap pakai	1 Paket	517.097.800					1 Paket	3.289.050.000	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	1 Tahun	217.381.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Tahun	2.339.050.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	1 Tahun	299.715.850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur	1 Tahun	950.000.000	Dinas Perhubungan
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				1.947.138.677					679.350.000	
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	1.911.778.677					79 Persen	196.600.000	
2	15	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.402.405.797						1.542.646.377	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.402.405.797	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur			1.542.646.377	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	392.475.080					1 Dokumen	50.500.000	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor tersedia	1 Paket	8.495.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Paket	10.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Foto Copy dan Penjilidan	1 Tahun	1.715.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	1.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan/koran Tersedia	1 Tahun	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	3.500.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan minum rapat dan konsultasi SKPD, perjalanan dinas dam dan luar daerah	1 Tahun	379.264.480	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	35.500.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	47.049.000				1 Dokumen	42.500.000	
2 15 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Kursi siap pakai meja komputer Tersedianya jumlah meja kerja,	20 buah 4 Buah 10 Buah	22.197.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	20 buah 4 Buah 10 Buah	25.000.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop siap pakai Tersedia jumlah komputer	1 Unit 2 Unit	24.852.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Unit 2 Unit	17.500.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	1.500.000				1 Dokumen	1.500.000	
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	150 Lembar	1.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	150 Lembar	1.500.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perkantoran	1 Dokumen	68.348.800				1 Dokumen	102.100.000	
2 15 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase kendaraan dinas jabatan dalam kondisi baik dan siap pakai	1 Tahun	15.456.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur 6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	49.200.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	1 Tahun	47.492.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Tahun	47.500.000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer Printer dalam kondisi baik Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa AC	3 Unit 2 Unit 3 Unit	5.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	3 Unit 2 Unit 3 Unit	5.400.000	Dinas Perhubungan
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang operasionalnya menerapkan SPM	25 persen	35.360.000				25 persen	482.750.000	
2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	jumlah operasional pelabuhan pengumpan regional	3 Pelabuhan	35.360.000				3 Pelabuhan	482.750.000	
2 15 03 1.09 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional	1 Tahun	17.680.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	masyarakat dan perusahaan kapal	1 Tahun	435.500.000	Dinas Perhubungan
2 15 03 1.09 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya kordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	1 Tahun	17.680.000	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	masyarakat dan perusahaan kapal	1 Tahun	47.250.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						57.344.351.900					
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	18.537.184.795			79 Persen	22.816.466.900			
2	16	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 dokumen	31.023.910			16 dokume	349.386.000			
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	3 dokumen	18.582.190	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	140.670.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai ketentuan	1 dokumen	5.656.320	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	38.781.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai ketentuan	12 dokumen	6.785.400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 dokumen	169.935.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 dokumen	13.590.141.485					75 dokumen	14.709.195.000	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor-honor dan kekurangan gaji)	64 dokumen	12.845.141.485	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	64 dokumen	13.828.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi	11 dokumen	745.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 dokumen	880.695.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 bulan	742.554.000					12 bulan	1.071.000.000	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	1 paket	4.615.500	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	5.250.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	12 bulan	449.782.700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	593.250.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	12 bulan	80.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	134.400.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan	1 paket	17.860.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	36.750.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/ koran/ media cetak yang tersedia dan siap edar	12 bulan	35.805.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	39.900.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang disusun dan disampaikan tepat waktu	10 laporan	154.490.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 laporan	243.075.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 paket	54.194.000					3 paket	406.219.000	
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	2 paket	37.550.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 paket	309.750.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap pakai	1 paket	16.644.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	96.469.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bulan	401.135.000					12 bulan	293.160.000	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai	12 bulan	3.020.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	3.360.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung kantor	12 bulan	262.605.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	289.800.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			135.510.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur		149.061.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	539 unit	3.718.136.400				539 unit	5.987.506.900	
2 16 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan siap pakai	28 unit	1.866.980.272	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	28 unit	2.968.809.900	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	489 unit	4.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	489 unit	7.192.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	149.740.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	173.670.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai	7 unit	1.499.152.128	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	7 unit	2.459.835.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dalam kondisi baik dan siap pakai	15 unit	197.464.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	15 unit	378.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	81 indeks	17.178.435.400				81 indeks	20.573.385.000	
2 16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	79 indeks	17.178.435.400				79 indeks	20.573.385.000	
2 16 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang	120 buah	2.055.077.578	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	120 buah	2.877.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online	30000 berita/tayang	10.368.999.744	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	30000 berita/tayang	11.676.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Bimtek PPID, Majalah, Pameran Pembangunan, Pertunjukkan Kesenian Rakyat dan Layanan Informasi	117 kali	308.965.018	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	117 kali	350.385.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan fasilitasi KPID	77 kali	2.542.320.008	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	77 kali	2.780.400.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah literasi informasi dan media serta jumlah sosialisasi monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun sesuai ketentuan	16 kali	817.004.432	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	16 kali	894.600.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis	14 photo/vdeo	1.086.068.620	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	14 photo/vdeo	1.995.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,52 indeks	94.414.255.464				2,52 indeks	13.954.500.000	
2 16 03 1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem pemerintah berbasis elektronik	25 aplikasi	94.414.255.464				25 aplikasi	13.954.500.000	
2 16 03 1.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan infrastruktur pada Pusat Data yang berfungsi	2 paket	80.600.834.139	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	2 paket	1.102.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani jaringan intranet dan internet	39 OPD/UPT	9.303.867.467	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	39 OPD/UPT	8.442.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 16 03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung SPBE	25 aplikasi	4.509.553.858	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	25 aplikasi	4.410.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			652.111.708				539.306.250		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang valid	100 persen	652.111.708				100 persen	539.306.250	
2 20 02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dianalisa dan diseminasi	11 sektor	652.111.708				11 sektor	539.306.250	
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	285.716.606	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 dokumen	243.731.250	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang terbangun	1 dokumen	206.366.096	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	1 dokumen	190.050.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik	11 sektor	160.029.006	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	11 sektor	105.525.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			602.151.826				618.450.000		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	80 persen	602.151.826				80 persen	618.450.000	
2 21 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	283.513.918				38 OPD	355.950.000	
2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis keamanan informasi yang disusun sesuai ketentuan	2 dokumen	150.514.268	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	187.950.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pengamanan data dan informasi pemerintah provinsi Bali	38 OPD	132.999.650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	38 OPD	168.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21 02 1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	38 OPD	318.637.908				38 OPD	262.500.000	
2 21 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang aman di Pemerintah Provinsi Bali	38 OPD	318.637.908	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	38 OPD	262.500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			16.696.592.311				27.636.704.915		
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	15.302.587.195				83,5 Persen	16.067.732.710	
2 17 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3 Dokumen	80.630.016				3 Dokumen	209.752.500	
2 17 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2 dokumen	78.417.006	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Instansi terkait dan stake holder	2 dokumen	157.752.500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja PD	1 Dokumen	2.213.010	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Instansi terkait dan stake holder	1 Dokumen	40.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	12.830.645.181			1 Layanan	11.613.246.013		
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	12.830.645.181	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	14 Dokumen	11.613.246.013	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik	6 Layanan	96.895.770				6 Layanan	444.607.348	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	9.999.250	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	19.320.254	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	64.931.520	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	106.052.095	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	14.965.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	28.143.170	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	7.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	38.640.508	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Layanan	1.335.111.200				3 Layanan	1.083.768.500	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	2.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	1.943.618	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	271.200.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	349.310.194	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1.061.911.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	732.514.688	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3 Jenis	959.305.028				3 Jenis	1.503.399.810	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 Jenis	729.460.536	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	903.543.883	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	2 Jenis	50.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	51.842.681	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	179.844.492	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Unit	548.013.246	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang bankable	83,33 Persen	266.464.240				83,33 Persen	718.700.000	
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	71 Koperasi	22.516.000				71 Koperasi	359.350.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 17 02 1.01 01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	71 Koperas	22.516.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	71 Koperasi	359.350.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 02 1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan	5 Koperasi	243.948.240				5 Koperasi	359.350.000	
2 17 02 1.02 01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	5 Koperasi	243.948.240	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi	5 Koperasi	359.350.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	17	04												
2	17	04	1.01		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	78,89 Persen	118.552.896			78,89 Persen	261.161.029		
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	142 KSP/USP Koperasi	118.552.896			142 KSP/USP Koperasi	261.161.029		
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat	100 KSP/USP Koperasi	118.552.896	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	KSP/USP-Koperasi	100 KSP/USP Koperasi	166.344.604	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	3,08 Persen	394.224.080			3,08 Persen	8.216.611.176		
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	126 Koperasi	394.224.080			126 Koperasi	8.216.611.176		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	60 Koperas	167.461.344	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi, BUMD, BUMN, Swasta	60 Koperasi	5.464.611.176	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya Jumlah koperasi tenun yang aktif Jumlah subak sebagai koperasi tani	64 Koperas 1 Koperasi 1 Koperasi	226.762.736	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Koperasi, BUMD, BUMN, Swasta	64 Koperasi 1 Koperasi 1 Koperasi	2.752.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	0,12 Persen	614.763.900			0,12 Persen	2.070.000.000				
2	17	07	1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Mitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid	190 UMKM	614.763.900			190 UMKM	2.070.000.000				
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM	190 UMKM	614.763.900	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	UMKM	190 UMKM	2.070.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										1.850.252.128		3.294.984.945	
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	1.775.299.232				83,5 Persen	2.544.078.007			
2	17	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1.357.423.276				1 Layanan	1.905.854.120			
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen	1.357.423.276	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	14 dokumen	1.905.854.120	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	5 Layanan	4.416.220				5 Layanan	51.466.838			
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	689.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	3.220.042	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	2.726.720	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	9.531.325	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	2.833.637	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Layanan	239.452.392				3 Layanan	334.737.508			
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	1.288.017	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	48.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	45.338.196	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	189.952.392	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Layanan	288.111.295	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3 Jenis	174.007.344				3 Jenis	252.019.541	
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 Jenis	95.784.448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	98.533.296	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	2 Jenis	3.270.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	2 Jenis	10.304.136	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	74.952.896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Barang Milik Daerah	1 Unit	143.182.109	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0,25 Persen	74.952.896				0,25 Persen	750.906.938	
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	50 Orang	74.952.896				50 Orang	750.906.938	
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	50 Orang	74.952.896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur, Pengelola Koperasi dan UMKM	50 Orang	750.906.938	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			22.658.293.554					27.477.551.226	
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	21.584.015.698				100 persen	23.739.336.726	
2 18 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	46 Dokumen	18.578.758.831				46 Dokumen	19.443.963.726	
2 18 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jenis Dokumen Administrasi Keuangan	46 Dokumen	18.578.758.831	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	46 Dokumen	19.323.963.726	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86 Persen	458.803.775				86 Persen	608.828.000	
2 18 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	10 Jenis	18.638.850	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	10 Jenis	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan peralatan komputer, laptop, printer sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 Jenis	213.166.335	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	2 Jenis	350.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	3 Jenis	63.466.990	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	3 Jenis	69.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan, foto copy sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 Jenis	16.231.600	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	2 Jenis	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	600 Kotak	7.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	600 Kotak	9.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 18 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1 Tahun	139.800.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Tahun	102.448.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	1 Dokumen	114.223.200				1 Dokumen	119.500.000	
2 18 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor	6 Jenis	114.223.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	6 Jenis	119.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	3 Dokumen	1.536.222.652				3 Dokumen	2.444.000.000	
2 18 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan benda pos materai 10.000	1 Jenis	3.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Jenis	3.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 Jenis	178.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	2 Jenis	180.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung Kantor	1 Unit	1.355.222.652	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	1 Unit	2.261.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	2 Dokumen	896.007.240				2 Dokumen	1.013.045.000	
2 18 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara roda 4 dan roda 2	20 Unit	763.822.240	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	20 Unit	940.325.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	8 Jenis	132.185.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Provinsi Bali	8 Jenis	72.720.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi/ Penanaman Modal di Luar Sarbagita	15 Persen	324.748.896				15 Persen	430.000.000	
2 18 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Kajian Peta potensi dan peluang investasi berbasis jenis usaha	4 Dokumen	324.748.896				4 Dokumen	400.000.000	
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi dan Mou antar Perusahaan	4 Dokumen	324.748.896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penanam Modal Kab/ Kota, Universitas	4 Dokumen	400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali	22.66 Persen	74.952.896				22.66 Persen	580.000.000	
2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Jumlah dokumen Promosi	2 Dokumen	74.952.896				2 Dokumen	580.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pameran Penanaman Modal	1 kali	74.952.896	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Investor	1 kali	400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Kepuasan Masyarakat	87,5 Persen	599.623.168				87,5 Persen	1.600.000.000	
2 18 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang dilayani sesuai kewenangan Provinsi	100 Persen	599.623.168				100 Persen	1.600.000.000	
2 18 04 1.02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	20 Pemantauan	524.670.272	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha dan Pemohon Izin	20 Pemantauan	700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pengaduan, Penyuluhan dan Pemantauan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang di tangani	100 Persen	74.952.896	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaku Usaha dan Pemohon Izin	100 Persen	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2	18	06								
2	18	06	1.01							
2	18	06	1.01	01						
2	22									
2	22	01								
2	22	01	1.01							
2	22	01	1.01	01						
2	22	01	1.01	06						
2	22	01	1.02							
2	22	01	1.02	01						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi sesuai dengan regulasi	1000 dokumen	324.067.584	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	1000 dokumen	500.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan akuntansi SKPD	100 persen	10.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	100 persen	12.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	763.066.000				100 Persen	2.071.100.000	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	31 Jenis	49.625.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	31 Jenis	225.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	5 Jenis	485.881.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	5 Jenis	1.255.500.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan) yang tersedia	3 Jenis	95.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Jenis	270.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	6 Jenis	45.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	6 Jenis	15.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia/Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 Jenis	25.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Jenis	9.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu layanan fasilitasi kunjungan tamu (makanan dan minuman) yang tersedia	12 Bulan	18.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 Bulan	21.600.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12 Bulan	44.060.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 Bulan	275.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.524.414.700				100 Persen	3.785.796.144	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	2 Jenis	10.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	2 Jenis	13.500.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	500.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Jenis	1.350.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	4 Jenis	249.930.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	4 Jenis	405.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	764.484.700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	12 Bulan	2.017.296.144	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.545.411.336				100 Persen	6.862.553.320	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	18 Kendaraan	837.888.688	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	18 Kendaraan	2.318.529.483	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	5 Jenis	46.175.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	5 Jenis	270.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor maupun Bangunan Lainnya yang terawat dengan baik	3 Gedung	1.661.347.648	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	3 Gedung	4.274.023.837	Dinas Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen	18.507.803.586				5 Persen	38.387.118.458	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali	2500 Orang	2.062.180.678				2500 Orang	8.800.000.000	
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan bahasa, aksara dan sastra Bali	3000 orang	1.500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	3000 orang	8.100.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga/Komunitas yang terbina	15 lembaga	562.180.678	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	15 lembaga	700.000.000	Dinas Kebudayaan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah pelaku seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian	477 Orang/Lembaga	7.474.858.428			477 Orang/Lembaga	20.587.118.458		
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Jenis dari Objek tradisi Budaya yang terlindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	40 jenis	1.974.858.518	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	40 jenis	4.387.118.458	Dinas Kebudayaan
									Semua Kelurahan Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
2	22	02	1.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelaku Seni yang mendapat penghargaan atas upaya pelestarian kesenian	477 orang/embaga	5.499.999.910	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat	477 orang/embaga	16.200.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			8.970.764.480				9.000.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 22 02 1.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			8.970.764.480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya		9.000.000.000	Dinas Kebudayaan	
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen	5.773.849.154				5 Persen	29.600.000.000	
2 22 03 1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina	518 lembaga/komunitas	5.773.849.154				518 lembaga/komunitas	600.000.000	
2 22 03 1.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			499.999.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/Lembaga/Komunitas Seni	8.800.000.000	Dinas Kebudayaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Lembaga/SDM Kesenian Tradisional yang terstandarisasi dan tersertifikasi	200 Lembaga	773.849.504	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/Lembaga/Komunitas Seni	200 Lembaga	8.000.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah SDM/Lembaga Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina	300 Lembaga/Komunitas	4.499.999.750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Masyarakat/Lembaga/Komunitas Seni	300 Lembaga/Komunitas	800.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen	492.271.620				5 Persen	5.288.350.000	
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM Tenaga Kesejarahan/Lembaga yang Terbina	119 Orang/Lembaga	492.271.620				119 Orang/Lembaga	5.288.350.000	
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber daya manusia/lembaga sejarah lokal provinsi yang memiliki pengetahuan sejarah lokal provinsi	100 Orang/Lembaga	292.271.620	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	SDM/Lembaga Sejarah serta Data dan Informasi Sejarah	100 Orang/Lembaga	4.888.350.000	Dinas Kebudayaan
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun	1 Purana	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	SDM/Lembaga Sejarah serta Data dan Informasi Sejarah	1 Purana	400.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	2.087.381.240				520 Cagar Budaya Dan Permuseuman	3.200.000.000	
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapkan	5 Cagar Budaya	150.000.000				5 Cagar Budaya	300.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	jumlah cagar budaya yang ditetapkan	5 Cagar Budaya	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya	5 Cagar Budaya	300.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Terkelola	80 Objek	1.937.381.240				80 Objek	2.900.000.000	
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Berkembang	80 objek	437.381.240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya dan Masyarakat	80 objek	500.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	5 Objek	1.500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Objek Cagar Budaya dan Masyarakat	5 Objek	2.400.000.000	Dinas Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.573.513.536					7.379.254.200	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	4.573.513.536				81 Poin	7.379.254.200	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	285.970.400				100 Persen	684.860.000	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	43 Jenis	199.995.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	43 Jenis	288.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	6 Jenis	15.092.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	6 Jenis	124.520.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (upacara keagamaan yang tersedia)	5 Jenis	45.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	5 Jenis	59.400.000	Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	8.496.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	4 Jenis	13.260.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	9 Jenis	8.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	9 Jenis	12.480.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12 Bulan	9.386.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	12 Bulan	187.200.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	264.413.000				100 Persen	312.000.000	
2	22	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan	4 Jenis	264.413.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	4 Jenis	312.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	2.607.951.832				100 Persen	4.073.883.000	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	1 Jenis	1.270.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	1 Jenis	1.990.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	884.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	3 Jenis	1.379.040.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat dengan baik	8 Jenis	213.880.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	8 Jenis	390.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	1.508.801.832	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	12 Bulan	2.302.853.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.415.178.304				100 Persen	2.308.511.200	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik	6 Kendaraan Dinas	163.770.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	6 Kendaraan Dinas	405.600.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	6 Jenis	199.450.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	6 Jenis	312.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor maupun bangunan lainnya yang terawat dengan baik	23 Gedung	1.051.958.304	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Taman Budaya	23 Gedung	1.590.911.200	Dinas Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.954.543.358					8.525.720.185	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	2.954.543.358				81 Poin	6.756.260.185	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana	100 Persen	271.587.720				100 Persen	1.048.950.000	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	35.976.720	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	8 jenis	81.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	2 jenis	95.146.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	2 jenis	216.000.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor (Upacara keagamaan) yang tersedia	3 jenis	101.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	3 jenis	391.500.000	Dinas Kebudayaan
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan	6 jenis	19.199.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	6 jenis	43.200.000	Dinas Kebudayaan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 jenis	5.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	1 jenis	14.850.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu layanan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana	12 bulan	14.766.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	12 bulan	302.400.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	356.412.000				100 Persen	810.000.000		
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai kebutuhan	12 jenis	356.412.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	12 jenis	810.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.010.553.578				100 Persen	2.407.386.860		
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	2 jenis	6.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	2 jenis	27.059.681	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 jenis	197.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	3 jenis	594.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	6 jenis	105.519.410	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	6 jenis	96.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12 bulan	701.784.168	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	12 bulan	1.690.327.179	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.315.990.060				100 Persen	2.489.923.325		
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terawat dengan baik	4 kendaraan	121.301.100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri		UPTD. Museum Bali	4 kendaraan	229.500.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang terawat dengan baik	4 jenis	67.270.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	4 jenis	135.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor maupun bangunan lainnya yang terawat dengan baik	18 gedung	1.127.418.960	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Museum Bali	18 gedung	2.125.423.325	Dinas Kebudayaan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.623.281.332						13.913.970.404	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin	3.623.281.332				81 Poin	9.791.589.830		
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			362.212.500					931.770.000		
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	31 Jenis	94.471.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	31 Jenis	270.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	48 Jenis	179.929.400	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	48 Jenis	189.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	6 Jenis	55.250.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	121.500.000	Dinas Kebudayaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	6 Jenis	15.066.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	27.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedia	3 Jenis	5.100.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3 Jenis	13.770.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Tersedia	12 Bulan	12.396.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	12 Bulan	310.500.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			18.000.000					270.000.000		
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jenis	18.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	1 Jenis	270.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100 Persen	1.724.068.944				100 Persen	5.216.346.000		
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	1 Jenis	2.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	1 Jenis	5.346.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	3 Jenis	450.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3 Jenis	1.215.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang Terpelihara dengan baik	6 Jenis	104.355.700	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	351.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu layanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	1.167.213.244	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	12 Bulan	3.645.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.518.999.888					3.373.473.830		
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	4 Kendaraan	150.050.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	4 Kendaraan	270.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang Terpelihara dengan baik	6 Jenis	102.180.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	6 Jenis	189.000.000	Dinas Kebudayaan	
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	1 Gedung	1.266.769.888	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD. Monumen Perjuangan Rakyat Bali	1 Gedung	2.914.473.830	Dinas Kebudayaan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			483.000.498.840						540.630.818.449	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai Evaluasi	19.467.155.745				82 Nilai Evaluasi	20.608.909.265		
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	9 Dokumen	22.267.800				9 Dokumen	83.297.665		
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	9 Dokumen	22.267.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	9 Dokumen	26.500.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	22	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses	52 Dokumen	9.224.258.024			52 Dokumen	11.659.511.600			
2	22	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang diproses	52 Dokumen	9.224.258.024	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	52 Dokumen	11.659.511.600	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan barang dan jasa administrasi umum perangkat daerah yang diproses	4096 Dokumen	1.341.046.600					4096 Dokumen	1.864.000.000	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan dan siap pakai	794 Unit	24.354.200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	794 Unit	46.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jasa penggandaan dan cetak yang diproses dan siap pakai	2937 Unit	67.831.400	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	2937 Unit	130.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	12 bulan	33.450.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	12 bulan	8.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakann	341 Kali	1.215.411.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	341 Kali	1.115.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dan siap pakai	15 Unit	2.903.853.209					15 Unit	2.510.000.000	
2	22	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diproses	15 Unit	2.903.853.209	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	15 Unit	2.510.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	176 Unit	4.479.089.212					176 Unit	1.072.100.000	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Unit alat Tulis Kantor yang tersedia dan siap pakai	35 Unit	4.479.089.212	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	35 Unit	180.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	66 Unit	1.496.640.900					66 Unit	3.420.000.000	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan siap pakai	6 Unit	939.808.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	6 Unit	810.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa kebersihan kantor dan taman yang dilaksanakan Jumlah Jasa Pemeliharaan Gedung kantor yang dilaksanakan	12 Bulan 12 Bulan	556.832.900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	12 Bulan 12 Bulan	1.900.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	09		PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Persentase Desa Adat yang berdaya dalam menyelenggarakan kegiatan Parahyangan, Pawongan dan Palembang	100 Persen	463.533.343.095					100 Persen	520.021.909.184	
2	22	09	1.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah keluaran pelaksanaan pembinaan kelembagaan Desa Adat	6652 Dokumen	457.752.498.075					6652 Dokumen	510.500.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 22 09 1.01 01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang telah memiliki lembaga pemerintahan sesuai ketentuan	300 Desa Adat	456.590.008.875	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat	300 Desa Adat	9.100.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2 22 09 1.01 02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Adat yang diregistrasi Jumlah Produk Hukum Adat yang Teraploud melalui Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT) Jumlah Wicara Adat Yang di Fasilitasi	1493 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	1.162.489.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat	1493 Produk Hukum 375 Produk Hukum 4 Wicara	1.400.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2 22 09 1.01 03	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan Jumlah Desa Adat yang menyampaikan dokumen penganggaran tepat waktu dan sesuai ketentuan Jumlah Juknis Pengelolaan Keuangan desa adat yang disusun Jumlah proposal pencairan dana desa adat yang diverifikasi	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat	1493 Desa Adat 1493 Desa Adat 1 Juknis 1493 Proposal	500.000.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
2	22	09	1.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	36 Dokumen	847.705.700			36 Dokumen	1.283.279.392		
2	22	09	1.02	01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah LPD Yang Meningkatkan Kriterianya Menjadi Sehat Jumlah Pararem LPD yang tersusun	15 LPD 1 Pararem	264.696.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat, LPLPD, LPD	15 LPD 1 Pararem	408.100.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	09	1.02	02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Pararem BUPDA yang tersusun Jumlah Pembentukan BUPDA yang difasilitasi	1 Pararem 15 BUPDA	583.009.700	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat, LPLPD, LPD	1 Pararem 15 BUPDA	518.959.792	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	22	09	1.03		Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Subak dan Subak Abian	2930 Dokumen 2930 Dokumen	914.533.000			2930 Dokumen 2930 Dokumen	1.110.675.792		
2	22	09	1.03	03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah data dan informasi potensi desa adat yang tersusun Jumlah laporan Pendataan Subak dan Subak Abian yang tersusun Jumlah proposal pencairan dana subak dan subak abian yang diverifikasi	1 Dokumen 1 Dokumen 2726 Dokumen	914.533.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat	1 Dokumen 1 Dokumen 2726 Dokumen	450.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2	22	09	1.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen, SDM, dan Lembaga Adat yang berkualitas	2330 Dokumen	4.018.606.320				2330 Dokumen	7.127.954.000	
2	22	09	1.04	03	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah buku/pedoman/juknis Lembaga Adat yang disusun Jumlah Paiketan/Pasikian Lembaga Adat yang dibentuk	3 buku/pedoman/juknis 2000 Paiketan/Pasikian	4.018.606.320	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur, MDA, Desa Adat dan Masyarakat	3 buku/pedoman/juknis 2000 Paiketan/Pasikian	6.000.000.000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			207.381.950					1.662.000.000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani Dengan Baik	52 Persentase	197.382.090				52 Persentase	1.462.000.000	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	85 %	197.382.090				85 %	1.462.000.000	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Bahan Pustaka yang Dikelola Dalam Basis Data	2500 Judul OPAC	9.999.850	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung Kab. Karangasem, Rendang, Besakih Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2500 Judul OPAC	700.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 23 02 1.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Minat Literasi	20 %	149.905.792	Kab. Buleleng, Buleleng, Paket Agung Kab. Karangasem, Rendang, Besakih Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	20 %	762.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 1.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Bertambahnya Koleksi Bahan Pustaka dan Meningkatnya Kualitas Fisik Bahan Pustaka	5000 Eks	37.476.448	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	5000 Eks	41.224.093	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	21 Persentase	9.999.860				21 Persentase	200.000.000	
2 23 03 1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	25 Judul	9.999.860				25 Judul	200.000.000	
2 23 03 1.03 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan	25 Judul	9.999.860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	25 Judul	200.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			24.620.119.825					21.822.000.000	
2 24 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	24.455.666.479				84 Nilai	19.797.000.000	
2 24 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	100 %	41.473.448				100 %	120.000.000	
2 24 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	41.473.448	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	120.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan	100 %	23.006.836.475				100 %	17.008.000.000	
2 24 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	6000 Dokumen	22.966.623.517	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	6000 Dokumen	17.000.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang Diverifikasi	15000 Dokumen	40.212.958	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	15000 Dokumen	8.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	258.815.800				100 %	660.000.000	
2 24 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia	1 Jenis	9.997.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Jenis	70.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tersedia	100 %	59.899.300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	100 %	65.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Upacara Keagamaan	2 Jenis	55.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Jenis	125.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Dokumen yang Dicetak dan Digandakan	3 Jenis	29.937.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Jenis	50.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 24 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Jenis	103.982.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Jenis	350.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	24	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	21.620.000			100 %	40.000.000			
2	24	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	10 Buah	3.720.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	10 Buah	4.092.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Tersedia	2 Jenis	17.900.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Jenis	40.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	387.002.724					100 %	859.000.000	
2	24	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Tersedia	1000 lembar	1.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1000 lembar	9.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	124.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	3 Jenis	450.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Kebersihan Kantor yang Terpenuhi	100 %	262.002.724	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	100 %	400.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	739.918.032					100 %	1.110.000.000	
2	24	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	2 Jenis	498.152.240	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Jenis	675.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	40.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 Unit	85.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Dipelihara	2 Jenis	201.765.792	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Jenis	350.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai Evaluasi Kearsipan	61 Nilai	164.453.346					61 Nilai	2.025.000.000	
2	24	02	1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola	100 %	37.476.448					100 %	200.000.000	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Lembaga yang Arsipnya Dimusnahkan	250 Box	37.476.448	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	250 Box	200.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02	1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Kearsipan	20 %	126.976.898					20 %	1.825.000.000	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Pengguna Arsip yang Terlayani	400 Pengguna Arsip 4 Kali Layanan Arsip	10.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	400 Pengguna Arsip 4 Kali Layanan Arsip	600.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	LAKI dan LAKE, Kualitas Profesionalisme Pengelola Arsip di Perangkat Daerah dan Tenaga Pengelola Arsip	35 Dokumen 30 Pengelola Arsip	116.976.898	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	35 Dokumen 30 Pengelola Arsip	1.225.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				13.601.256.707					16.727.999.914	
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.863.299.047					15.921.049.598	
3	25	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.189.299.561					12.867.694.496	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	11.189.299.561	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan		1 tahun	12.867.694.496	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3	25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	145.389.410			1 Tahun	405.592.210		
3	25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	23.627.210	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	33.627.210	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	1 Tahun	75.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 Tahun	16.972.200	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	21.965.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Tahun	1 Tahun	29.790.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	250.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	2.000.000				1 Tahun	295.000.000	
3	25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Tahun	2.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	295.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	119.365.076				1 Tahun	139.865.076	
3	25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	3.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 Tahun	116.365.076	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	136.365.076	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1.407.245.000				1 Tahun	2.212.897.816	
3	25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala	1 Tahun	533.182.584	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	921.385.400	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	691.512.416	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	991.512.416	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dinas secara rutin/berkala	1 Tahun	182.550.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur Pemerintah	1 Tahun	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4 kelompok	149.952.896				4 kelompok	170.000.000	
3	25 02 1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya kesejahteraan petani garam	4 Kelompok	149.952.896				4 Kelompok	170.000.000	
3	25 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitasi	4 kelompok	149.952.896	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat Pesisir	4 kelompok	170.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	105.165,51 Ton	438.052.048				105.165,51 Ton	277.475.168	
3	25 03 1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan Perikanan Tangkap	1 Dokumen	438.052.048				1 Dokumen	277.475.168	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 25 03 1.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan (SDI)	1 Dokumen	37.476.448	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak Kab. Gianyar, Gianyar, Lebih Kab. Jembrana Negara, Pengambenga Kab. Karangasem, Kubu, Sukadana Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Tabanan, Tabanan, Sudimara Kota Denpasar Denpasar Selatan, Serangan		Kelompok Nelayan	1 Dokumen	77.475.168	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisai Perizinan Perikanan Tangkat	30 Orang	400.575.600	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak Kab. Gianyar, Gianyar, Lebih Kab. Jembrana Negara, Pengambenga Kab. Karangasem, Kubu, Sukadana Kab. Klungkung, Dawan, Kusamba Kab. Tabanan, Tabanan, Sudimara Kota Denpasar Denpasar Selatan, Serangan		Kelompok Nelayan	30 Orang	200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	18.981,2 Ton	37.476.448				18.981,2 Ton	59.475.148	
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Data dan Informasi Sebaran Hama Penyakit Ikan	4 Kabupaten	37.476.448				4 Kabupaten	59.475.148	
3 25 04 1.05 06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan	4 Kabupaten	37.476.448	Kab. Buleleng, Gerokgak, Gerokgak Kab. Jembrana, Melaya, Candikusuma Kab. Jembrana, Melaya, Tuwed Kab. Jembrana, Jembrana, Budeng Kab. Karangasem, Kubu, Sukadana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Suana Kab. Klungkung, Nusa Penida, Lembongan		Kelompok Nelayan	4 Kabupaten	59.475.148	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
3	25	06												
3	25	06	1.02											
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan	240 Paket	112.476.268	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	1. Pelaku Usaha 2. Masyarakat, Anak-Anak Stunting dan Ibu Hamil	240 Paket	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.126.097.117					5.855.284.840	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4.026.097.347					5.355.284.840	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.461.435.363					4.639.584.840	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	3.461.435.363	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	1. Pangan, Sandang dan Papan		12 bulan	4.639.584.840	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor, terselenggaranya upacara keagamaan, jenis pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	3 jenis	36.004.600				3 jenis	59.700.000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	1.434.600	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Jembrana, Negara, Tegal Badeng Barat Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Seluruh Bangunan Kantor UPTD	12 bulan	1.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	5 jenis	3.570.000	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Jembrana, Negara, Tegal Badeng Barat Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Seluruh Bangunan Kantor UPTD	5 jenis	13.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselesaikannya Upacara Keagamaan	12 bulan	30.000.000	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan		Seluruh Bangunan Kantor UPTD	12 bulan	40.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	1.000.000	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	1. Pangan, Sandang dan Papan	Seluruh Bangunan Kantor UPTD	12 bulan	5.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya surat menyurat	12 bulan	81.400.000				12 bulan	126.000.000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	500.000	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	1. Pangan, Sandang dan Papan	Semua administrasi perkantoran	12 bulan	1.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	80.900.000	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Jembrana, Negara, Tegal Badeng Barat Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Semua administrasi perkantoran	12 bulan	125.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3	25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	4 buah	447.257.384			4 buah	530.000.000		
3	25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	5 jenis	124.727.896	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	1. Pangan, Sandang dan Papan	Jenis kendaraan dinas	5 jenis	180.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor, terselenggaranya kebersihan kantor, terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	322.529.488	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Jenis kendaraan dinas	12 bulan	350.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			99.999.770				500.000.000		
3	25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			99.999.770				500.000.000		
3	25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul	12 bulan	99.999.770	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Jembrana, Negara, Tegal Badeng Barat Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	1. Pangan, Sandang dan Papan		12 bulan	500.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		2.707.733.838				4.050.797.603		
3	25 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.487.737.238				3.341.042.603		
3	25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.934.937.454				2.439.775.707		
3	25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN Nilai evaluasi manajemen kinerja Persentase terbayarnya gaji dan tunjangan tepat waktu	52 dokumen 78 persen 100 persen	1.934.937.454	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			52 dokumen 78 persen 100 persen	2.439.775.707	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			35.391.000				42.500.000		
3	25 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.391.000				6.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			33.000.000				30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168.600.000				351.500.000		
3	25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan		1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			72.600.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			95.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan		200.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			348.808.784				507.266.896		
3	25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			123.950.096	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1. Pangan, Sandang dan Papan		132.266.896	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			37.476.448				75.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan			
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	4.950 Sampel	219.996.600		4.950 Sampel	709.755.000			
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			219.996.600			709.755.000			
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Produk Perikanan Yang Diuji	4950 Sampel	211.496.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat Umum, Unit Pengolah Ikan	4950 Sampel	570.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah UPI Yang Disurveilance	10 UPI	8.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat Umum, Unit Pengolah Ikan	10 UPI	139.755.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.185.512.601					2.263.787.182	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.185.512.601					2.263.787.182	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.648.271.788					1.887.518.782	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	1.648.271.788	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kawasan	1.887.518.782	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			36.247.885					190.304.400	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	2.300.800	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kawasan	1.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	12.479.085	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kawasan	120.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	10.000.000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kawasan	36.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	2.468.000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 Kawasan	1.940.400	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	9.000.000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Kawasan	30.564.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.200.000				7.020.000		
3 25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	1.200.000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Kawasan	7.020.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.400.000				21.480.000		
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	1.000.000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Kawasan	1.200.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	8.400.000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Kawasan	20.280.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			490.392.928				157.464.000		
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	73.282.000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Kawasan	144.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	412.240.928	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	1 Kawasan	12.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1 Kawasan	4.870.000	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Kawasan	1.464.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.226.440.618				2.746.187.267		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.226.440.618				2.746.187.267		
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.019.497.882				2.211.881.667		
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	100 persen	2.019.497.882	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persen	2.211.881.667	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			51.281.060				254.305.600		
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	100 persen	2.024.800	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 persen	8.977.600	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	100 persen	8.298.260	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	130.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	100 persen	30.000.000	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	65.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	100 persen	2.708.000	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	5.328.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	100 persen	8.250.000	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.560.780					35.000.000		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	100 persen	16.560.780	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	35.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			139.100.896					245.000.000		
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	100 persen	64.148.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkap di pelabuhan	100 persen	74.952.896	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	95.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			16.033.289.677						23.803.000.000	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	14.007.242.348				82 Nilai	15.878.000.000		
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	119.711.704				22 Dokumen	125.000.000		
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6 Dokumen	42.723.098	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	6 Dokumen	55.000.000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	16 Dokumen	76.988.606	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	16 Dokumen	70.000.000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	534 Dokumen	12.587.132.632				534 Dokumen	14.000.000.000		
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	86 Dokumen	12.587.132.632	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	86 Dokumen	14.000.000.000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	87.428.825				6 Jenis	232.000.000		
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik dan baterai yang disediakan	5 Jenis	3.593.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	5 Jenis	7.000.000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat-alat kantor yang disediakan	25 Jenis	11.567.525	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	25 Jenis	18.000.000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah upacara keagamaan yang dilaksanakan	4 Jenis	55.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	4 Jenis	56.000.000	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6.798.300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	6 Jenis	10.000.000	Dinas Pariwisata	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 26 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan	1 Jenis	2.220.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	1 Jenis	11.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	2 Jenis	8.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	2 Jenis	130.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang usuran Pemerintah Daerah yang disediakan	7 Jenis	344.140.823				7 Jenis	385.000.000	
3 26 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah material dan benda pos untuk kelancaran administrasi	1 Jenis	2.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	1 Jenis	5.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya langganan telepon, air, dan listrik	3 Jenis	138.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	3 Jenis	160.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan gedung kantor dan penataan taman	2 Jenis	204.140.823	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	2 Jenis	220.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	868.828.364				3 Jenis	1.136.000.000	
3 26 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat transportasi yang dipelihara	4 Jenis	178.532.300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	4 Jenis	400.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya urusan pemerintah	3 Jenis	674.576.064	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	3 Jenis	676.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	3 Jenis	15.720.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	5. Pariwisata	Aparatur	3 Jenis	60.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Produk Pariwisata yang Kreatif dan Inovatif	50 Persen	574.721.070				50 Persen	1.025.000.000	
3 26 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing	105 DTW	88.584.620				105 DTW	400.000.000	
3 26 02 1.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Tersusunnya Buku Daya Tarik Wisata Provinsi Bali	100 Buku	88.584.620	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	100 Buku	400.000.000	Dinas Pariwisata

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3	26	02	1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pedoman Jalur wisata yang berpihak pada masyarakat lokal	1 Dokumen	268.806.254				1 Dokumen	250.000.000		
3	26	02	1.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersusunnya Buku Acuan Pola Perjalanan Wisata Deskriptif Melalui Jalur Darat di Bali	1 Dokumen	268.806.254	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kewenangan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan	3 Usaha Pariwisata	217.330.196				3 Usaha Pariwisata	375.000.000		
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah buku direktori Usaha Pariwisata yang tersusun Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	195 Buku 130 Usaha Pariwisata	179.252.896	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Usaha Pariwisata	195 Buku 130 Usaha Pariwisata	375.000.000	Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah industri dan usaha pariwisata yang sesuai standar	9 Usaha Pariwisata	38.077.300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Usaha Pariwisata	9 Usaha Pariwisata	41.885.030	Dinas Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	46.300.000 Rupiah.	587.684.991				46.300.000 Rupiah.	3.910.000.000	
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	2754700 Orang	587.684.991				2754700 Orang	3.910.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 26 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah tayangan informasi pariwisata di media	9000 Tayangan	229.170.486	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	9000 Tayangan	1.000.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah informasi kepariwisataan yang tersampaikan melalui media teknologi	1 Dokumen	84.467.551	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	1 Dokumen	210.000.000	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah sarana promosi wisata digital	4 Video Promosi	274.046.954	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Calon Wisatawan	4 Video Promosi	2.700.000.000	Dinas Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kunjungan berulang wisatawan mancanegara dan nusantara	0	345.669.254				0	690.000.000	
3 26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif	9 Sarana dan Prasarana	195.552.806				9 Sarana dan Prasarana	490.000.000	
3 26 04 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Jaringan Orang Kreatif Jumlah Ruang Kreasi	9 Jaringan 9 Ruang Kreasi	60.299.955	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur, Masyarakat, dan Wisatawan	9 Jaringan 9 Ruang Kreasi	300.000.000	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 26 04 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	18 Usaha	135.252.851	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata Aparatur, Masyarakat, dan Wisatawan	18 Usaha	190.000.000	Dinas Pariwisata	
3 26 04 1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	9 Ekosistem	150.116.448			9 Ekosistem	200.000.000		
3 26 04 1.02 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan ekraf berbasis budaya bali yang disusun	1 Dokumen	150.116.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata Aparatur dan Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000	Dinas Pariwisata	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat ditempatkan sesuai dengan kompetensinya	0	517.972.014			0	2.300.000.000			
3	26	05	1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	120 Orang 205 Orang	517.972.014			120 Orang 205 Orang	2.300.000.000			
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata yang mendapatkan pelatihan	65 Orang	182.429.264	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	65 Orang	500.000.000	Dinas Pariwisata
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata	73 Orang	189.173.544	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	73 Orang	300.000.000	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 26 05 1.01 09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pelatihan	67 Orang	146.369.206	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5. Pariwisata	Aparatur dan Masyarakat	67 Orang	1.500.000.000	Dinas Pariwisata
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.158.311.646			1.088.722.867			
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kelompok Yang Memanfaatkan Lahan Pekarangan Dan Pengolah Hasil Pertanian	3,73 Persen	252.360.688				3,73 Persen	305.356.431	
2 09 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan,	18 kelompok	252.360.688				18 kelompok	305.356.431	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 09 03 1.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan Jumlah Kelompok yang mengikuti bimtek pengolahan dan pemasaran hasil di 9 Kab/Kota kajian sentra daging di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar	18 kelompok 9 kelompok	252.360.688	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Kelompok Tani Ternak	18 kelompok 9 kelompok	305.356.431	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.500 kkal/kapita/hari	547.207.024				2.500 kkal/kapita/hari	555.000.000	
2 09 04 1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Data Indikator FSVA, Jumlah Buku NBM	2 dokumen	207.386.640				2 dokumen	328.000.000	
2 09 04 1.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Indikator FSVA dan jumlah buku NBM	2 dokumen	207.386.640	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	OPD Kabupaten/Kota, OPD Provinsi dan Dinas terkait	2 dokumen	328.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang di bina	3 unit	339.820.384				3 unit	227.000.000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 09 04 1.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	3 Unit	339.820.384	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Lumbung Pangan Masyarakat	3 Unit	227.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	82 Persen	358.743.934				82 Persen	228.366.436	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang diuji	20 sampel	358.743.934				20 sampel	228.366.436	
2 09 05 1.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji	20 Sampel	358.743.934	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	0	20 Sampel	228.366.436	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						63.295.194.408	38.175.387.533					
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai				56.620.464.671	84 Nilai	31.713.406.136				
3	27	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen			619.134.520	6 Dokumen	649.973.000				
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersedia	2 Dokumen		329.811.484	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Dokumen	347.628.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia	1 Dokumen		289.323.036	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Dokumen	302.345.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen			51.953.083.364				1 Dokumen	27.091.182.136	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jenis Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jenis		51.549.582.884	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	26.636.193.136	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	1 Jenis		403.500.480	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	454.989.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	4 Jenis			371.283.395				4 Jenis	142.991.000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen alat-alat listrik yang disediakan dan siap pakai	2 Jenis		64.892.580	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	21.991.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai	1 Tahun		50.435.515	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	22.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang diadakan	3 Jenis		205.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	77.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis alat tulis dan peralatan kantor yang siap pakai	10 Jenis		50.955.300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	10 Jenis	22.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	2 Jenis			602.000.000				2 Jenis	880.000.000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang terbayar tepat waktu	3 Jenis		402.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	660.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan/lingkungan dalam keadaan bersih	1 Tahun		200.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	220.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	3 Jenis			3.074.963.392				3 Jenis	2.949.260.000	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan siap pakai	2 Jenis		2.050.240.224	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	1.926.795.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 Unit		824.623.168	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Unit	907.086.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang terpelihara	4 Jenis		200.100.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	115.379.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penyaluran Sarana Pertanian	90 Persen	5.173.750.861				90 Persen	3.720.155.928	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	9 Kabupaten/Kota	375.050.142				9 Kabupaten/Kota	275.000.000	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	18 Kali	375.050.142	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak	18 Kali	275.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Perkebunan	80 %	2.314.382.971				80 %	2.795.988.218	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Buku Laporan SP Tanaman Pangan dan Hortikultura Meningkatnya luas pengembangan tanaman buah Meningkatnya mutu tanaman sayuran Meningkatnya produksi buah-buahan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hortikultura Pelaksanaan kegiatan promosi produk pertanian TPH	5 Buku 2 Hektar 2 Hektar 2 Kelompok Tani/Subak 1 Paket 1 Kali	619.660.751	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	5 Buku 2 Hektar 2 Hektar 2 Kelompok Tani/Subak 1 Paket 1 Kali	857.626.936	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani/Subak Sawah yang menghasilkan padi hibrida	7 Kelompok	357.528.396	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	7 Kelompok	522.448.076	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jenis Pengadaan, Fasilitas Alat Sarana dan Prasarana Komoditas Tembakau Peningkatan Kopetensi Petani dan Petugas Dalam Budidaya Tembakau	2 Jenis 150 Petani dan Petugas	1.337.193.824	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani/Subak Abian	2 Jenis 150 Petani dan Petugas	1.415.913.206	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Yang Menerima Bibit Ternak dan Kelompok Yang Memahami Kualitas Pakan	42 Kelompok	2.484.317.748				42 Kelompok	649.167.710	
3 27 02 1.04 01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Data Peternakan Jumlah Yang Menerima Bibit Ternak	3 Jenis 30 kelompok	2.484.317.748	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani Ternak	3 Jenis 30 kelompok	649.167.710	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15 Persen	994.572.588				15 Persen	1.093.926.359	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1). Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, 2). Terlaksananya Koordinasi, Sinsinkronisasi serta Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani serta 3). Koordinasi ,Sinsinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Kegiatan	994.572.588				3 Kegiatan	1.093.926.359	
3 27 03 1.01 02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terbinanya Perusahaan Besar Swasta/Negara Komoditas Perkebunan Tersedianya Alat Pamarut Kelapa Tersedianya Gerobak Dorong/Arco Tersedianya Mesin Pemetong Rumput	3 PBSN 35 Unit 18 Unit 6 Unit	696.040.880	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Subak Abian/Kelompok Tani	3 PBSN 35 Unit 18 Unit 6 Unit	765.541.480	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian di 9 Kabupaten/Kota	3 Jenis	298.531.708	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Subak Abian/Kelompok Tani	3 Jenis	328.384.879	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentasen Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen	373.292.944				5 Persen	1.408.284.130	
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Ternak Hewan yang Tervaksin dan Jumlah Ternak/Hewan yang dieleminasi	52700 dosis/ekor	315.692.896				52700 dosis/ekor	1.326.637.620	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengawasan Lalu Lintas Ternak/Hewan Jumlah Ternak/Hewan yang Dieleminasi Jumlah Ternak/Hewan yang Tervaksin	9 lokasi 500 ekor 52200 dosis	315.692.896	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Hewan Ternak dan Aparat	9 lokasi 500 ekor 52200 dosis	1.326.637.620	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 04 1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	2 kali	57.600.048				2 kali	81.646.510	
3 27 04 1.05 02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan	2 kali	57.600.048	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	petugas RPH dan Jagal	2 kali	81.646.510	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	15 Persen	133.113.344				15 Persen	239.614.980	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok tani	20 Kelompok	133.113.344				20 Kelompok	239.614.980	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Tani yang Terbina	25 Kelompok	133.113.344	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok tani	25 Kelompok	239.614.980	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	133.756.157				84 Nilai	210.540.000	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 jenis	133.756.157				2 jenis	210.540.000	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	3 jenis	71.906.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 jenis	98.010.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis bangunan kantor yang dipelihara	6 gedung	61.850.157	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	6 gedung	112.530.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Padi Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran	5 Persen	780.346.392				5 Persen	934.781.990	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Benih Padi Bersertifikat yang Beredar di Pasaran	3 jenis	780.346.392				3 jenis	934.781.990	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih yang diterbitkan	25 sertifikat	205.682.290	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Produsen Benih, Pedagang benih, petani dan Areal Penyebaran Varietas	25 sertifikat	292.880.350	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah sampel pengujian mutu benih	97 sample	249.853.218	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Produsen Benih, Pedagang benih, petani dan Areal Penyebaran Varietas	97 sample	248.880.350	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengenalan Varietas Tanaman Pangan Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Benih Tersedia Data Inventarisasi Penyebaran Varietas	10 varietas 12 Laporan 12 laporan	324.810.884	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Produsen Benih, Pedagang benih, petani dan Areal Penyebaran Varietas	10 varietas 12 Laporan 12 laporan	393.021.290	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.351.311.196					
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	187.635.000			84 Nilai	262.938.350			
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Jenis	187.635.000			2 Jenis	262.938.350			
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	3 Jenis	110.000.000	Kab. Buleleng, Seririt, Tanguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	169.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih	1 Paket	77.635.000	Kab. Buleleng, Seririt, Tanguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket	93.938.350	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.	5 persen	1.449.149.328					5 persen	1.088.372.846	
3	27	05	1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	9 Kab/Kota	1.449.149.328					9 Kab/Kota	1.088.372.846	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Kab	474.717.056	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	2 Kab	438.368.452	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura	2 Kab	474.715.856	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	2 Kab	438.368.452	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terkendalinya Tanaman Pangan dan Hortikultura dari serangan OPT dan DPI	9 Kab/kota	499.716.416	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani (Subak)	9 Kab/kota	211.635.942	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3										
3	27									
3	27	01								
3	27	01	1.08							
3	27	01	1.08	02						
3	27	01	1.08	04						
3	27	02								
3	27	02	1.02							
3	27	02	1.02	02						
3	27	02	1.02	03						
3										
3	27									
3	27	01								
3	27	01	1.08							
3	27	01	1.08	02						
3	27	02								
3	27	02	1.02							
3	27	02	1.02	01						

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Benih kelapa salak yang berkualitas Entres kopi robusta Jumlah produksi kopi arabika	1750 butir 50000 ros 1000000 butir	1.080.545.020	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	1750 butir 50000 ros 1000000 butir	1.190.076.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	1 Jenis	1.186.299.830				1 Jenis	1.331.000.000		
3 27 02 1.03 04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah perakitan marigold (gumitir) warna warni, pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	1 paket	1.186.299.830	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat	1 paket	1.331.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.347.200.248					1.131.948.508		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	177.907.513					84 Nilai	215.915.700	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	2 Jenis	177.907.513					2 Jenis	215.915.700	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	101.170.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 jenis	122.415.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung yang di Bersihkan	3 Gedung	76.737.513	Kab. Gianyar, Gianyar, Gianyar Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Gedung	93.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Yang Ramah Lingkungan.	5 persen	1.169.292.735					5 persen	916.032.808	
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	55 persen	1.169.292.735					55 persen	916.032.808	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Bahan Metabolit Sekunder APH Jumlah Biakan Sebar Trichoderma. SP	550 Liter 500 Kilogram	587.146.225	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	550 Liter 500 Kilogram	438.368.029	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang dibina untuk perbanyakkan APH dan penanganan dampak perubahan iklim (DPI)	2 Kelompok	582.146.510	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	2 Kelompok	477.664.779	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			1.289.016.707					1.711.885.000	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	60.200.000				84 Nilai	75.045.000	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa komunikasi sumberdaya listrik air	2 Jenis	60.200.000				2 Jenis	75.045.000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Jenis	25.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aperatur	2 Jenis	28.193.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jenis	35.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aperatur	1 Jenis	46.852.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pertanian Organik Yang Produktif	21 Persen	1.228.816.707				21 Persen	1.636.840.000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	1 kawasan	1.228.816.707				1 kawasan	1.636.840.000	
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah kawasan pertanian organik yang produktif	1 Kawasan	633.146.480	Kab. Bangli, Kintamani, Buahon	1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	1 Kawasan	761.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah kelompok tani pengolah pupuk organik yang dibina	75 Kelompok	595.670.227	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan 1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani	75 Kelompok	875.590.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.315.490.508				2.376.114.620	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	186.820.816				84 Nilai	225.957.490	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH JENIS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2 Jenis	186.820.816				2 Jenis	225.957.490	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JUMLAH JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG TERBAYAR TEPAT WAKTU	3 JENIS	30.000.000	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 JENIS	36.300.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JUMLAH RUANGAN/LINGKUNGAN KANTOR DALAM KEADAAN BERSIH	4 JENIS	156.820.816	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 JENIS	189.657.490	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Semen	81 Persen	1.128.669.692				81 Persen	2.150.157.130	
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	JUMLAH SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI	3 Jenis	1.128.669.692				3 Jenis	2.150.157.130	
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	JUMLAH PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI BENIH/BIBIT	2 PAKET	1.128.669.692	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 PAKET	2.150.157.130	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.086.968.120	1.133.846.040				
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai		218.775.296			84 Nilai	264.718.140		
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	3 jenis		218.775.296			3 jenis	264.718.140		
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	3 jenis	142.824.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 jenis	172.817.040	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih	4 jenis	75.951.296	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 jenis	91.901.100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner	84.97 Nilai		868.192.824				84.97 Nilai	869.127.900	
3	27	04	1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan dan produk hewan yang teridentifikasi	10000 sampel		868.192.824				10000 sampel	869.127.900	
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah sampel penyakit hewan dan produk hewan yang teridentifikasi	10000 sampel	346.382.240	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	10000 sampel	419.122.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif			
3 27 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan hasil uji	75 laporan	521.810.584	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Negara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	75 laporan	450.005.400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			867.287.222						1.094.422.100		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84 Nilai	105.235.000						84 Nilai	127.334.000	
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	2 Jenis	105.235.000						2 Jenis	127.334.000	
2 09 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Listrik dan Jasa Komunikasi	2 jenis	59.400.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 jenis	71.874.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ruangan/lingkungan kantor dalam keadaan bersih	1 Tahun	45.835.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	55.460.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Bersertifikat Keamanan Pangan	3 Persen	762.052.222						3 Persen	967.088.100	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang Tersertifikasi dan Registrasi	2 PSAT	762.052.222						2 PSAT	967.088.100	
2 09 05 1.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang disertifikasi	2 PSAT	362.287.987	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha PSAT dan Kelompok Pelaku Usaha PSAT	2 PSAT	491.509.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
2 09 05 1.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha PSAT yang teregistrasi	2 PSAT	399.764.235	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha PSAT dan Kelompok Pelaku Usaha PSAT	2 PSAT	475.578.400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						802.670.182	835.191.524					
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Bibit Ternak	10 Persen				802.670.182	10 Persen	835.191.524				
3	27	02	1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Jenis			802.670.182	1 Jenis	835.191.524				
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Jenis HPT yang dipelihara dan Jumlah jenis ternak yang terpelihara	5 Jenis		802.670.182	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	1. Pangan, Sandang dan Papan	Kelompok Tani Ternak Dan Krama Bali	5 Jenis	835.191.524	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						512.334.707			5.843.992.584			
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan	75 persen			212.429.240				75 persen	1.256.197.800	
2	11	02	1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen IKLH dan IKPLHD Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	2 dokumen 1 dokumen			212.429.240				2 dokumen 1 dokumen	1.256.197.800	
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS	1 dokumen		212.429.240	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Para pelaku usaha dan masyarakat	1 dokumen	1.256.197.800	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	4,87 persen			34.999.800				4,87 persen	3.542.794.784	
2	11	03	1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 tahun			34.999.800				1 tahun	3.542.794.784	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah danau yang dianalisa Jumlah sampel pesisir laut yang dianalisa Jumlah titik sampel air sungai yang dianalisa Jumlah titik sampel udara yang dianalisa	4 danau 13 kawasan pariwisata 14 sungai 3 kawasan industri	34.999.800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	9 Kab/Kota	4 danau 13 kawasan pariwisata 14 sungai 3 kawasan industri	3.542.794.784	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	26,73 persen	264.905.667				26,73 persen	1.045.000.000	
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah	9 kab/kota	264.905.667				9 kab/kota	1.045.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kabupaten/kota dan desa adat/desa/kelurahan yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka pengelolaan sampah berbasis sumber melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta Jumlah kabupaten/kota yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi dalam tata laksana pengelolaan LB3	9 kab/kota	264.905.667	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat di 9 Kabupaten/Kota se-Bali	9 kab/kota	1.045.000.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		15.550.998.027						21.210.483.181	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	15.207.912.373				79	20.636.031.581	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	2 dokumen	40.827.720				2 dokumen	222.845.680	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	40.827.720	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	222.845.680	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	11.473.344.957				1 tahun	14.881.337.713	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	11.427.802.482	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	14.835.795.113	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan Jumlah SPJ yang diverifikasi Jumlah laporan keuangan yang disusun	55 dokumen 37 dokumen 600 dokum 14 laporan	45.542.475	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	55 dokumen 37 dokumen 600 dokumen 14 laporan	45.542.600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	624.427.430				1 tahun	1.379.728.868	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	16.266.750	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	33.549.950	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	55.670.880	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	124.845.400	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	93.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	178.338.720	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	42.001.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	46.509.700	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan	1 tahun	12.970.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	29.282.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	1 tahun	42.750.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	172.697.250	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	361.768.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	794.505.848	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	341.654.104				1 tahun	461.324.600	
3 28 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	341.654.104	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	461.324.600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	557.643.032				1 tahun	678.011.400	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	187.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	262.739.400	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	370.443.032	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	415.272.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	2.170.015.130				1 tahun	3.012.783.320	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	1.023.019.936	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	1.465.400.680	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	437.401.370	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	569.843.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	709.593.824	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 tahun	977.539.640	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3,04 persen	155.609.496				3,04 persen	250.000.000	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 tahun	155.609.496				1 tahun	250.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kawasan hutan Jumlah movev penggunaan kawasan hutan Jumlah pembinaan dan movev industri Jumlah penanganan kasus kehutanan Jumlah pengendalian ilegal logging, perambahan dan kebakaran hutan	2 kajian teknis 2 pengguna 5 industri 2 kasus 20 patroli	155.609.496	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2 kajian teknis 2 pengguna 5 industri 2 kasus 20 patroli	250.000.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	4,83 persen	187.476.158				4,83 persen	324.451.600	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam DaerahKab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 tahun	187.476.158				1 tahun	324.451.600	
3 28 06 1.01 02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	JUmlah gerakan penanaman bersama Gotong Royong Sad Kerthi Jumlah monitoring dan evaluasi KBR dan KBD di 4 KPH Jumlah monitoring dan evaluasi Perhutanan Sosial Jumlah pengembangan hutan rakyat pada lahan kritis/agak kritis Jumlah peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan Jumlah terfasilitasinya dokumen perencanaan Perhutanan Sosial Jumlah tersusunnya rencana kelola pada kelompok Perhutanan Sosial	4 lokasi 4 lokasi 20 kelompok 5 hektar 32 lokasi 10 kelompok 5 kelompok	187.476.158	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Wilayah UPTD KPH se-Bali	4 lokasi 4 lokasi 20 kelompok 5 hektar 32 lokasi 10 kelompok 5 kelompok	324.451.600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3										
3										
3	28									
3	28	01								
3	28	01	1.02							
3	28	01	1.02	01						
3	28	01	1.06							
3	28	01	1.06	01						
3	28	01	1.06	02						
3	28	01	1.06	04						
3	28	01	1.06	05						
3	28	01	1.08							
3	28	01	1.08	02						
3	28	01	1.08	04						
3	28	01	1.09							
3	28	01	1.09	02						
3	28	01	1.09	11						
3										
3	28									
3	28	01								
3	28	01	1.02							
3	28	01	1.02	01						
3	28	01	1.06							
3	28	01	1.06	01						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	25.116.245	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	58.564.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	38.000.000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	109.807.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	2.496.200	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	36.602.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	58.566.548				1 tahun	183.012.500		
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	18.600.000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	73.205.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	39.966.548	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	109.807.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	518.661.184				1 tahun	562.127.500		
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	508.681.184	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	489.115.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	9.980.000	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Timur	1 tahun	73.012.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			4.465.039.183						5.691.537.413	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	4.465.039.183						5.691.537.413
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	4.028.368.833						4.788.695.913
3 28 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	4.028.368.833	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	4.788.695.913	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	95.108.800						317.201.500
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	2.219.500	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	36.602.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	11.999.300	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	58.564.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	25.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	109.807.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	2.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	36.602.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1 tahun	53.390.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	75.625.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	143.481.502						183.012.500
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	28.495.242	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	73.205.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	114.986.260	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	109.807.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	198.080.048				1 tahun	402.627.500	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	188.090.048	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	219.615.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	9.990.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Selatan	1 tahun	183.012.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			2.463.337.430					3.845.142.491	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79	2.463.337.430			79	3.845.142.491	
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	2.119.528.312			1 tahun	3.078.425.991	
3 28 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	2.119.528.312	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	3.078.425.991	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun	65.426.100			1 tahun	241.576.500	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	1 tahun	2.994.700	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	36.602.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	29.993.500	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	58.564.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	30.000.000	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	109.807.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	2.437.900	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	36.602.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	61.376.348			1 tahun	183.012.500	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan komunikasi, listrik dan air	1 tahun	21.400.000	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	73.205.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	39.976.348	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	109.807.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun	217.006.670			1 tahun	342.127.500	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	169.550.222	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	219.615.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3 28 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	47.456.448	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD KPH Bali Barat	1 tahun	122.512.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2.758.156.524						
3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79				2.758.156.524					
3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun				1.918.224.654					
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1.918.224.654	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	2.113.952.524	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun		64.939.100				1 tahun	241.576.500		
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	2.470.100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	36.602.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	29.975.100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	58.564.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	30.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	109.807.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	2.493.900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	36.602.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun		39.517.648				1 tahun	73.205.000		
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor	1 tahun	39.517.648	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	73.205.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun		105.776.000				1 tahun	329.422.500		
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	95.860.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	219.615.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	9.916.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1 tahun	109.807.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							1.941.070.772			1.957.230.729	
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79		1.941.070.772				79	1.957.230.729		
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun		1.683.684.022				1 tahun	1.804.805.929		
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1.683.684.022	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	1.804.805.929	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun		7.368.510				1 tahun	21.587.500		
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	3.330.510	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	17.171.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	4.038.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	4.416.500	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun		17.286.000			1 tahun	62.750.600		
2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	17.286.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	62.750.600	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun		232.732.240				1 tahun	68.086.700	
2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	232.732.240	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	1 tahun	68.086.700	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				6.508.061.856					20.547.650.978	
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79		2.284.106.788				79	3.676.564.678	
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun		1.753.683.100				1 tahun	1.915.248.678	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1.753.683.100	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	1.915.248.678	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 tahun		73.875.000				1 tahun	108.020.000	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	5.445.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	1 tahun	10.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	14.795.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	1 tahun	55.875.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	77.000.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetak dan penggandaan	1 tahun	5.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	10.780.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1 tahun		456.548.688				1 tahun	1.653.296.000	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 tahun	346.278.688	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	840.000.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 tahun	100.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	425.700.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun	10.270.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	6. Penguatan Infrastruktur	UPTD Pengelolaan Sampah	1 tahun	387.596.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 persen		4.223.955.068				100 persen	16.871.086.300	
2	11	11	1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	1 tahun		4.223.955.068				1 tahun	16.871.086.300	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah pembelian bahan kimia; Jumlah pembelian material tanah penutup TPA Regional Jumlah pemrosesan akhir di TPA Regional	1 paket 1 paket 1 tahun	1.418.945.408	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 paket 1 paket 1 tahun	6.350.000.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah pemeliharaan eco park Jumlah pemeliharaan IPAL TPA Regional Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan TPA Regional	1 paket 1 paket 1 tahun	2.630.936.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 paket 1 paket 1 tahun	7.624.685.902	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Penanganan Khusus di TPA Regional	1 tahun	9.868.110	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	868.426.848	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah koordinasi dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA Regional	1 tahun	77.205.050	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	275.000.000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kerjasama dengan pihak lain di TPA Regional	1 tahun	87.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pedungan	6. Penguatan Infrastruktur	TPA Regional	1 tahun	1.752.973.550	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			16.826.896.875					17.715.000.000	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.2 Nilai	15.688.390.291				82.2 Nilai	16.330.000.000	
3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	11.784.064.363				1 Sub Kegiatan	12.500.000.000	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 Dokumen	11.784.064.363	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	25 Dokumen	12.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	1.078.958.340				7 Sub Kegiatan	1.640.000.000	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	9 Jenis	11.955.100	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	9 Jenis	13.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Jenis alat tulis kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Alat Listrik dan Bahan Kegiatan Kantor yang disediakan yang disediakan	1 Paket 18 Unit 58 Buah 300 Meter 52 Jenis	698.816.040	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Paket 18 Unit 58 Buah 300 Meter 52 Jenis	1.100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	2 Jenis	75.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	75.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	14.217.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	8 Jenis	17.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 Jenis	5.840.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1 Jenis 2905 Kotak	273.130.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis 2905 Kotak	420.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3	30 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	864.197.252			4 Sub Kegiatan	990.000.000		
3	30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	3 Jenis	210.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Jenis	250.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	113 Unit	454.197.252	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	113 Unit	520.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan Kantor	1 Tahun	200.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun	220.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan	1.961.170.336				2 Sub Kegiatan	1.200.000.000	
3	30 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	17 Unit	933.417.440	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	17 Unit	900.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Taman yang dipelihara	1 Tahun 1 Tahun	1.027.752.896	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Tahun 1 Tahun	300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.07 Indeks	356.465.798				80.07 Indeks	350.000.000	
3	30 02 1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen SKA (Surat Keterangan Asal) yang diterbitkan	7000 Dokumen	356.465.798				7000 Dokumen	350.000.000	
3	30 02 1.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksportir	7000 Dokumen	356.465.798	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Eksportir/Pelaku Usaha	7000 Dokumen	350.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	2 Pasar	99.958.800				2 Pasar	100.000.000		
3	30	03	1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	8 Pasar	99.958.800				8 Pasar	100.000.000		
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar yang dibina	8 Pasar	99.958.800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pasar	8 Pasar	100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	3 %	18.363.820				3 %	60.000.000		
3	30	05	1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	1 Kegiatan 15 Pelaku Usaha	18.363.820				1 Kegiatan 15 Pelaku Usaha	60.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	15 Pelaku Usaha	18.363.820	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	2 %	546.401.408				2 %	800.000.000	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsumen yang dilindungi	100 %	496.401.448				100 %	700.000.000	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen yang didukasi Lembaga LPKSM yang terdata	100 Orang 1 Tahun	496.401.448	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Konsumen	100 Orang 1 Tahun	700.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang diawasi	10 Produk	49.999.960			10 Produk	100.000.000		
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Produk yang diawasi	10 Produk	49.999.960	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Konsumen	10 Produk	100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	00 % 30 %	117.316.758			00 % 30 %	75.000.000		
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan/menyediakan sandang lokal Bali	80 Toko	117.316.758			80 Toko	75.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 30 07 1.03 01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar Jumlah toko yang menyediakan produk sandang lokal bali	141 Produk 80 Toko	117.316.758	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	141 Produk 80 Toko	75.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			5.550.287.742					5.650.000.000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	1,5 % 00 %	5.350.116.454				1,5 % 00 %	5.400.000.000	
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %	5.350.116.454				1,5 %	5.400.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah RPIK yang di evaluasi	9 RPIK	15.247.420	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	9 RPIK	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sentra yang difasilitasi sarana dan prasarana industri	10 Sentra	334.869.110		1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	10 Sentra	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah perajin yang difasilitasi pameran Jumlah Produsen Produk Sandang Lokal Bali yang difasilitasi Fashion Show	0 - 150 Perajin 10 Perajin	4.999.999.924	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	0 - 150 Perajin 10 Perajin	5.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
3	31	04													
3	31	04	1.01												
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Industri yang terdata Jumlah Sentra Industri yang didampingi	270 Industri 6 Sentra	200.171.288	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Perajin	270 Industri 6 Sentra	250.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			2.223.394.450					2.612.000.000		
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.2 Nilai	2.122.819.450					82.2 Nilai	2.412.000.000	
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	1.766.863.774					1 Sub Kegiatan	2.000.000.000	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 Dokumen	1.766.863.774	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	25 Dokumen	2.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4 Sub Kegiatan	192.352.780					4 Sub Kegiatan	232.000.000	
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	0 - 14 Jenis 8 Unit 12 Buah	166.984.780	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	0 - 14 Jenis 8 Unit 12 Buah	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Fotocopy	2 Jenis 5000 Lembar	2.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis 5000 Lembar	3.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1 Jenis	4.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	4.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	2 Jenis	19.368.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Jenis	25.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	2 Sub Kegiatan	53.506.448				2 Sub Kegiatan	60.000.000		
3 31 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Layanan kemasan yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit 19 Unit	53.506.448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	5 Unit 19 Unit	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan	110.096.448				1 Kegiatan	120.000.000		
3 31 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	2 Unit	110.096.448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	2 Unit	120.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	1,5 % 00 %	100.575.000				1,5 % 00 %	200.000.000		
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5 %	100.575.000				1,5 %	200.000.000		
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis mutu produk Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan mutu kemasan Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha	20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha	100.575.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.157.907.602						2.479.800.000	
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.2 Nilai	2.050.437.754						2.279.800.000	
3 30 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	1.808.898.038						2.000.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
3 30 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	25 Dokumen	1.808.898.038	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	25 Dokumen	2.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Sub Kegiatan	59.348.420				5 Sub Kegiatan	70.500.000	
3 30 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	4 Jenis	997.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	4 Jenis	1.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	46 Jenis	21.315.620	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	46 Jenis	16.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	1 Jenis	10.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Fotocopy	1 Jenis 2082 Lembar	1.999.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis 2082 Lembar	3.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	1 Jenis	25.036.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan	61.196.448				3 Sub Kegiatan	69.300.000	
3 30 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	100 Lembar	1.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	100 Lembar	1.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 Jenis	12.000.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	1 Jenis	13.200.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	16 Unit	48.196.448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	16 Unit	55.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan	120.994.848				1 Sub Kegiatan	140.000.000	
3 30 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	3 Unit	120.994.848	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Aparatur	3 Unit	140.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	2 %	107.469.848				2 %	200.000.000	
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan	55 Sertifikat	107.469.848				55 Sertifikat	200.000.000	
3 30 06 1.02 02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang	55 Pengujian	107.469.848	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Pangan, Sandang dan Papan	Eksportir/Pelaku Usaha	55 Pengujian	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				7.677.057.173				9.164.427.542	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	82 persen	7.221.648.643				82 persen	8.027.189.981	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	4 Dokumen	3.969.600				4 Dokumen	4.366.560	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 Dokumen	1.984.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	2.183.280	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 Dokumen	1.984.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	2.183.280	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	38 Pegawai	6.078.512.271				38 Pegawai	6.689.388.498	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	35 pegawai	6.078.512.271	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	35 pegawai	6.686.363.498	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			800.964.472					893.160.649	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	1 tahun	738.509.872	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	812.360.589	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	7 jenis	4.752.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	7 jenis	5.227.860	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	9 laporan	57.702.000		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 laporan	63.472.200	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dalam kondisi baik	5 unit	338.202.300				5 unit	440.274.274	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas (mobil dan motor) yang dipelihara dan dalam kondisi baik	13 unit	305.602.300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	13 unit	336.162.530	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dan dalam kondisi baik	1 tahun	32.600.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	35.860.000	Sekretariat Daerah
4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 persen	349.999.900				100 persen	744.255.475	
4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			99.999.950					312.012.949	
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro	2 laporan	99.999.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 laporan	109.999.945	Sekretariat Daerah
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			50.000.000					103.400.000	
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Energi, Air, Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 laporan	50.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 laporan	55.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 laporan	199.999.950				1 laporan	328.842.526	
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Badan Layanan Umum Daerah	1 laporan	199.999.950	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 laporan	219.999.945	Sekretariat Daerah
4 01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku	70 Persen	105.408.630				70 Persen	392.982.086	
4 01 08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			55.408.530					224.242.218	
4 01 08 1.01 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD, APBN dan Wilayah)	2 laporan	55.408.530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 laporan	60.949.383	Sekretariat Daerah
4 01 08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			50.000.100					168.739.868	
4 01 08 1.02 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 laporan	50.000.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 laporan	55.000.110	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH			63.728.072.535					78.702.625.432	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			63.728.072.535				100 Persen	78.702.625.432	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	622.339.420				12 bulan	274.340.991	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rensta, Renja, RKA, DPA Perangkat Daerah	6 Dokumen	622.339.420	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 Dokumen	192.276.008	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	18.354.711.952				12 bulan	25.460.325.965	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen yang menerima Pembayaran Gaji Jumlah dokumen yang menerima Pembayaran Gaji	6 biro 52 dokumen	17.737.554.054	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 biro 52 dokumen	24.622.429.662	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diuji/verifikasi	6 biro	617.157.898	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 biro	837.896.303	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	346.058.557				12 bulan	418.730.881	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah di lingkungan Setda Provinsi Bali	31 laporan	346.058.557	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	31 laporan	418.730.881	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	8.676.987.766				12 bulan	8.267.392.772	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan elektronik/penerangan bangunan	12 bulan	268.749.092	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	396.176.194	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 paket	1.688.856.176	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 paket	543.820.688	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Pimpinan dan Tamu serta Aktivitas Lapangan	12 bulan	3.618.264.444	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	220.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	2.553.427.080	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	4.448.611.444	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	12 bulan	547.690.974	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	725.999.494	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	9.317.162.628				12 bulan	11.252.211.598	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia di Lingkungan Setda	12 bulan	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	5.445.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	1.534.500.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	1.687.950.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang acara	12 bulan	3.551.092.944	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	4.295.385.040	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan gedung kantor dan petugas taman	12 bulan	4.221.569.684	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	5.263.431.558	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan	7.071.487.570				12 bulan	12.928.846.146	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dikelola oleh setda	12 bulan	5.713.870.942	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	4.470.572.712	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana prasarana pendukung peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	1.357.616.628	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	1.209.999.617	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	5.012.003.128				12 bulan	6.115.508.864	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Gaji KDH & WKDH	14 bulan	247.349.060	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	14 bulan	350.277.441	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Biaya Penunjang Operasional KDH & WKDH	12 bulan	4.764.654.068	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	5.765.231.423	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12		Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Dokumen Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Dae	12 bulan	11.919.281.466				12 bulan	11.528.575.918	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga kepala daerah	12 bulan	8.695.476.759	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	8.255.525.966	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	12 bulan	3.018.324.707	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	3.024.999.952	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah kegiatan upacara keagamaan	12 bulan	205.480.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	248.050.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.13		Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Dokumen Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	12 bulan	469.974.800				12 bulan	516.972.500	
4	01	01	1.13	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen dan materi kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Atensi tamu VIP/VVIP	12 bulan	469.974.800	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	516.972.500	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.14		Fasilitas Keprotokolan	Dokumen Fasilitas Keprotokolan	12 bulan	1.938.065.248				12 bulan	1.939.719.797	
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 bulan	1.938.065.248	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	955.619.302	Sekretariat Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01		SEKRETARIAT DAERAH						27.451.443.366					
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	77 nilai	7.897.469.795			77 nilai	7.176.443.366				
4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang	398.686.932			36 orang	50.000.000			
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	398.686.932	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	50.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang	5.947.070.588					36 orang	6.374.443.366	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan tepat waktu	36 orang	5.947.070.588	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	36 orang	6.374.443.366	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 paket	750.118.675					1 paket	160.000.000	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang tersedia	1 paket	149.999.375	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	70.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 paket	149.999.950	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 paket	20.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	1 paket	100.119.700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	1 paket	30.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	349.999.650	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 tahun	40.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 paket	801.593.600					1 paket	592.000.000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	9 unit	166.130.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	9 unit	167.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	17 unit	439.583.600	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	17 unit	320.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4 jenis	149.880.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	4 jenis	50.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung	1 paket	46.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 paket	55.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai/Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	3,1 nilai/skor	1.169.983.807					3,1 nilai/skor	1.575.000.000	
4	01	03	1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)	2 dokumen	279.928.408					2 dokumen	595.000.000	
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD/e-LPPD)	2 dokumen	149.999.988	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	2 dokumen	395.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Obyek Penataan Wilayah yang tertangani dengan baik	1 segmen penlok	129.928.420	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 segmen penlok	200.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
4 01 03 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1 laporan	502.626.490				1 laporan	540.000.000	
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD	1 dokumen	242.429.144	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	350.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan di Provinsi dan kabupaten/kota yang pelaksanaannya belum optimal	1 laporan	260.197.346	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 laporan	190.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah yang ditindaklanjuti	1 dokumen	387.428.909				1 dokumen	440.000.000	
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemerintah yang ditindaklanjuti	1 dokumen	242.429.109	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	265.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Potensi Kerjasama	1 dokumen	144.999.800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	175.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Pelayanan Atma Kertih	76 nilai	17.441.273.296				76 nilai	18.700.000.000	
4 01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Laporan Dokumentasi Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1 dokumen	6.849.715.526				1 dokumen	14.350.000.000	
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Upacara Keagamaan	445 upacara	6.087.381.170	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	445 upacara	13.700.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	1 dokumen	762.334.356	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	650.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 dokumen	10.591.557.770				1 dokumen	4.350.000.000	
4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 dokumen	10.591.557.770	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	1 dokumen	4.350.000.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH									
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12.264.965.433				16.804.169.164	
4 01 01		Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	8.462.195.545				100 persen	10.280.469.023	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan	4 Dokumen	5.208.500				4 Dokumen	31.900.000	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	2.914.900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Dokumen	26.950.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang terselesaikan	1 Dokumen	2.293.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	4.950.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang diselesaikan	37 Orang	7.303.677.377				37 Orang	7.898.117.354	
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN	37 Orang	7.300.293.577	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	37 Orang	7.894.487.354	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang diselesaikan	7 Dokumen	3.383.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Sipil Negara	7 Dokumen	3.630.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang diselesaikan	1 Tahun	93.696.500				1 Tahun	1.517.979.540	
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen/instalasi listrik yang disediakan	1 Tahun	13.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Tahun	12.100.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan	1 Paket	70.620.300	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Paket	1.245.839.540	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	10.076.200	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Jenis	36.300.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	83 Unit	1.059.613.168				83 Unit	832.472.129	
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik	4 Unit	410.552.896	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Unit	199.100.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dengan kondisi baik	10 Unit	581.530.272	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 Unit	519.874.129	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	69 Unit	67.530.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	69 Unit	91.498.000	Sekretariat Daerah
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	3.802.769.888				100 persen	6.523.700.141	
4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	393 Produk Hukum	1.748.481.856				393 Produk Hukum	3.214.058.998	
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD Jumlah Pergub yang diselesaikan	5 Raperda 40 Pergub	1.073.905.792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Masyarakat	5 Raperda 40 Pergub	1.649.654.254	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan	250 Kepgub	187.382.240	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Masyarakat	250 Kepgub	338.015.011	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan	50 Orang 225 Produk Hukum 400 Buku	149.905.792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Masyarakat	50 Orang 225 Produk Hukum 400 Buku	519.470.296	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang telah Terfasilitasi	75 Produk Hukum	337.288.032	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Masyarakat	75 Produk Hukum	706.919.437	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	34 Bantuan Hukum	2.054.288.032				34 Bantuan Hukum	3.309.641.143	
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum	11 Perkara 35 Pendampingan Hukum	1.866.905.792	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota, Provinsi, Masyarakat	11 Perkara 35 Pendampingan Hukum	2.250.512.981	Sekretariat Daerah
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum Jumlah NPHD yang dihasilkan Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani Terlaksananya lomba kadarkum	30 Aparatur 50 Orang 400 NPHD 9 Perkara 9 Perkara Non Litigasi 1 Laporan	187.382.240	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Kabupaten/Kota, Provinsi, Masyarakat	30 Aparatur 50 Orang 400 NPHD 9 Perkara 9 Perkara Non Litigasi 1 Laporan	1.059.128.162	Sekretariat Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4	01		SEKRETARIAT DAERAH						7.060.141.874	14.993.283.001				
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan Setda Provinsi Bali	82 Persen	6.670.278.928				82 Persen	14.297.590.001			
4	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	5 Laporan	5.980.360.679				5 Laporan	7.551.924.001		
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	5 Dokumen	5.980.360.679	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	5 Dokumen	7.551.924.001	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	13 Dokumen	15.409.415					13 Dokumen	33.387.500	
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase usulan Kepegawaian yang sesuai dan ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	15.409.415	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Setda Provinsi Bali	100 %	33.387.500	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	142.753.290					100 %	243.431.500	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang berfungsi baik	4 Jenis	3.900.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	4 Jenis	5.445.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	20 Jenis	30.995.290	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	20 Jenis	36.300.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun	1 Tahun	107.858.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	1 Tahun	187.166.500	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik	1 Laporan	531.755.544					1 Laporan	6.449.062.000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	16 unit	472.795.544	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	16 unit	6.377.672.000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	5 Jenis	58.960.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Biro Organisasi	5 Jenis	71.390.000	Sekretariat Daerah
4	01	02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	83 %	389.862.946					83 %	695.693.000	
4	01	02	1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	83 %	164.896.348					83 %	359.946.500	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	83 %	29.181.900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	42.350.000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penataan kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan	100 %	52.724.600	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota Se Bali	100 %	90.750.000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah	36 Dokumen	82.989.848	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten / Kota Se Bali	36 Dokumen	226.846.500	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	83 %	224.966.598					83 %	335.746.500	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Manajemen Perubahannya Baik	83 %	54.999.640	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	102.850.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya Minimal BB	83 %	40.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	72.600.000	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah yang Penerapan Budaya Kerjanya baik	83 %	17.498.700	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	24.200.000	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang baik	100 %	24.999.810	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	100 %	48.400.000	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pelayanan Publik yang baik	83 %	87.468.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali Dan Kabupaten / Kota Se Bali	83 %	87.696.500	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH			16.552.049.018				18.999.300.000		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			14.161.822.868				13.849.300.000		
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.633.985.598				10.001.100.000		
4 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70 orang	11.633.985.598	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		70 orang	10.000.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.826.697.270				2.886.000.000		
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1 paket	1.546.373.670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	2.500.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang terpenuhi	1 paket	34.643.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	66.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek, dan pameran yang dibayarkan per bulan	1 paket	245.680.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	220.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			701.140.000				710.000.000		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas per tahun	1 tahun	402.220.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 tahun	200.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya kendaraan dinas per tahun	1 tahun	112.330.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 tahun	110.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam satu tahun	1 tahun	186.590.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 tahun	250.000.000	Sekretariat Daerah
4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			2.390.226.150				5.150.000.000		
4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.590.226.400				4.200.000.000		
4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen strategi pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen analisa kebutuhan	2 dokumen	49.980.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		2 dokumen	100.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan penyelesaian pengadaan barang/jasa pengelolaan produk katalog lokal	20 unit 2 laporan	1.440.246.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		20 unit 2 laporan	4.000.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang tepat waktu	5 dokumen/laporan	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		5 dokumen/laporan	100.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			199.999.910					550.000.000		
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Terlaksananya pelayanan pelaksanaan pengadaan SPSE secara penuh	100 persen	99.999.910	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 persen	400.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi PBJ yang dikelola dan dikembangkan	3 laporan	100.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 laporan	150.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			599.999.840					400.000.000		
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi SDM pengadaan barang/jasa	4 kali	324.994.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 kali	200.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen variabel kematangan terimplementasi	9 dokumen/indikator	75.046.840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		9 dokumen/indikator	100.000.000	Sekretariat Daerah	
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	12 kali	199.959.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 kali	100.000.000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	02				SEKRETARIAT DPRD			158.604.866.318						226.133.000.000	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	83.189.112.068				100 persen	98.503.000.000		
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	3 Dokumen	162.213.546				3 Dokumen	264.000.000		
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	68.131.698	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 Dokumen	132.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	94.081.848	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	132.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang terhimpun	12 Dokumen	10.263.226.426				12 Dokumen	11.880.000.000		
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	10.074.221.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	55 orang	11.660.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan verifikasi	34 bahan	95.916.008	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	34 bahan	110.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	93.089.218	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	14 Dokumen	110.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi umum yang terlaksana	6 Jenis	5.170.829.138				6 Jenis	9.080.000.000		
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang tersedia	40 Jenis	193.869.025	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	40 Jenis	300.000.000	Sekretariat DPRD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
4 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	71 Jenis	289.634.290	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	71 Jenis	550.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 Jenis	1.213.438.254	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	3 Jenis	1.500.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	26 Jenis	217.750.300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	26 Jenis	300.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis koran dan perundang - undangan untuk masing - masing anggota DPRD Dewan yang tersedia	17 Jenis	930.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	17 Jenis	930.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat -rapat, menghadiri undangan, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan	12 Dokumen	2.326.137.269	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	5.500.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	1 Jenis	119.655.000				1 Jenis	500.000.000	
4 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang tersedia	20 Jenis	119.655.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	20 Jenis	500.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa penunjang kantor yang tersedia dalam setahun	3 Jenis	2.519.075.580				3 Jenis	2.565.000.000	
4 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1000 Lembar	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1000 Lembar	15.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penggunaan telepon, air, dan listrik serta pulsa modem untuk Sekretariat DPRD Bali yang terbayar	144 Rekening	890.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	144 Rekening	900.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	4 Jasa	1.619.075.580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	4 Jasa	1.650.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	3 Jenis	3.919.418.996				3 Jenis	4.900.000.000	
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	49 Kendaraan	2.933.409.096	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	49 Kendaraan	3.500.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	4 gedung	193.458.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	4 gedung	550.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	22 Jenis	792.551.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	22 Jenis	850.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terlaksana	3 Jenis	59.407.519.202				3 Jenis	67.764.000.000	
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Administrasi Keuangan DPRD yang dapat diselesaikan tepat waktu	12 Dokumen	58.253.132.074	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	66.000.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang tersedia	351 Stel	912.787.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	351 Stel	1.500.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPR yang Melaksanakan Medical Check Up	55 orang	241.599.628	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	55 orang	264.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
4 02 01 1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Jenis Layanan Administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	2 Jenis	1.627.174.180				2 Jenis	1.550.000.000	
4 02 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pandangan Umum Fraksi di DPRD yang terhimpun	1 Dokumen	226.443.290	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Dokumen	550.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat DPRD yg Terfasilitasi dalam setahun	48 Laporan	1.400.730.890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	48 Laporan	1.000.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase peningkatan kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali	5 persen	75.415.754.250				5 persen	127.630.000.000	
4 02 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Keputusan DPRD/Pimpinan terhadap Perda dan Peraturan DPRD yang terbentuk	14 Keputusan	8.678.304.300				14 Keputusan	19.800.000.000	
4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Keputusan DPRD tentang Propemperda	1 Keputusan	1.144.555.116	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	2.200.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Keputusan DPRD/Keputusan Pimpinan DPRD/Rekomendasi yang terlaksana	12 Keputusan	7.037.180.316	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Keputusan	16.500.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Studi Penelitian yang tersusun	3 Dokumen	496.568.868	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	3 Dokumen	1.100.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah jenis pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	5 Jenis	4.428.883.940				5 Jenis	9.020.000.000	
4 02 02 1.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Keputusan Dewan Tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan KUA dan PPAS yang Dihasilkan	1 Keputusan	64.235.198	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	1.650.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dihasilkan	1 Keputusan	77.572.098	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	1.650.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD yang dihasilkan	1 Keputusan	1.426.247.948	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	2.200.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.02 04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Keputusan Dewan terhadap Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang dihasilkan	1 Keputusan	1.434.105.948	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	2.200.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Keputusan Dewan tentang Rekomendasi Persetujuan dan Kesepakatan terkait pertanggung jawaban yang dihasilkan	1 Keputusan	1.426.722.748	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	1.320.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terlaksana	5 Jenis	15.778.735.564				5 Jenis	29.920.000.000	
4 02 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	3.833.882.092	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Laporan	7.150.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	3.330.225.550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Laporan	7.150.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	3.984.445.516	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Laporan	7.150.000.000	Sekretariat DPRD
4 02 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan terlaksananya pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	3.605.429.356	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Laporan	7.150.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Rekomendasi	1.024.753.050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Rekomendasi	1.320.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang terlaksana	5 Jenis	10.775.481.008				5 Jenis	17.270.000.000		
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Pelaksanaan BIMTEK	6 Kali	1.816.403.666	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	6 Kali	5.500.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Peliputan dan Penyebar Luasan baik Cetak maupun Online	60 Publikasi	2.432.978.696	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	60 Publikasi	3.850.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Pembayaran Honor Kelompok dan Tim Ahli	12 Dokumen	3.251.172.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	3.850.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen Pembayaran Tenaga Ahli Fraksi	12 Dokumen	905.842.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	12 Dokumen	1.320.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Keputusan DPRD tentang Program Kerja DPRD	1 Keputusan	2.369.083.696	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Keputusan	2.750.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah jenis kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terlaksana	3 Jenis	26.871.819.430				3 Jenis	33.770.000.000		
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	4 Dokumen	3.220.347.396	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	4 Dokumen	7.150.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Keputusan Pokok- pokok Pikiran DPRD	2 Keputusan	1.106.646.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 Keputusan	1.650.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	22.544.825.534	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	3 Dokumen	24.970.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan dan pengawasan kode etik DPRD yang terlaksana	1 Jenis	493.084.496				1 Jenis	1.100.000.000		
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pengawasan kode etik DPRD	5 Laporan	493.084.496	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	5 Laporan	1.100.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis kegiatan dalam rangka fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana	2 Jenis	8.389.445.512				2 Jenis	16.750.000.000		
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	10 Laporan	6.356.583.514	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	10 Laporan	14.000.000.000	Sekretariat DPRD	
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Buku Kinerja Pimpinan DPRD yang tersusun	3 Buku	2.032.861.998	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	3 Buku	2.750.000.000	Sekretariat DPRD	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	01				PERENCANAAN			24.380.849.779						31.755.226.743	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	15.554.026.578					82 Nilai	20.207.027.134	
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	852 dokumen	300.181.172					852 dokumen	458.415.289	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA Induk Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan Jumlah dokumen rencana Perangkat Daerah yang selesai disusun sesuai ketentuan Jumlah Dokumen RKA Induk Perangkat Daerah yang siap diverifikasi Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah yang siap diverifikasi	1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen 59 dokumen 59 dokumen	247.728.912	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen 59 dokumen 59 dokumen	355.725.603	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	708 dokumen 5 dokumen	52.452.260	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	708 dokumen 5 dokumen	102.689.686	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1686 dokumen	12.594.313.631				1686 dokumen	15.504.705.908	
5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	48 dokumen	12.308.293.040	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	48 dokumen	15.190.083.258	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	700 Dokumen	198.117.995	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	700 Dokumen	217.929.794	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	16 Laporan 2 Laporan	87.902.596	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	16 Laporan 2 Laporan	96.692.856	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17 Jenis	625.266.986				17 Jenis	1.099.242.141	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang tersedia dan berfungsi baik	10 jenis	43.703.698	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	10 jenis	63.096.383	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dan berfungsi baik	20 jenis	176.152.548	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	20 jenis	117.177.773	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	3 jenis	123.476.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	3 jenis	143.092.893	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	11 jenis	53.884.948	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	11 jenis	77.370.093	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis	74.916.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 jenis	82.408.093	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	2 jenis	42.426.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	2 jenis	75.966.458	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 jenis	110.706.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	5 jenis	540.130.448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 jenis	928.129.768				10 jenis	945.130.868	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	300 materai	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	300 materai	3.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu	4 jenis	342.276.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	4 jenis	342.276.448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu	4 jenis	582.853.320	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	4 jenis	599.854.420	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	9 jenis	1.106.135.021				9 jenis	2.199.532.928	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan siap pakai	35 unit	779.224.480	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	35 unit	1.183.736.480	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin dalam kondisi baik	10 jenis	132.986.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	10 jenis	266.296.448	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dalam kondisi baik	1 unit	193.924.093	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappeda Provinsi Bali	1 unit	749.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan	100 persen	5.822.350.794				100 persen	7.586.908.871	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 Dokumen	3.197.432.160				2 Dokumen	3.880.000.000	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah berita acara hasil kesepakatan Musrenbang	1 Dokumen	83.047.620	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	3.114.384.540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 Dokumen	3.630.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
5	01	02	1.02											
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	761.917.542			5 Dokumen	1.059.300.000		
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	471.309.026	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	618.942.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi berbasis SIPD	2 Dokumen	290.608.516	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	440.357.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	6 Jenis	1.863.001.092			6 Jenis	2.647.608.871		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	8 Dokumen	85.850.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	227.801.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Laporan	282.305.892	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	5 Laporan	618.077.671	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Fasilitasi/Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	18 Rekomendasi	1.494.845.200	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	18 Rekomendasi	1.801.730.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 persen	3.004.472.407				100 persen	3.961.290.738	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	12 Dokumen	1.075.821.545				12 Dokumen	1.470.700.000	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	88.315.696	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Dokumen	203.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	43.841.728	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	101.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	47.839.748	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	135.300.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	43.968.648	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	79.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	144.966.188	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	159.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	78.889.993	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	101.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Peninjauan Kembali Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Bali Tahun 2019- 2023 Dokumen Revisi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Bali Tahun 2019-2023 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Laporan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	555.999.896	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	611.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	71.999.648	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	79.200.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	9 dokumen	858.164.562				9 dokumen	943.981.018	
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	221.994.084	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	244.193.492	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	275.939.884	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	303.533.873	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	16.249.400	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	17.874.340	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dokumen	343.981.194	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	378.379.313	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang sesuai dengan regulasi	9 Dokumen	1.070.486.300				9 Dokumen	1.546.609.720	
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi	5 Dokumen	277.270.320	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 Dokumen	513.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	257.973.940	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	1 Dokumen	173.299.720	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan, diasistensikan, dan dievaluasi	5 dokumen	289.839.040	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	5 dokumen	667.810.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif		
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	245.403.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Aparatur	2 dokumen	192.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5 02	KEUANGAN			1.210.181.023.520					1.645.352.433.620		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	19.043.772.616					100 persen	27.335.357.734	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja yang disusun	74 dokumen	31.381.270					74 dokumen	25.000.000	
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9 dokumen	31.381.270	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	9 dokumen	25.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2252 dokumen	16.625.891.690					2252 dokumen	25.095.357.734	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	44 dokumen	16.421.607.740	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	44 dokumen	24.875.357.734	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi	2200 dokumen	204.283.950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	2200 dokumen	220.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah disusun tepat waktu	7 dokumen	1.105.332.012					7 dokumen	590.000.000	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis	252.827.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 jenis	370.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor	1 jenis	852.505.012	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 jenis	220.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD disusun tepat waktu	4 dokumen	1.281.167.644					4 dokumen	1.625.000.000	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	3 jenis	374.471.544	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	3 jenis	450.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	82.768.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	4 jenis	175.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah jenis rehab/pemeliharaan gedung kantor	2 jenis	823.928.100	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	2 jenis	1.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pe APBD Provinsi serta SK Ev Ranperda/Ranperbup/Ra dan Penyerapan Anggaran Waktu	100 Persen	1.189.586.372.678				100 Persen	1.615.437.075.886	
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	8 dokumen	2.744.360.392				8 dokumen	1.000.000.000	
5 02 02 1.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD	2 dokumen	2.744.360.392	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh OPD Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali	2 dokumen	1.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pembinaan keuangan daerah Kab/Kota disusun tepat waktu	9 dokumen	287.855.450				9 dokumen	280.000.000	
5 02 02 1.02 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Gubernur tentang evaluasi Ranperda tentang APBD kab/kota dan penjabaran APBD Kab/Kota	9 dokumen	287.855.450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Kab/Kota Se-Bali	9 dokumen	280.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	246.936.050				1 dokumen	500.000.000	
5 02 02 1.03 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan kas daerah dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah laporan register SP2D disusun tepat waktu Jumlah laporan SPD (Surat Penyediaan Dana) disusun tepat waktu	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	246.936.050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD Pemerintah Provinsi Bali	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	500.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah, Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	4 dokumen	264.469.244				4 dokumen	180.000.000	
5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	jumlah dokumen laporan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	2 dokumen	264.469.244	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	2 dokumen	180.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	3 laporan	1.186.042.751.542				3 laporan	1.613.477.075.886	
5 02 02 1.05 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			2.775.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat Bali		3.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 02 1.05 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan khusus	1 dokumen	172.932.325.432	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat Bali	1 dokumen	471.631.637.244	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah laporan penyaluran dana darurat/Belanja Tidak Terduga	1 dokumen	50.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat Bali	1 dokumen	54.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	jumlah laporan penyaluran dana bagi hasil Provinsi	1 dokumen	960.335.426.110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat Bali	1 dokumen	1.084.845.438.642	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100 Persen	1.550.878.226				100 Persen	2.580.000.000	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 laporan	1.550.878.226				1 laporan	2.580.000.000	
5 02 03 1.01 01	Penyusunan Standar Harga	jumlah laporan standar harga disusun tepat waktu	1 dokumen	249.633.680	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen	220.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	302.560.800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen	160.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	jumlah laporan optimalisasi penggunaan barang milik daerah jumlah laporan pemanfaatan barang milik daerah jumlah laporan pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	998.683.746	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2.200.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	KEUANGAN			6.027.017.233					5.664.000.000	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.643.136.513					2.664.000.000	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.539.524.516					2.000.000.000	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.539.524.516		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum yang disusun tepat waktu	5 dokumen	75.505.025				5 dokumen	30.000.000	
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor yang ditangani tepat waktu	1 jenis	75.505.025	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 jenis	30.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	1.028.106.972				2 dokumen	634.000.000	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang ditangani tepat waktu	2 jenis	104.385.200	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	2 jenis	162.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang ditangani tepat waktu	1 jenis	14.650.000	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 jenis	22.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			909.071.772		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN		450.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan laporan BMD Provinsi Bali Tepat Waktu	100 Persen	2.383.880.720				100 Persen	3.000.000.000	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah disusun tepat waktu	1 dokumen	2.383.880.720				1 dokumen	3.000.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif			
5 02 03 1.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan hasil pendataan tanah Jumlah laporan klaim asuransi barang milik daerah Jumlah laporan Pemasangan papan nama kepemilikan Jumlah Laporan Pemasangan patok batas Jumlah laporan pensertifikatan tanah Jumlah laporan penyelesaian permasalahan tanah	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.383.880.720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemerintah Provinsi Bali	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	3.000.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 02	KEUANGAN			82.942.731.911						120.791.484.725		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	80.766.204.781						79 Persen	116.720.712.992	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100 %	20.621.700						100 %	33.000.000	
5 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100 %	11.091.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	16.500.000	Badan Pendapatan Daerah		
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 %	9.530.300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	16.500.000	Badan Pendapatan Daerah		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	72.811.105.592						100 %	94.639.227.315	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	72.811.105.592	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	94.639.227.315	Badan Pendapatan Daerah		
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	2.359.833.725						100 %	2.636.165.632	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	11.392.500	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	21.961.500	Badan Pendapatan Daerah		
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	88.949.225	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	289.891.800	Badan Pendapatan Daerah		
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	75.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	109.807.500	Badan Pendapatan Daerah		
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	1.811.510.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	1.275.000.000	Badan Pendapatan Daerah		
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	2.442.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	52.004.832	Badan Pendapatan Daerah		
5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	820 nasi Kotak 1160 snack kotak	9.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	820 nasi Kotak 1160 snack kotak	45.500.000	Badan Pendapatan Daerah		
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	3200 nasi Kotak 3350 snack kotak 100 DL	361.540.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	3200 nasi Kotak 3350 snack kotak 100 DL	842.000.000	Badan Pendapatan Daerah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
5	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 %	2.069.710.000			100 %	3.069.670.212			
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terlaksana	6 Jenis	1.779.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	6 Jenis	1.769.600.212	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor yang terlaksana	5 Jenis	290.210.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	5 Jenis	1.300.070.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	653.000.000					100 %	985.339.300	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	4.392.300	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	400.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	585.640.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	250.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	395.307.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	2.851.933.764					100 %	14.633.060.533	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	5 unit roda 4	195.495.448	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	5 unit roda 4	356.608.765	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	10 unit roda 4	1.184.226.188	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	10 unit roda 4	1.315.686.255	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	413.828.032	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	464.177.034	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara	100 %	1.058.384.096	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	7.486.981.311	Badan Pendapatan Daerah
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen	42.694.340					100 Persen	116.732.880	
5	02	02	1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	100 %	42.694.340					100 %	116.732.880	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi daerah yang selesai dievaluasi	100 %	42.694.340	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	116.732.880	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	2.133.832.790					56,40 Perse	3.954.038.853	
5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan	100 %	2.133.832.790					100 %	3.954.038.853	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah inovasi sistem pelayanan Pajak dan Retribusi daerah yang terpadu berbasis Online yang diterapkan Persentase capaian PAD terhadap target PAD yang ditetapkan Persentase Wajib Pajak yang memanfaatkan aplikasi layanan pembayaran Pajak dan retribusi daerah Online yang diterapkan	1 Inovasi 100 % 2 %	151.604.900	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	1 Inovasi 100 % 2 %	1.123.727.512	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah rekomendasi terhadap mekanisme pengelolaan PAD yang ditindaklanjuti Persentase regulasi terkait PAD selesai / direvisi Persentase SOP pelayanan pajak dan retribusi daerah yang disusun/direvisi dan diimplementasikan	4 Rekomendasi 100 % 100 %	20.042.180	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	4 Rekomendasi 100 % 100 %	541.503.061	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase informasi terkait pelayanan pajak yang tersampaikan kepada wajib pajak Persentase wajib pajak yang disuluh dan membayar pajak	100 % 10 %	400.849.460	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	100 % 10 %	470.669.868	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase kontribusi realisasi pajak daerah terhadap PAD Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun Persentase pembayaran piutang pajak daerah periode 1 tahun terhadap piutang 5 tahun Persentase pengaduan layanan pajak dan retribusi daerah yang ditindaklanjuti	83.71 % 20 % 23.97 % 90 %	1.525.833.910	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	83.71 % 20 % 23.97 % 90 %	1.488.715.912	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi realisasi non pajak daerah terhadap PAD	16,29 %	35.502.340	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	16,29 %	329.422.500	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	KEUANGAN			9.535.534.851					11.085.866.433	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	6.312.864.803				79 Persen	7.347.688.986	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	4.935.665.903				100 %	5.440.605.701	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	4.935.665.903	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaron	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	5.440.605.701	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	251.280.640				100 %	336.356.599	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	4.935.600	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaron	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	13.591.972	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	166.879.440	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaron	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	13.591.972	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	25.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaron	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	36.602.500	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	11.805.600	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaron	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	20.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	4.500.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaron	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	14.933.820	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1232 galon air	9.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaron	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1232 galon air	30.800.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana Jumlah perjalanan dinas yang terlaksana	1130 Nasi kotak 1130 Snack kotak 2 DL 180 DD	29.160.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1130 Nasi kotak 1130 Snack kotak 2 DL 180 DD	206.836.335	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	466.900.000				100 %	566.839.904	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	2.400.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	2.723.226	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	264.000.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	363.616.678	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	200.500.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	200.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	659.018.260				100 %	1.003.886.782	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	31.703.200	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 unit roda 4	50.368.230	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4 9 unit roda 2	108.307.748	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	1 unit roda 4 9 unit roda 2	169.879.970	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	38.140.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	57.871.457	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	467.447.312	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	689.819.125	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	13.420.000	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Barang milik daerah	100 %	35.948.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	3.222.670.048				56,40 Persen	3.738.177.447	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1)	78 Nilai IKM	3.222.670.048				78 Nilai IKM	3.738.177.447	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (1)	78 Nilai IKM	1.311.276.992	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	1.620.049.677	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (1)	20 %	1.911.393.056	Kab. Buleleng, Buleleng, Pamaran	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	2.118.127.770	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	KEUANGAN				4.781.634.232				6.167.236.734	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	3.927.141.720				79 Persen	5.188.311.757	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.041.827.804				100 %	3.736.989.797	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.041.827.804	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	3.736.989.797	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	150.158.680				100 %	350.213.057	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	2.297.000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	5.124.350	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	100.791.680	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	175.127.418	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	25.000.000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	36.602.500	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	5.820.000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	34.414.256	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	340 nasi kotak 490 snack kotak 4 DL 105 DD	16.250.000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	340 nasi kotak 490 snack kotak 4 DL 105 DD	86.747.925	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	314.600.000				100 %	357.834.498	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	1.000.000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2.834.498	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	168.600.000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	205.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	145.000.000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	420.555.236				100 %	743.274.405	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	13.883.000	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4	36.602.060	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4 9 unit roda 2	89.056.148	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4 9 unit roda 2	124.674.478	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	7.100.000	Kab. Jembrana, Negara, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	9.179.786	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	299.858.688	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	560.493.747	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	10.657.400	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	12.324.334	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
5	02	04						56,40 Persen	978.924.977					
5	02	04	1.01					78 Nilai IKM	978.924.977					
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (2)	78 Nilai IKM	439.140.928	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	509.970.442	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD)	20 %	415.351.584	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	468.954.535	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN			7.725.113.218					8.958.140.652	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	6.841.094.258				79 Persen	7.965.021.600	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	5.473.131.046				100 %	6.020.444.151	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	5.473.131.046	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	6.020.444.151	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	242.495.160				100 %	515.769.946	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	9.982.500	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	12.078.825	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	177.572.660	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	287.129.775	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	25.000.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	36.602.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	7.200.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	31.115.053	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	3.240.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	18.974.736	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	300 galon air	6.000.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	300 galon air	8.400.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	255 nasi kotak 300 snack kotak 4 DL 215 DD	13.500.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	255 nasi kotak 300 snack kotak 4 DL 215 DD	121.469.057	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	420.720.000				100 %	505.779.934	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	1.000.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	4.622.164	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	220.220.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	266.466.200	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	199.500.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	234.691.570	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif						
5	02	01	1.09												
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	704.748.052			100 %	923.027.569				
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	32.148.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4	38.903.073	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4 11 unit roda 2	148.004.496	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4 11 unit roda 2	175.616.457	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	7.300.000	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	17.036.800	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	486.537.456	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	672.525.785	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	30.758.100	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	18.945.454	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	884.018.960				56,40 Persen	993.119.052		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	78 Nilai IKM	884.018.960				78 Nilai IKM	993.119.052		
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	78 Nilai IKM	422.614.480	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	486.981.483	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (3)	20 %	461.404.480	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	506.137.569	Badan Pendapatan Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5	02				KEUANGAN			14.156.546.547						16.487.342.129	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	11.318.019.011				79 Persen	13.162.039.615		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	9.633.998.349				100 %	10.597.398.184		
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	9.633.998.349	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	10.597.398.184	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	337.989.650				100 %	705.547.957		
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	7.400.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	13.908.950	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	200.489.650	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	295.060.073	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	25.000.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	67.715.074	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	61.000.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	131.769.000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang terpenuhi	100 %	9.600.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	14.055.360	Badan Pendapatan Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1500 galon air	12.000.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1500 galon air	43.950.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	1000 Nasi Kotak 1500 Snack Kotak 4 DL 80 DD	22.500.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1000 Nasi Kotak 1500 Snack Kotak 4 DL 80 DD	139.089.500	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	488.160.000				100 %	730.504.200	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	2.660.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2.928.200	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	285.000.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	527.076.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	200.500.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	200.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	857.871.012				100 %	1.128.589.274	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Unit Roda 4	27.118.100	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	32.029.910	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	144.659.088	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	228.373.516	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	55.420.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	59.597.900	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	576.193.824	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	733.913.788	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	54.480.000	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	74.674.160	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	2.838.527.536				56,40 Persen	3.325.302.514	
5 02 04	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (3)	78 Nilai IKM	2.838.527.536				78 Nilai IKM	3.325.302.514	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (4)perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	78 Nilai IKM	1.954.478.576	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	2.169.262.754	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (4)	20 %	884.048.960	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	1.156.039.760	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	02		KEUANGAN						15.477.013.009	16.922.167.578				
5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen		12.479.964.657		79 Persen	14.059.992.471			
5	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %		10.423.770.365		100 %	11.459.256.284			
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	10.423.770.365	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	11.459.256.284	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %		440.682.120				100 %	575.599.039	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	10.952.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	13.158.306	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	200.497.820	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	293.241.204	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	25.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	36.602.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	63.828.300	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	70.234.268	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	16.150.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	26.243.993	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	510 Nasi Kotak 610 Snack Kotak 2400 Galon Air	84.450.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	510 Nasi Kotak 610 Snack Kotak 2400 Galon Air	70.234.268	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	300 Nasi Kotak 500 Snack Kotak 4 DL	39.804.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	300 Nasi Kotak 500 Snack Kotak 4 DL	65.884.500	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %		702.000.000				100 %	1.052.500.000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	1.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	500.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	850.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	200.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	200.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %		913.512.172				100 %	972.637.148	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Unit Roda 4	29.991.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	35.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	6 Unit Roda 2	118.227.796	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	6 Unit Roda 2	142.852.135	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	19.150.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	20.100.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	690.277.376	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	713.782.413	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	55.866.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	60.902.600	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	2.997.048.352				56,40 Persen	2.862.175.107	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5)	78 Nilai IKM	2.997.048.352				78 Nilai IKM	2.862.175.107	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (5)	78 Nilai IKM	2.783.751.360	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	2.756.050.871	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (5)	20 %	213.296.992	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	106.124.236	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	KEUANGAN				8.096.526.384				10.531.802.452	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	6.325.284.912				79 Persen	8.457.346.867	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	4.874.198.100				100 %	6.507.761.138	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	4.874.198.100	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	6.507.761.138	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	233.283.940				100 %	400.746.766	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	15.000.600	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	16.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	147.298.340	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	190.961.305	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	25.000.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	45.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	16.225.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	19.125.361	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang terpenuhi	100 %	5.760.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	5.800.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	1200 Galon Air	24.000.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	1200 Galon Air	44.550.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	430.900.000				100 %	441.391.800	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	2.000.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	228.400.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	238.891.800	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	200.500.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	200.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	786.902.872				100 %	1.107.447.163	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Unit Roda 4	28.828.100	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	37.268.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	13 Unit Roda 2	131.080.948	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	13 Unit Roda 2	15.019.566	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	27.100.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	31.181.700	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	560.093.824	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	980.219.897	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	39.800.000	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	43.758.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	1.771.241.472				56,40 Persen	2.074.455.585	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6)	78 Nilai IKM	1.771.241.472				78 Nilai IKM	2.074.455.585	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (6)	78 Nilai IKM	916.052.512	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	1.116.859.760	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (6)	20 %	855.188.960	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	957.595.825	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	KEUANGAN				5.386.120.613				6.177.280.968	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	4.389.809.413				79 Persen	5.061.872.662	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.495.834.793				100 %	3.855.604.273	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.495.834.793	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	3.855.604.273	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	160.723.240				100 %	295.553.807	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	9.500.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	10.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	119.723.240	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	132.777.850	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	25.000.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	37.000.000	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	6.500.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	14.157.650	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	271.500.000				100 %	304.526.275	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	1.000.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	4.026.275	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	120.000.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	150.500.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	461.751.380				100 %	606.188.307	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Unit Roda 4	19.134.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	32.179.840	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	48.772.900	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4 9 Unit Roda 2	60.243.250	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	14.200.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	56.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	374.764.480	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	445.041.517	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	4.880.000	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	12.723.700	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	996.311.200				56,40 Persen	1.115.408.306	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7)	78 Nilai IKM	996.311.200				78 Nilai IKM	1.115.408.306	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (7)	78 Nilai IKM	541.170.272	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	654.278.891	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (7)	20 %	455.140.928	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	461.129.415	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	KEUANGAN				5.973.031.780				6.558.694.857	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	5.153.920.716			79 Persen	5.712.557.151	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.494.236.838			100 %	3.843.660.522	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.494.236.838	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	3.843.660.522	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif					
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	288.196.810			100 %	391.346.581			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 %	2.967.600	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	3.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	138.537.210	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	175.447.169	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	25.000.000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	30.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	31.744.000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	31.900.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	2.700.000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh		aparatur	100 %	3.059.969	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	304 Galon Air	7.600.000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	304 Galon Air	7.616.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	306 Nasi Kotak 360 Snack Kotak 1 DL 120 DD	79.648.000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	306 Nasi Kotak 360 Snack Kotak 1 DL 120 DD	140.323.443	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	339.400.000					100 %	402.267.240	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	1.900.000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2.196.150	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	192.000.000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	250.071.090	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	145.500.000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	1.032.087.068					100 %	1.075.282.808	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 Unit Roda 4	38.485.500	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 Unit Roda 4	42.334.050	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan	2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	177.222.500	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	2 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2	190.547.000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase mebeleur yang terpelihara	100 %	20.120.000	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	35.220.109	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	771.623.168	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarang Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	780.082.159	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	24.635.900	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	27.099.490	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	819.111.064				56,40 Persen	846.137.706	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	78 Nilai IKM	819.111.064				78 Nilai IKM	846.137.706	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	78 Nilai IKM	501.000.928	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	595.422.571	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (8)	20 %	318.110.136	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	250.715.135	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 02	KEUANGAN				5.601.663.714				6.600.794.705	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	79 Persen	4.828.707.650				79 Persen	5.716.721.707	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.921.056.416				100 %	4.313.162.058	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3.921.056.416	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	4.313.162.058	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 %	218.873.850				100 %	438.938.958	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	100 %	2.551.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	6.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 %	117.687.850	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	178.407.456	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 %	25.000.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	32.700.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi	100 %	3.920.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	31.624.560	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 %	3.360.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	6.500.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	260 galon air	5.000.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	260 galon air	91.853.471	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana Jumlah Perjalanan Dinas yang terlaksana	270 nasi Kotak 545 snack kotak 4 DL 160 DD	61.355.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	270 nasi Kotak 545 snack kotak 4 DL 160 DD	91.853.471	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 %	280.300.000				100 %	323.928.200	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 %	800.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	2.928.200	Badan Pendapatan Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 %	135.000.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	171.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor yang terpenuhi	100 %	144.500.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 %	150.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	408.477.384				100 %	640.692.491	
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4	18.725.600	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4	34.816.650	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara dan terbayar PKB nya	1 unit roda 4 10 unit roda 2	72.389.248	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	1 unit roda 4 10 unit roda 2	106.171.502	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 %	11.360.000	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	22.000.000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	100 %	284.101.136	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	463.753.259	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	21.901.400	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	barang milik daerah	100 %	13.951.080	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,40 Persen	772.956.064				56,40 Persen	884.072.998	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (8)	78 Nilai IKM	772.956.064				78 Nilai IKM	884.072.998	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi (9)	78 Nilai IKM	446.980.928	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	78 Nilai IKM	565.893.205	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Persentase pembayaran atas tunggakan pajak daerah yang terbayar periode 1 tahun terhadap tunggakan 5 tahun (target UPTD) (9)	20 %	325.975.136	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PAD	20 %	318.179.793	Badan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 03	KEPEGAWAIAN									
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
5 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	13.328.651.554				82,5 Nilai	18.151.312.410	
5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	13 dokumen	33.982.000				13 dokumen	50.000.000	
5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana	12 dokumen	5.250.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 dokumen	50.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen kinerja perangkat daerah	1 dokumen	28.732.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	28.732.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	3 dokumen	10.365.918.161				3 dokumen	13.707.882.849	
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3 dokumen	10.365.918.161	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 dokumen	13.707.882.849	Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	6 jenis	607.641.240				6 jenis	595.614.820	
5 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik/penerangan yang tersedia	5 jenis	7.818.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis	17.896.300	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	141.466.440	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 jenis	75.599.720	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang diadakan	2 logistik	92.275.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 logistik	89.985.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	200 dokumen	15.763.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	200 dokumen	24.999.800	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	5 jenis bacaan	19.764.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis bacaan	19.764.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rentang waktu pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	12 bulan	330.554.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	367.370.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana	2 jenis	48.135.000				2 jenis	979.713.000	
5 03 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2 jenis	48.135.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	979.713.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	3 jasa	1.281.938.205				3 jasa	1.140.803.363	
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	300 surat	3.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 surat	3.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jasa	279.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jasa	279.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum kantor	4 jenis	999.938.205	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 jenis	858.803.363	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 pemeliharaan	991.036.948				4 pemeliharaan	1.677.298.378	
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	17 unit	674.757.128	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	17 unit	1.160.844.028	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	1 jenis	136.669.820	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 jenis	266.844.350	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 pemeliharaan	55.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 pemeliharaan	125.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	11 jenis	124.610.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	11 jenis	124.610.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0,8 indeks	2.641.522.714				0,8 indeks	3.164.687.264	
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 jenis	1.430.571.982				5 jenis	1.945.142.972	
5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	susunan rencana kebutuhan ASN	1 laporan	13.772.265	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	57.042.800	Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	jumlah formasi ASN yang diadakan	400 Formasi	1.111.383.564	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	400 Formasi	1.513.539.584	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	700 SK	134.686.809	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	700 SK	175.779.244	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah data yang termutakhirkan dalam aplikasi sistem informasi kepegawaian	1900 dokumen	170.729.344	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1900 dokumen	198.781.344	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Layanan Mutasi dan Promosi ASN	3 jenis	360.855.744				3 jenis	472.929.344	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan mutasi antar Instansi yang diterbitkan	200 SK	79.166.848	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	200 SK	112.726.448	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu dan Kenaikan Gaji Berkala Bagi JPT	2500 SK	99.676.448	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2500 SK	137.476.448	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang di Promosikan	67 orang	182.012.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	67 orang	222.726.448	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Layanan Pengembangan Kompetensi ASN	4 jenis	273.731.344				4 jenis	304	
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan Ijin/Tugas Belajar, Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan Pencantuman Gelar	160 PNS	106.244.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	160 PNS	130	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Data PNS yang akan dikembangkan kompetensinya	1000 orang	86.654.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1000 orang	103	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah SK Jabatan Fungsional	300 SK	80.832.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	300 SK	71	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah layanan penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin Aparatur	4 jenis	576.363.644				4 jenis	746.614.644	
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS Provinsi Bali yang memiliki penilaian prestasi kerja	100 Persen	314.002.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 Persen	367.012.048	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan mendapatkan penghargaan SLKS dan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	1000 Orang	161.725.748	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1000 Orang	209.626.148	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin	36 OPD	75.026.448	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	36 OPD	137.640.448	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah pelanggaran disiplin yang diproses	2 Kasus	25.609.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 Kasus	32.336.000	Badan Kepegawaian Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 03	KEPEGAWAIAN			2.679.315.168					7.341.140.334	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai	2.293.119.368				82,5 Nilai	6.675.760.514	
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	3 laporan	1.969.222.512				3 laporan	6.043.361.122	
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan	3 Dokumen	1.969.222.512	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		Aparatur	3 Dokumen	6.043.361.122	Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang terlaksana	2 administrasi	44.271.720				2 administrasi	311.484.256	
5 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	6.539.720	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	15 jenis	14.999.120	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rentang waktu pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah	12 bulan	37.732.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	296.485.136	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan kantor yang tersedia	1 jasa	267.735.136				1 jasa	296.485.136	
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhiya layanan umum kantor	1 Layanan	267.735.136	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Layanan	296.485.136	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 jenis	11.890.000				5 jenis	24.430.000	
5 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana dengan baik	5 Jenis	11.890.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 Jenis	24.430.000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0,8 indeks	386.195.800				0,8 indeks	665.379.820	
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan Kompetensi ASN	1 jenis	386.195.800				1 jenis	665.379.820	
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah kerjasama kemitraan penilaian dan jumlah pengukuran kompetensi pegawai	2 lembaga 3 metode 1000 orang yang diukur	386.195.800	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 lembaga 3 metode 1000 orang yang diukur	665.379.820	Badan Kepegawaian Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			30.220.034.302					42.416.925.004	
5 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			15.744.802.246					22.577.065.000	
5 04 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.999.750					20.570.000	
5 04 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	9 dokumen	16.999.750	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		9 dokumen	20.570.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.942.110.056					14.900.000.000	
5 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 dokumen	11.942.110.056	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		14 dokumen	14.900.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			224.134.440					472.230.000	
5 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	12 bulan	99.992.900	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	121.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	41.229.540	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	72.600.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur	12 bulan	49.050.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	42.350.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat - rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang	12 bulan	33.862.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	181.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			213.908.000					1.963.500.000	
5 04 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	213.908.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	1.963.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.469.372.512					1.965.535.000	
5 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	12 bulan	630.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	762.300.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	12 bulan	839.372.512	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	1.197.185.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.878.277.488					2.870.230.000	
5 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	336.722.344	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	500.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	1.261.165.144	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	1.946.230.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 bulan	280.390.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		12 bulan	423.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			14.475.232.056					19.839.860.004	
5 04 02 1.01	Pengembangan			1 176 978 304					441 320 000	
5 04 02 1.01 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	umlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum	1 dokumen	39.645.050	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	14.520.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 1.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	umlah standar pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan Umum	60 orang	1.137.333.254	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		60 orang	426.800.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif							
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			13.298.253.752				19.398.540.004							
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi kepemimpinan dan Prajabatan serta jabatan fungsional	3 dokumen	1.043.600.494	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		3 dokumen	441.320.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah tersertifikasinya kompetensi aparatur Pemprov, kabupaten/kota	90 orang	349.595.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		90 orang	84.700.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga	1 paket	164.753.000	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 paket	169.000.004	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah standar pembelajaran pemerintahan bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional	1 dokumen	19.376.650	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1 dokumen	14.520.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang lulus pelatihan kepemimpinan, Fungsional dan Prajabatan	300 orang	11.720.928.608	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		300 orang	18.689.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										24.722.103.336			17.453.286.638	
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai	15.385.386.536					82 Nilai	13.969.400.698					
5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	86.070.150					17 Dokumen	94.677.165					
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan ,Penganggaran Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	12 Dokumen	39.999.750	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Dokumen	43.999.725	Badan Riset dan Inovasi Daerah					
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	5 Dokumen	46.070.400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 Dokumen	50.677.440	Badan Riset dan Inovasi Daerah					
5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	634 Dokumen	12.010.334.630					634 Dokumen	12.018.150.000					
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	28 Dokumen	11.992.703.030	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	28 Dokumen	12.000.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah					
5	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ yang diverifikasi	600 Dokumen	11.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		Aparatur	600 Dokumen	12.100.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah					
5	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Keuangan	5 Laporan	3.331.600	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		Aparatur	5 Laporan	2.420.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah					
5	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	3.300.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		Aparatur	1 Dokumen	3.630.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 jenis	391.430.040				6 jenis	145.753.025	
5 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis	12.524.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 jenis	23.107.700	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	44 jenis	41.005.140	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	44 jenis	55.457.325	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 jenis	142.416.500	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 jenis	156.658.150	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	23.880.400	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 jenis	26.268.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang Disediakan	4 jenis	37.200.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 jenis	40.920.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	134.404.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	147.844.400	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	337.320.000				2 jenis	371.052.000	
5 05 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	3 jenis	133.800.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 jenis	147.180.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 jenis	203.520.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 jenis	223.872.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis	532.496.036				3 jenis	545.529.313	
5 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Peranko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan	1 jenis	2.480.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 jenis	2.772.500	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	226.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 jenis	236.111.777	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan	34 jenis	304.016.036	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin		Aparatur	34 jenis	306.645.036	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2.027.735.680				2 jenis	1.165.291.195	
5 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 unit	761.128.032	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 unit	1.165.291.195	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 jenis	1.266.607.648	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	15 jenis	1.393.268.413	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	75 persen	9.336.716.800				75 persen	3.483.885.940	
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	10 Dokumen	8.217.820.100				10 Dokumen	1.399.624.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 05 02 1.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Jumlah Laporan FGD Terkait Kajian Kebijakan Pemerintah Jumlah Seminar Nasional	4 dokumen 3 dokumen 1 dokumen	7.217.820.100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	4 dokumen 3 dokumen 1 dokumen	8.000.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.01 08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Analisa Data Sensus	1 dokumen	350.000.000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 dokumen	890.424.300	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	IKKD IPKD Penerbitan Buku dan E- jurnal Bali Membangun Bali	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	212.413.500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen	270.537.400	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dokumen Evaluasi	5 dokumen	437.586.500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	5 dokumen	238.662.300	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang dicapai	100 persen	745.000.000				100 persen	1.259.612.040	
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Hasil kajian/penelitian bidang ekonomi	1 dokumen	175.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat, Aparatur, Konsultan dan Akademisi	1 dokumen	192.500.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 05 02 1.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian/ Penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan Persentase Kajian/ penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang direkomendasikan	2 Dokumen 100 Persen	320.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Pangan, Sandang dan Papan	Masyarakat, Aparatur, Konsultan dan Akademisi	2 Dokumen 100 Persen	792.112.040	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.03 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah kajian/ penelitian pengembangan energi dan sumber daya mineral	1 dokumen	250.000.000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6. Penguatan Infrastruktur	Masyarakat, Aparatur, Konsultan dan Akademisi	1 dokumen	275.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang dicapai	100 persen	373.896.700				100 persen	824.649.900	
5 05 02 1.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap penguatan SIDA Jumlah koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan dan penerapan IPTEKS	1 dokumen 4 pemenang	101.702.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 dokumen 4 pemenang	275.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangan Mengikuti pameran tingkat nasional (Harteknas) Persentase inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	1 kegiatan 1 kegiatan 100 %	99.999.800	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	1 kegiatan 1 kegiatan 100 %	450.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 1.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitas Permohonan HKI Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) Persentase Hak Kekayaan Intelektual Yang Dihilangkan	75 pemohon 1 dokumen 100 Persen	172.194.100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur, Akademisi, Masyarakat dan Birokrasi	75 pemohon 1 dokumen 100 Persen	99.649.900	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG				7.764.707.249				9.634.578.472	
5 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai evaluasi manajemen kinerja	82 Nilai	6.700.202.389			82 Nilai	7.934.578.472	
5 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	7 dokumen	4.877.200			7 dokumen	12.000.000	
5 07 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	4.877.200	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	12.000.000	Badan Penghubung

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
5 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen administrasi keuangan	12 bulan	4.593.002.505				12 bulan	4.983.578.472	
5 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	16 pns	4.593.002.505	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	16 pns	4.983.578.472	Badan Penghubung
5 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pelayanan administrasi umum yang mendukung kelancaran kantor	6 jenis	154.557.700				6 jenis	330.000.000	
5 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan bangunan kantor	5 jenis	14.652.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	5 jenis	30.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis	20.633.200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 jenis	35.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara keagamaan	2 jenis	80.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 jenis	90.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dokumen	6 jenis	7.132.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	6 jenis	25.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk koordinasidan konsultasi Jumlah penyediaan makanan dan minuman (masukkotak) untuk rapat- rapat Jumlah penyediaan makanan dan minuman (snackkotak) untuk rapat-rapat	12 bulan 250 orang 150 orang	32.140.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan 250 orang 150 orang	150.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor	16 unit	23.610.000				16 unit	250.000.000	
5 07 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaranapendukung gedung kantor	10 unit	23.610.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	10 unit	250.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jenis sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	1.049.692.636				3 jenis	1.209.000.000	
5 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang dibayartepat waktu Jumlah materai yang tersedia	12 bulan 270 buah	6.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan 270 buah	9.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik yang dibayar tepat waktu	12 bulan	205.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	300.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayartepat waktu	12 bulan	838.692.636	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 bulan	900.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis sub kegiatan pemeliharaan BMD	3 jenis	874.462.348				3 jenis	1.150.000.000	
5 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara denganbaik	13 unit	754.521.376	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan BMD	13 unit	880.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	35.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan BMD	12 bulan	70.000.000	Badan Penghubung
5 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik	12 bulan	84.940.972	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan BMD	12 bulan	200.000.000	Badan Penghubung
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Nilai	1.064.504.860				90 Nilai	1.700.000.000	
5 07 02 1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	jenis sub kegiatan pendukung indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	3 jenis	1.064.504.860				3 jenis	1.700.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif								
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pagelaran seni Jumlah kegiatan pameran kuliner Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan tari Bali)	3 kali 2 kali 12 bulan	115.560.972	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	3 kali 2 kali 12 bulan	500.000.000	Badan Penghubung			
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung berjalan dengan baik	12 bulan	948.943.888	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan masyarakat	12 bulan	1.200.000.000	Badan Penghubung			
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01	INSPEKTORAT DAERAH												27.462.267.274		35.959.500.000	
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100 persen	23.510.352.081				100 persen	29.421.500.000				
6	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 persen	24.999.750			100 persen	43.000.000				
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu.	100 persen	14.999.930	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	25.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100 persen	9.999.820	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	18.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 persen	20.233.120.126			100 persen	25.000.000.000				
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 persen	20.233.120.126	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	25.000.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase layanan administrasi umum yang terpenuhi	100 persen	514.621.685			100 persen	925.000.000				
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100 persen	23.500.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	52.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100 persen	72.497.885	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	82.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor yang terpenuhi	100 persen	114.840.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	200.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	100 persen	15.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	37.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	100 persen	40.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	47.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kunjungan tamu yang telah dilaksanakan	100 persen	25.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	100 persen	57.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD yang terlaksana	100 persen	223.783.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		aparatur	100 persen	450.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 persen	300.000.000			100 persen	770.000.000				
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 persen	300.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	770.000.000	Inspektorat			
6	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	100 persen	590.857.588			100 persen	633.500.000				
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi	100 persen	1.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	3.500.000	Inspektorat			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
6 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	100 persen	265.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	270.000.000	Inspektorat
6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa layanan umum kantor	100 persen	324.857.588	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	360.000.000	Inspektorat
6 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 persen	1.846.752.932				100 persen	2.050.000.000	
6 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional yang terpenuhi	100 persen	938.922.232	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	950.000.000	Inspektorat
6 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang telah dilaksanakan	100 persen	695.401.356	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 persen	800.000.000	Inspektorat
6 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang telah dilaksanakan	100 persen	212.429.344	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		Aparatur	100 persen	300.000.000	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	95 persen	2.599.991.228				95 persen	4.468.000.000	
6 01 02 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan internal	100 persen	1.874.716.036				100 persen	3.000.000.000	
6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LPPD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi	9 Laporan	194.952.876	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	9 Laporan	770.000.000	Inspektorat
6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Monev Penyerapan anggaran dan Pengadaan barang jasa pemerintah daerah Jumlah laporan review DAK fisik Jumlah laporan review dokumen perencanaan dan penganggaran	4 Laporan PA PBJ 4 LHP 7 LHR Perencanaan	464.905.782	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	4 Laporan PA PBJ 4 LHP 7 LHR Perencanaan	550.000.000	Inspektorat
6 01 02 1.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu dan dievaluasi	45 LKJIP	49.999.825	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	45 LKJIP	200.000.000	Inspektorat
6 01 02 1.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas laporan keuangan	2 LHR LK	174.952.896	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 LHR LK	200.000.000	Inspektorat
6 01 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemeriksaan urusan Kabupaten/kota mlah laporan pembinaan dan pengawasan dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	3 Laporan 55 LHP	574.952.146		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 Laporan 55 LHP	550.000.000	Inspektorat
6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Efektifitas SPIP pada Perangkat Daerah	1 Laporan	149.999.615	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	330.000.000	Inspektorat
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	55 LHP	264.952.896	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	55 LHP	400.000.000	Inspektorat
6 01 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 persen	725.275.192				100 persen	1.468.000.000	
6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawalan penyelesaian kerugian daerah, pengamata pemerintah, dan pembangunan pemerintah	1 Laporan	97.476.448	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	118.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
6 01 02 1.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan audit kasus, khusus dan tujuan tertentu Jumlah laporan benturan kepentingan dan pelaksanaan Whistle Blower System yang ditindaklanjuti Jumlah Laporan Evaluasi PPRG Jumlah laporan pemantauan dana desa Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat Jumlah Sekolah pengelola bantuan operasional sekolah yang di awasi	8 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 2 laporan dana desa 12 Laporan 8 Laporan	627.798.744	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	8 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 2 laporan dana desa 12 Laporan 8 Laporan	1.350.000.000	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	90 persen	1.351.923.965				90 persen	2.070.000.000	
6 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengasawasan yang telah dilaksanakan	100 persen	591.971.224				100 persen	730.000.000	
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah objek pemeriksaan program kerjapengawasan tahunan inspektorat provinsi bali	105 objek pemeriksaan	262.065.432	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		aparatur	105 objek pemeriksaan	370.000.000	Inspektorat
6 01 03 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah laporan hasil penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan provinsi bali dan kabupaten/kota	2 Laporan	329.905.792	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	aparatur	2 Laporan	360.000.000	Inspektorat
6 01 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 persen	759.952.741				100 persen	1.340.000.000	
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas	12 Bulan	397.476.448	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	12 Bulan	690.000.000	Inspektorat
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas Jumlah perangkat daerah yang dievaluasi dalam penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	2 laporan 41 perangkat daerah	49.999.875	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 laporan 41 perangkat daerah	160.000.000	Inspektorat
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah laporan verifikasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi	3 laporan	199.999.970	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	3 laporan	230.000.000	Inspektorat
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah laporan pelaksanaan survey penilaian integritas, unit pengendalian gratifikasi dan tunas integritas anti korupsi	1 laporan	112.476.448	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		Aparatur	1 laporan	260.000.000	Inspektorat
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			22.430.358.877					29.821.723.742	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	nilai evaluasi manajemen kinerja	83 nilai	10.029.278.757				83 nilai	12.505.791.246	
8 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	8 dokumen	12.000.000				8 dokumen	17.900.000	
8 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	8.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	13.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	4.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	4.900.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70 dokumen	8.660.957.696				70 dokumen	10.576.285.600	
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70 Dokumen	8.660.957.696	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	70 Dokumen	10.576.285.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	269.365.045				100 %	387.006.030	
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	1.693.095	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	3.999.050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	100 %	69.854.150	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	100 %	86.999.580	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	1 tahun	80.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	85.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy	1 tahun	25.155.800	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	20.549.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	18.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	18.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 tahun	3.750.000	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	4.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun	70.912.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	167.958.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa urusan pemerintah terealisasi	100 %	774.599.616				100 %	774.599.616	
8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	250 lembar	2.500.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	250 lembar	2.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon, listrik dan air	1 tahun	110.000.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	110.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayartepat waktu	1 tahun	662.099.616	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur	1 tahun	662.099.616	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	312.356.400				100 %	750.000.000	
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100 %	276.766.400	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	100 %	450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100 %	15.660.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	100 %	260.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi	100 %	19.930.000	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparatur dan Masyarakat	100 %	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			424.952.596					1.109.897.696	
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			424.952.596					1.109.897.696	
8 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Dokumen	424.952.596	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		4 Dokumen	1.109.897.696	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi			Target	Pagu Indikatif	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78 persentase	11.328.522.836				78 persentase	14.300.000.000	
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Dokumen Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4 dokumen	11.328.522.836				4 dokumen	14.300.000.000	
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 dokumen	11.328.522.836	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	5. Pariwisata	Masyarakat dan Aparatur	2 dokumen	14.300.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat	16,6% persentase	222.429.144				16,6% persentase	1.560.000.000	
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	222.429.144				1 Dokumen	1.560.000.000	
8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah dokumen hasil Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan	2 dokumen	222.429.144	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	2 dokumen	1.560.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	88 persentase	425.175.544				88 persentase	346.034.800	
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 dokumen	425.175.544				2 dokumen	346.034.800	
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dokumen	425.175.544	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	3 DOKUMEN	346.034.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL				4.760.200.427.351					6.836.664.174.397	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Penentuan target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 mengacu pada target capaian RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya.

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 disusun dengan mempertimbangkan kondisi Provinsi Bali dalam keadaan normal. Namun dengan terjadinya Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga saat ini yang berdampak pada lesunya perekonomian Bali, maka dibutuhkan perubahan target capaian ekonomi makro. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi Provinsi Bali yang masih dalam proses pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat dampak Pandemi COVID-19. Perubahan target makro ekonomi tahun 2022 dilakukan terhadap beberapa indikator makro ekonomi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Bali Tahun 2022

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET RPJMD	TARGET RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi	7,00% (6,80% - 7,20%)	5,90% (5,50%-6,30%)
2	Persentase Kemiskinan	1,90%	3,25% (3,00%-3,50%)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,98%	1,23%
4	Indeks Pembangunan Manusia	78,25% (75,61%-78,25%)	76,93% (75,61%-78,25%)
5	Gini Ratio	0,2800%	0,3570%

Pada pertumbuhan ekonomi, terjadi perubahan target yang semula 7,00% dengan batas bawah 6,80% dan batas atas 7,20% menjadi 5,90% dengan batas bawah 5,50% dan batas atas 6,30%. Target persentase kemiskinan semula ditetapkan sebesar 1,90%, kemudian mengalami perubahan menjadi 3,25% dengan batas bawah 3,00% dan batas atas 3,50%. Untuk tingkat pengangguran terbuka target semula adalah 0,98%, mengalami perubahan menjadi 1,23%. Indeks pembangunan manusia juga mengalami perubahan dengan target semula 78,25% dengan batas bawah 75,61% dan batas atas 78,25% menjadi 76,93% dengan batas bawah 75,61% dan batas atas 78,25%. Gini ratio dengan target semula 0,2800%, mengalami perubahan menjadi 0,3570%.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Mengacu pada penjabaran Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terdapat 30 (tiga puluh) Indikator Kinerja Utama, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2
Target Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD TAHUN 2022
1	Tingkat Inflasi Bali	Persentase (%)	3,00 ±1 (yoy)
2	Ketersediaan pangan utama	Persentase (%)	100
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	22
4	Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	Persentase (%)	33
5	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persentase (%)	105,5
6	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persentase (%)	118,5

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET RKPD TAHUN 2022
7	Umur Harapan Hidup (UHH)	Dalam tahun	72,5
8	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,84
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk usia 16 -18 tahun	Persentase (%)	83,11
10	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,91
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	76,93 (75,61-78,25)
12	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	73
13	Persentase Kemiskinan	Persentase (%)	3,25 (3,00-3,50)
14	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1,23
15	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase (%)	76,55
16	Indeks Kebahagiaan	Indeks	73,98
17	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	(Persentase%)	45
18	Jumlah devisa sektor pariwisata	USD	10.732.500
19	Indeks kepuasan wisatawan	persentase (%)	83
20	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	5,90 (5,50-6,30)
21	Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali	Persentase (%)	12,5
22	Indeks konektivitas	Rata-rata waktu tempuh (jam/100km)	2,4
23	Angka kriminalitas	Kasus	2.731
24	Indeks demokrasi	Persentase (%)	81
25	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	64,9
26	Daya dukung lingkungan	Persentase (%)	17,64
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase (%)	63,77
28	Mitigasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase (%)	14,8
29	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persentase (%)	13,79
30	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi kedalam 3 (tiga) aspek meliputi : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum mengacu pada pembagian urusan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum penetapan target-target IKK cenderung moderat dan mendukung secara langsung capaian IKU Daerah. Untuk lebih jelasnya, penetapan target capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali dapat dilihat dalam tabel 7.3 berikut:

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	Persentase (%)	5,90 (5,50 - 6,30)	7,25 (7,00 - 7,50)
2	Laju Inflasi	Persentase (%)	3,00±1	3,00±1
3	PDRB per kapita	Jumlah	62 juta – 67 juta	66 juta – 71 juta
4	Indeks Gini	Persentase (%)	0,3570	0,2500
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persentase (%)	3,25 (3,00 – 3,50)	2,50 – 3,00
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase (%)	76,93 (75,61-78,25)	77,78 (75,56 - 80,00)
7	Angka Melek Huruf	Persentase (%)	92.9	90.42
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	10.84	11.40
9	Angka usia harapan hidup	tahun	72.5	72.5
10	Persentase balita gizi buruk	Persentase (%)	1	1
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase (%)	8.5	5.6

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase (%)	100	100
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Jumlah	2,723,567	2,793,567
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	76,55	76.8
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1,23	0,90
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	82
17	Opini BPK	Status	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	96.62	96.86
19	Penguatan cadangan pangan	Persentase (%)	20	20
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14.57	14.57
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	1.93	1.93
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persentase (%)	1.43	1.43
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persentase (%)	14.38	19,24-20,88
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	Persentase (%)	16.21	15.59
2	Nilai Tukar Petani	Persentase (%)	105.50	106.00
3	Angka kriminalitas	Kasus	2731	2262
4	Indeks Kebahagiaan	Indeks	73.98	74.98
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	45	45
6	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	22	25
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1 Pendidikan				
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase (%)	83.1	84.1

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1.2	Angka Partisipasi Kasar			
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	109.052	109.84
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	112.39	113.75
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persentase (%)	103.616	104.42
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan			
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	25.73	26.02
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	Persentase (%)	12.91	13.2
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	24.59	24.88
1.4	Angka Partisipasi Murni			
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	100	100
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	100	100
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	100	100
1.5	Angka Partisipasi Sekolah			
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99.56	99.56
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	97.92	97.92
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	82.35	82.35
1.6	Angka Putus Sekolah			
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0.01	0
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0.06	0.05
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.21	0.20
1.7	Angka Kelulusan			
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	100	100
1.8	Angka Transisi (AT)			
1.8.1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	100.47	101.53
1.8.2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	100.47	101.53
1.9	Fasilitas Pendidikan			
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	96.26	97.01
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase (%)	95.05	95.8
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persentase (%)	97.87	98.33
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	63.97	64.03
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	23,95	23,95
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	66,09	66,09
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persentase (%)	65,37	65,37
	- SMA/MA (per 1000 murid)			
	- SMK (per 1000 murid)			
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata			
1.14.1	SD/MI	Persentase (%)	0.03	0.03
1.14.2	SMP/MTS	Persentase (%)	0.09	0.09
1.14.3	SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.10	0.10
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	108.72	109.61

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	99.90	99.91
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	93.22	93.30
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV			
1.18.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	77.26	77.95
1.18.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	96.84	97.76
1.18.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	97.95	98.46
1.18.4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persentase (%)	97.55	97.84
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/ 1000 KH	10	10
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/ 1000 KH	6.50	5.50
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/ 1000 KH	4.41	4.41
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/ 100.000 KH	66	65
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persentase (%)	1.45	1.45
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk			
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persentase (%)	0.029	0.029
2.6.2	Rasio klinik	Persentase (%)	0.021	0.021
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persentase (%)	0.016	0.016
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persentase (%)	0.40	0.4
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk			

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persentase (%)	2.3	2.4
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persentase (%)	1.30	1.40
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase (%)	88.5	88.5
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	96.7	96.8
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persentase (%)	100	100
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100
2.14	Case Detection Rate TBC	Persentase (%)	36	37
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persentase (%)	90	90
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persentase (%)	100	100
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	104	102
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	100	100
2.19	Angka kematian Malaria	Persentase (%)	<1	<1
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	< 1	< 1
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	85	90
2.22	Persentase Kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	55	55
2.23	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persentase (%)	22.2	22.2
2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100
2.25	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2.26	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persentase (%)	100	100
2.27	Cakupan puskesmas pembantu	Persentase (%)	0.12	0.12
2.28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persentase (%)	96	96.5
2.29	Cakupan Pelayanan nifas	Persentase (%)	98.5	99
2.30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	100	100
2.31	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	100	100
2.32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persentase (%)	100	100
2.33	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	100	100
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100
2.35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100
2.36	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persentase (%)	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Persentase (%)	78.54	80.27
3.2	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	Persentase (%)	70.60	72.30
3.3	Panjang Pantai Terabrasi	Kilometer	117.64	117.49
3.4	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	78.11	78.25
3.5	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	72	75

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3.6	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi yang bersertifikat	Persentase (%)	76	80
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persentase (%)	100	100
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas hasil Pelayanan pengujian laboratorium dan Peralatan	Persentase (%)	100	100
3.9	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	Persentase (%)	100	100
3.10	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	Persentase (%)	91.25	92.5
3.10.1	Persentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	Persentase (%)	93	95
3.10.2	Persentase penduduk yang berakses layanan air limbah di Provinsi Bali	Persentase (%)	89.5	90
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase (%)	94	95
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	Jumlah rumah terbangun kewenangan Provinsi	Unit	20	80
4.5	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase (%)	60	72
4.6	Persentase kawasan kumuh	Persentase (%)	6.6	5.6
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase (%)	30.39	30.59

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	35.58	35.59
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	44.66	44.67
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persentase (%)	100	100
6	Sosial			
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	0.31	1,82
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	1.05	5,55
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	0.7	3.68
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase (%)	100	100
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persentase (%)	60	60
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	20	20
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase (%)	100	100
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	60	60
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1 Tenaga Kerja				
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persentase (%)	46	1.55
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah	22	22
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah	1621	1621
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persentase (%)	350	350
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Jumlah	116,922	116,922
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persentase (%)	0	0
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Jumlah	920	920
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Jumlah	216	216
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	100	100
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah	30	30
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	42	42
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	Persentase (%)	7.31	7.31

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	46.83	46.95
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	15.90	17.90
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase (%)	48.60	49.10
2.4	Rasio KDRT	Persentase (%)	0.046	0.045
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Persentase (%)	-	-
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	72.95	73
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase (%)	100	100
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase (%)	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	88.50	88.50
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persentase (%)	1.00	1.00
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persentase (%)	1.00	1.00
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persentase (%)	0.97	1.00
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persentase (%)	0.97	1.00
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persentase (%)	0.97	0.98
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	Persentase (%)	-	-
3	Pangan			
3.1	Ketersediaan Pangan Utama			
3.1.1	Padi	Ton	855,523	857,523
3.1.2	Jagung	Ton	45,500	46,000
3.1.3	Kedelai	Ton	2,706	2,760
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	4,871	4,967
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	55,500	56,000
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	179	181
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	27,106	27,648
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/ Hari	2,650	2,650
		Gram/Kap/ Hari	63	63
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	95.00	95.00

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4 Pertanahan				
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persentase (%)	0.7	0.85
5 Lingkungan Hidup				
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	69.17	70.67
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	93.89	94.39
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42.57	43.57
5.9	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	2	2
5.10	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	6
5.11	Jumlah limbah B3 yang dikelola			
5.12	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persentase (%)	100	100
5.13	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	18 Kawasan & 50 Dokumen

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
5.14	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1
5.15	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase (%)	100	100
5.16	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persentase (%)	100	100
5.17	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persentase (%)	100	100
5.18	Penetapan hak MHA	Persentase (%)	100	100
5.19	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	30	150
5.20	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	100	100
5.21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	30	30
5.22	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	30 Adiwiyata	30 Adiwiyata
5.23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	20 Kasus	20 Kasus
5.24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	991,573,370	1,008,414,118
5.25	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persentase (%)	73	72

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persentase (%)	0.99	1
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persentase (%)	94.17	96.67
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persentase (%)	60.38	65.38
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	99.5	100
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	54	58
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persentase (%)	75.94	84.9
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persentase (%)	12.29	12.29
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persentase (%)	20.79	23.02
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persentase (%)	100	100
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persentase (%)	77.8	79.8
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	300	325
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	76.92	76.92
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase (%)	2,15	2,15

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	2.3	2.3
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase (%)	40	40
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase (%)	25	30
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	2	2
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	6	6
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	10	12
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persentase (%)	2,3	2,3
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	57	56.5
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persentase (%)	28.02	27.66

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8.11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase (%)	38.20	39.75
8.12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase (%)	9.86	8.88
8.13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	41.5	41
8.14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	23	22.5
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase (%)	88,9	88,9
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase (%)	89	90
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	73	73
8.18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persentase (%)	90	100
8.19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persentase (%)	520	530
8.20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase (%)	100	100
8.21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase (%)	93	94
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase (%)	100	100
8.24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase (%)	14	16
8.25	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	21,64	21,64
8.26	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	15.5	15.5
9	Perhubungan			
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum			
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	492,431	527,604
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	13,958,286	13,958,286
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	24,500,000	25,000,000
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	160	165
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	156,817	158,386
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis			
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	9	9
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	2	2
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	3	3
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	55.00	60.00
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:350	1:300
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum			
9.9.1	Angkutan Darat			
	- Orang	Jumlah	492,431	527,604
	- Barang	Jumlah	148,068	155,471

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
9.9.2	Angkutan Laut			
	- Orang	Jumlah	16,749,943	17,447,858
	- Barang	Jumlah	651,791,382	678,949,356
9.9.3	Angkutan Udara			
	- Orang	Jumlah	24,500,000	25,000,000
	- Barang	Jumlah	354,644,551	356,190,996
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/termi nal per tahun			
9.10.1	Dermaga			
	- Orang	Jumlah	16,749,943	17,447,858
	- Barang	Jumlah	651,791,382	678,949,356
9.10.2	Bandara			
	- Orang	Jumlah	24,500,000	25,000,000
	- Barang	Jumlah	354,644,551	356,190,996
9.10.3	Terminal			
	- Orang / Barang	Jumlah	492431/ 148068	527604/ 155471
10	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)	80.00	90.00
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon			
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persentase (%)	94.20	95.00
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persentase (%)	3.44	3.01
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persentase (%)	68.41	74.85
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persentase (%)	50.00	52.15

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	89.42	89.92
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persentase (%)	300,650	290,000
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	Persentase (%)	80	80
11.4	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	314,967	315,467
11.5	Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk lokal	Persentase (%)	4.5	4.6
12	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	174	176
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	5.16	5.33
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persentase (%)	28.81	28.53
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persentase (%)	0.16	0.16
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	80	81
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	0.86	0.87
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	58	60
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	46	48
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	12.5	15
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	199 Orang	959 Orang
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	28 cabor	30 cabor
14	Statistik			
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1 Buku	1 Buku

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
15	Persandian			
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	97.82	100.00
16	Kebudayaan			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19,336	19,336
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	691	711
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	328	328
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu			
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	-	-
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	-	-
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	-	-
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	-	-
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	341	368
17	Perpustakaan			
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persentase (%)	8.5	8.244
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	2.500	235.450
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	n/a	n/a
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	38,000	42,000
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	1,250	14,651
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	35	155
18	Kearsipan			
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase (%)	20%	100%

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	30	150
LAYANAN URUSAN PILIHAN				
1 Pariwisata				
1.1	Kunjungan Wisatawan			
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	8,775,000	8,970,000
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	9,997,000	11,156,000
1.2	Lama Tinggal Wisatawan			
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	5.00	5.10
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	10.6	10.9
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persentase (%)	57.95	57.95
2 Pertanian				
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	14.57	14.57
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persentase (%)	1.93	1.93
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	Persentase (%)	1.43	1.43
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	14.38	19,24-20,88
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar			
2.5.1	Padi	Jumlah	58.80	61.50
2.5.2	Jagung	Jumlah	31,22	31,22
2.5.3	Kedelai	Jumlah	12,92	12,92
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase (%)	9.011	9.011
3 Kehutanan				
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase (%)	1,48%	1,48%
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	n/a	250ha
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persentase (%)	60	60
4 Energi dan Sumber Daya Mineral				
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase (%)	99.85	99.85

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persentase (%)	80	80
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persentase (%)	70	70
5 Perdagangan				
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persentase (%)	2.85	3
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persentase (%)	30.19	33.96
6 Perindustrian				
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persentase (%)	3.91	4.04
7 Transmigrasi				
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persentase (%)	40	40
8 Kelautan dan Perikanan				
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	130075.46	226,517,79
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	33.52	34.86
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase (%)	90	100
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persentase (%)	97	100
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	105166.51	107269.84
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persentase (%)	80	80
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persentase (%)	105.19	106.19
PENUNJANG URUSAN				
1 Perencanaan Pembangunan				
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Persentase (%)	100	100
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persentase (%)	100	100
2	Keuangan			
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP
2.2	Persentase SiLPA	Persentase (%)	6	6
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persentase (%)	6	6
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persentase (%)	0	0
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persentase (%)	20	20
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persentase (%)	10	10
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Rasio	29,28 : 70,71	30,54 : 69,45
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1,900,172,78 6,199	2,010,028,403 ,889
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase (%)	20	20
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase (%)	3	3
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase (%)	36.00	38.00

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	52	52
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	270	270
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	6.869	6.869
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100
	Penerapan SIDA:		-	-
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	14% 7/50	14% 7/50
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	70% 7/8	70% 7/8
5	Pengawasan			
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase (%)	27	27
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase (%)	5	5
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persentase (%)	10	10
6	Sekretariat Dewan			
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Target Capaian Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan program pembangunan seperti yang tertuang dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dukungan tersebut sangat penting artinya agar target-target yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang termuat dalam RKPD tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER